RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

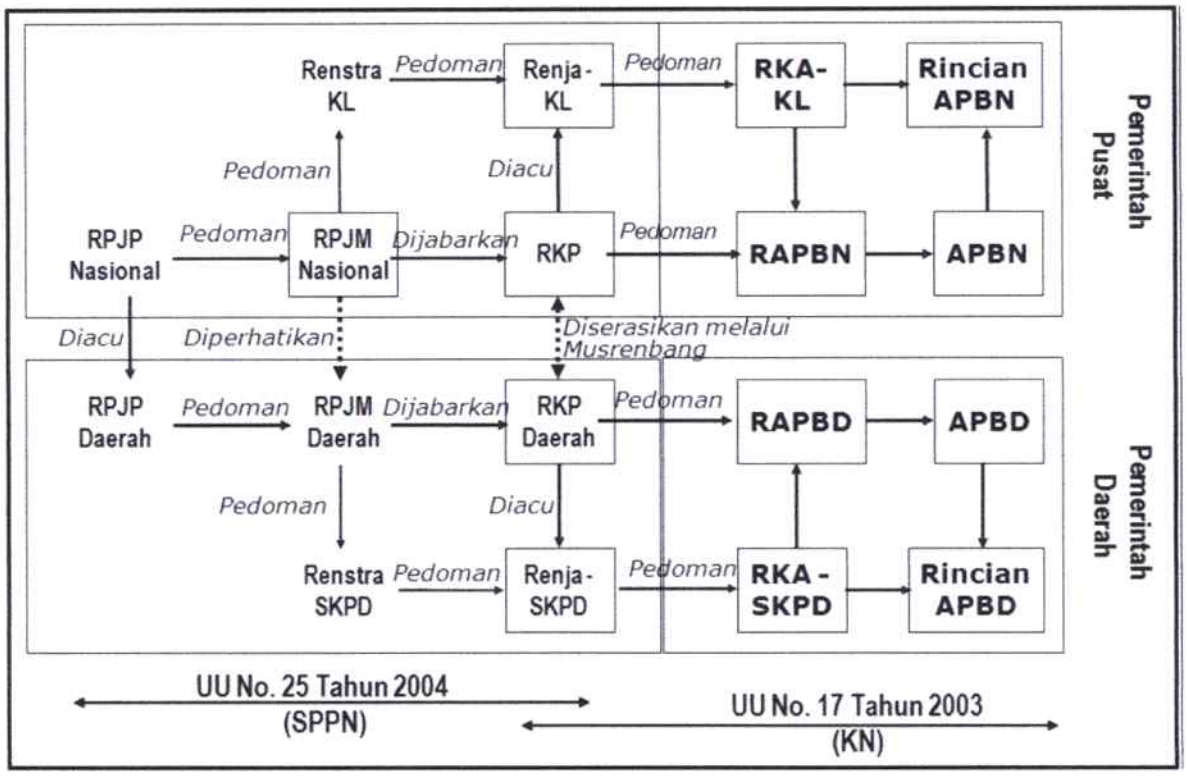
Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun Tahun 2017, proses penyusun Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 serta dikaitkan dengan Renja K/L dan Renja Provinsi. Selanjutnya, rancangan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 akan ditindaklanjuti dengan proses penyusunan R-APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2024. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar I.1.

Gambar I.1.

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya



1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah:

1. Undang–Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang– Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 20 20-2024;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah ketiga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024;

22. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh ASN dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
4. Menjamin keterkaitan, keserasian, serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;

2. Mengembangkan kerangka pemirikan kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik dimasa depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis. Pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilaksanakannya penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel T-C.29. berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										
	Bidang Administrasi Pemerintahan										
	Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah	**Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah**	**Persen**			**88**	**100**	**100%**			
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara	Laporan		1	1	1	**100%**			
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Terlaksananya Penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan		1	1	1	**100%**			
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Bupati Tapanuli Utara	Laporan		1	1	1	**100%**			
	Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten	Terlaksananya Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten	Kegiatan		1	1	1	**100%**			
	Penegasan Batas Antar kecamatan, antar desa dan antara kelurahan dalam wilayah kabupaten	Terlaksananya Penegasan Batas Antar kecamatan, antar desa dan antara kelurahan dalam wilayah kabupaten	Desa			20	20	**100%**			

	Penataan Unsur rupa bumi di kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penataan Unsur rupa bumi di kabupaten Tapanuli Utara	Kecamatan			3		**0**			
	Penyelenggaraan Hari jadi kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Peringatan Hari jadi kabupaten Tapanuli Utara	Kegiatan		1	1	1	**100%**			
	Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara	Kecamatan			15	0	**0**			
	Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah	Laporan		1	1	1	**100%**			
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kegiatan		1	1	1	**100%**			
	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintah	**Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan**	**Persen**			**88**	**100**	**100%**			
	Jasa Pendukung Forum koordinasi pimpinan daerah (FORKOPOIMDA) Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pendukung Forum koordinasi pimpinan daerah (FORKOPOIMDA) Kabupaten Tapanuli Utara	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Kali		10	10	10	**100%**			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintahan	Kali		4	4	4	**100%**			
	Jasa Pendukung persiapan kunjungan kerja Bupati Tapanuli Utara ke Kecamatan dan Deas/Kelurahan	Tersedianya Jasa Pendukung persiapan kunjungan kerja Bupati Tapanuli Utara ke Kecamatan dan Deas/Kelurahan	Kali		10	10	10	**100%**			
	Penyediaan Jasa Pendukung Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pendukung Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	kegiatan			1	0	**0**			
	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	**Cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi**	**Persen**			**88**	**96**	**100%**			
	Biaya Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia	Terlaksananya Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia	Kegiatan		1	1	1	**100%**			
	Pengkajian dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengkajian dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		1	1	1	**100%**			
	Penyusunan Nomenklatur Jabatan pelaksana	Terlaksananya Penyusunan Nomenklatur Jabatan pelaksana	Perbub		1	1	1	**100%**			
	Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis	Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis	Kegiatan		1	1	1	**100%**			

	Fasilitasi Penyusunan Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)	Proposal		3	3	3	**100%**			
	Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Perangkat Daerah		45	45	45	**100%**			
	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Evaluasi Jabatan	Perangkat Daerah		45	45	45	**100%**			
	Pendampingan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Kegiatan		1	1	1	**100%**			
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kegiatan		1	1	1	**100%**			
	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Perangkat Daerah		11	11	11	**100%**			
	PROGRAM PERUMUSAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	**Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian**	**Persen**			**88**	**100**	**100%**			
	Monitoring Ketersediaan LPG 3 KG dan BBM	Terlaksananya Monitoring Ketersediaan LPG 3 KG dan BBM	Persen		90	90	90	**100%**			
	Penyediaan Jasa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Persen		90	90	90	**100%**			
	Perencanaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Corporate Sosial Responsibility (CSR)	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Corporate Sosial Responsibility (CSR)	Persen		90	90	90	**100%**			
	Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Terlaksananya Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Persen		90	90	90	**100%**			
	Koordinasi Program Kerjsama dengan Investor	Terlaksananya Koordinasi Program Kerjsama dengan Investor	Investor			2	0	**100%**			
	Pameran Pembangunan Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Kegiatan Pameran Pembangunan Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara	Persan			100	0	**100%**			
	PROGRAM PENINGKATAN BUMD DAN LEMBAGA KEUANGAN	Jumlah BUMD dan Lembaga Keuangan	**Unit**			**3**					
	Penyediaan Jasa Administrasi Tim Pengembalian Kredit Bona Pasogit Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Tim Pengembalian Kredit Bona Pasogit Tapanuli Utara	Persen			90	0	**0**			

	Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyar (KUR)	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyar (KUR)	Persen		90	90	90	**100%**			
	Penyusunan Ranperda Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Tersusunnya Ranperda Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Ranperda		3	3	3	**100%**			
	PROGRAM PERUMUSAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	**Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan**	**Persen**			**85**	**98**	**100%**			
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku		1	1	1	**100%**			
	Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik	Terlaksananya KegiatanVerifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik	OPD		14	14	14	**100%**			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan	OPD		57	57	57	**100%**			
	Pelatihan Sistem Standar Satuan Harga	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Sistem Standar Satuan Harga	Orang			120	0	**100%**			
	Sistem Monev Online	Terlaksananya Kegiatan Sistem Monev Online	OPD		54	54	54	**100%**			
	Koordinasi dan Administrasi Penggunaan Dana Tidak Terduga	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Administrasi Penggunaan Dana Tidak Terduga	Tahun		1	1	1	**100%**			
	Koordinasi Jasa Konstruksi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Jasa Konstruksi	Tahun			1	0	**100%**			
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas ASN dalammemahami hukum Kontrak Konstruksi	Terlaksananya KegiatanBimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas ASN dalammemahami hukum Kontrak Konstruksi	Orang		70	70	70	**100%**			
	Koordinasi Pelaksanaan Gotongroyong	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Gotongroyong	Tahun		1	1	1	**100%**			
	Pengendalian Proyek Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Proyek Pembangunan	Tahun		1	1	1	**100%**			
	Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja	Buku		200	200	200	**100%**			
	Pengendalian Proyek Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Proyek	Buku		5	5	5	**100%**			
	Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Buku		17	17	17	**100%**			
	Verifikasi Rencana kerja dan Anggaran	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Rencana kerja dan Anggaran	OPD		54	54	54	**100%**			

	PROGRAM PERUMUSAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN	**Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan**				**88**	**90**	**100%**			
	Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Persen		95	95	95	**100%**			
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEMASYARAKATAN	**Cakupan Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan**	**Persen**			**88**	**81**	**92.04%**			
	Syukuran Tahun Baru/Open House PNS Pemkab Tapanuli Utara	Terlaksananya Kegiatan Syukuran Tahun Baru/Open House PNS Pemkab Tapanuli Utara	Persen		95	95	95	**100%**			
	Safari Ramadhan Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Tapanuli Utara	Persen			95	0	**0**			
	Berbuka Puasa Bersama Pemkab Tapanuli Utara	Terlaksananya Kegiatan Berbuka Puasa Bersama Pemkab Tapanuli Utara	Tempat		6	6	0	**0**			
	Pemberangkatan/Pelepasan Calon Jamaah Haji Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya KegiatanPemberangkatan/Pelepasan Calon Jamaah Haji Kabupaten Tapanuli Utara	Calon Jamaah Haji		3	3	0	**0**			
	Pemberangkatan/Pelepasan Wisata Rohani Tokoh Agama Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Kegiatan Pemberangkatan/Pelepasan Wisata Rohani Tokoh Agama Kabupaten Tapanuli Utara	Tokoh Agama			3	0	**0**			
	Syukuran Tahun Baru/Open House Non PNS/Masyarakat Pemkab Tapanuli Utara	Terlaksananya Kegiatan Syukuran Tahun Baru/Open House Non PNS/Masyarakat Pemkab Tapanuli Utara	Persen		95	95	95	**100%**			
	Perayaan Natal Oikumene Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Kegiatan Perayaan Natal Oikumene Kabupaten Tapanuli Utara	Persen		95	95	95	**100%**			
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**				**100**	**98**	**98%**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Biaya Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Teresdianya Biaya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Biaya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan		12	12	12	**100%**			

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Biaya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Biaya KegiatanPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Biaya Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Biaya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Dayar Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Dayar Air dan Listrik	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Rapat-Rapat Kooedinasi Dalam Daerah	Tersedianya Biaya Kegiatan Rapat-Rapat Kooedinasi Dalam Daerah	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya Biaya Kegiatan Penyediaan Jasa Non PNS	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Jasa Internet Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tersedianya Biaya kegiatan Penyediaan Jasa Internet Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Biaya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Jasa Petugas Pengamanan Melekat Bupati	Tersedianya Jasa Petugas Pengamanan Melekat Bupati	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Jasa Staff Ahli Bupati	Tersediany Jasa Staff Ahli Bupati	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Jasa Operasional Supir Pejabat Pengganti Perjalanan Dinas	Tersedianya Jasa Operasional Supir Pejabat Pengganti Perjalanan Dinas	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah Kabupaten	Tersedianya Jasa Tamu Pemerintah Kabupaten	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Cendramata/Tropy dan Penghargaan	Tersedianya Cendramata/Tropy dan Penghargaan	Bulan		12	12	12	**100%**			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	**Persen**			**72**	**85**	**100%**			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulan		12	12	12	**100%**			

	Pemerliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemerliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Pemerliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	TerlaksananyaPemerliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terlkaksananya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantro	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantro	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Rehab Gedung Kantor Bupati Unit A	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Bupati Unit A	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Bupati	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Bupati	Bulan		12	12	0	0			
	Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Wakil Bupati	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Wakil Bupati	Bulan		12	12	0	0			
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Jasa Petugas Peralatan dan Gedung Pemda	Terlaksananya Penyediaan Jasa Petugas Peralatan dan Gedung Pemda	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Rehab/Pemeliharaan Rumah Dinas Bupati	Terlaksananya Rehab/Pemeliharaan Rumah Dinas Bupati	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Rehab/Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Bupati	Terlaksananya Rehab/Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Bupati	Bulan		12	12	12	**100%**			

	Pengadaan Alat-Alat Band	Terlaksananya Pengadaan Alat-Alat Band	Bulan		12	12	0	**0**			
	Pembangunan Gudang di Kompleks Terminal Madya Tarutung	Terlaksananya Pembangunan Gudang di Kompleks Terminal Madya Tarutung	Bulan		12	12	0	**0**			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM	**Persentase kualitas pemeliharaan gedung/ kantor dan kendaraan dinas Bupati/Wakil Bupati serta kendaraan pool**	**Persen**			**88**	**81**	**92.04%**			
	Pengadaan Peralatan dan kelengkapan lainnya di Mess Pemda Ajibata	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan kelengkapan lainnya di Mess Pemda Ajibata	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Pengadaan Peralatan dan kelengkapan lainnya di Mess Pemda Medan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan kelengkapan lainnya di Mess Pemda Medan	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Jasa Operasional Pemasangan Peralatan Pemda Jaringan Instalasi Listrik dan kelengkapan lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Operasional Pemasangan Peralatan Pemda Jaringan Instalasi Listrik dan kelengkapan lainnya	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Pembangunan Dek Penahan di rumah Dinas Belakang Pendopo	Terlaksananya Pembangunan Dek Penahan di rumah Dinas Belakang Pendopo	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Pemeliharaan Paving Blok di Halaman Kantor Bupati Unit A	Terlaksananya Pemeliharaan Paving Blok di Halaman Kantor Bupati Unit A	Bulan		12	12	0	**0**			
	Penggantian Atap Mess Pemda Tapanuli Utara di Medan	TerlaksananyaPenggantian Atap Mess Pemda Tapanuli Utara di Medan	Bulan		12	12	12	**100%**			
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH/WAKIL KDH	**Cakupan kinerja pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH**	**Persen**			**88**	**100**	**100%**			
	Biaya Operasional Bupati	Tersedianya Biaya Operasional Bupati	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Biaya Operasional Wakil Bupati	Tersedianya Biaya Operasional WakilBupati	Bulan		12	12	12	**100%**			
	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Cakupan penyusunan produk dan pelayanan Hukum	**Persen**			**88**	**88**	**100%**			
	Pengkajian dan Penetapan Draf Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pengkajian dan Penetapan Draf Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen		10	10	10	**100%**			
	Pengkajian dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati	Terlaksananya Pengkajian dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati	Dokumen		80	80	80	**100%**			
	Evaluasi dan Eksaminasi Perjanjian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Evaluasi dan Eksaminasi Perjanjian Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	**100%**			

	Pengkajian Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA)	Terlaksanany Pengkajian Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA)	Persen			100	0	**0**			
	Pengkajian dan Evaluasi Produk-Produk Hukum	Terlaksananya Pengkajian dan Evaluasi Produk-Produk Hukum	Persen		100	100	100	**100%**			
	Forum Komunikasi Bidan g Hukum	Terlaksananya Forum Komunikasi Bidan g Hukum	Persen			100	0	**0**			
	Penyediaan Jasa Penanganan Perkara	T Tersedianya Jasa Penanganan Perkara	Persen		100	100	100	**100%**			
	Fasilitasi HAM	Terlaksananya Fasilitasi HAM	Persen		100	100	100	**100%**			
	Jaringan Dokumentasi Hukum	Tersedianya Jaringan Dokumentasi Hukum	Persen		100	100	100	**100%**			
	Penyuluhan Hukum	Terlaksananya Penyuluhan Hukum	Persen			100	0	**100%**			
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Persen		100	100	100	**100%**			
	Himpunan Produk-Produk Hukum	Terhimpunnya Produk-Produk Hukum	Persen		100	100	100	**100%**			
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN SERTA KEBIJAKAN BUPATI	**Persentase Kegiatan serta Kebijakan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang dimuat oleh media massa**	**Persen**			**88**	**99**	**100%**			
	Penyediaan Notulensi Rapat dan Fasilitasi Peliputan Media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Biaya Penyediaan Notulensi Rapat dan Fasilitasi Peliputan Media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen			100	0	**0**			
	Dokumentasi Kegiatan Kepala aerah Dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Biaya Dokumentasi Kegiatan Kepala aerah Dan Wakil Kepala Daerah	Buah		300	300	300	**100%**			
	Penyediaan Dokumen Melalui Pengumpulan dan Penjilidan Klipping Berita Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dokumen Melalui Pengumpulan dan Penjilidan Klipping Berita Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Buku			48	0	**0**			
	Pembuatan Buku Himpunan Pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Biaya Pembuatan Buku Himpunan Pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Buku			180	0	**0**			
	Penyediaan Jasa Bahan Bacaan Harian./Mingguan/majalah	Tersedianya Jasa Bahan Bacaan Harian./Mingguan/majalah	exp		34	34	34	**100%**			
	PROGAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, KEPROTOKOLAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH	**Persentase Pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Protokol**	**Persen**			**88**	**100**	**100%**			
	Penunjang Kegiatan Aparatur Protokoler, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan	Tersedianya Biaya Kegiatan Aparatur Protokoler, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan	Laporan		12	12	12	**100%**			

	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGADAAN BARANG/JASA	**Cakupan Pengadaan Barang/Jasa**				**88**	**100**	**100%**			
	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Sistem Rencana Umum Pengadaan	Terlaksananya Sistem Rencana Umum Pengadaan	Bulan		12	12	12	**100%**			
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan		1	1	1	**100%**			
	Penyediaan Jasa Administrasi dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	OPD		46	46	46	**100%**			
	Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	OPD		46	46	46	**100%**			
	Penyediaan Jasa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Tersedianya Jasa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Tahun		1	1	1	**100%**			
	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan		1	1	1	**100%**			
	Pelatihan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Orang		90	90	90	**100%**			
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan**	**Persen**			**88**	**100**	**100%**			
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen		1	1	1	**100%**			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		1	1	1	**100%**			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dokumen		1	1	1	**100%**			
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah	Dokumen		1	1	1	**100%**			
	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah	Terusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen		12	12	12	**100%**			
	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen		1	1	1	**100%**			
	Penyediaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Tersedianya Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Dokumen		1	1	1	**100%**			
	Sistem Pengendalian Intern	Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern	Tahun			1	0	**0**			

	Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah	Tersedianya Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah	Bulam		12	12	12	**100%**			
	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Sekretariat Daerah	Dokumen		1	1	1	**100%**			
	Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah	Dokumen		1	1	1	**100%**			
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	**100%**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Cakupan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	30	16	18	18	**100%**	3	37	123,3%
		Jumlah Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan									
		Jumlah Kunjungan Kerja Bupati Tapanuli Utara ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan									
		Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang dilaksanakan									
		Jumlah Rapat – rapat koordinasi pemerintah di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan dan di fasilitasi									
		Jumlah Kecamatan yang dilakukan penilaian									
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	20	3	12	12	**100%**	3	18	90%
		Jumlah Jalan, Gang, Sarana Umum dan Rumah yang diberikan Nama atau Nomor									
		Jumlah Unsur Rupa Bumi yang ditata									
		Persentase Batas antar Kecamatan, Antar Desa dan Kelurahan yang dilakukan verifikasi penegasan									
		Persentase wikayah /daerah yang dilakukan verifikasi penegasan batas									
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	30	14	18	18	**100%**	4	36	120 %
		Kegiatan APKASI yang disediakan Jasa Pendukungnya									
		Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara yang diselenggarakan									
		Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawabann (LKPJ) Bupati Tapanuli Utara yang disusun									

		Buku laporan LPPD Kabupaten Tapanuli Utara yang disusun									
		Buku laporan SPM Daerah yang disusun									
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Cakupan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	25	6	15	15	**100%**	8	29	116%
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama		25	5	15	15	**100%**	8	28	112%
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Dokumen	40	12	8	8	**100%**	12	32	80%
		Jumlah Masjid yang dikunjungi Tim Safari Ramadhan Kab. Tapanuli Utara									
		Jumlah Perayaan Natal Oikumene di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan									
		Jumlah Perayaan Paskah Raya di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan									
		Jumlah Acara Berbuka Puasa Bersama di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan									
		Jumlah Syukuran Tahun Baru Non PNS/Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan									
		Jumlah Syukuran Tahun Baru PNS/Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan									
		Jumlah Calon Jamaah Haji di Kabupaten Tapanuli Utara yang diberangkatkan									
		Jumlah Tokoh Agama yang diberangkatkan melaksanakan Wisata Rohani									
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	35	2	15	15	**100%**	2	34	97%
		Jumlah Kelompok Masyarakat dan Individu yang mendapat Bantuan Sosial									
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen hasil kebijakan,Evaluasi dan capaian	Dokumen	5	1	1	1	**100%**	1	4	80%

	terkait Kesejahteraan Masyarakat	kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,Perpustakaan, Kearsipan, Tarntribun Linmas									
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Cakupan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persen**	**100**					100	100	100%
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi	Dokumen	3.528	1154	879	967	110%	889	3.010	85,3%
		Jumlah Surat Keputusan Bupati,Surat Keputusan Sekretaris Daerah yang di Evaluasi dan Dieksaminasi	SK								
		Jumlah Rancangan Peraturan Bupati yang dievaluasi dan ditetapkan	Perda								
		Jumlah draf Rancangan Peraturan Daerah yang fasilitasi dan ditetapkan	Draf Ranperda								
		Jumlah PROMPEMPERDA yang ditetapkan	PROMPER PERDA								
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang difasilitasi	Perkara	31	3	8	5	62,5%	8	16	51,6%
		Jumlah dokumen yang dilaporkan terkait RANHAM	Dokumen								
		Jumlah peserta yang mengikuti forum komunikasi bidang hukum	Orang								
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang didokumentasikan dan dipublikasikan	Dokumen	3.092	1.022	770	831	107%	780	2.633	85,1%
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui JDIH	Produk Hukum								
		Jumlah peserta yang mendapat penyuluhan hukum	Orang								
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Cakupan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persen**	**100**				100%	**100**	**100**	100%
1.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan	60	4	24	24	100%	12	40	66,6%
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	laporan	200	40	80	80	100%	40	160	80%
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase UMKM yang dimonitoring	laporan	60	12	12	12	100%	12	48	80%
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	30	4	18	18	100%	4	26	86,6%

		Jumlah Standar Satuan Harga yang disusun	Standar								
		Jumlah Sistem Monev Online yang dikoordinasikan	Laporan								
		Jumlah Perangkat Daerah Pengusul Kegiatan DAK fisik yang diverifikasi	Perangkat Daerah								
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	25	0	15	15	100%	9	24	96%
		Jumlah Jasa Konstruksi yang dikoordinasikan	Laporan								
		Jumlah Pelaksanaan Gotong Royong yang dikoordinasikan	Laporan								
		Jumlah Proyek Pembangunan yang dikendalikan	Paket								
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	15	1	9	9	100%	3	13	86,6%
		Jumlah Proyek yang dimonitoring dan di Evaluasi									
		Jumlah Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja yang disusun									
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jsa	Dokumen	5	0	3	3	100%	1	4	80%
		Jumlah dokumen Strategi Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Evaluasi PBJ	Dokumen								
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Lyanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	5	0	3	3	100%	1	4	80%
		Persentase Pengadaan sistem Pengadaan Barang/jasa Secara Elektornik yang ditindaklanjuti	Persen								
		Jumlah Dokumen data hasil Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen								
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	250	50	150	150	100%	50	250	100%
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**100**					**100**	**100**	100%

4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dokumen**	**31**	**19**	**6**	**6**	100%	**6**	**31**	100%
		Jumlah Dokumen Renja yang disusun	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Renaksi yang disusun	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan yang disusun	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Renaksi Perubahan yang disusun	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Renstra Perubahan yang disusun	Dokumen								
		Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	Dokumen								
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	4	75%
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	4	75%
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	4	75%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	100%	1	4	100%
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	4	100%
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**							100%
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Bulan	70	14	14	14	100%	14	56	75%
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	12	12	12	100%	12	48	75%
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	100%	1	4	75%
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bul;anan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	90	18	18	18	100%	18	72	75%

4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun**	**Persen**	**100**							100%
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	10	2	2	2	100%	2	8	75%
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Bulan**	**12**					**12**	**12**	100%
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Saerah	Bulan	70	14	14	14	100%	14	56	75%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Derah**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	75	35	37	35	95	3	73	97%
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	264	120	140	130	93	4	254	96%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	43	20	21	20	95	2	42	98%
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	99	45	50	48	96	4	97	98%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase PNS yang difasilitasi terkait koordinasi dan konsultasi SKPD	Persen	12146	5360	6782	6682	99	4	12046	99%
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	10	3	7	7	100	0	10	100%
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	125	15	19	19	100	91	125	100%
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	155	50	63	62	98%	42	154	99%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	**100%**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyurT	Laporan	5	2	2	2	100	1	5	100%
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	96	45	50	49	98	1	95	99%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	217	98	118	110	93	1	209	96%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayaan umum Kantor yang disediakan	Laporan	1756	850	905	900	99	1	1751	100%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	**100%**

4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara yang dibayarkan pajaknya	unit	192	78	85	83	98	29	190	99%
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	JumlahMebel yang dipelihara	Unit	136	15	19	19	100	102	136	100%
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	185	50	69	69	100	66	185	100%
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Unit	49	15	25	23	92	9	47	96%
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau angunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	9	2	4	4	100	3	9	100%
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretarit Daerah**	Persen	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Paket	617	280	310	310	100	27	617	100%
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	603	265	309	309	100	29	29	100%
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Cakupan Penataan Organisasi**	Persen	**95**					**95**	**95**	100%
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	3					3	3	100%
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	laporan	2					2	2	100%
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	3					3	3	100%
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persen**	**100**					**100**	**100**	100%
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Laporan	8	2	2	2	100%	2	6	75%
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	3	3	3	100%	3	9	75%
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	4	1	1	1	100%	1	3	75%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Ada beberapa indikator kinerja yang menjadi dasar Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah. Secara umum capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sebagaimana yang ditargetkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 dapat dicapai dengan baik.

Berikut ini disajikan pada Tabel T-C.30 capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022(n-2), tahun 2023(n-1), dan proyeksi tahun berjalan (tahun 2024), dan tahun 2025(n+1).

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

NO	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023(Tahun n)	Tahun 2024 (Tahu n n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peringkat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi	Perintakat	10	9			7				
2	Realisasi permohonan bantuan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap permohonan masyarakat yang masuk	Persen	100	100			100				
3	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan terhadap produk hukum yang diusulkan	Persen	100	100			100				
4	Persentase kinerja BUMD baik (sehat dan profitable)	Persen	66	66			60				
5	Persentase pengecer pupuk dan LPG menjual sesuai HET	Persen	100	100			100				
6	Persentase kegiatan fisik yang terlaksana dengan baik (tidak menjadi temuan pengawas)	Persen	98.20	98,4			98,2				
7	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terealisasi	Persen	100	100			100				
8	Persentase Layanan Administrasi yang sesuai SOP	Persen	100	100			100				
9	Indeks Reformasi Birokrasi (Hasil PMPRB On line)	Persen	40	50			-				
10	Persentase acara/kegiatan sesuai keprotokolan	Persen	100	100			100				
11	Persentase Pelaporan tepat waktu	Persen	100	100			100				
12	Persentase capaian kinerja dan keuangan sekretariat daerah	Persen	100	100			100				

PERUBAHAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi dibidang tata pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum	Persentase terlaksananya fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase terlaksananya fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase terpenuhinya Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	Persen	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi dibidang perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase terlaksananya Administrasi Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase terlaksananya pengadaan barang dan jasa daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Persen	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan serta perencanaan dan keuangan	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase terlaksananya Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase terpenuhinya Administrasi dan Operasional Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100	100	100

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dinilai baik yang ditandai dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang baik pula.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, antara lain:
   - Belum optimalnya tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas kinerja
   - Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.
   - Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur.
   - Perlunya peningkatan pelayanan kecamatan, kelurahan, dan desa
   - Perlunya peningkatan pengelolaan BUMD untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
   - Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah
   - Masih kurangnya tindak lanjut implementasi terhadap kesepakatan bersama atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangani.
   - Masih minimnya layanan administrasi umum dan produk hukum berbasis IT
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Tapanuli Utara

   Fungsi utama pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah mengkoordinasi seluruh Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi Bupati Tapanuli Utara. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mencerminkan tingkat koordinasi yang baik dalam rangka mensinergiskan pelayanan setiap Perangkat Daerah untuk mencapai visi dan misi Bupati Tapanuli Utara.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara:
   - Semakin besarnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan Perangkat Daerah sehingga dituntut pelayanan aparatur yang maksimal.
   - Berkembangnya teknologi informasi yang menyebab informasi dapat disampaikan secara cepat dan massal.
   - Semakin banyaknya produk-produk hukum yang mengatur pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah.
   - Semakin meningkatnya pengawasan aparat hukum dalam pelaksanaan program/kegiatan instansi pemerintah.
   - Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024:
   - Pentingnya fungsi koordinasi untuk mensinergiskan pelayanan Perangkat Daerah dalam mencapai Visi dan Misi Bupati Utara sehingga meningkatnya kualitas koordinasi dari Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
   - Pentingnya sistem koordinasi yang cepat dan tepat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan baik.
   - Perlunya peningkatan SDM Aparatur sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan agar rumusan program dan kegiatan dapat sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD menggambarkan bahwa Rancangan Awal RKPD telah sesuai dengan analisis kebutuhan sehingga Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024. Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2024 disajikan pada tabel T-C.31.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
4.01	Sekretariat Daerah						Sekretariat Daerah					21.616.888.438	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	34.126.869.338	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tapanuli Utara	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	159.992.920	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	97.911.450	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	17.364.375	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	6.234.000	

		Semua Kelurahan					Perangkat Daerah						
			Jumlah Dokumen Renja yang disusun	Dokumen	1	15.000.000		Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	dokumen	1		
			Jumlah Dokumen Renaksi yang disusun		**1**				Jumlah Dokumen Renaksi yang disusun	dokumen	1		
			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun	**Dokumen**	**1**				Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun	dokumen	1		
			Jumlah Dokumen Renja Perubahan yang disusun	**Dokumen**	**1**				Jumlah Dokumen Renja Perubahan yang disusun	dokumen	1		
			Jumlah Dokumen Renaksi Perubahan yang disusun	**Dokumen**	**1**				Jumlah Dokumen Renaksi Perubahan yang disusun	dokumen	1		
			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun	**Dokumen**	**1**				Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun	dokumen	1		
			Jumlah Dokumen Renstra Perubahan yang disusun	**Dokumen**	**1**				Jumlah Dokumen Renstra Perubahan yang disusun	dokumen	1		
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	1	21.068.775	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	dokumen	1	5.000.000	

			Dokumen RKA-SKPD						Dokumen RKA-SKPD				
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya DPA Sekretariat Daerah	Dokumen	1	14.699.522	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Tersusunnya DPA Sekretariat Daerah	dokumen	1	5.000.000	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya DPA Perubahan Sekretariat Daerah	Dokumen	1	8.019.910	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Tersusunnya DPA Perubahan Sekretariat Daerah	dokumen	1	5.000.000	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunya Dokumen LPPD, SAKIP, IKU, dan PKTersusunya Dokumen LPPD, SAKIP, IKU, dan PK	Dokumen	4	22.488.023	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Tersusunya Dokumen LPPD, SAKIP, IKU, dan PKTersusunya Dokumen LPPD, SAKIP, IKU, dan PK	Bagian	10	56.677.550	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi	Dokumen	1	76.352.315	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi	Dokumen	1	5.000.000	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**12**	**11.802.179.735**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**100**	**12.674.638.477**	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang/Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	11.578.100.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Orang/Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14/org		

4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20	205.413.611	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	300	176.690.400	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Laporan	1	10.290.360	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Laporan	1	5.000.000	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	13	8.375.764	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18	15.000.000	
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun**	**Laporan**	**2**	**71.658.145**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun**	**Laporan**	**100**	**35.000.000**	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	**71.658.145**	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	35.000.000	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Bulan**	**12**	**658,441,820**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Bulan**	**12**	**300.000.000**	

4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang/Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	658,441,820	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Orang/Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	14/org	300.000.000	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Derah**	**Persen**	**12**	**6.228.508.257**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Derah**	**Persen**	**100**	**3.475.000.000**	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	37	179.744.781	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	37	80.000.000	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	140	813.217.341	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	140	200.000.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Pernggandaan yang disediakan	Paket	21	173.903.058	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Paket Barang cetakan dan Pernggandaan yang disediakan	Paket	21	80.000.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	50	3.164.629.098	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	50	1.500.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooerdinasi dan konsultasi SKPD	Dokumen	6.782	1.897.013.979	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooerdinasi dan konsultasi SKPD	laporan	7.477	1.615.000.000	

4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**899.382.750**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**953.986.299**	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	7	525.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	600.000.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	19	164.382.750	Pengadaan Mebel	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	1	253.920.000	
.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	63	210.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1	100.066.299	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**12**	**3.812.865.737**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**2.904.548.004**	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	2	191.008.125	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	2	10.000.000	
			Jumlah Mou dengan PT.Pos Indonesia terkait pengiriman surat, dokumen	**MoU**					Jumlah Mou dengan PT.Pos Indonesia terkait pengiriman surat, dokumen	**MoU**	1		

			dan pengiriman lainnya						dan pengiriman lainnya				
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	50	828.812.827	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	50	727.117.189	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	118	537.951.926	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	118	239.999.347	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	905	2.255.092.859	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	8	1.927.431.468	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		12	3.988.572.658	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Tapanuli Utara	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100**	**465.798.507**	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Item	85	1.360.600.710	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapanuli Utara	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Unit	66	445.798.507	

			Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraaan (STNK) yang diperpanjang						Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraaan (STNK) yang diperpanjang		7		
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang dipelihara Jumlah Mebel yang dipelihara	Item	19	55.125.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Mebel yang dipelihara Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	100	-	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Laiinya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Laiinya yang dipelihara	Item	69	441.565.406	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Laiinya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Laiinya yang dipelihara	Unit	72	20.000.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Gedung	25	1.635.156.541	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Gedung	7	-	
			Jumlah Gedung Kantor yang dibayarkan PBB						Jumlah Gedung Kantor yang dibayarkan PBB		5		
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Gedung	4	496.125.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau angunan Lainnya	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Gedung			
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Kebutuhan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretarit Daerah**	**Bulan**	**12**	**5.261.625.100**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Persentase Kebutuhan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretarit Daerah**	**Bulan**	**100**	**2.299.933.701**	

4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	**Item**	**310**	3.048.686.400	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	**paket**	27	1.499.933.701	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Item	309	2.212.938.700	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	paket	29	800.000.000	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Penataan Organisasi**	**Persen**	**45**	**940.054.510**	**Penataan Organisasi**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Penataan Organisasi**	**Persen**	**100**	**242.511.750**	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Perangkat Daerah	45	364.128.957	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Dokumen	3	80.858.600	
			Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi kelembagaannya						Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi kelembagaannya		45		
			Jumlah Perangkat Daerah yang disusun nomenklatur jabatan pelaksana						Jumlah Perangkat Daerah yang disusun nomenklatur jabatan pelaksana		45		
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasi; fasilitasi pelayanan publik dan Tata Laksana	Dokumen	3	270.686.800	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah laporan hasi; fasilitasi pelayanan publik dan Tata Laksana	Laporan	2	79.146.150	

			Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang dikrimkan						Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang dikrimkan		2		
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan	2	305.238.753	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dokumen	3	82.507.000	
			Jumlah Perangkat Daerah Nilai PMRB Online > 50						Jumlah Perangkat Daerah Nilai PMRB Online > 50		5		
			Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu						Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu		45		
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persen**		303.587.706	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Kab. Tapanuli Utara	**Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persen**	**2**	**167.560.250**	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	**laporan**	**12**	149.850.623	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	**laporan**	200	106.672.100	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	**laporan**	12	115.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	**laporan**	3	45.768.150	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	**laporan**	12	38.737.083	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	**laporan**	1	15.120.000	

4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Pesen**	**100%**	**5.958.396.671**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Kab. Tapanuli Utara	**Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**100**	**5.755.683.800**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persen**	**100**	**717.041.795**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persen**	**100**	**328.489.100**	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	210.797.499	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4	89.483.000	
			Jumlah Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1				Jumlah Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4		
			Jumlah kunjungan kerja Bupati Tapanuli Utara ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan	Dokumen	12				Jumlah kunjungan kerja Bupati Tapanuli Utara ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan	Dokumen	6		
			Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Dokumen	16				Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Dokumen			

			lainnya yang dilaksanakan						lainnya yang dilaksanakan				
			Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan dan fasilitasi	Dokumen	4				Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan dan fasilitasi				
			Jumlah Kecamatan yang dilakukan penilaian	Dokumen	15				Jumlah Kecamatan yang dilakukan penilaian				
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kelurahan	11	182.156.042	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kelurahan	100	-	
			tersedianya dokumen batas daerah antar kecamatan	Kecamatan	2				tersedianya dokumen batas daerah antar kecamatan	Kecamatan	2		
			tersedianya dokumen penegasan batas daerah antar kabupaten	Dokumen	1				tersedianya dokumen penegasan batas daerah antar kabupaten	Dokumen	100		
			terselenggaranya Penilainan Kecamatan Terbaik	Kegiatan	1				terselenggaranya Penilainan Kecamatan Terbaik	Kegiatan			
			tersusunnya buku rupabumi	Buku	5				tersusunnya buku rupabumi	Buku			

			tersusunnya dokumen pemberian nama jalan,gang sarana umu dan penomoran rumah	Dokumen	1				tersusunnya dokumen pemberian nama jalan,gang sarana umu dan penomoran rumah	Dokumen			
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanaannya Fasilitasi Otonomi Daerah	**Dokumen**	**1**	324.088.254	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	**dokumen**	2	239.006.100	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kegiatan APKASI yang disediakan Jasa Pendukungnya	Kegiatan	1				Kegiatan APKASI yang disediakan Jasa Pendukungnya	Kegiatan	10		
		Peringkat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas LPPD Kabupaten Tapanuli Utara	Tersusunnya Buku LKPJ Bupati Tapanuli Utara	Dokumen	1				Tersusunnya Buku LKPJ Bupati Tapanuli Utara	Dokumen	1		
		Pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara yang	Tersusunnya Buku LPPD Kabupaten Tapanuli Utara	Dokumen	1				Tersusunnya Buku LPPD Kabupaten Tapanuli Utara	Dokumen	1		

		diselenggarakan											
		Jumlah Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tapanuli Utara yang disusun	tersusunnya EPPD terhadap LPPD	Dokumen	1				tersusunnya EPPD terhadap LPPD	Dokumen	1		
		Jumlah Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara yang disusun	tersusunnya laporan SPM	Dokumen					tersusunnya laporan SPM	Dokumen	1		
		Jumlah Buku Laporan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tapanuli											

		Utara yang disusun											
		Jumlah Kegiatan APKASI yang difasilitasi											
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Dokumen**	**12**	**74.708.255**	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Dokumen**	**100**	**-**	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	10	39.654.720	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	10	-	
	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Dokumen	1	20.000.000	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Dokumen	1	-	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan kerjasama	Dokumen	21	15.053.535	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan kerjasama	Dokumen	21	-	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**100**	**3.482.121.423**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**100**	**2.091.294.950**	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasai Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	20	794.078.658	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasai Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	17	701.295.100	
			Jumlah Perayaan Natal	Dokumen	**1**				Jumlah Perayaan Natal	Dokumen	1		

			Oikumene di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan						Oikumene di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan				
			Jumlah Perayaan Paskah Raya di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen	**1**				Jumlah Perayaan Paskah Raya di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen	1		
			Jumlah Acara Berbuka Puasa Bersama di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen	**1**				Jumlah Acara Berbuka Puasa Bersama di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen	1		
			Jumlah Syukuran Tahun Baru Non PNS/Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen	**1**				Jumlah Syukuran Tahun Baru Non PNS/Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen	1		
			Jumlah Syukuran Tahun Baru PNS/Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen	**1**				Jumlah Syukuran Tahun Baru PNS/Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan	Dokumen	1		
			Jumlah Calon Jamaah Haji di Kabupaten Tapanuli Utara yang diberangkatkan	Dokumen	**10**				Jumlah Calon Jamaah Haji di Kabupaten Tapanuli Utara yang diberangkatkan	Dokumen	10		

			Jumlah Tokoh Agama yang diberangkatkan melaksanakan Wisata Rohani	Dokumen	**5**				Jumlah Tokoh Agama yang diberangkatkan melaksanakan Wisata Rohani	Dokumen	5		
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, Tansmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan pencataran sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	12	2.512.500.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, Tansmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan pencataran sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	240	1.260.000.000	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan			175.542.765	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan	**dokumen**	340	129.999.850	

			Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tantibum Linmas						Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tantibum Linmas				
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Dokumen**	**650**	**1.684.525.198**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Dokumen**	**100**	**813.173.525**	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Dokumen	650	723.007.700	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Dokumen	904	241.649.875	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang dilaporkan terkait RANHAM Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Komunikasi Bidang Hukum Jumlah Peserta yang mendapatkan penyuluhan Hukum	Dokumen	3	712.173.900	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen yang dilaporkan terkait RANHAM Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Komunikasi Bidang Hukum Jumlah Peserta yang mendapatkan penyuluhan Hukum	kasus	8	497.955.150	

4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan pengelolaan informasi Hukum yang di Dokumentasikan	Dokumen	650	249.343.598	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Produk Hukum dan pengelolaan informasi Hukum yang di Dokumentasikan	Dokumen	795	73.568.500	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Cakupan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persen**		**1.954.951.192**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Kab. Tapanuli Utara	**Cakupan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persen**	**100**		
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persen**		**146.664.188**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persen**	**100**	**145.293.500**	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen		21.096.674	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	12	47.783.550	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	laporan		203.156.705	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	laporan	1	97.509.950	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen		22.410.810	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			-	

4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persen**	**97**	**468.898.244**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persen**	**100**	**288.239.300**	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan	Dokumen	4	199.758.844	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan	Dokumen	4	78.047.900	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Program Pembangunan	laporan	4	132.702.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Program Pembangunan	laporan	4	138.239.500	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	**3**	136.437.400	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	4	71.951.900	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**		**1.239.388.760**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kab. Tapanuli Utara**	**Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**	**100**	**300.422.100**	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	100	731.831.395	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	2	168.099.750	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	dokumen	145	249.308.385	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	dokumen	2	123.246.400	

4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	orang	45	258.248.980	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	orang	200	9.075.950	
TOTAL						**38.306.276.578**	**TOTAL**					**29.463.867.188**	

Tabel T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

No.	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 23.601.978.538,-	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 3.232.957.575,-	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 724.586.500,-.	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dengan Kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023. Berdasarkan hasil usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyeleggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada tahun 2023, tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2023

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN.1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP.1	PP Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru dan terbarukan
		PP.2	PP Peningkatan kuantitas ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		PP.3	PP Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan
		PP.4	PP Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan
		PP.5	PP Penguatan kewirausahaan Usaha Makro Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi

		PP.6	PP Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
		PP.7	PP Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
PN.2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP.1	PP Pembangunan Wilayah Sumatera
		PP.2	PP Pembangunan Wilayah Jawa Bali
		PP.3	PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
		PP.4	PP Pembangunan Wilayah Kalimantan
		PP.5	PP Pembangunan Wilayan Sulawesi
		PP.6	PP Pembangunan Wilayah Maluku
		PP.7	PP Pembangunan Wilayah Papua
PN.3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PP.1	PP Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
		PP.2	PP Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
		PP.3	PP Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

		PP.4	PP Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
		PP.5	PP Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
		PP.6	PP Pengentasan kemiskinan
		PP.7	PP Peningkatan produktivitas dan daya saing
PN.4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP.1	PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
		PP.2	PP Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
		PP.3	PP Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial
		PP.4	PP Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan

			Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
PN.5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP.1 PP.2 PP.3 PP.4 PP.5	PP Infrastruktur pelayanan dasar PP Infrastruktur ekonomi PP Infrastruktur perkotaan PP Energi dan ketenagalistrikan PP Transformasi digital
PN.6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP.1 PP.2 PP.3	PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup PP Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim PP Pembangunan Rendah Karbon
PN.7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP.1 PP.2 PP.3 PP.4 PP.5	PP Konsolidasi Demokrasi PP Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri PP Penegakan Hukum Nasional PP Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola PP Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli

Utara Tahun 2020-2024, tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja".

Sesuai dengan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dirumuskan 3 (tiga) sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu:

1. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang tata pemerintahan, kerja sama kesejahteraan rakyat dan hukum
2. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa
3. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi

Untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dituangkan pada Tabel III.2 Berikut

Tabel III.2
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang tata pemerintahan, kerja sama kesejahteraan rakyat dan hukum	1. Persentase Terlaksananya fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100
		2. Persentase Terpenuhinya Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah	Persen	100
		3. Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	Persen	100

	2. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa	1. Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	98,8
		2. Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Persen	98,8
		3. Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Persen	98,8
	3. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi	1. Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Persen	100

	pimpinan, serta perencanaan dan keuangan			
		2. Persentase Terlaksananya Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100
		3. Persentase Terpenuhi Administrasi dan Operasional Sekretariat Daerah	Persen	95
		4. Persentase Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penggangaran, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Tapanuli Utara yaitu: "Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata.
2. Pencapaian Misi Bupati Tapanuli Utara, yang terdiri dari :
   a. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan;
   b. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumberdaya lokal;
   c. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
   d. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan;
   e. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata;
   f. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
   g. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri; dan
   h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan system e-government.
3. Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangungan dan Keuangan Daerah.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Tapanuli Utara

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023					Prakiran Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
4	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
4.01	**Sekretariat Daerah**									
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Program Penunjang Uruisan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100 Persen**	**30.907.997.616**	**DAU**		**95 Persen**	**39.059.763.780**
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**129.821.900**	**DAU**		**100**	**176.957.645**
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1	14.999.900	DAU		1	16.537.390
		Jumlah Dokumen Renaksi yang disusun	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1				1	
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1				1	
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan yang disusun	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1				1	
		Jumlah Dokumen Renaksi Perubahan yang disusun	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1				1	
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1				1	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1	10.250.000,-	DAU		1	17.567.235
		Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1				1	

4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1	14.698.000	DAU		1	13.999.435
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1	9.927.900	DAU		1	12.048.010
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	1	66.520.400	DAU		1	95.388.741
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja san iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	1	13.425.700	DAU		1	21.416.834
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**13.241.070.700**	**DAU**		**100**	**14.603.655.564**
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	Kab. Tapanuli Utara	14	13.044.502.200	DAU		14	14.381.563.664
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1	177.444.000	DAU		1	195.632.010
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	1	9.889.200	DAU		1	13.229.890
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	12	9.235.300	DAU		12	13.230.000
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun**	laporan	**Kab. Tapanuli Utara**	2	**66.684.500**	**DAU**		2	**69.109.661**
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	Kab. Tapanuli Utara	2	66.684.500	DAU		2	69.109.661
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Bulan**	**Kab. Tapanuli Utara**	**12**	**658.441.812**	**DAU**		**12**	**725.932.098**
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang/Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	Kab. Tapanuli Utara	14 Bulan	658.441.812	DAU		2 Orang/Bulan	725.932.098
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Derah**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100 Persen**	**3.881.281.315**	**DAU**		**100 Persen**	**5.287.803.533**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Kab. Tapanuli Utara	3 Paket	80.112.500	DAU		3 Paket	98.573.202
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Kab. Tapanuli Utara	4 Paket	386.677.415	DAU		4 Paket	460.981.158

4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Pernggandaan yang disediakan	Paket	Kab. Tapanuli Utara	2 Paket	100.002.400	DAU		2 Paket	164.462.571
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	Kab. Tapanuli Utara	4 laporan	2.250.000.000	DAU		4 laporan	2.701.125.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooerdinasi dan konsultasi SKPD	laporan	Kab. Tapanuli Utara	4 laporan	1.064.489.000	DAU		4 laporan	1.862.661.622
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**1.108.274.800**	**DAU**		**100**	**4.363.997.967**
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	Kab. Tapanuli Utara	1 unit	150.000.000	DAU		4 unit	3.307.500.000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Kab. Tapanuli Utara	91 unit	149.100.000	DAU		91 unit	164.382.750
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	Kab. Tapanuli Utara	42 unit	809.174.800	DAU		42 unit	892.115.217
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**3.498.600.689**	**DAU**		**100**	**4.050.694.024**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	Kab. Tapanuli Utara	1 laporan	152.500.000	DAU		1 laporan	173.643.750
		Jumlah Mou dengan PT.Pos Indonesia terkait pengiriman surat, dokumen dan pengiriman lainnya	MoU	Kab. Tapanuli Utara	1 laporan				1	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	Kab. Tapanuli Utara	1 laporan	742.877.189	DAU		I laporan	819.022.100
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	Kab. Tapanuli Utara	1 laporan	519.491.500	DAU		1 laporan	760.713.644
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	Kab. Tapanuli Utara	1 laporan	2.083.732.000	DAU		1 laporan	2.297.314.530
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**1.795.072.300**	**DAU**		**100**	**2.142.237.210**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Persen	Kab. Tapanuli Utara	100	817.698.100	DAU		100	
		Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraaan (STNK) yang diperpanjang	Unit	Kab. Tapanuli Utara	29 unit				7	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit Unit	Kab. Tapanuli Utara	0 unit 102 unit	50.000.000	DAU		0 unit 102 unit	55.125.000
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Laiinya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Laiinya yang dipelihara	Unit Unit	Kab. Tapanuli Utara	0 unit 66 unit	260.374.200	DAU		0 unit 66 unit	287.062.555

4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	Kab. Tapanuli Utara	9 Unit	315.000.000	DAU		9 Unit	402.412.500
		Jumlah Gedung Kantor yang dibayarkan PBB	Unit	Kab. Tapanuli Utara	5				5	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	Kab. Tapanuli Utara	3 Unit	400.000.000	DAU		3 Unit	496.125.000
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretarit Daerah**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**5.710.396.500**	**DAU**		**100**	**6.407.222.408**
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Paket	Kab. Tapanuli Utara	27	3.333.324.300	DAU		27	3.750.198.952
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	Kab. Tapanuli Utara	29	2.377.074.200	DAU		29	2.657.023.456
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Cakupan Penataan Organisasi**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**95**	**498.753.600**	**DAU**		**95**	**771.750.221**
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	3	209.420.700	DAU		3	203.564.057
		Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi kelembagaannya	Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara	45				45	
		Jumlah Perangkat Daerah yang disusun nomenklatur jabatan pelaksana	Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara	45				45	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasi; fasilitasi pelayanan publik dan Tata Laksana	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	2	157.444.700	DAU		2	237.425.139
		Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang dikrimkan	Proposal	Kab. Tapanuli Utara	2				2	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	3	131.888.200	DAU		3	330.761.025
		Jumlah Perangkat Daerah Nilai PMRB Online > 50	Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara	5				8	
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu	Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara	45				45	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**319.599.500**	**DAU**		**100**	**460.403.449**
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	2	115.514.800	DAU		2	235.400.067
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	3	104.265.900	DAU		3	114.953.155
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	1	99.818.800	DAU		1	110.050.227
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Cakupan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**		**DAU**		**100**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Cakupan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**466.642.500**	**DAU**		**100**	**686.875.912**

4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	4	179.811.200	DAU		4	203.588.091
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	5	149.502.800	DAU		5	164.826.837
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	6	103.853.500	DAU		6	318.460.984
		Kegiatan APKASI yang disediakan Jasa Pendukungnya	Kegiatan	Kab. Tapanuli Utara	10				10	
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Cakupan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**33.475.000**	**DAU**		**100**	**84.691.294**
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	1	23.366.000	DAU		1	59.950.091
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan kerjasama	Laporam	Kab. Tapanuli Utara	1	10.109.000	DAU		1	24.741.203
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**1.680.350.600**	**DAU**		**100**	**2.748.651.537**
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasai Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	8	621.247.000	DAU		8	684.924.818
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, Tansmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan pencataran sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	2	1.014.000.000	DAU		2	2.014.000.000
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tantibum Linmas	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	2	45.103.600			2	49.726.719
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Cakupan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**1.041.459.000**	**DAU**		**100**	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	5	505.000.000	DAU		5	756.323.489
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen yang dilaporkan terkait RANHAM Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Komunikasi Bidang Hukum Jumlah Peserta yang mendapatkan penyuluhan Hukum	Dokumen Kasus Orang Orang	Kab. Tapanuli Utara	3 4 200 200	440.000.000	DAU		3 4 200 200	744.930.475

4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan pengelolaan informasi Hukum yang di Dokumentasikan	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	2	96.459.000	DAU		2	263.296.184
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Cakupan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**98,8**	**1.571.908.284**			**98,8**	**1.930.976.934**
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**309.341.284**			**100**	**384.646.816**
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	12	52.280.284	DAU		12	56.586.695
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	7	171.117.300	DAU		7	277.240.383
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	2	85.943.700	DAU		2	50.819.738
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**385.729.500**	**DAU**		**100**	**502.441.774**
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	4	168.590.100	DAU		4	185.870.585
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Program Pembangunan	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	4	102.702.000	DAU		4	146.303.955
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Kab. Tapanuli Utara	3	114.437.400	DAU		3	170.267.234
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**	**Kab. Tapanuli Utara**	**100**	**876.837.500**	**DAU**		**100**	**1.043.888.344**
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	3	560.839.100	DAU		3	585.250.108
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	Dokumen	Kab. Tapanuli Utara	3	193.471.600	DAU		3	213.302.439
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	Orang	Kab. Tapanuli Utara	30	122.526.800	DAU		30	245.335.797

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Hasil Evaluasi Renja Perubahan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten, dirumuskan Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebesar 27.445.588.098,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tapanuli Utara. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 11 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 23.442112.198,-.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
   Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri 4 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.372.760.575,-
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.
   Program Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari 3 Kegiatan dan 8 sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 650.715.325,-.

Secara keseluruhan, untuk Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai 3 Program, 18 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 27.445.588.098,-,-.

Uraian yang lebih rinci mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat seperti dibawah ini:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, terdiri dari 11 Kegiatan yaitu:
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:
        a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
        b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
        c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
        d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
        e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
        f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu:
        a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
        b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
        c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
        d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
    c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
    d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
    e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Pengadaan Mebel;
    b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 5 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
    b. Pemeliharaan Mebel;
    c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
    d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;
    b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Fasilitasi Keprotokolan;
    b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
    c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan.
11. Penataan Organisasi, terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
    c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

II. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri 4 Kegiatan, yaitu:
    1. Administrasi Tata Pemerintahan, terdiri dari 3 Sub Kegiatan,
        a. Penataan Administrasi Pemerintahan;

b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. Fasilitasi Kerjasama Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:
   a. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri;
   b. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
3. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
   a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
   b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Rakyat;
   c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.
4. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
   a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
   b. Fasilitasi Bantuan Hukum;
   c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

III. Program Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 3 Kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
   a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
   b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
   c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

2. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
    b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
    c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro.
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
    b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
    c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB V
PENUTUP

Untuk memperoleh hasil pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan yang dicita-citakan oleh masyarakat, maka melalui penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perubahan Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, dapat tergambar Rencana Pembangunan dan prioritas yang diinginkan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, mempedomani penjaringan aspirasi masyarakat serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan adanya penyusunan RENJA Perubahan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat terkoordinasi, terintegrasi dan interaktif lintas pelaku, transparan dan bertanggungjawab. Disamping itu, pertimbangan pada perencanaan pembangunan yang lebih efisien dan lebih responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dengan memperhatikan potensi dan karakteristik serta permasalahan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, untuk mencapai keberhasilan dan menjaga kesinambungan pembangunan pada Tahun Anggaran 2024, maka RENJA Perubahan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini

dapat disajikan sebagai pedoman perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan anggaran yang dialokasikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung, Nopember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Ir. DAVID P SIPAHUTAR, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670720 199503 1 002

RENCANA KERJA
(RENJA) 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I **2**
PENDAHULUAN **2**
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penyusunan 6
BAB II **8**
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA Error! Bookmark not defined.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. 8
2.2. Analisa Pelayanan Kinerja 20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD 20
2.4. LINGKUNGAN INTERNAL 22
2.4.1 Kekuatan (*Strength*): 22
2.5. LINGKUNGAN EKSTERNAL PELUANG (OPPORTUNITY) 23
2.6. ANCAMAN (THREAT): 24
2.7. STRATEGI UMUM KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATENTAPANULI UTARA: 24
2.8. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 25
2.9. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25
BAB III **25**
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **26**
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 26
3.2 Tujuan & Sasaran 27
3.3 Program Dan Kegiatan 27
BAB IV **27**
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **28**
BAB V **29**
PENUTUP **29**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Kerja. Penyusunan Renja memuat program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata Kabupaten Tapanuli Utara yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara merupakan rencana pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan tersebut diatas, dokumen perencanaan disusun sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang memiliki jangka waktuperencanaan 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1(satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra OPD.

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan rencana kegiatan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Tapanuli Utara yang tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara, dimana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengambil misi ke 8 (delapan) dimana misi ke 8 ini menurunkan tujuan dan sasaran seperti tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 – 2024.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi dimana Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola keuangan dan kekayaan yang profesional;
2. Pengembangan Manajemen pengelola keuangan dan kekayaan daerah;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran- sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Renja BKAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2012;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2010;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 65 Tahun 2016; tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan BKAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah untuk memaduserasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) BKAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024.

Arti Renja BKAD Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai panduan/pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Renja BKAD. Kabupaten Tapanuli Utara, dan juga sebagai arahan dan acuan dalam pemanfaatan secara optimal sumber dana dan sumber daya yang dimiliki Renja BKAD Kabupaten Tapanuli Utara sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada melalui kerjasama kemitraan dengan segenap komponen terkait untuk mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Sementara tujuan disusunnya Renja BKAD Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk memasukkan program yang ada di Rencana Kerja a ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Tahun 2024 yakni:

a. Sebagai acuan/arah bagi BKAD dalam menyusun program/kegiatan prioritas Tahun 2024 berdasarkan ketersediaan sumberdaya dalam rangka mencapai Kabupaten Tapanuli Utara sebagai kabupaten termaju di Indonesia;
b. Merumuskan rencana program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai

indikator kinerja dan pendanaan.

c. Merumuskan rekomendasi sebagai dasar penyusunan analisis kebutuhan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ri ngkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja,baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU (BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD yang memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran targetkinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)Kabupaten Tapanuli Utara dan Capaian Renstra tahun Sebelumnya

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi ini didasarkan atas pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, evaluasi pelaksanaan Renstra, dan perkiraan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) pada tahun berjalan.

Pada tahun 2022, alokasi anggaran ditujukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan total pagu anggaran sebesar 281.520.131.660 yang terdiri dari

- Belanja Operasi Rp. 12.935.215.560
- Belanja Modal Rp. 915.151.900
- Belanja Tidak Terduga Rp. 10.474.955.600
- Belanja Transfer Rp. 257.194.808.600

Adapun rincian realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Uraian Program/Kegiatan		ANGGARAN 2021	Fisik (%)	REALISASI 2021	Sisa	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			**100 %**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**40.193.900,00**		**34.277.900,00**	**5.916.000,00**	**85,28**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00		0,00	0,00	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00		0,00	0,00	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00		0,00	0,00	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00		0,00	0,00	100
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00		0,00	0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.226.885.549,00		2.258.866.749,00	8.018.800,00	99,65
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.200.387.749,00		2.200.387.749,00	0,00	100
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan	48.888.100,00		45.977.100,00	2.911.000,00	94,05

	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.629.900,00		7.522.100,00	5.107.800,00	59,56
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.979.800,00		4.979.800,00	0,00	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0,00		0,00	0,00	0,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00		0,00	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		124.475.000,00		121.132.620,00	3.342.380,00	97,31
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.710.300,00		3.085.000,00	625.300,00	97,24
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.087.300,00		9.861.300,00	226.000,00	97,76
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.546.400,00		8.448.000,00	98.400,00	98,85
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.509.000,00		27.316.300,00	192.700,00	99,30
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.963.000,00		18.907.000,00	56.000,00	99,70
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.675.000,00		6.135.000,00	540.000,00	91,91
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.984.000,00		47.380.020,00	1.603.980,00	96,73
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00		0,00	0,00	0,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00		0,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		172.075.150,00		167.967.159,00	4.107.991,00	97,61
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.103.000,00		14.009.559,00	2.093.441,00	97,14
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.972.150,00		152.957.600,00	2.014.550,00	98,70
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		42.541.100,00		39.558.280,00	2.982.820,00	92,99
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.721.600,00		23.498.280,00	2.223.320,00	91,36
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.159.600,00		6.595.000,00	564.600,00	92,11
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.659.900,00		9.465.000,00	194.900,00	97,98
Program Pengelolaan Keuangan Daerah			**100 %**			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		132.923.400,00		119.364.900,00	13.558.500,00	89,80
1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	3.534.600,00		3.498.300,00	36.300,00	98,97
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	140.768.200,00		139.162.600,00	1.605.600,00	98,86
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	133.704.700,00		132.541.806,00	1.162.894,00	99,13
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	436.741.000,00		413.102.291,00	23.638.709,00	94,59
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	3.454.200,00		3.454.200,00	0,00	100

	Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					
6	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	112.379.900,00		98.874.700,00	13.505.200,00	87,98
7	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	13.554.700,00		13.537.700,00	17.000,00	99,87
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		179.034.900,00		162.703.700,00	16.331.200,00	90,88
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	23.177.000,00		23.069.000,00	108.000,00	99,53
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	8.115.700,00		8.077.700,00	38.000,00	99,53
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	11.308.800,00		11.128.800,00	180.000,00	98,41
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8.687.400,00		8.682.200,00	5.200,00	99,94
4	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota	127.746.000,00		111.746.000,00	16.000.000,00	87,48
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		77.738.400,00		77.613.400,00	125.000,00	99,84
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban/n	16.504.000,00		16.492.000,00	12.000,00	99,93
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.316.500,00		5.245.500,00	71.000,00	98,66
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	42.527.700,00		42.485.700,00	42.000,00	99,90
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	154.669.800,00		154.356.473,00	313.327,00	99,80
5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	57.390.400,00		50.558.400,00	6.832.000,00	88,10
6	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	13.390.200,00		13.390.200,00	0,00	100
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1.124.465.924,00		1.122.086.824,00	2.379.100,00	99,79
1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.122.086.824,00		1.122.086.824,00	0,00	100
2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.379.100,00		0,00	2.379.100,00	0,00
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.474.955.600,00		10.126.560.516,00	348.395.084,00	96,67
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		28.698.000,00		28.546.790,00	151.210,00	99,42
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	26.197.700,00		26.046.490,00	151.210,00	99,42

2	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2.500.300,00		2.500.300,00	0,00	100
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			**100 %**			
Pengelolaan Barang Milik Daerah		94.543.700,00		85.572.100,00	8.971.600,00	90,51
1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2.500.300,00		2.500.300,00	0,00	100
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	19.510.300,00		19.459.900,00	50.400,00	99,74
3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	88.154.900,00		84.541.200,00	3.613.700,00	95,90
4	Pengamanan Barang Milik Daerah	8.094.700,00		5.373.100,00	2.721.600,00	66,38
5	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.013.100,00		6.593.100,00	1.420.000,00	82,28
5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10.897.200,00		10.897.200,00	0,00	100
6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	40.837.900,00		40.248.300,00	589.600,00	98,56
7	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	7.190.500,00		3.000.500,00	4.190.000,00	41,73
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		217.352.200,00		187.338.700,00	30.013.500,00	86,19
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	40.368.300,00		27.454.300,00	12.914.000,00	68,01
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	6.552.100,00		3.376.300,00	3.175.800,00	51,.53
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8.449.900,00		8.319.900,00	130.000,00	98,46
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	34.418.000,00		34.340.000,00	78.000,00	99,77
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	21.394.300,00		19.435.700,00	1.958.600,00	90,85
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	7.168.800,00		6.809.800,00	359.000,00	94,99
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.735.300,00		5.734.000,00	1.300,00	99,98
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	18.944.100,00		16.343.100,00	2.601.000,00	86,27
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	19.244.900,00		17.608.900,00	1.636.000,00	91,50
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	15.716.400,00		15.620.600,00	95.800,00	99,39
11	Penagihan Pajak Daerah	18.424.900,00		15.680.900,00	2.744.000,00	85,11
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1.700.600,00		1.700.600,00	0,00	100
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	7.963.300,00		4.063.300,00	3.900.000,00	51,03
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11.271.300,00		10.851.300,00	420.000,00	96,27

Berdasarkan tabel diatas ada 3 program dan 14 kegiatan yang dilaksakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Terdapat 1 kegiatan yang capaian realisasi fisiknya tidak mencapai 100%, yaitu program pengelolaan barang Milik daerah. Hal ini disebabkan karena pengukuran aset tanah akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat

(*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator- indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 - 2024 (dijelaskan dalam lampiran Tabel Indikator Kinerja Utama).

2.1.2 Capaian Renstra

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi capaian kinerja yang dibandingkan capaian Renstra OPD dapat digambarkan pada Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023. Capaian kinerja realisasi anggaran yang telah dicapai pada Tahun Anggaran (TA) 2023 adalah sebesar 90,51 % dan diharapkan pada TA. 2024 ini capaian kinerja tersebut akan mencapai peningkatan di setiap Program dan Kegiatan. Oleh karena itu secara umum dapat dikatakan capaian kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan pada Renstra OPD yang telah direncanakan.

2.1.3 Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2024

Untuk tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2024 dengan usulan sebesar Rp. 285.713.713.710,- terurai dalam 3 program dan 50 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja meningkat atau minimal sama dengan Tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan Tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

a. Adanya beberapa kebijakan yang penerapannya dalam waktu singkat seperti rasionalisasi, dimana terdapat penghematan anggaran pada setiap kegiatan. Dana penghematan dari hasil rasionalisasi kegiatan dimaksud dipergunakan pada kegiatan lain seperti pengadaan fisik dan lain sebagainya;
b. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi ;
c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan;
d. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan;
e. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
f. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Renja Badan Keuangan Aset (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 - 2024, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Peningkatan sistem yang mendukung mekanisme penganggaran di Kabupaten Tapanuli Utara yakni dengan diterapkannya sistem baru oleh Pemerintah Pusat yang disebut SIPD didalam memberi kemudahan, sehingga anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara semakin transparan dan tertata dengan baik.
b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
c. Peningkatan disiplin pegawai, ini terlihat dengan diberlakukannya absen dengan memakai alat deteksi jari (*fingerprint*), termasuk untuk pegawai yang akan keluar dan masuk ruangan kantor.
d. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (*reward and punishing*), dan kesejahteraan pegawai.
e. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan pelayanan satu pintu.
f. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.

Penjelasan di atas bisa diperhatikan juga pada Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran (Rp)	
				Target	Realisasi	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**Persen**	**100 %**	**97 %**	**5.624.995.680**	**5.476.730.854**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persen	100 %	100 %	**357,183,100**	**355,777,200**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pelaksanaan	**Dokumen**	**4**	**2**	5,000,000	4,999,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Laporan**	**1**	**1**	4,657,400	4,656,400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Laporan**	**0**	**3**	342,600	342,600
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Laporan**	**12**	**18**	352,183,100	350,778,200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai target**	**Persen**	**100 %**	**100 %**	**3,529,170,218**	**3,452,752,903**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Orang/Bulan**	**13**	**26**	3,044,589,418	2,983,285,778
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Dokumen**	**12**	**24**	425,497,200	418,119,800
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Dokumen**	**1**	**6**	54,083,600	46,348,100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran (Rp)	
				Target	Realisasi	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100 %**	**100 %**	**565,312,700**	**545,147,487**
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Paket**	**6**	**12**	31,911,700	31,911,700
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Paket**	**12**	**24**	80,000,000	78,641,910
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**Paket**	**12**	**24**	42,864,300	41,346,700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik yang Disediakan	**Paket**	**-**	**-**	68,502,900	68,500,100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Paket**	**12**	**24**	68,502,900	68,500,100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	**Dokumen**	**12**	**24**	33,586,800	22,930,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Laporan**	**12**	**12**	308,447,000	301,817,077
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100 %**	**100 %**	**389,634,585**	**385,483,510**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**Unit**	**1**	**2**	309,112,910	284,119,600
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100 %**	**100 %**	**424,251,872**	**403,439,814**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Laporan**	**12**	**24**	5,000,000	5,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Laporan**	**12**	**24**	44,126,700	33,449,236
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**laporan**	**12**	**24**	375,125,172	364,990,578
	Pemeliharaan Barang Milik	**Terlaksananya Pemeliharaan**	**Persen**	**100 %**	**100 %**	**439,964,880**	**435,904,529**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran (Rp)	
				Target	Realisasi	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**Unit**	**12**	**24**	160,077,300	156,867,707
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Unit**	**1**	**1**	181,151,196	180,691,722
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Unit**	**12**	**24**	98,736,384	98,345,100
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Terlaksanannya koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah**	**Persen**	**100 %**	**100 %**	**1,790,571,900**	**1,759,874,874**
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	**Dokumen**	**3**	**6**	220,806,000	216,374,528
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	**Dokumen**	**3**	**6**	159,400,300	156,596,515
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	**Dokumen**	**3**	**6**	59,382,400	57,428,683
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	**Dokumen**	**0**	**3**	54,528,400	53,744,504
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	**Dokumen**	**3**	**6**	419,794,000	414,684,994
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	**Dokumen**	**3**	**6**	475,261,700	471,771,117
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	**Dokumen**	**12**	**12**	155,902,800	154,052,950
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	**Dokumen**	**12**	**24**	79,979,200	79,083,443
	Pembinaan Penganggaran Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti	**Orang**	**160**	**160**	165,517,100	156,138,140

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran (Rp)	
				Target	Realisasi	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023
	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persen**	**100 %**	**100 %**	**544,037,350**	**526,810,449**
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah yang baik, efektif dan efisien	**Dokumen**	**12**	**12**	75,803,600	75,424,129
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	**Dokumen**	**12**	**24**	25,000,000	24,007,700
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	**Dokumen**	**12**	**24**	128,750,550	121,811,220
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	**Dokumen**	**12**	**12**	29,935,100	29,677,000
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	**Dokumen**	**12**	**12**	109,548,000	109,159,700
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	**Orang**	**45**	**80**	175,000,100	166,730,700
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persen**	**100 %**	**100 %**	**549,096,825**	**389,355,665**
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	**Dokumen**	**12**	**4**	54,408,600	44,089,500

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran (Rp)	
				Target	Realisasi	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	**Dokumen**	**12**	**24**	57,499,800	50,669,000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	**Laporan**	**6**	**12**	266,188,625	128,618,365
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Taput	**Dokumen**	**12**	**24**	170,999,800	165,978,800
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persen**	**100 %**	**100 %**	**281,695,363,000**	**280,339,382,210**
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	**Laporan**	**12**	**9**	3,150,478,000	3,096,653,900
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	**Laporan**	**60**	**36**	265,428,271,000	265,428,271,000
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	**Laporan**	**12**	**6**	13,116,614,000	11,814,457,310
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	**Laporan**	**0**	**2**	-	-
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Laporan**	**0**	**2**	**227,254,000**	**226,453,415**
	Implementasi dan Pemeliharaan	Terlaksananya Implementasi dan	**Laporan**	**0**	**2**	144,231,500	142,789,157

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran (Rp)	
				Target	Realisasi	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023
	Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100 %**	**100 %**	**779,960,300**	**525,956,527**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	**Laporan**	**6**	**12**	113,754,400	88,035,203
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	**Laporan**	**12**	**24**	263,617,400	96,202,203
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Dokumen**	**0**	**0**	72,366,400	64,810,450
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	**Dokumen**	**12**	**24**	136,605,100	119,404,533
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	**Laporan**	**12**	**24**	105,781,100	85,609,774
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	**Orang**	**45**	**90**	87,835,900	71,894,364

2.2. Analisa Pelayanan Kinerja

Analisa kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Target pelayanan dalam dimaksud tertuang pada Tabel T-C.30 terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. **Kedudukan :**

    a. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
    b. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi Pengelolaan Keuangan.

2. **Tugas**

    a. menyusun kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
    b. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
    c. menyusun RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD;
    d. mengesahkan DPA-OPD;
    e. menetapkan SPD;
    f. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    g. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
    h. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
    i. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan pengelolaan ketatausahaan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Fungsi

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selaku Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan fungsinya berwenang untuk :

a. menyusun kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. menyusun kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
d. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
e. mengesahkan DPA dan DPPA SKPD;
f. menetapkan SPD;
g. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
h. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
i. melakukan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
j. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
k. melakukan pengelolaan ketatausahaan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki peran penting dalam perealisasian seluruh anggaran belanja yang telah di tampung pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara, dan secara simultan bertanggung jawabselaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daaerah (PPKD) yang menjadi bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), BKAD berperan dalam penyusunan APBD/P-APBD setiap tahunnya dimulai dari Penyusunan RKPD sampai pada penetapan Perda APBD/P-APBD berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara, hal ini cukup rumit karena harus mensinkronkan laporan keuangan, realisasi anggaran, aliran kas dan neraca terhadap realisasi fisik di lapangan.
2. Selain bertanggung jawab dalam hal penyusunan LKPD, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah juga bertanggung jawab dalam hal penatauahaan aset yang bersinggungan dengan masyarakat.

Metode *SWOT Analysis* adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi *strength* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *opportunity* (peluang) dan *threaths* (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

2.4. LINGKUNGAN INTERNAL

2.4.1 Kekuatan (*Strength*):

2.4.1.1 Hukum dan Perundangan :

Sejak terbitnya peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah membagi 2 BPKPAD menjadi 2 Badan yaitu BKAD dan BAPENDA. BKAD terdiri dari 3 Bidang Teknis dan 1 Sekretariat.

2.4.1.2 Sumber Daya Manusia :

Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang Strata-2 sebanyak 16 % Strata-1 sebanyak 56 % dan Diploma III sebanyak 16 %, dan lulusan SMA sebanyak 12% yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset daerah.

2.4.1.3 Sarana/Prasarana :

Tersedianya sistem informasi online yakni SIPD, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda), baik Simda Keuangan, Simda Gaji, Simda Barang Milik Daerah (BMD), Sistem Pembayaran CMS, menjadi faktor pendukung terhadap proses penyelesaian tugas tugas di tiap bidang, Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana;

2.4.1.4 Budaya Kerja;

Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi haruslah memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi misi dan tujuan yang sama. Budaya kerja harus disosialisasikan terus menerus agar dapat berjalan sesuai dengan harapan;

2.4.1.5 Kepemimpinan;

Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam memimpin organisasinya, kedua aspek tersebut akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada di dalamnya. Hal ini terkait dengan *human relation*, *delegation of authority* (pendelegasian wewenang) dan *divison of work* (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf yang sangat tinggi sebagai institusi baru, dapat mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

2.4.2 Kelemahan (Weaknesses):

2.4.2.1 Sumber Daya Manusia

dari sisi kuantitas, jumlah SDM pada BKAD belum memadai untuk mengimbangi volume kerja yang begitu besar. Sehingga masih dibutuhkan SDM yang kompeten dan dapat bekerja dengan baik serta berintegritas tinggi.

2.4.2.2 Sarana/Prasarana:

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah dibayar oleh Kemendagri, Masih memiliki kelemahan, belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penatausahaan keuangan di Pemerintah Daerah.

2.5. LINGKUNGAN EKSTERNAL PELUANG (OPPORTUNITY)

1). Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;

2). Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;

3). Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah;

4). Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;

5). Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para *stakeholder*, seperti Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Pusat dan Provinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik;

2.6. ANCAMAN (THREAT):

Sikap pesimistis masyarakat terhadap pemerintah akan mempengaruhi kondusifitas pemerintahan. Sehingga perlu dilakukan pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

2.7. STRATEGI UMUM KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATENTAPANULI UTARA:

2.7.1 Tahap Perencanaan;

1. Tahap ditentukannya target kerja dari sisi anggaran. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data yang lebih representatif dan akurat;
2. Tahap ditentukannya besaran anggaran untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tapanuli Utara untuk menunjang pembangunan yang dilaksanakan masing-masing OPD.

2.7.2 Tahap Pelaksanaan dan Koordinasi;

1. Kegiatan pengelolaan keuangan dimana seluruh OPD akan melaporkan setiap laporan/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk setiap realisasi kegiatan untuk selanjutnya akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Semester dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di akhir tahun anggaran.
2. Kegiatan pendataan, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di seluruh OPD di Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

2.7.3 Tahap Pengawasan;

Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas di lapangan, tetapi pengawasan pun dilakukan dengan pemeriksaan administratif. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/penyelewengan dalam penatausahaan keuangan dan asset

2.7.4 Tahap Evaluasi;

Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidentil, tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi lain, sehingga penatausahaan yang di awali dengan penganggaran dapat berjalan dengan baik;

Isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut :

a. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah KabupatenTapanuli Utara selama 9 (Sembilan) tahun berturut-turut.
b. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sistem perencanaan, pendataan, penilaian, penetapan, penatausahaan, pengelolaan keuangan, pembinaaan SDM, sistem pengawasan internal.

2.8. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran. Hal di atas bisa diperhatikan pada Tabel T-C.31 dan T-C.32 (terlampir).

2.9. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Disamping program/kegiatan rutin, program/kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah merupakan program/kegiatan yang menunjang pada kegiatan hasil rumusan perencanaan melalui Musrenbang yang dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Dimana Program/Kegiatan ini secara teknis ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, namun perencanaan, pelaporan dan pencairan dana dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Mengacu kepada visi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yaitu "Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Tujuan Wisata". Sektor Pariwisata Indonesia khususnya daerah sekitar Danau Toba menjadi perhatian serius dan utama Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Kabupaten sekitar Danau Toba. Presiden Jokowi berniat menggarap sektor pariwisata lebih serius dan menjadikannya sebagai suatu industri dan andalan pendapatan negara. Tanpa ditetapkan sebagai industri, sulit bagi sektor Pariwisata untuk berkembang, mendatangkan devisa untuk negara dan bersaing dengan negara lain yang mempunyai obyek pariwisata terbatas tetapi diurus dengan serius, seperti yang dilakukan oleh Malaysia, Singapore, Vietnam dan lain lain. Keseriusan Pemerintah untuk menjadikan industri Pariwisata sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara di masa depan merupakan niat yang harus didukung dan diharapkan dipersiapkan secara serius oleh Pemerintah, bukan hanya sekedar *lips service*. Target 20 juta wisatawan manca negara (wisman) hingga akhir tahun 2023 merupakan target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Jokowi dan untuk dapat mencapai target tersebut harus dibuat strategi yang handal dari sisi kebijakan, kesiapan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusianya.

Namun dengan adanya pandemi Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid'19) yang secara langsung mempengaruhi perekonomian seluruh negara di dunia, termasuk Negara republik Indonesia dan secara langsung mempengaruhi pula dengan perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara. Dimana dengan adanya covid'19, maka dana yang seharusnya diprioritaskan pada pembangunan fisik, akhirnya dialihkan pada penanganan para pasien yang terkena virus dimaksud.

Dari seluruh daerah wisata yang ditetapkan, Pemerintah menunjuk 10 daerah wisata unggulan dengan anggaran yang tidak sedikit (sekitar 20 trilyun), baik untuk pengembangan industri pariwisatanya sendiri maupun pembangunan infrastruktur penunjangnya, seperti bandara, pelabuhan laut/sungai/danau, jalan tol dan sebagainya.

Dalam mengantisipasi program Pemerintah Pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ikut mempersiapkan diri khususnya di bidang pariwisata dengan memperbaiki infrastruktur jalan di sekitar Danau Toba di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, pembenahan Bandara Silangit dan juga mempersiapkan Kota Muara sebagai kota wisata sebagai tempat penyelenggaraan event-event pariwisata seperti Festival Danau Toba (FDT) yang rencananya akan dilaksanakan setiap tahun. Dalam hal ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara juga

mempersiapkan diri, terutama dalam hal penganggaran dana yang ditampung untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

3.2 Tujuan & Sasaran

3.2.1 Tujuan

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada misinya yang bertujuan :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja
2. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan;

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang direncanakan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara merupakan lanjutan dari sasaran dari target Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2022 - 2024:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah;
3. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2024 adalah mengacu pada Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 - 2024. Program dan kegiatan dimaksud tertulis pada Tabel T-C.33 pada lampiran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 disertai dengan Indikator Kinerja dan Pagu Indikatifnya.

Rumusan rencana program/kegiatan dimaksud, disajikan pada tabel Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 (terlampir).

BAB V
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran dari Rancangan Awal Rencana Strategis (Ranwal Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara dimana pagu indikatif program dimaksud akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024.

Rencana Kerja Tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi staf pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

T-C.32

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 (terlampir).

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								**288.384.067.508,00**
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								**288.384.067.508,00**
5	02				KEUANGAN								**288.384.067.508,00**
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6.565.517.342,00
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								196.553.000,00
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	15 Dokumen	100 Persen	0
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	12 Laporan	100 Persen	196.553.000,00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.076.608.832,00
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya administrasi keuangan	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	30 Orang/bulan	100 Persen	4.617.476.132,00

								perangkat daerah sesuai target					
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai target	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	5000 Dokumen	100 Persen	453.133.200,00
5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai target	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	0
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai target	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	100 Persen	5.999.500,00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								591.902.005,00
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen	12 Paket	100 Persen	27.811.300,00

5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen	12 Paket	100 Persen	81.839.925,00
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen	12 Paket	100 Persen	33.568.680,00
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen	12 Paket	100 Persen	121.268.300,00
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen	12 Dokumen	100 Persen	14.050.800,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen	12 Laporan	100 Persen	313.363.000,00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								29.843.000,00
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen	11 Unit	100 Persen	29.843.000,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								356.988.976,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen	12 Laporan	100 Persen	4.565.600,00
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen	12 Laporan	100 Persen	62.436.176,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen	12 Laporan	100 Persen	289.987.200,00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								313.621.529,00
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen	8 Unit	100 Persen	183.331.300,00
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen	1 Unit	100 Persen	85.225.829,00

								Daerah					
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen	1 Unit	100 Persen	45.064.400,00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								281.522.636.391,00
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								1.297.227.000,00
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Persentase Pengelolaan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen 100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	141.135.000,00
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen 100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	155.604.000,00
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								

						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi PemerintahPersentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen100 Persen	45 Dokumen	100 Persen	50.000.000,00
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD							
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen 100 Persen	45 Dokumen	100 Persen	50.000.000,00
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD							
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen 100 Persen	6 Dokumen	100 Persen	370.630.000,00
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen 100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	375.058.000,00

5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran							
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen 100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	144.800.000,00
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah							
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen 100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	10.000.000,00
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi PemerintahPersentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen100 Persen	180 Orang	100 Persen	0
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							151.211.720,00
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah							
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen 100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	10.010.520,00

						Sistem Akuntansi Pemerintah							
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen 100 Persen	225 Dokumen	100 Persen	40.000.000,00
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank								
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen 100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	0
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait								
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen 100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	0
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								

						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen 100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	0
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi PemerintahPersentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen100 Persen	160 Orang	100 Persen	101.201.200,00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							220.116.500,00
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban							
						-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	-	4 Dokumen	-	0
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran							
						-	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	-	6 Laporan	-	30.117.000,00
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							
						-	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	-	3 Laporan	-	64.999.800,00
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							

						-	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	-	1 Dokumen	-	124.999.700,00
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah								
						-	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	-	1 Dokumen	-	0
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								279.744.122.171,00
5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah								
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksanya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 persen 100 Persen	12 Laporan	100 Persen	3.096.653.900,00
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan								
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksanya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 Persen	12 Laporan	100 Persen	273.116.310.900,00
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak								

						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksanya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 Persen	12 Laporan	100 Persen	3.531.157.371,00
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota							
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksanya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 Persen	1 Laporan	100 Persen	0
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							109.959.000,00
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah							
						Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Htgalung Siwaluompo	100 Persen 100 persen	1 Dokumen	100 Persen	109.959.000,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							295.913.775,00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							295.913.775,00
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah							
						-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	37.499.900,00

5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah							
						-	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	67.978.050,00
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah							
						-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	14.997.950,00
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah							
						-	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	45 Dokumen	-	79.278.000,00
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							
						-	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	58.159.900,00
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	45 Orang	-	37.999.975,00
												TOTAL	**288.384.067.508,00**

KEPALA BADAN,

KIJO SINAGA, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730111 199503 1 001

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2024

TARUTUNG
2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan K/L yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja K/L), dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra dan Renja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya RPJM ini menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya sebagai dasar Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA) SKPD berupaya untuk terus melakukan pembenahan agar sesuai dengan tuntutan lingkungan dalam berbagai perubahan yang terjadi yang sejalan dengan tuntunan masyarakat terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan terciptanya good governance di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 ini disusun untuk mewujudkan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2024 seperti yang tertuang pada Rencana Strategis BPBD, yaitu **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG CEPAT DAN TANGGAP AKAN BENCANA" .**

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2022, menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ini disusun atas berbagai Landasan Hukum, yaitu:

1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4286);
2. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
23. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMN dan Renstra K/L 2010-2014;
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No 12 Tahun 2008 tentang Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2024 dalam prinsip tata pemerintahan yang baik.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 adalah :

a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf BPBD Kabupaten Tapanuli Utara dalam menentukan prioritas program kegiatan.
b. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
c. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab I Pendahuluan

Merupakan Penjelasan, Latar Belakang Penulisan, Landasan Hukum Yang Memuat Maksud Dan Tujuan Penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Yang Memuat Informasi Tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun Lalu Serta Capaian Renstra SKPD.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Menjelaskan Mengenai Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD, Serta Program Dan Kegiatan.

Bab IV Penutup

Merupakan Gambaran Kondisi Yang Diharapkan Untuk Pencapaian Pelaksanaan Renja Tahun 2024

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan tolak ukur tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 yang didasarkan pada hasil pelaksanaan terhadap kinerja seluruh program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan dan merupakan hasil suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja masukan, keluaran, hasil dan manfaat yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (terlampir kolom 6 dan 8) dan perkiraan Tahun berjalan 2024 diharapkan tidak berbeda dengan tahun 2024 dengan target pencapaian pelaksanaan 100 %. Hasil-hasil yang telah dicapai pada kegiatan Tahun 2023 merujuk kepada Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, OPD BPBD mengalami perubahan terutama pada program dan urusan.

Secara umum rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengn Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Dearah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Utara

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**		**100 %**			**100 %**		
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi**	**100 %**		**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
1.	Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**9 Dokumen**	**6 Dokumen**	**9 Dokumen**	**6 Dokumen**	**100 %**	**6 Dokumen**	**15**	**78**
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikthtisar Realisasi Kinerja SKPD	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**100 %**	**12 Bulan**	**4**	**72**
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi kinerja	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**100 %**	**12 Laporan**	**24**	**100**

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Tahun**		**100 %**		**100 %**	**1 Tahun**		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**	**12 Bulan**	**24**	**100**
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**	**12 Bulan**	**24**	**100**
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**12 Bulan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100 %**	**1 Laporan**	**2 Laporan**	**90**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60 bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**	**12 Bulan**	**24**	
1.	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**100 %**	**1 Paket**	**2 Paket**	**100**
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**100 %**	**1 Paket**	**2 Paket**	**99**
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**100 %**	**1 Paket**	**2 Paket**	**100**
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**100 %**	**1 Paket**	**2 Paket**	**100**
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**12 Bulan**	**50 Dokumen**	**50 Dokumen**	**50 Dokumen**	**100 %**	**50 Dokumen**	**100 Dokumen**	**91**
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100 %**	**1 Laporan**	**2 Laporan**	**98**

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7 Unit**	**7 Unit**	**7 Unit**	**7 Unit**	**100 %**	**7 Unit**	**7 Unit**	**7 Unit**
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**3 Unit**	**3 Unit**	**3 Unit**	**3 Unit**	**100 %**	**3 Unit**	**3 Unit**	**3 Unit**
2.	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin laiinya yang disediakan	**4 unit**	**4 unit**	**4 unit**	**4 unit**	**100 %**	**4 unit**	**4 unit**	**4 unit**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100**
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100 %**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**87**
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan Pemeliharaan**								
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	**8 Unit**	**8 Unit**	**8 Unit**	**8 Unit**	**100 %**	**8 Unit**	**8 Unit**	**97**

2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	**6 Unit**	**6 Unit**	**6 Unit**	**6 Unit**	**100 %**	**6 Unit**	**6 Unit**	**97**
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	**1 Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**100 %**	**1 Unit**	**1 Unit**	**100**
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**1 Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**100 %**	**1 Unit**	**1 Unit**	**100**
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**								
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana/Kota	Jumlah Dokumen Ksjisn Resiko Bencana yang dilegalisasi	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100 %**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100 %**
1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	**18 papan rambu kebencanaan**	**18 papan rambu kebencanaan**	**18 papan rambu kebencanaan**	**18 papan rambu kebencanaan**	**100 %**	**18 papan rambu kebencanaan**	**18 papan rambu kebencanaan**	**100 %**
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**								

1.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	**100 %**	2 Unit	2 Unit	100
2.	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	**100 %**	6 Kawasan	6 Kawasan	100
3.	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**100 %**	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
4.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personal TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerial	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	**100 %**	10 orang	10 orang	100
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	**100 %**	2 laporan	2 laporan	100
1.	Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**	12 Bulan	12 Bulan	100
	Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	**100 %**	5 Orang	5 Orang	100

	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kaabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2000 goni	2000 goni	2000 goni	2000 goni	**100 %**	2000 goni	2000 goni	100
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi system komando penanganan darurat bencana	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	**100 %**	1 laporan	1 laporan	100
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	**100 %**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	100
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	**100 %**	12 dokumen	12 dokumen	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Capaian kinerja pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014- 2019 dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

Adapun pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disajikan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan Dokumen Penanggulangan Bencana Daerah	0,5	-	-	-	-
2.	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	0,10	0,10	53 Paket	18 Paket	15 Paket
3.	Cakupan Daerah Siaga Bencana	520	472	127	127	244
4.	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dini dan penanggulangan bencana	10.712	4.100	9.400	2.000	2.000

5.	Cakupan masyarakat yang mendapatpengetahuan kebencanaan	520	472	472	-	3940
6.	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	-	-	-	-	140.143
7.	Respone time mencapai lokasi bencana	1x24 Jam	1x24 Jam	1x24 Jam	1x24 Jam	1x24 Jam
8.	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai response time yang telah ditentukan	0,10	0,08		0,15	0,39
9.	Ketersediaan peta rawan bencana Kabupaten (Ada/Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.	Jumlah Kejadian Bencana					
	a. Gempa Bumi	-	-	-	-	1
	b. Banjir	22	9	8	8	3
	c. Tanah Longsor	150	125	71	93	144
	d. Angin Puting Beliung	3	2	3	10	14
	e. Kebakaran Hutan	-	5	-	4	7
	f. Bencana Lainnya	-	2	4	3	20
11.	Nilai Kerugian Bencana					
	a. Jumlah korban meninggal/hilang (jiwa)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	b. Jumlah kerugian materi (Rp)	-	-	-	14.850.000.000	28.950.000.000
12.	Ketersediaan fasilitas pasca bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13.	Persentase tim penanggulangan bencana terdidik	10	10	10	10	10

Data Bencana Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018 - 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian Bencana				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kecamatan Tarutung	50	34	32	42	60
2	Kecamatan Sipoholon	11	3	4	6	13
3	Kecamatan Pagaran	7	4	1	8	8
4	Kecamatan Siborongborong	19	25	13	14	15
5	Kecamatan Siatas Barita	9	8	9	6	18
6	Kecamatan Adiankoting	9	3	2	2	5
7	Kecamatan Pahae Julu	8	16	3	5	10
8	Kecamatan Pahae Jae	18	3	4	8	11
9	Kecamatan Simangumban	3	-	-	3	8
10	Kecamatan Purbatua	6	10	1	5	3
11	Kecamatan Parmonangan	8	7	2	5	6
12	Kecamatan Sipahutar	8	9	3	1	5
13	Kecamatan Pangaribuan	5	6	2	6	7
14	Kecamatan Garoga	6	5	3	6	3
15	Kecamatan Muara	8	3	5	1	17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD adalah:

1. Minimnya anggaran yang tersedia dalam penanggulangan bencana;
2. Kurangnya sarana dan prasarana dan jumlah SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Banyaknya Laporan Kejadian Bencana yang tidak bisa ditanggulangi;

4. Rendahnya kepedulian dan pemahaman Masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD adalah:

1. Keterbatasan dana/Anggaran yang dialokasikan belum memadai.
2. Sumber daya aparatur belum mencukupi
3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana jika terjadi.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung penanggulangan bencana.
5. Letak Geografis daerah Kabupaten Tapanuli Utara sendiri yang merupakan kawasan yang sangat rawan akan bencana baik itu bencana gempa tektonik, longsor dan banjir

Secara keseluruhan program dan kegiatan yang diselenggarakan melalui tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui RPJMD Kab. Tap. Utara Tahun 2019 - 2024 dan capaian program Nasional/Internasional.

Adapun tantangan yang dihadapi dan peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD adalah :

Tantangan yang dihadapi:

1. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke prefentif berupa pengurangan bencana yang terkandung dalam UU Nomor 24 Tahun 2008 BNPB sebagai Lembaga yang diamanatkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan fungsi merumuskan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisiensi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana , terpadu dan menyeluruh masih berusia sangat muda apalagi BPBD di daerah-daerah;

2. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan desa;
3. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
4. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
5. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan Penaggulangan bencana.

sedangkan Peluang yang kita rasakan dengan terbentuknya BPBD di Kab. Tap. Utara terkait dengan UU No. 24 Tahun 2008 sebagai dasar Hukum yang menjamin tertanganninya isu penanggulangan bencana dan isu terkait lainnya, selain itu dengan kehadiran BNPB dan BPBD, penganggulangan bencana akan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, terpaduh, menyeluruh dan efektif-efisien. Peluang selanjutnya adalah semakin bertumbuhnya perhatian dunia pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecendrungan perubahan iklim global yang dampaknya semakin memburuk.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD dengan rencana kebutuhan dikaitkan dengan program/kegiatan BPBD perencanaanya dilakukan dengan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara dan dilakukan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang tangtangan dan kendala yang kemungkinan akan timbul. Perencanaan strategis adalah integritas antara keahlian sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan pemanfaatan kondisi lingkungan yang

strategis dengan kata lain dengan keberadaan geografis Kabupaten Tapanuli Utara yang sangat rentan akan bencana maka sangat diperlukan pembenahan sarana dan prasarana sehingga akan memungkinkan meminimalis dampak yang terjadi. Dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan usulan BPBD setelah penentapan RKPD tidak begitu terjadi perbedaan semua usulan terakomudir di dalam rancangan awal RKPD tersebut.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***14***
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.182.666.458	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.182.666.458	
2	Program Penanggulangan Bencana	Tapanuli Utara		100%	880.970.770	Program Penanggulangan Bencana	Tapanuli Utara		100%	880.970.770	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, adalah merupakan visi, misi dan agenda harapan atau keinginan (Nawa Cita) pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya Indonesia Sejahtera, demokratis dan berkeadilan yang menjadi Visi Indonesia . Prioritas Pembangunan Nasional adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui :

√ Mekanisme Ekonomi

√ Program pro rakyat (pro poor dan pro job)

√ Program pendukung pembangunan berkelanjutan (pro enviroment), penurunan emisi gas rumah kaca, pengendalian pencemaran, penurunan laju kerusakan.

√ Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

√ Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan

Tugas pokok dan fungsi BPBD sangat terkait dengan kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja SKPD

Tujuan Renja SKPD adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun atau waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menentapkan tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pelayanan administrasi Kantor
b. Meningkatkan Sarana Prasarana Kantor
c. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur
d. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehingga menghasilkan produk penanggulangan bencana yang berkualitas.
e. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintergrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana

f. Mengembangkan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran Renja SKPD

Sasaran Renja SKPD adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan . Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran sebagai berikut ;

a. Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
b. Meningkatnya fasilitas pendukung sarana prasarana kantor bagi aparatur
c. Meningkatnya kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas kantor
d. Meningkatnya informasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
e. Meningkatnya sistem koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana
f. Meningkatnya sistem informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel.

3.3. Program dan Kegiatan

a. Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan ditentukan berdasarkan metode strategis untuk mendukung program Internasional dan Nasional yang terkait. Program merupakan penjabaran dari visi dan misi serta pilihan tindakan sesuai dengan menejemen risiko, visi penanggulangan bencana secara jelas menyebutkan cita-cita untuk menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi bencana. Pertimbangan program didasarkan pada tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana.

Terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk. Mewujudkan pengurangan resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran serta membangun komitmen bersama Dinas/Instansi, Kantor dan Badan Pemerintah.

Ditingkat nasional ketertarikan berbagai pihak pada isu Penanggulangan resiko bencana ini terwujud dalam terbentuknya Platform Nasional penanggulangan resiko bencana dan

forum-forum serupa di daerah. Dengan adanya platform dan forum-forum ini, penanggulangan bencana dan resiko bencana menjadi urusan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan Perguruan Tinggi hal ini tentunya akan semakin memperkuat pelaksanaan pengurangan resiko bencana.

b. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rencana kerja BPBD dalam mencapai sasaran memiliki 2 program, 8 Kegiatan dan tertuang melalui 25 sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah

   Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

   Administrasi Umum Perangkat Daerah

   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   - Penyediaan Jasa surat menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kenderaann perorangan Dinas atau kenderaan dinas jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penanggulangan Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP)
							4	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	**05**				**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**		Tapanuli Utara	100%	***4.063.637.228***				***3.813.232.742***
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang yang tertangani**	Tapanuli Utara	100%	***3.182.666.458***			100%	***3.413.540.742***
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**TerlaksananyaPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tapanuli Utara	100%	**41.007.300**			100%	***29.479.325***
1	05	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Terlaksananya pendukung untuk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tapanuli Utara	1 Dok	4.772.200	DAU		1 Dok	***4.772.050***

1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Belanja SKPD	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapanuli Utara	1 Dok	4.246.600	DAU		1 Dok	***4.246.475***
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan Evaluasi kinerja	Tapanuli Utara	1 Dok	31.988.500	DAU		1 Dok	***20.460.800***
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun**	**Tapanuli Utara**	**100%**	**2.368.334.378**			100%	***2.727.974.836***
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tapanuli Utara	12 bln	2.321.987.278	DAU		12 bln	***2.682.127.636***
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan tersedianya jasa administrasi keuangan	Tapanuli Utara	12 bln	41.347.200	DAU		12 bln	***41.347.200***
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapanuli Utara	12 bln	4.999.900	DAU		12 bln	***4.500.000***
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**TerlaksananyaAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tapanuli Utara	12 bln	87.999.900	DAU		-	**-**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Tersedianya pakaian kerja petugas kebersihan (PHL)	Tapanuli Utara	12 bln	87.999.900	DAU		-	**-**
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**TerlaksanayaAdministrasi Umum Perangkat Daerah**	Tapanuli Utara	100%	301.664.800	DAU		100%	***178.390.400***
1	**05**	**01**	**2.06**	**01**	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapanuli Utara	12 Bulan	10.186.100	DAU		12 Bulan	***9.601.500***

1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Tapanuli Utara	12 Bulan	20.477.600	DAU		12 Bulan	***14.999.300***
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan	Tapanuli Utara	12 Bulan	10.081.900	DAU		12 Bulan	***5.985.000***
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan	Tapanuli Utara	12 Bulan	22.015.800	DAU		12 Bulan	***16.589.600***
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tapanuli Utara	12 Bulan	19.996.400	DAU		12 Bulan	***16.989.000***
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Junmlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapanuli Utara	12 Bulan	218.907.000	DAU		12 Bulan	***114.226.000***
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tapanuli Utara**	**100%**	**37.908.800**	DAU	-	-	**-**
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tapanuli Utara	100 %	9.701.400	DAU	-	-	**-**
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tapanuli Utara**	**100%**	**252.146.300**	DAU			***251.818.056***
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Sura Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tapanuli Utara	12 Bulan	2.000.000	DAU		12 Bulan	***1.200.000***
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumer Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumer Daya Air dan Listrik	Tapanuli Utara	12 Bulan	32.159.100	DAU		12 Bulan	***32.199.000***

1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapanuli Utara	12 Bulan	217.987,200	DAU		12 Bulan	***218.419.056***
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tapanuli Utara**	**100 %**	**181.604.800**	DAU		**100 %**	***225.878.125***
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Tapanuli Utara	8 Unit	81.042.500	DAU		8 Unit	*189.583.700*
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Tapanuli Utara	6 Unit	26.230.800	DAU		6 Unit	***21.200.725***
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunnan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Tapanuli Utara	1 Unit	6.058.100	DAU	-	-	-
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Tapanuli Utara	1 Unit	29.931.500	DAU		1 Unit	***15.093.700***
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		**Tapanuli Utara**	**100 %**	**880.970.770**	DAU		**100 %**	***399.692.000***
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota**	**Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Tapanuli Utara**	**100 %**	**507.948.9**	DAU		**100 %**	***175.000.000***
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegaslisasi	Tapanuli Utara	100 %	513.049.000	DAU	-	-	-

1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang tinggal di daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Tapanuli Utara	100 %	41.819.900	DAU	-	-	-
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Terlaksananya Peningkatan Kesiapsiagan Terhadap Bencana**	**Tapanuli Utara**	**100 %**	**227.932.670**	DAU		**100 %**	***175.000.000***
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Tapanuli Utara	100 %	5.000.000	DAU			-
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untukPencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tapanuli Utara	6 Desa	156.998.500	DAU		9 Desa	*75.000.000*
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Tapanuli Utara	100 %	-	DAU		100 %	*100.000.000*
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kaupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kaupaten/Kota	Tapanuli Utara	100 %	62.934.170	DAU	-	-	-
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Tapanuli Utara	100 %	3.000.000	DAU			

1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Terlaksananya Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Tapanuli Utara**	**100 %**	**95.169.200**	DAU			
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Tapanuli Utara	100 %	5.000.000	DAU			
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Tapanuli Utara	12 Dokumen	76.869.200	DAU		12 Dokumen	*76.000.000*
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Perjenis Kejadian Bencana	Tapanuli Utara	12 Bulan	3.000.000	DAU		12 Bulan	*10.000.000*
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Koran Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tapanuli Utara	12 Bulan	9.000.000	DAU		12 Bulan	*34.692.000*
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komandan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Tapanuli Utara	12 Bulan	1.300.000	DAU		-	-
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah Data dan Informasi Kebencanaaan**	**Tapanuli Utara**	**100 %**	**3.000.000**	DAU		**100 %**	***104.000.000***
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Tapanuli Utara	12 Dokumen	3.000.000	DAU		12 Dokumen	*2.400.000*
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Tapanuli Utara	-	-	DAU		12 Dokumen	*20.000.000*

1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehailitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Tapanuli Utara	-	-	DAU		70 Orang	*81.600.000*

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana kerja dan pendaanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2024 dapat dijelaskan pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
							Tahun 2024
Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif	**Meningkatkan Akuntabilitasi Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	100 %	3.302.807.998
			Kegiatan: **Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6 Dok**	**6 Dok**	**29.479.325**
			Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**6 Dok**	**6 Dok**	**4.772.050**
			Sub Kegiatan :	Jumlah Laporan Capaian	**2 Lap**	**2 Lap**	**4.246.475**

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikthtisar Realisasi Kinerja SKPD			
			Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja	12 Lap	12 Lap	20.460.000
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**2.617.242.092**
			Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	2.571.394.892
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70 Orang	70 Orang	41.347.200
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	70 Orang	70 Orang	4.500.000
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**205.747.000**
			Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	9.601.500
			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	14.999.300
			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan dan rumah tangga yang	12 Bulan	12 Bulan	5.235.000

			Rumah Tangga	disediakan			
			Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	16.631.200
			Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	16.989.000
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	142.291.000
			Sub Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**251.818.056**
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1 Lap	1.200.000
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	12 Lap	32.199.000
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Lap	12 Lap	218.419.056
			Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan Pemeliharaan**	**100 %**	**100 %**	**198.521.525**
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	8 Unit	162.227.100

			pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya			
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	21.200.725
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	15.093.700
	Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana	**Respon Time (1x24 Jam)**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana**	**100 %**	**100 %**	**241.092.000**
		Persentase bencana yang ditangani (88 Persen)	**Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			**75.000.000**
		Jumlah Desa Tangguh Bencana (9 Desa)	Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	9 Desa	9 Desa	75.000.000
			Sub Kegiatan : Pelatihan Pencengahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan Pencengahan dan Mitigasi Bencana	15 Kecamatan	15 Kecamatan	0
			Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling	**100 %**	**100 %**	**143.692.000**

				lama 1X24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen LAporan Kaji Cepat			
			Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	82.000.000
			Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5 Orang	5 Orang	4.000.000
			Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Bulan	12 Bulan	57.692.000
			Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**			22.400.000
			Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	1Dokumen	20.000.000
			Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan			2.400.000

			Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya jumlah aparatur BPBD dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan teknis didalam Menyusun dokumen kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana (R3P)	70 Orang	70 Orang	0

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara periode tahun 2020-2024 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam perjalanannya dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana agar indikator yang ditetapkan dapat dicapai dengan mengukur kapasitas yang dimiliki serta target yang ditetapkan dapat tercapai dan tertuju tepat bagi penerima manfaat yang seharusnya.

Demikian Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
KEPALA PELAKSANA,

BONGGAS FREDDY PASARIBU, S.Pt
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196711211998031002

2024

DINAS PARIWISATA

KABUPATEN TAPANULI UTARA

PERUBAHAN RENCANA KERJA KERJA (RENJA)















DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI RENJA DINAS PARIWISATA KAB.TAP. UTARA TAHUN 2023 8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kab. Tap. Utara 9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata 11
a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11
b. Permasalahan/Hambatan 12
c. Dampak Program Dinas Pariwisata Kab. Tap. Utara terhadap Visi dan Misi Bupati Tapanuli Utara 13
d. Isu Strategis 13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 18
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kab. Tap. Utara 20
3.3 Program dan Kegiatan 21
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN

KATA PENGANTAR



Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perubahan setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD maka Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2024 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2024.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah, disusun dengan me mpertimbangkan sasaran strategis Perangkat Daerah dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2024. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun 2024.

KEPALA DINA S PARIWISATA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

SASMA H. SITUMORANG, S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 197704251997111001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan perencanaan kerja. Perencanaan terdiri dari dua elemen penting, yaitu *sasaran (goals)* dan rencana itu sendiri *(plan)*. Dalam menetapkan sasaran, masyarakat sebagai stake holder diharapkan menjadi pemain utama. Partisipasi masyarakat dan kemampuan untuk menangkap dan menerjemahkan tuntutan publik menjadi faktor penting dalam proses perencanaan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2024, yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Ruang lingkup Perubahan Rencana Kerja adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai. Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024, yaitu

"Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung SDM yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata", pencapaiannya didukung dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan
4. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan

5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*

Selain menjadi salah satu Visi Kabupaten Tapanuli Utara, dari kedelapan misi di atas, yang erat kaitannya dengan Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara adalah misi ke lima.

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pariwisata mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang secara rinci pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara nomor : 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Perubahan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang- undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, jo Undang - undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, jo Undang - undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023;
9. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh ASN dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara ini dimaksudkan untuk membuat Perubahan Rencana Kerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 dan RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara 2020–2024 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD;
2. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di bidang Pariwisata Tahun 2024;
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun 2024;
4. Untuk memadukan gerak antara pemerintah, pelaku pariwisata, pelaku seni dan budaya serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara dan menjelaskan kedudukan Rancangan Awal Renja terhadap dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kondisi Fisik dan Keuangan sampai Triwulan II Tahun 2024

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kondisi tahun lalu

3.1. Analisis Pelayanan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

Mengemukakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

3.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara.

3.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

3.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.5. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.6. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

3.7. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TAPANULI UTARA TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitaskinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatanyang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian programRenstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untukmengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul sertatindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada Perubahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Triwulan II Tahun 2024 dengan pagu dana sebesar Rp. 14,738,235,372. (empat belas miliar tujuh ratud tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dialokasi untuk pelaksanaan 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2,355,766,741 (15,98%). Rangkuman tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 disajikan terlampir sebagaimana dalam Tabel 2.1 berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja

Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5	**BELANJA DAERAH**	**14,738,235,372.00**	**2,355,766,741.00**	**15.98**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**7,146,503,172.00**	**2,355,766,741.00**	**32.96**
5.1.01	Belanja Pegawai	3,781,757,613.00	1,785,567,514.00	47.22
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,364,745,559.00	570,199,227.00	16.95
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**7,146,503,172.00**	**2,355,766,741.00**	**32.96**
5.2	**BELANJA MODAL**	**7,591,732,200.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	469,894,000.00	0.00	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,771,838,200.00	0.00	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4,350,000,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**7,591,732,200.00**	**0.00**	**0.00**
	JUMLAH BELANJA	**14,738,235,372.00**	**2,355,766,741.00**	**15.98**

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan Urusan Pilihan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman kepada Renstra Tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target, sasaran tahunan dan pencapaiannya dengan cara

mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja, outcome yang dikaitkan dengan capaian sasaran.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Mancanegara	1.Bahan Promosi	450	550	650	750	850	0	0	0	235	-	0	0	0	31,33	-
			2.Partisipasi Event Pariwisata															
			3.Pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata															
2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah Wisatawan Nusantara	1.Bahan Promosi	157.550	162.450	142.700	143.600	144.500	141.350	142.356	139.950	180.000	-	89,72%	87,63%	98,07%	125,35%	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 4 bidang dan 1 sekretariat.

a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

- Sekretariat terdiri atas :
  - Sekretaris
  - Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
- Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pemasaran Pariwisata
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
  - Kepala Sub Bidang Riset, Edukasi, Pengambangan dan Infrastuktur
  - Kepala Sub Bidang Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah

Setiap bidang memiliki indikator dan target kinerja yang spesifik sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan di masing-masing bidang, Dimana kinerja masing-masing bidang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara. Sasaran tersebut sesuai dengan arah kebijakan kepariwisataan untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisata dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah.

b. Permasalahan/Hambatan

Dalam upaya pengembangan pariwisata ditemukan berbagai hambatan/permasalahan yang timbul, diantaranya :

1. Terbatasnya promosi dan pemasaran pariwisata ke daerah/negara yang potensial bagi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Belum tersedianya Master Plan, DED atau RAB untuk melaksanakan pembangunan di obyek daya taris Wisata/ destinasi wisata.
3. Perlunya dilakukan evaluasi berkala bagi pengelola Daya Tarik Wisata agar kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, sarana pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya lebih meningkat kapasitasnya.

4. Belum optimalnya fasilitasi dan wadah yang cocok serta belum memiliki zona kreatif bagi para pelaku ekonomi kreatif di wilayah dalam rangka penguatan pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Berbagai Data yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata belum dikelola secara sistematis sehingga ketersediaan dan akurasi data tidak maksimal.
6. Kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, transportasi, dll.) yang belum memadai.
7. Kurangnya daya dukung infrastruktur menuju destinasi wisata
8. Pengembangan sektor pariwisata belum terintegrasi dengan dengan sektor lain
9. Belum adanya tata kelola obyek wisata yang jelas dan sesuai dengan karakterisik masingmasing obyek wisata termasuk agenda wisata yang terencana
10. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru
11. Masih kurangnya promosi pariwisata, baik wisata alam maupun buatan
12. Belum optimalnya kapasitas dan profesionalisme tenaga kerja pariwisata

c. Dampak Program Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Pencapaian Visi/Misi Bupati Tapanuli Utara

Visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dapat dirumuskan, yaitu “Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata”. Visi tersebut akan diwujudkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbsis pertanian dan sumberdaya lokal
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja,pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government;

9.

d. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, medesak dan menentukan.

1. Belum berkembangnya usaha Pariwisata yang dapat menunjang perkembangan destinasi Pariwisata daerah
2. Peningkatan daya saing produk wisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesilibitas berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan Industri pariwisata masih dianggap kurang.
3. Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha –usaha ekonomi pariwisata skala Mikro, Kecil dan Menengah masih belum berjalan dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan
4. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan dibidang Pariwisata
6. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya daerah untuk mengangkat citra budaya daerah. Hal ini disebabkan masih kurangnya apresiasi karya seni budaya daerah
7. Belum optimalnya pengenalan, informasi dan promosi objek wisata
8. Belum adanya tata kelola obyek wisata yang jelas dan sesuai dengan karakterisik masing masing obyek wisata termasuk agenda wisata yang terencana
9. Peningkatan Kemitraan atau kerjasama pariwisata dengan pihak/daerah lain.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Arah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

I. BIDANG PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
- Pengelolaan Destinasi Pariwisata

- Perencanaan Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Destinasi Pariwisata

II. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- Melaksanakan berbagai jenis penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan kepariwisataan kepada masyarakat selaku pelaku usaha kepariwisataan
- Menjalin kerja sama atau bermitra dengan lembaga kepariwisataan untuk melaksanakan pengembangan kepariwisataan maupun pembuatan paket-paket wisata.
- Memberdayakan masyarakat dalam usaha pengembangan kepariwisataan di Tapanuli Utara, baik dengan seniman atau budayawan yang dijadikan sebagai guide maupun sebagai Pelaku Story legenda/mitos
- Melaksanakan survey dan peninjauan lapangan terhadap lokasi-lokasi wisata baru yang perlu dibenahi dan dikembangkan
- Melaksanakan pendataan terhadap jumlah pengunjung ke daerah-daerah wisata maupun ke penginapan-penginapan yang ada di lokasi wisata

III. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

- Menyelenggarakan promosi dan pemasaran wisata melalui berbagai kegiatan dan media, antara lain: pameran, mass media/eletronik, penyebaran brosur, booklet, facebook dan website
- Mengikuti Pameran Pariwisata, baik di dalam dan di luar daerah
- Melaksanakan berbagai event atau kegiatan yang sifatnya promosi dan publikasi wisata

PERMASALAHAN

1. Masih banyak daya tarik wisata dan fasilitas pendukung yang belum berkualitas/berstandar pelayanan prima;
2. Kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, transportasi, dll.) yang belum memadai
3. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai media promosi dan informasi pariwisata, sebagai salah satu strategi pemasaran pariwisata
4. Belum memadainya kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, sarana pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya

8. Kelembagaan pariwisata yang terkelola dengan baik dan berkelanjutan belum optimal, terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatanasih rendahnya sadar wisata dan penerapan sapta pesona oleh pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata maupun masyarakat tanggung jawab tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya.

PRIORITAS PENANGANAN

I. BIDANG PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

- Agar menganggarkan kegiatan untuk pengembangan lokasi-lokasi potensi wisata agar menjadi daerah atau lokasi tujuan wisata bagi para wisatawan.
- Melibatkan masyarakat khususnya yang berada di sekitar daerah wisata agar bersinergi dengan pemerintah untuk mengembangkan daerah wisata tersebut.
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai ujung tombak dalam menyambut dan memberi pelayanan yang ramah dan baik kepada para pengunjung
- Menjalin kerja sama dengan lembaga kepariwisataan untuk melaksanakan paket-paket wisata.

II. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- Menjadikan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepariwisataan sebagai materi kepada masyarakat dalam upaya menjadi Raja bagi para pengunjung di lokasi objek Wisata.
- Mengadakan survey dan pendataan ke hotel-hotel yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara mengenai jumlah wisatawan yang berkunjung maupun menginap di Tapanuli Utara.
- Melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha kepariwisataan di Tapanuli Utara
- Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dalam pengembangan bakat dan kemampuan dalam hal seni suara, lukis ataupun seni lainnya melalui festival atau lomba.

III. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

- Menyelenggarakan promosi dan pemasaran wisata melalui berbagai kegiatan dan media, antara lain: pameran, mass media/eletronik, penyebaran brosur, booklet dan website.

- Mengikuti Pameran Pariwisata, baik di dalam maupun di luar daerah
- Membuka Website dan Facebook Pariwisata guna publikasi objek dan tujuan wisata di Tapanuli Utara

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan yang baik mempunyai tujuan, sasaran dan target yang jelas untuk periode tertentu. Dalam perencanaan seringkali mengalami keterbatasan tertentu baik dari sisi dana, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam perumusan

tujuan, sasaran, program dan kegiatan PD harus memperhatikan kondisi umum daerah, potensi yang dimiliki dan permasalahan pokok yang dihadapi daerah dan PD dengan menyusun prioritas-prioritas tertentu.

Menurut SPPN 2004 ditetapkan 5 dokumen perencanaan pembangunan yang perlu disusun oleh perencana baik di tingkat nasional maupun daerah yaitu:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
c. Rencana Strategis
d. Perubahan Rencana Kerja Pemerintahe. Perubahan Rencana Kerja Institusi (Renja)

Renja PD merupakan rencana tahunan (annual planning) yang bersifat operasional yang mirip dengan RKPD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD sedangkan Renja PD merupakan penjabaran Renstra PD. Dalam SPPN dijelaskan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional dilakukan dengan menciptakan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang disusun pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari RPJP hingga Renja PD.

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, yaitu:

Visi Indonesia Tahun 2019 – 2024 terdapat 5 visi :

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Undang investasi seluas – luasnya untuk buka lapangan pekerjaan
4. Reformasi Birokrasi
5. APBN yang fokus dan tepat sasaran

Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2024

Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa VisiKemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah: *"PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"*.

Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan dan Sasaran dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program

Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata	Meningkatkan Daya Tarik Wisata	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata yang dikelola	• Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Adapun sasaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah masyarakat terutama masyarakat pariwisata, lokasi potensi wisata dan Aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Fungsi dari Perubahan Rencana Kerja SKPD 2024 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 dan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

3.3. Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 tertuang dalam program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan untuk Tahun 2024.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Non Urusan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata*

- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Perubahan Rencana Kerja Program dan kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian kinerja untuk Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut (terlampir).

BAB IV
PENUTUP

Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen rancangan awal perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara. Isi dari Rencana Kerjalebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2019 – 2024.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana KerjaDinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman awal dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Rencana Kerjadan selanjutnya menjadi Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder Pariwisata dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran serta dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

SASMA H. SITUMORANG, S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 197704251997111001

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA KAB. TAPANULI UTARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PARIWISATA							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 100 Persen Persen**	**100 100 Persen Persen**	**6.208.173.340,00**	**4.884.101.131,00**	**4.855.475.410,00**	**-2.819.620.640,00**							**3.388.552.700,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah*				2 Dok 7 dok	2 Dok 7 dok	65.000.000,00	51.272.650,00	51.272.650,00	-13.727.350,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	-		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	5.761.000,00	5.761.000,00	-4.239.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.989.500,00	4.989.500,00	-10.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.543.500,00	4.543.500,00	-456.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.528.500,00	4.528.500,00	-471.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.747.450,00	4.747.450,00	-252.550,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.029.200,00	5.029.200,00	29.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	21.673.500,00	21.673.500,00	-8.326.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			35.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.774.052.700,00	3.746.769.797,00	3.718.144.076,00	-55.908.624,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	-		480.052.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.699.052.700,00	3.679.715.597,00	3.651.089.876,00	-47.962.824,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			399.052.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	61.975.200,00	61.975.200,00	-8.024.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.079.000,00	5.079.000,00	79.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.000.000,00	3.803.500,00	3.803.500,00	-2.196.500,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	-		6.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	3.803.500,00	3.803.500,00	-2.196.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			6.500.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen 1 tahun	100 Persen 1 tahun	525.000.000,00	267.235.352,00	267.235.352,00	-257.764.648,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	-		610.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	24.913.000,00	24.913.000,00	-25.087.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	26.843.250,00	26.843.250,00	-23.156.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	33.573.000,00	33.573.000,00	-41.427.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			80.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	28.516.102,00	28.516.102,00	28.516.102,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	153.390.000,00	153.390.000,00	153.390.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	580.000.000,00	0,00	0,00	-580.000.000,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	-		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	380.000.000,00	0,00	0,00	-380.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kantor*				100 Persen 1 tahun	100 Persen 1 tahun	778.120.640,00	766.067.132,00	766.067.132,00	-12.053.508,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	-		862.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			2.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	56.205.200,00	56.205.200,00	6.205.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	726.620.640,00	709.861.932,00	709.861.932,00	-16.758.708,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera*				100 Persen 1 tahun	100 Persen 1 tahun	480.000.000,00	48.952.700,00	48.952.700,00	-431.047.300,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	-		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	40.130.000,00	40.130.000,00	-9.870.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	30.000.000,00	8.822.700,00	8.822.700,00	-21.177.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Destinasi wisata yang dibenahi**				**5 Destinasi**	**5 Destinasi**	**4.348.321.748,00**	**8.480.356.000,00**	**8.495.356.000,00**	**4.971.678.252,00**							**9.320.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah daya tarik wisata yang dikelola*				3 Destinasi	3 Destinasi	100.000.000,00	0,00	515.000.000,00	415.000.000,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	Destinasi Wisata		720.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			120.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				-	3 Dokumen	0,00	0,00	515.000.000,00	515.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*				12 dok	12 dok	3.798.321.748,00	7.980.356.000,00	27.590.000,00	-3.770.731.748,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	Destinasi Wisata		4.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				35 Unit	35 Unit	3.798.321.748,00	7.980.356.000,00	27.590.000,00	-3.770.731.748,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			4.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*				255 Unit	255 Unit	450.000.000,00	500.000.000,00	7.952.766.000,00	7.502.766.000,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	Destinasi Wisata		4.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	5 Lokasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				-	35 Unit	0,00	0,00	7.952.766.000,00	7.952.766.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			4.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Event Pariwisata yang diikuti/dilaksanakan**				**22 event**	**22 event**	**680.000.000,00**	**189.999.675,00**	**39.195.825,00**	**110.000.000,00**							**790.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemasaran Pariwisata*				22 evevt	22 evevt	680.000.000,00	189.999.675,00	39.195.825,00	-640.804.175,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	Wisatawan		790.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			90.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	110.804.175,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	1 Promosi	450.000.000,00	79.195.500,00	39.195.825,00	-410.804.175,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah HAKI yang difasilitasi**				**2 kali**	**2 kali**	**400.000.000,00**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**150.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota*				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	Pelaku Ekonomi Kreatif		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Berkembangnya Riset Ekonomi Kreatif*				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-200.000.000,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	Pelaku Ekonomi Kreatif		350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Produk	1 Produk	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreati**				**36 Persen**	**36 Persen**	**200.000.000,00**	**1.292.545.600,00**	**1.277.545.600,00**	**900.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya*				12 persen	12 persen	200.000.000,00	1.292.545.600,00	1.277.545.600,00	1.077.545.600,00			-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				-	200 Orang	0,00	0,00	775.196.500,00	775.196.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	1.292.545.600,00	502.349.100,00	402.349.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENGEMBANGAN WISATA 5. PENGEMBANGAN WISATA			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	J U M L A H								**11.836.495.088,00**	**14.947.002.406,00**	**14.717.572.835,00**	**2.881.077.747,00**							**15.148.552.700,00**	

RENCANA KERJA
(RENJA) PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kerja Organsasi Perangkat Daerah (RENJA) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disusun berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024. Renja ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan dan daya dukung sumberdaya alam yang ada guna kesejahteraan masyarakat.

Semoga Rencana Kerja Organsasi Perangkat Daerah (RENJA) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tarutung, 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Ir. S.E.Y. PASARIBU, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680513 199403 1 004

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bagian dari wilayah otonom Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk dikelola demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ***"Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan & Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata"***. Sebagian besar penduduk Kabupaten Tapanuli Utara (±80%) menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Utara dipandang dari segi potensi sumber daya alam yang ada memang lebih cocok dikelola untuk sektor pertanian. Dinas Pertanian memandang sektor pertanian dengan ketersediaan sumber daya alam sebagai salah satu potensi dalam meningkatkan kesejahteraan pertanian dengan menjadikan Tapanuli Utara menjadi lumbung pangan, maka dalam mengimplementasikan kondisi dilakukan pembangunan pertanian dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai salah satu stakeholder dan pemerintah daerah kabupaten sebagai pemegang kebijakan daerah akan memberikan perkembangan kemakmuran yang nyata dan meninggalkan konsep lama yang hanya menjadikan masyarakat sebagai objek dari pembangunan.

Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki tersebut membutuhkan perencanaan pembangunan yang tepat dan terarah sehingga tujuan dan sasaran kinerja dapat dicapai serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kontribusi positif dalam sistem perencanaan daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bagian instansi pemerintahan kabupaten juga tetap meningkatkan pelayanan dengan mempersiapkan perencanaan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan dengan prosedur bottom up , yakni dengan menampung aspirasi dan kebutuhan petani dengan menyesuaikannya dengan program kerja yang telah ditetapkan. Aplikasinya diwujudkan dalam Rencana Strategi dan Rencana Kerja Tahunan dengan

memperhatikan analisis faktor kekuatan, kendala , tantangan dan peluang pengembangan daerah yang ada.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2024 yang menjabarkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian dengan memperhatikan kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah Kabupaten Tapanuli Utara serta capaian yang dihasilkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bagian instansi Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara, jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerha Kabupaten Dairi, jo Undang-undang Nomor 12 Tahun1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal; jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN Bappenas Nomor 050/4936/Sj, Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dengan maksud sebagai pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arahan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governnace);
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pengelolaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan aplikasi dan turunan dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, sekaligus sebagai acuan dasar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan dan capaian kinerja. Disamping itu Rencana Kerja ini sebagai aplikasi secara makro dan mikro rencana

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara bidang Pertanian Tahun 2020-2024.

1. Tujuan dan Sasaran

Dinas Pertanian sebagai pelaksana pembangunan Pertanian di daerah Kabupaten Tapanuli Utara terus mendukung dan menyelenggarakan pembangunan Pertanian, sedangkan sasaran pelaksanaan pembangunan pertanian Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara sumber daya alam yang dimiliki masyarakat melalui peningkatan produksi, peningkatan produktivitas dengan tujuan meningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

2. Rencana Strategis

Adapun rencana strategis ini mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yakni : ***"Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan & Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata".*** Visi ini merupakan cara pandang jauh kedepan, yang merefleksikan cita-cita, yakni hendak menjadi apa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Utara dimasa depan, dan sekaligus menentukan arah perjalanan institusi ini. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan strategi dalam melaksanakan pembangunan pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain :

1. Meningkatkan Produktifitas, Kualitas dan produksi komoditas unggulan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan;
2. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan;
3. Meningkatakan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Meningkatakan Produksi dan Ketersediaan Pangan beras secara berkelanjutan serta mempertahan Swasembada Pangan;
5. Meningkatkan keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat perkapita dan menurunnya konsumsi beras;
6. Mengendalikan perkembangan Hama dan Penyakit yang mengganggu produksi dan produktivitas .

3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dinamika pencapaian kinerja terus mengalami perubahan yang positif, dimana pencapaiannya tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2024 ini tujuan utamanya tetap mengarah pada perbaikan daya dukung lingkungan hidup dengan mengurangi lahan kritis melalui Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pengelolaan Hutan yang Berbasis kepada Masyarakat.

4. Kendala yang Dihadapi

Secara umum kendala yang dihadapi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 mencakup perubahan metode penyusunan yang mengadaptasi langsung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mana masih diperlukan sosialisasi agar SKPD dapat menelaah dan menuangkannya dalam penyusunan RENJA.

Persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan dimasa yang akan datang di daerah Kabupaten Tapanuli Utara dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) akar masalah yang selanjutnya merupakan masalah fundamental atau akar masalah pembangunan pertanian. Ketujuh masalah tersebut adalah : 1) Kepemilikan Lahan petani relative sempit dan tekanan alih fungsi lahan. 2) Lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan. 3) Keterbatasan infrastruktur, sarana prasrana, lahan dan air. 4) Lemahnya Kapasitas dan kelembagaan penyuluh. 5) Keterbatasan akses petani terhadap sumber permodalan. 6) Lemahnya peran kelompok tani dan kelembagaan petani lainnya, dan 7) transfer teknologi berjalan lambat dan belum berkembangnya industri hilir.

Disamping itu penerapan perundangan-undangan yang masih sulit serta kelembagaan masyarakat dan pendanaan dalam pengelolaan sektor

pertanian masih bersifat parsial dan temporer bahkan sarana pendukung yang belum mencukupi.

5. Solusi Pemecahan

Memperhatikan kendala diatas, diharapkan penyusunan perencanaan pembangunan sektor pertanian ke depan memerlukan kebijakan dan langkah terobosan yang kongkrit dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan sehingga pemanfaatannya atas azas potensi dan tepat kelola untuk kesejahteraan masyarakat .

Terhadap beberapa langkah yang diambil untuk melaksanakan pembangunan pertanian yang mengacu pada potensi dan tepat kelola pada saat ini sampai masa akan datang akan memberi konsekuensi terhadap besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan, maka peningkatan alokasi anggaran biaya pembangunan pertanian pada masa yang akan datang sangat perlu. Namun selain pendanaan yang rutin (DAU/ DAK) diperlukan upaya kemitraaan dengan pihak swasta yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD

Salah satu hasil pembangunan pertanian yang patut disyukuri dan membanggakan adalah Kabupaten Tapanuli Utara masih tetap mencapai swasembada pangan sehingga kebutuhan beras bagi penduduk Kabupaten Tapanuli Utara masih tercukupi, kondisi demikian sangat diharapkan terjaga terus untuk meghindari terjadinya krisis pangan.

Memperhatikan Rencana Strategis OPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara maka dapat dilihat bahwa perlu adanya penyempurnaan materi guna mempertemukan antara format yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal ini dimaksudkan karena Renstra OPD telah disusun pada Tahun 2014. Namun demikian lingkup Program dan Kegiatan Bidang Pertanian telah terakomodir dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD dilakukan dengan menitik beratkan pada capaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (ouput). Mengacu pada hal tersebut maka Rencana Kerja OPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara telah mencapai target berdasarkan program dan kegiatan, bahkan terdapat beberapa kegiatan yang telah bersinergi dengan capaian kinerja yang lebih kompleks.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara diawali dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Rencana Strategi 2020-2024. Pengukuran kinerja ini

ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja out comes yang dikaitkan terhadap capaian sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai evaluasi untuk melihat perubahan kinerja organisasi yang mana lebih lanjut digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja dan memberikan solusi pemecahan permasalahan sekaligus sebagai bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis pada tahun mendatang.

Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Utara diukur berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam 4 (empat) tahun terakhir sekaligus tingkat pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh dengan kategori 'Baik'. Berdasarkan Capaian Kinerja tersebut maka kinerja akan terus dipertahankan dan ditingkatkan pada kinerja tahun yang akan datang.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam pelaksanaan pembangunan Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Pertanian tetap diperhadapkan pada isu strategis yang perlu dikelola penanganannya secara cermat. Adapun isu strategis dimaksud antara lain :

1. Konsepsi Otonomi Daerah

   Sistem pengurusan pembangunan bidang pertanian di daerah yang masih lemah sebagai akibat kebijakan yang masih ditentukan oleh pusat. Hal ini terlihat dari ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban daerah, kekuasaan antara pemerintah daerah, lembaga legislatif dan masyarakat, tugas dan tanggungjawab, beban pekerjaan, anggaran yang tersedia dan prestasi birokrasi pemerintah daerah. Sehingga menjadi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah di Kabupaten Tapanuli Utara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan peran proaktif dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengantipasi permasalahan yang berkaitan dengan fungsi otonomi daerah dan desentralisasi sehingga pemerintah daerah dapat mengelola semua permasalahan sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga otonom.

2. Kemiskinan

   Kabupaten Tapanuli Utara masih identik dengan peta kemiskinan. Penciptaan lapangan pekerjaan yang didominasi dari sektor pertanian belum memberikan gambaran perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat marginal di Tapanuli Utara. Hal ini dipicu dengan tingginya inflasi, terutama pada bahan makanan, transportasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

3. Ketersediaan Infrastruktur

   Posisi strategis sebagai jalur mobilitas antar daerah kabupaten tetangga membutuhkan akses jalan yang tinggi. Disamping itu topografi Kabupaten Tapanuli Utara berada dalam wilayah pegunungan membutuhkan perhatian pengembangan infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur dasar lainnya) sehingga mobilitas dalam pengelolaan pembangunan pertanian dan perkebunan dapat terselenggarakan.

4. Pengelolaan Potensi Daerah yang Belum Optimal

   Potensi sumberdaya alam dari pertanian dan perkebunan hingga saat ini belum mendapat pengelolaan yang optimal. Pongelolaan ini perlu diupayakan secara tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat dan lingkungan ekosistemnya agar kelestarian tetap terjaga.

5. Wawasan Lingkungan

   Kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat penggunaan pestisida dan zat kimia yang tinggi tidak terkendali menyebabkan terganggunya fungsi ekosistem. Degradasi kawasan pertanian dan perkebunan yang terjadi ini jika tidak dikendalikan akan memberikan dampak negatif pada kelestarian hasil dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Secara global akan memberikan perubahan lingkungan yang akan mengancam kehidupan manusia dan lingkungan ekosistem.

Dalam mengelola isu yang menjadi permasalahan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan ke depannya perlu dilakukan analisa dan asumsi guna memberikan solusi yang tepat sehingga dapat menjadi upaya dan strategi dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan pokok dinas yang optimal.

Adapun solusi yang dapat diberikan dalam pengelolaan permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi pengelolaan pertanian dan perkebunan;
2. Mendukung program Kementerian pertanian dalam mempercepat produksi , meningkatkan produktivitas dan menjaga keswasembadaan pangan dengan melibatkan masyarakat;
3. Peningkatan produksi hasil tanaman perkebunan rakyat dengan tidak mengesampingkan kualitas pasca panen;
4. Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraannya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan kerja yang baik akan selalu memberikan hasil dan manfaat yang optimal. Dalam mewujudkan aplikasi perencanaan ini akan memenuhi dan memberlakukan tahapan pembahasan antar instansi pemerintah yang difasilitasi oleh Bappeda melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Forum OPD. Dalam proses ini akan mempertimbangkan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas pembangunan daerah yang menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Hingga sampai saat ini belum terdapat perbedaan rancangan kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD. Hal ini memberikan indikasi bahwa sistem perencanaan pembangunan telah membentuk suatu sistem yang cukup dipahami OPD. Apabila terdapat perbedaan penganggaran diperlukan pembahasan lanjutan dalam KUA –PPAS dan RKA oleh Tim Peneliti dan Tim Anggaran Kabupaten. Tahapan ini sangat penting guna penyelarasan anggaran kegiatan yang dapat diselenggarakan pada tahun yang direncanakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan program dan kegiatan OPD maka diperlukan rekapitulasi usulan dan permohonan dari masyarakat umum, tanggapan LSM dan lembaga

pembangunan/ peneliti lainnya atas kinerja OPD dan hubungan kerjasama antar kabupaten/ kota dan provinsi serta pemerintah pusat. Namun demikian penyusunan program kerja juga tetap memperhatikan isu strategis yang berkembang yang dianggap dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah bidang Pertanian sesuai Tugas Pokok dan Fungsi OPD Dinas Pertanian.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 s/d TW II

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
											I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9=10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja yang dikeluarkan Inspektorat	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**Persen**	**100**	**63.816.097.600**	**225**	**50.144.394.705**	**100**	**17.302.567.901**	**25,00**	**3.043.680.784**		**5.762.285.886**		-		-	**25**	**8.803.822.970**	**250**	**58.948.217.675**	**250,00%**	**92,37%**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan**	**Persen**	**100**	**193.335.938**	**4**	**58.297.900**	**5**	**131.013.000**		-	**3,00**	**60.305.200**	-	-	-	-	**3**	**60.305.200**	**7**	**118.603.100**	**200,00%**	**61,35%**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	56.010.000	0	-	2	56.010.000		-	1,00	29.627.200					1	29.627.200	1	29.627.200	50,00%	52,90%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Laporan	2	5.000.000	0	-	1	5.000.000		-		-					0	-	0	-	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	32.325.938	4	19.843.000	1	5.000.000		-	1,00	4.565.000	0				1	4.565.000	5	24.408.000	100,00%	75,51%
	Target : 74,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	100.000.000	0	38.454.900	1	65.003.000			1,00	26.113.000					1	26.113.000	1	64.567.900	50,00%	64,57%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan jasa pelayanan penatausahaan keuangan**	**Persen**	**100**	**47.755.367.801**	**250**	**44.017.136.311**	**100**	**14.844.745.389**	**25,00**	**2.781.280.784**	**25,00**	**4.902.201.702**	**0**	-	**0**	-	**50**	**7.683.482.486**	**300**	**51.700.618.797**	**300,00%**	**108,26%**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	60	47.482.330.002	39	43.659.019.511	12	14.779.306.189	3,00	2.781.280.784	3,00	4.882.614.502					**6**	**7.663.895.286**	**45**	**51.322.914.797**	**75,00%**	**108,09%**
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	60	240.711.861	36	338.674.400	12	60.439.200			6,00	15.109.800					**6**	**15.109.800**	**42**	**353.784.200**	**70,00%**	**146,97%**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	32.325.938	2	19.442.400	1	5.000.000			1,00	4.477.400		-		-	**1**	**4.477.400**	**3**	**23.919.800**	**60,00%**	**74,00%**
							0	-											**0**	-	**0**	-		
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Laporan**	**6**	**138.710.524**	**3**	**50.361.900**	**1**	**7.000.000**		-		**2.143.700**	**0**	-		-	**0**	-	**3**	**50.361.900**	**50,00%**	**36,31%**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan Penatausahan Barang Milik Daerah	Laporan	5	131.710.524	3	50.361.900	0	-	-	-	-	-				-	**0**	-	**3**	**50.361.900**	**60,00%**	**38,24%**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	Laporan	1	7.000.000			1	7.000.000				2.143.700										
							0	-											**0**	-	**0**	-		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.927.972.789**	**200**	**1.441.636.140**	**100**	**208.798.200**		-		**115.322.888**		-		-	**0**	**115.322.888**	**200**	**1.556.959.028**	**200,00%**	**80,76%**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	60	42.816.782	48	25.194.300	12	2.000.000			6,00	989.400					**6**	**989.400**	**54**	**26.183.700**	**90,00%**	**61,15%**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	60	193.955.194	48	193.758.400	12	40.000.000			6,00	24.458.500					**6**	**24.458.500**	**54**	**218.216.900**	**90,00%**	**112,51%**
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bulan	60	43.087.889	48	42.985.400	12	2.000.000			6,00	991.000					**6**	**991.000**	**54**	**43.976.400**	**90,00%**	**102,06%**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	60	129.304.612	48	100.122.400	12	20.813.200			6,00	11.000.000					**6**	**11.000.000**	**54**	**111.122.400**	**90,00%**	**85,94%**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	60	258.592.415	48	137.685.000		-	6,00								**6**	**77.883.988**	**54**	**215.568.988**	**90,00%**	**83,36%**
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	60	79.461.465	48	83.570.900		-	-								**0**	-	**48**	**83.570.900**	**80,00%**	**105,17%**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	60	1.180.754.434	48	858.319.740	12	143.985.000			6,00	77.883.988					**6**	**77.883.988**	**54**	**936.203.728**	**90,00%**	**79,29%**
							0	-											**0**	-	**0**	-		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Paket Peralatan Mesin Lainnya**	**Unit**	**20**	**422.594.251**	**3**	**89.550.000**	**10**	**14.000.000**		-		-		-		-	**0**	-	**3**	**89.550.000**	**15,00%**	**21,19%**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan Mesin Lainnya	Unit	20	222.594.251	7	89.550.000	4	14.000.000				-					**0**	-	**7**	**89.550.000**	**35,00%**	**40,23%**
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	200.000.000	0	-	0										**0**	-	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**11.828.762.276**	**455**	**3.952.585.572**	**100**	**1.531.423.212**	**25,00**	**262.400.000**		**378.504.862**		-		-	**25**	**640.904.862**	**480**	**4.593.490.434**	**480,00%**	**38,83%**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	30.166.565	30	18.990.000	12	2.000.000			6,00	1.000.000					**6**	**1.000.000**	**36**	**19.990.000**	**60,00%**	**66,27%**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	60	223.558.426	30	75.249.810	12	39.705.700			6,00	16.140.334					**6**	**16.140.334**	**36**	**91.390.144**	**60,00%**	**40,88%**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	60	11.575.037.286	24	3.858.345.762	12	1.489.717.512	3,00	262.400.000	3,00	361.364.528					**6**	**623.764.528**	**30**	**4.482.110.290**	**50,00%**	**38,72%**
							0	-											**0**	-	**0**	-		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**1.549.354.022**	**100**	**534.826.882**	**100**	**565.588.100**		-		**303.807.534**		-		-	**0**	**303.807.534**	**100**	**838.634.416**	**100,00%**	**54,13%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	103	691.486.284	206	417.749.082	2	55.588.100			2,00	12.700.450					**2**	**12.700.450**	**208**	**430.449.532**	**201,94%**	**62,25%**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	57.867.738	20	37.077.800	10	10.000.000			5,00	5.000.000					**5**	**5.000.000**	**25**	**42.077.800**	**62,50%**	**72,71%**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	300.000.000	2	80.000.000	0	-			-	-					**0**	-	**2**	**80.000.000**	**100,00%**	**26,67%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kendaraan Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	10	500.000.000	0	-	10	500.000.000				286.107.084					**0**	**286.107.084**	**0**	**286.107.084**	**0,00%**	**57,22%**
	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan**			**50.967.565.709**	**0**	**20.068.882.421**		**3.291.887.599**		**687.955.750**		**1.172.273.300**		-		-		**1.860.229.050**	**0**	**21.929.111.471**	**#DIV/0!**	**43,03%**
		Produksi :	**Padi Sawah**	**Ton**	**118.800,00**		**118.911,40**		**118.800,00**		**11.799,79**		**76.392,32**						**88.192,11**	-	**74,24%**	-	**0,00%**	
		Padi Sawah : 118.600,00 Ton		**Ku/ha**	**49,65**		**52,68**		**49,65**		**52,68**		**52,68**						**52,68**		**106,10%**			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
											I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Padi Gogo : 66.000,00 Ton		**Padi Ladang**	**Ton**	**70.600,00**		**66.507,42**		**70.600,00**		**17.163,30**		**21.665,88**						**38.829,18**		**55,00%**			
	Jagung : 88.000 Ton			**Kw/ha**	**29,69**		**29,72**		**29,69**		**29,72**		**29,72**						**29,72**		**100,10%**			
	Kacang Tanah : 2.501 Ton		**Jagung**	**Ton**	**91.000,00**		**136.500,99**		**91.000,00**		**29.755,61**		**23.013,55**						**52.769,16**		**57,99%**			
	Cabai Merah : 6830,20 Ton			**Kw/ha**	**51,89**		**55,96**		**51,89**		**55,96**		**55,96**						**55,96**		**107,84%**			
	Bawang Merah : 1.023 Ton	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung**	**Persen**	**100**	**42.165.664.628**	**49**	**15.700.880.076**	**0**	**2.391.887.599**		**687.955.750**		**622.772.600**		-		-	**0**	**1.310.728.350**	**49**	**17.011.608.426**	**49,00%**	**40,34%**
	Nenas : 160.200,00 Ton	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	50	37.428.058.744	31	14.614.091.427		1.811.887.599		687.955.750		500.429.900					**0**	**1.188.385.650**	**31**	**15.802.477.077**	**62,00%**	**42,22%**
	Pisang : 26.500 Ton	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	25	4.397.605.884	18	1.086.788.649		240.000.000		-		8.027.000					**0**	**8.027.000**	**18**	**1.094.815.649**	**72,00%**	**24,90%**
	Kopi Arabika : 14.780,50 Ton	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah Benih Bersertifikat perkebunan berbentuk batang	batang		340.000.000				340.000.000		-		114.315.700										
	Kakao : 1790,50 Ton						**0**	-											**0**	-	**0**	-		
	Aren : 183 Ton	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme**	**Laporan**	**50**	**8.801.901.081**	**32**	**4.368.002.345**	**0**	**900.000.000**	-	-	-	**549.500.700**	**0**	-	**0**	-	**0**	**549.500.700**	**32**	**4.917.503.045**	**64,00%**	**55,87%**
		Penjamin Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Penurnian	Laporan	25	1.736.340.753	15	729.728.947	0	-									**0**	-	**15**	**729.728.947**	**60,00%**	**42,03%**
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Laporan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Laporan	25	7.065.560.328	17	3.638.273.398		900.000.000				549.500.700					**0**	**549.500.700**	**17**	**4.187.774.098**	**68,00%**	**59,27%**
							0	-											**0**	-	**0**	-		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian**	**Persen**	**46**	**125.341.309.082**	**30**	**57.635.688.150**	**10**	**10.823.826.000**		-		**2.733.642.445**		-		-		**2.733.642.445**	**30**	**60.369.330.595**	**65,22%**	**48,16%**
	Produktivitas Pertanian :	**Pengembangan PraSarana Pertanian**	**Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Laporan**	**42**	**3.863.723.900**	**20**	**1.150.586.872**	**0**	**635.000.000**	-	-	-	**261.914.470**	**0**	-	**0**	-	**0**	**261.914.470**	**20**	**1.412.501.342**	**47,62%**	**36,56%**
	Padi Sawah : 49,64 Kw/ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	20	1.297.711.400	14	681.290.172		350.000.000				3.505.800					**0**	**3.505.800**	**14**	**684.795.972**	**70,00%**	**52,77%**
	Padi Gogo 29,69 Kw/ha	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Laporan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Laporan	10	1.231.012.500	6	469.296.700											**0**	**258.408.670**	**6**	**727.705.370**	**60,00%**	**59,11%**
	Jagung : 51,86 Kw/ha	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang	Dokumen	10	750.000.000																	
	Kacang Tanah : 15,44 Kw/ha	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	2	300.000.000																		
	Cabai Merah : 48,10 Kw/ha	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas Kawasan pertanian yang dimanfaatkan	Ha		285.000.000				285.000.000				258.408.670										
	Bawang Merah : 93,00 Kw/ha																							
	Nenas : 1.602,00 Kw/ha	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian terbangun**	**Unit**	**465**	**121.477.585.182,00**	**151**	**56.485.101.278,35**	**3**	**10.188.826.000,00**		-		**2.471.727.975,00**		-		-	**0**	**2.471.727.975**	**151**	**58.956.829.253**	**32,47%**	**48,53%**
	Pisang : 455,00 Kw/ha	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit	120	55.224.434.704	39	18.927.086.325		5.398.826.000,00				1.361.345.375					**0**	**1.361.345.375**	**39**	**20.288.431.700**	**32,50%**	**36,74%**
	Kopi Arabika : 1.121,60 Kg/ha	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	10	982.708.500	2	228.000.000		-									**0**	-	**2**	**228.000.000**	**20,00%**	**23,20%**
	Kakao : 662,60 kg/ha	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	300	63.546.379.228	107	36.889.840.712		4.000.000.000				925.382.600					**0**	**925.382.600**	**107**	**37.815.223.312**	**35,67%**	**59,51%**
	Aren : 509,80 kg/ha	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15	1.474.062.750	3	342.000.000	2	240.000.000				60.000.000					**0**	**60.000.000**	**3**	**402.000.000**	**20,00%**	**27,27%**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	20	200.000.000		98.174.241	1	500.000.000				125.000.000						**125.000.000**		**223.174.241**	**0,00%**	**111,59%**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	unit	1	50.000.000		-	1	50.000.000									**0**	-	**0**	-		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**	**Persen**	**88**	**3.319.080.373**	**100**	**1.355.203.173**	**3**	**305.000.000**		-		**27.843.600**		-		-		**27.843.600**	**100**	**1.383.046.773**	**113,64%**	**41,67%**
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengandalian OPT Tanaman**	**Laporan**	**15**	**3.319.080.373**	**103**	**1.355.203.173**	**3**	**305.000.000**		-		**27.843.600**		-		-	**0**	**27.843.600**	**103**	**1.383.046.773**	**686,67%**	**41,67%**
		Penegendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Laporan Pengandalian OPT Tanaman	Laporan	15	3.319.080.373	9	1.355.203.173		305.000.000				27.843.600					**27843600**	**#REF!**	**27843609**	**#REF!**	**185624060,00%**	**#REF!**
							0	-											**0**	-	**0**	-		
							0	-											**0**	-	**0**	-		
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Cakupan usaha pertanian yang dibina dan diawasi**	**Persen**	**16**	**560.314.526**	**100**	**334.424.060**	**100**	**125.000.000**		-		**21.577.786**		-		-		**21.577.786**	**100**	**356.001.846**	**625,00%**	**63,54%**
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**laporan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian**	**Laporan**	**10**	**560.314.526**	**6**	**334.424.060**	**2**	**125.000.000**		-		**21.577.786**		-		-	**0**	**21.577.786**	**6**	**356.001.846**	**60,00%**	**63,54%**
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Bulan	60	560.314.526	45	334.424.060		125.000.000				21.577.786					-	**#REF!**	**45**	**#REF!**	**75,00%**	**#REF!**
							0	-											**0**	-	**0**	-		
							0	-											**0**	-	**0**	-		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase rumah tangga petani yang masuk kelembagaan petani**	**Persen**	**94**	**11.840.488.346**	**85**	**7.926.243.310**	**90**	**1.266.299.940**	-	-		**158.709.700**		-		-		**158.709.700**	**85**	**8.084.953.010**	**90,43%**	**68,28%**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persen**	**100**	**11.840.488.346**	**30**	**7.926.243.310**	**15**	**1.266.299.940**	-	-		**158.709.700**		-		-	**0**	**158.709.700**	**30**	**8.084.953.010**	**30,00%**	**68,28%**
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan	15	10.870.710.221	30	4.185.697.424		695.400.000				147.296.900					15	**147.296.900**	**45**	**4.332.994.324**	**300,00%**	**39,86%**
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan	15	323.259.375	30	1.441.410.650		545.899.940				2.118.000					15	**2.118.000**	**45**	**1.443.528.650**	**300,00%**	**446,55%**
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kecamatan	15	646.518.750	18	2.299.135.236		25.000.000				9.294.800					**0**	**9.294.800**	**18**	**2.308.430.036**	**120,00%**	**357,06%**
																			0	-				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
											I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)						**255.844.855.636**	**0**	**137.464.835.819**		**33.114.581.440**		**3.731.636.534**		**9.876.332.717**		-		-	**0**	**13.607.969.251**	**0**	**151.072.805.070**	**#DIV/0!**	**59,05%**
Predikat kinerja																								

BAB III.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian.
2. Kebijakan pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor serta komoditas penyedia bahan baku bio-energi.
3. Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan.
4. Kebijakan pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) dan agro-industri di perdesaan, sebagai dasar / landasan pengembangan bio-industri berkelanjutan.
5. Kebijakan re-orientasi memproduksi dari satu jenis produk menjadi multi produk (produk utama, bioenergi, produk sampingan, produk dari limbah, *zero waste* dan lainnya).
6. Kebijakan pengembangan klaster/kawasan, yaitu pada kawasan tertentu yang mengungkit pencapaian target nasional.
7. Kebijakan sistem perbenihan/pembibitan, perlindungan petani, kelembagaan petani, inovasi dan diseminasi teknologi, penyuluhan, dan kebijakan sistem perkarantinaan pertanian.
8. Kebijakan mendukung program tematik: MP3EI, MP3KI, PUG, KSS, ketenagakerjaan, percepatan daerah tertinggal, kawasan khusus dan wilayah perbatasan.Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penanganan pasca bencana alam.
9. Kebijakan subsidi: (1) subsidi pupuk tetap diperlukan dengan cara mengurangi pupuk tunggal, menaikan subsidi pupuk majemuk, (2) pupuk organik tetap dikembangkan bukan dengan dukungan subsidi, tetapi dialihkan menjadi kegiatan pengembangan pupuk organik, (3)

subsidi benih ditiadakan dan dialihkan menjadi kegiatan penguatan penangkar benih/bibit.

10. Kebijakan kredit : (1) kredit ketahanan pangan akan terus dilanjutkan untuk mendorong dn meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna mendukung ketahanan pangan, (2) untuk lebih menjamin teralokasinya kredit untuk pangan, maka plafon kredit dialokasikan menurut subsektor, (3) untuk memecahkan kelangkaan tenaga kerja & menjamin pengelolaan pangan skala luas, maka Kredit Mekanisasi pertaniaan sangat diperlukan, (4) kegiatan sertifikasi tanah diperlukan, sehingga layak kredit.

Strategi Pembangunan Pertanian tahun 2019-2024 meliputi :

1. Menjadikan basis produksi komoditas pangan, komoditas ekspor, penyedia bahan baku industri dan bio-energi dengan pendekatan kawasan.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk pertanian.
3. Menyediakan prasarana dasar bidang pertanian
4. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara rinci uraian mengenai pengembangan pertanian dan perdesaan, dijelaskan dalam enam bidang program, yaitu:

A. Pengkajian kebijakan, perencanaan dan program terpadu pertanian.

B. Perbaikan produksi pertanian dan sistem bertani melalui diversifikasi usaha tani.

C. Peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

D. Konservasi dan rehabilitasi tanah.

E. Pengendalian hama terpadu (PHT).

F. Unsur hara bagi peningkatan produksi pangan.

Memperhatikan hal di atas maka arah kebijakan strategi pembangunan pertanian dan perkebunan ke depan bertujuan untuk

pengelolaan sumber daya alam yang memiliki potensi pertanian secara tepat dengan tujuan peningkatan pendapatan petani yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai salah satu institusi pemerintahan untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partispatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai perwujudan tanggung jawab dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal	Realisasi Tahun	Target Tahun . .			
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan									
	Menurunnya Daerah Rentan Pangan		Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Persen	NA	NA	18,25	13,89	9,52	5,16
		Meningkatnya Produksi dan produktivitas pangan	Produksi Tanaman Pangan	Ton						
			Padi Sawah	Ton	113.938	118.204	118.250	118.400	118.600	118.800
			Padi Ladang	Ton	66.275	75.787	70.000	70.200	70.400	70.600
			Jagung	Ton	89.087,85	124.117,86	82.000,00	85.000	88.000	91.000
			Produktivitas Tanaman	Kw/ha						

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal	Realisasi Tahun	Target Tahun . .			
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pangan							
			Padi Sawah	Kw/ha	49,60	49,62	49,62	49,63	49,64	49,65
			Padi Ladang	Kw/ha	29,66	29,66	29,67	29,68	29,69	29,69
			Jagung	Kw/ha	51,73	51,73	51,78	51,82	51,86	51,89
			Produksi Daging	Ton	1.396	2.281	2.335	2.387	2.437	2.487
			Populasi Ternak	Ekor						
			Kerbau	Ekor	9.600	9.767	9.787	9.797	9.837	9.877
			Babi	Ekor	62.350	3.005	3.055	3.105	3.155	3.205
		Meningkatnya Kelompok Tani yang dibina	Persentase kelompok tani yang melakukan pertemuan rutin	Persen	60	65	70	75	80	85

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal	Realisasi Tahun	Target Tahun . .			
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatmya sarana Pertanian yang Baik	Persentase Jumlah pertanian yang baik	Persen	40	45	50	55	60	60
	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektro Pertanian		Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Milyar Rupiah	2.601,04	2.660,74	2.721,52	2.783,38	2.845,24	2.907,10
		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi	Produksi dan Produktivitas komoditi unggulan per hektar per tahun							

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal	Realisasi Tahun	Target Tahun . .			
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Unggulan								
			Jagung	Ton	89.087,85	124.117,86	82.000,00	85.000	88.000	91.000
				Kw/ha	51,73	51,73	51,78	51,82	51,86	51,89
			Kacang Tanah	Ton	1.370,14	2.452,47	2.459,00	2.484,00	2.501,00	2.518,00
				Kw/ha	15,35	15,35	15,38	15,41	15,44	15,47
			Bawang Merah	Ton	648,70	476,00	920,00	971,25	1.023,00	1.075,25
				Kw/ha	69,01	91,54	92,00	92,50	93,00	93,50
			Cabe Merah	Ton	5.381,30	6.222,40	6.454,00	6.648,15	6.830,20	7.028,45
				Kw/ha	44,15	45,62	46,10	47,15	48,10	49,15
			Nenas	Ton	134.096,90	155.139,20	157.107,50	158.620,80	160.200,00	162.105,00
				Kw/ha	1.591,05	1.585,60	1.595,00	1.599,00	1.602,00	1.605,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal	Realisasi Tahun	Target Tahun . .			
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pisang	Ton	2.100,00	4.174,10	12.050,00	24.112,00	36.180,00	48.280,00
				Kw/ha	562,85	601,62	602,50	602,80	603,00	603,50
			Kopi	Ton	14.336,74	14.663,94	14.698,50	14.752,30	14.780,50	14.810,85
				Kg/ha/tahun	1.078,24	1.100,45	1.105,70	1.108,50	1.121,60	1.125,20
			Kakao	Ton	1.776,67	1.778,89	1.781,60	1.789,90	1.790,50	1.792,65
				Kg/ha/tahun	665,11	657,75	659,25	661,20	662,60	663,25
			Aren	Ton	178,44	178,91	179,50	181,00	183,00	185,00
				Kg/ha/tahun	601,01	509,72	509,75	509,78	509,80	509,82
		Meningkatnya Perluasan Lahan Produktif	Persentase Lahan Produktif	Persen	78	79	80	81	82	83

C. Program dan Kegiatan

Secara umum Rencana Kerja Tahun 2022 OPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dan Rencana Strategis OPD dan seoptimal mungkin untuk mendukung dan melanjutkan program pembangunan Pertanian dengan mendasari Capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang memperhatikan pendayagunaan potensi ekonomi daerah dalam bidang pertanian.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TAPANULI UTARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERTANIAN							**26.773.528.829,00**	**33.114.581.440,00**	**32.705.764.271,00**	**5.932.235.442,00**							**23.397.253.829,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**26.773.528.829,00**	**33.114.581.440,00**	**32.705.764.271,00**	**5.932.235.442,00**							**23.397.253.829,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**26.773.528.829,00**	**33.114.581.440,00**	**32.705.764.271,00**	**5.932.235.442,00**							**23.397.253.829,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**17.515.818.814,00**	**17.302.567.901,00**	**17.504.890.762,00**	**-1.203.389.985,00**							**16.312.428.829,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						111.000.000,00	131.013.000,00	104.115.000,00	-6.885.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	56.010.000,00	54.116.000,00	4.116.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	65.003.000,00	44.999.000,00	-5.001.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	14.335.508.214,00	14.844.745.389,00	15.090.966.250,00	755.458.036,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		13.389.118.229,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				170 Orang/ bulan	170 Orang/ bulan	14.262.099.014,00	14.779.306.189,00	15.025.527.050,00	763.428.036,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			13.169.069.029,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	67.409.200,00	60.439.200,00	60.439.200,00	-6.970.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			220.049.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	-11.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		165.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	363.000.000,00	208.798.200,00	208.798.200,00	-154.201.800,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		315.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	32.000.000,00	20.813.200,00	20.813.200,00	-11.186.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	143.985.000,00	143.985.000,00	-56.015.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	160.000.000,00	14.000.000,00	0,00	-160.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	100.000.000,00	14.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.006.310.600,00	1.531.423.212,00	1.531.423.212,00	-474.887.388,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		1.998.310.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	39.705.700,00	39.705.700,00	-294.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.958.310.600,00	1.489.717.512,00	1.489.717.512,00	-468.593.088,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			1.958.310.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	460.000.000,00	565.588.100,00	565.588.100,00	105.588.100,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		315.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				120 Unit	4 Unit	145.000.000,00	55.588.100,00	55.588.100,00	-89.411.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produksi Padi Sawah Peningkatan Produktifitas Padi Sawah Peningkatan Produksi Padi Ladang Peningkatan Produktifitas Padi Sawah Peningkatan Produktifitas Padi Sawah Peningkatan Produksi Padi Jagung**				**29.69 49.65 118800 70600 51.89 91000 Kw/ha Kw/ha Ton Ton Kw/ha Ton**	**118800 29.69 70600 49.65 51.89 91000 Ton Kw/ha Ton Kw/ha Kw/ha Ton**	**2.980.000.000,00**	**3.291.887.599,00**	**3.266.647.509,00**	**146.725.000,00**							**3.126.725.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	2.980.000.000,00	2.391.887.599,00	2.366.647.509,00	-613.352.491,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Kelompok Tani		656.725.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				7 Laporan	6 Laporan	2.625.000.000,00	1.811.887.599,00	1.840.647.509,00	-784.352.491,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			1.725.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				8 Laporan	7 Laporan	355.000.000,00	240.000.000,00	186.000.000,00	-169.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			355.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				150000 Batang	150000 Batang	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-						0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		2.470.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				12 Dokumen	9 Dokumen	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			2.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				4 Varietas Unggul Baru (VUB)	4 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			370.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian**				**46.0 persen**	**46.0 persen**	**4.260.000.000,00**	**10.823.826.000,00**	**10.498.826.000,00**	**-2.060.000.000,00**							**2.200.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	440.000.000,00	635.000.000,00	610.000.000,00	170.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		1.240.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				5 Laporan	5 Laporan	290.000.000,00	350.000.000,00	325.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			190.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				800 Ha	100 Ha	0,00	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			900.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Terbangunnya Infrastruktur Pertanian*				27 Lokasi	27 Lokasi	3.820.000.000,00	10.188.826.000,00	9.888.826.000,00	6.068.826.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	Kelompok Tani		960.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			120.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				15 Unit	19 Unit	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				-	2 Unit	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			240.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	1 Unit	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				5 Unit	19 Unit	600.000.000,00	5.398.826.000,00	5.298.826.000,00	4.698.826.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**305.000.000,00**	**305.000.000,00**	**70.000.000,00**							**470.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	-95.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		470.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	100 Ha	400.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	-95.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			470.000.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**70.000.000,00**	**125.000.000,00**	**50.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**0,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	70.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.547.710.015,00**	**1.266.299.940,00**	**1.080.400.000,00**	**-259.610.015,00**							**1.288.100.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	1.547.710.015,00	1.266.299.940,00	1.080.400.000,00	-467.310.015,00			-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	-		1.288.100.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Unit	15 Unit	1.063.100.000,00	695.400.000,00	630.400.000,00	-432.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			1.088.100.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Unit	7 Unit	360.000.000,00	545.899.940,00	440.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				50 Unit	3 Unit	124.610.015,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-114.610.015,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	J U M L A H								**26.773.528.829,00**	**33.114.581.440,00**	**32.705.764.271,00**	**107.518.230.668,90**							**23.397.253.829,00**	

BAB IV
PENUTUP

Demikian penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, dengan harapan untuk dapat menjadi kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang optimal dan bersinergi dengan Program Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Diharapkan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini dapat menjadi salah satu perwujudan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan penganggaran daerah berdasarkan skala prioritas usulan program dan kegiatan pembangunan bidang kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya dalam aplikasinya tetap memenuhi peraturan dan aturan pelaksanaan anggaran yang berlaku dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Melalui sarana Musyawarah Pembangunan Tahun 2022 agar menjadi forum sinkronisasi rencana kegiatan tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan pemutahiran sistem perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara khususnya.

Masukan dan saran dalam pelaksanaan penyusunannya akan lebih dipertimbangakan dalam penyempurnaan rencana kegiatan pada masa yang akan datang dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam Institusi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan kerangka regulasi yang ada.

Tarutung, 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Ir. S.E.Y. PASARIBU, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680513 199403 1 004

dispora

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. TAPANULI UTARA

P – RENJA 2024









Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara

Jln. Sisingamangaraja No. 199 Tarutung, 22411
Sumatera Utara Tel/Fax.
Website : http//www.taputkab.go.id; Email: disporataputkab@gmail.com

KATAPENGANTAR

Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena bimbingan-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA-PD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan pedoman dalam melaksanakan program kerja tahunan yang mengacu kepada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024,

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 disusun berdasarkan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada dan diharapkan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan serta bagian dari pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kami sangat menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 ini masih belum sempurna, untuk itu kritik membangun serta sumbang saran pembaca dan semua pihak, sangat kami harapkan untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja pada tahun-tahun mendatang.

Tarutung, Juli 2024

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Ir. MARCO T.P. PANGGABEAN M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670317 199203 1 009

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

			Hal.
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB 1	:	PENDAHULUAN	I.1
		1.1. Latar Belakang	I.1
		1.2. Landasan Hukum	I.1
		1.3. Maksud dan Tujuan	I.3
		1.4. Sistematika Penulisan	I.4
BAB II	:	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	II.1
		2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II.1
		2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.6
		2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II.8
		2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II.15
BAB III	:	TUJUAN DANSASARAN PERANGKATDAERAH	III.1
		3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III.1
		3.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2021	
BAB V	:	PENUTUP	IV.1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (P-RKA PD), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD).

Pwerunahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, Penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara 2024.

Perubahan dalam Renja Tahun 2024 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan dan perubahan indicator kinerja program dan kegiatan. Perubahan Renja diakibatkan oleh perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Pemuda dan Olahraga KabupatenTapanuli Utara Tahun 2024sampai dengan Triwulan II.

Perubahan Renja Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan RKA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara yaitu : “Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan jiwa kewirausahaan ” dan “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja “ yang diwujudkan melalui meningkatnya kapasitas dan keahlian pemuda, meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan serta meningkatnya nilai AKIP.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-UndangNomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dimaksudkan sebagai upaya melakukan penyesuaian atas perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rentra tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
2. Tersedianya acuan untuk penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024,
3. Sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah yang mencakup:

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun berjalan. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut urusan pemerintah daerah.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
3.1 Telaahan Terhadap Program Nasional
3.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2024

Bab IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 mengacu pada pencapaian Kinerja dan Keuangan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

Capaian Kinerja dan Keuangan Renja Tahun 2024 berisi target dan realisasi yang dilaksanakan dari DPA tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024. Target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga dan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024, sedangkan jumlah anggaran untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024.

Realisasi penyerapan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan semester I tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.660.178.504,00 atau 24,55% persen dari total pagu OPD pada APBD sebesar Rp. Rp.6.763.414.996,- .

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan semester I tahun 2021 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) digunakan untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaian dengan Renstra.

Untuk mengetahui capaian target yang direncanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan semester I tahun 2021 dengan realisasi yang terjadi dapat dilihat berdasarkan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2021 sebesar Rp.6.763.414.996,- untuk melaksanakan 4 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan sebagaimana disajikan dalam table 2.1.

Tabel 2.1

Evaluasi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara

Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja Renja 2024 (%)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024 s/d TW II			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp,)	K	(Rp.)
					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Debdab Pelayanan dasar									
2	19				**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**					6.763.414.996		1.660.178.504		24,55
2	19	O1			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Layanan Penunjang yang tertangani	500 %		100 %	3.045.111.996	50 %	1.461.048.204	50	47,98
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Keg		2 Keg	9.847.200	2 Keg	5.916.200	100	60,08
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok		2 Dok	3.931.000	1 Dok	-	50	0,00
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	5 Dok		1 Dok	5.916.200	1 Dok	5.916.200	100	100,00
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 Keg		3 Keg	2.366.611.596	3 Keg	1.186.263.898	100	50,12

2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bln		12	Bln	2.310.108.196	6	Bln	1.155.054.098	50	50,00
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifokasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan PD	60	Bln		12	Bln	50.587.200	6	Bln	25.293.600	50	50,00
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5	Dok		1	Dok	5.916.200	1	Dok	5.916.200	100	100,00
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananaya Administrasi Umum Perangkat Daerah	30	Keg		6	Keg	280.093.800	6	Keg	100.164.600	100	35,76
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Bln		12	Bln	9.999.900	6	Bln	3.840.300	50	38,40
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	60	Bln		12	Bln	29.996.600	6	Bln	7.425.300	50	24,75
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	60	Bln		12	Bln	17.981.600	6	Bln	3.884.900	50	21,60
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bln		12	Bln	14.997.700	6	Bln	7.960.900	50	53,08
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	Bln		12	Bln	14.999.000	6	Bln	7.270.000	50	48,47
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bln		12	Bln	192.119.000	6	Bln	69.783.200	50	36,32
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	5	Keg		1	Keg	58.410.800	1	Keg	45.946.500	100	78,66
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan	60	Bln		12	Bln	58.410.800	6	Bln	45.946.500	50	78,66

						Peralatan dan Mesin Lainnya									
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15	Keg		3	Keg	165.999.200	3	Keg	73.822.456	100	44,47
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	Bln		12	Bln	3.000.000	6	Bln	1.000.000	50	33,33
2	19	01	2.01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bln		12	Bln	54.999.200	6	Bln	16.822.456	50	30,59
2	19	01	2.01	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bln		12	Bln	108.000.000	6	Bln	56.000.000	50	51,85
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	Bln		12	Bln	164.149.400	6	Bln	48.934.550	50	29,81
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	Bln		2	Keg	39.994.600	2	Keg	8.349.250	100	20,88
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	Bln		12	Bln	9.490.000	6	Bln	-	50	0,00
2	19	01	2.01	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60	Bln		12	Bln	114.664.800	6	Bln	40.585.300	50	35,39
2	19	02			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	Meningkatnya Pemuda Pelopor, Wira Usaha Pemula,		%		100	%	431.937.900	0	%	48.349.600	0	11,19

						Pemuda Berprestasi								
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	15 Keg		3 Keg	376.984.200	1 Keg	33.395.900	33,3	8,86
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaran Peningkatan Kapasitas Daya Saing pemuda dan Pelopor	Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelopor	5 Keg		1 Keg	79.934.700	0 Keg	-	0	0,00
2	19	02	2.01	02	koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaran Peningkatan Kapasitas Daya saing Wira usaha Pemula	Meningkatnya Jumlah Pemuda Wira Usaha Pemula	5 Keg		1 Keg	89.369.600	0 Keg	-	0	0,00
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Pemuda Kader	5 Keg		2 Keg	207.679.900	0 Keg	33.395.900	0	16,08
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	2 Keg		2 Keg	54.953.700	2 Keg	14.953.700	100	27,21
2	19	02	2.02	01	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Dengan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen Data Kepemudaan	5 Dok		1 Dok	14.953.700	1 Dok	14.953.700	100	100,00
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan	Jumlah Dokumem Data	5 Dok		1 Dok	40.000.000	0 Dok	-	0	0,00

					Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Organisasi Kepemudaan									
2	19	03			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	Jumlah Medali Tingkat Nasional		Mdl			Mdl	3.106.545.500		Mdl	150.780.700	###	4,85
						Jumlah Medali Tingkat Provinsi		Mdl			Mdl			Mdl			
						Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga		%			%			%			
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah	5	Keg		1	Keg	2.209.635.100	1	Keg	103.870.300	100	4,70
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga		Unit		2	Unit	2.209.635.100		Unit	103.870.300	0	4,70
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	5	Keg		1	Keg	46.910.400	1	Keg	46.910.400	100	100,00
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Berprestasi	30	Org		6	Org	46.910.400	6	Org	46.910.400	100	100,00
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5	Keg		1	Keg	850.000.000	0	Keg	-	0	0,00
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	10	Orga		2	Orga	850.000.000		Orga	-	0	0,00
2	19	03	2.04		**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	Persentase Peningkatan Pembinaan Organisasi Kepramukaan	100	%		100	%	179.819.600	100	%	-	100	0,00

2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksanaya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	10	Keg		2	Keg	179.819.600		Keg	-	0	0,00
2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan	5	Keg		1	Keg	99.942.000	0	Keg	-	0	0,00
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	5	Keg		1	Keg	79.877.600	0	Keg	-	0	0,00

Sumber : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Posisi Juni 2024

Tarutung, Juli 2024

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Ir. MARCO T.P. PANGGABEAN M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670317 199203 1 009

Dipindai dengan CamScanner

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk manganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara digunakan beberapa indicator.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan triwulan II tahun 2024 hasilnya, adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara

Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Pemuda Pelopor											
	Jumlah Wirausaha Muda Pemula											
	Pemuda Berprestasi											
	Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Kabupaten											
	Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Provinsi											
	Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Nasional											
	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga Aktif											
	Jumlah Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten											
	Lapangan Olahraga											

2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2024

Telahaan terhadap Rancangan Awal Renja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dispora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, dengan arahan kepala Dinas terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas berdasarkan rancangan awal RKPD disajikan pada Tabel 2,3.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024

Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinera	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinera	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**				6.763.414.996	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**				6.873.414.996	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Cakupan Layanan Penunjang yang tertangani	100 %	3.045.111.996	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Cakupan Layanan Penunjang yang tertangani	100 %	3.075.111.996	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Keg	9.847.200	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Keg	9.847.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3.931.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3.931.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 Dok	5.916.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 Dok	5.916.200	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Keg	2.366.611.596	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Keg	2.366.611.596	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	2.310.108.196	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	2.310.108.196	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifokasi Keuangan SKPD	Dispora	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan PD	12 Bln	50.587.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifokasi Keuangan SKPD	Dispora	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan PD	12 Bln	50.587.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dok	5.916.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Dispora	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dok	5.916.200	

						SKPD					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananaya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Keg	280.093.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananaya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Keg	310.093.800	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bln	9.999.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bln	9.999.900	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Dispora	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	12	Bln	29.996.600	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Dispora	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	12	Bln	29.996.600	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispora	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Bln	17.981.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispora	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Bln	17.981.600	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispora	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bln	14.997.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispora	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bln	14.997.700	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispora	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bln	14.999.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispora	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bln	14.999.000	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bln	192.119.000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bln	222.119.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	1	Keg	58.410.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	1	Keg	58.410.800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bln	58.410.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bln	58.410.800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Keg	165.999.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Keg	165.999.200	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispora	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Bln	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispora	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Bln	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bln	54.999.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bln	54.999.200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispora	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bln	108.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispora	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bln	108.000.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Keg	164.149.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Keg	164.149.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispora	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bln	39.994.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispora	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bln	39.994.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora	Terlaksananaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bln	9.490.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora	Terlaksananaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bln	9.490.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispora	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bln	114.664.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispora	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bln	114.664.800	
2	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**		Meningkatnya Pemuda Pelopor, Wira Usaha Pemula, Pemuda Berprestasi	100 %	431.937.900	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**		Meningkatnya Pemuda Pelopor, Wira Usaha Pemula, Pemuda Berprestasi	100 %	431.937.900	
	Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	3 Keg	376.984.200	Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	3 Keg	376.984.200	
	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaran Peningkatan Kapasitas Daya Saing pemuda dan Pelopor	Dispora	Jumlah Pemuda Pelopor	1 Keg	79.934.700	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaran Peningkatan Kapasitas Daya Saing pemuda dan Pelopor	Dispora	Jumlah Pemuda Pelopor	1 Keg	79.934.700	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaran Peningkatan Kapasitas Daya saing Wira usaha Pemula	Dispora	Jumlah Pemuda Wira Usaha Pemula	1 Keg	89.369.600	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaran Peningkatan Kapasitas Daya saing Wira usaha Pemula	Dispora	Jumlah Pemuda Wira Usaha Pemula	1 Keg	89.369.600	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Pemuda Kader	2 Keg	207.679.900	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Pemuda Kader	2 Keg	207.679.900	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	1 Keg	54.953.700	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	1 Keg	54.953.700	
	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Dengan Dunia Usaha	Dispora	Jumlah Dokumen Data Kepemudaan	1 Dok	14.953.700	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Dengan Dunia Usaha	Dispora	Jumlah Dokumen Data Kepemudaan	1 Dok	14.953.700	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Dokumem Data Organisasi Kepemudaan	2 Dok	40.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Dokumem Data Organisasi Kepemudaan	2 Dok	40.000.000	
3	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**		Jumlah Medali Tingkat Nasional		3.106.545.500	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**		Jumlah Medali Tingkat Nasional		3.186.545.500	
			Jumlah Medali Tingkat Provinsi					Jumlah Medali Tingkat Provinsi			
			Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga					Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga			
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah	1 Keg	2.209.635.100	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah	1 Keg	2.289.635.100	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga		2.209.635.100	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga		2.289.635.100	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1 Keg	46.910.400	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1 Keg	46.910.400	
	Seleksi Atlet Daerah	Dispora	Jumlah Atlet Berprestasi	6 Org	46.910.400	Seleksi Atlet Daerah	Dispora	Jumlah Atlet Berprestasi	6 Org	46.910.400	

	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100	%	850.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100	%	850.000.000	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dispora	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	2	Org	850.000.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dispora	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	2	Org	850.000.000	
4	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**		Persentase Peningkatan Pembinaan Organisasi Kepramukaan	100	%	179.819.600	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**		Persentase Peningkatan Pembinaan Organisasi Kepramukaan	100	%	179.819.600	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Terlaksanaya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100	%	179.819.600	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Terlaksanaya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100	%	179.819.600	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Dispora	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan	1	Keg	99.942.000	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Dispora	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan	1	Keg	99.942.000	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Dispora	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	1	Keg	79.877.600	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Dispora	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	1	Keg	79.877.600	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan.

Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara'

Pada tahun 2020, tidak ada usulan masyarakat melalui Musrenbang yang dapat diakomodir oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 2.4

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara

Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**				Tdk ada
	-	-	-	-	-
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**				Tdk ada

Sumber : Musrenbang Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Program Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3).

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan Pemuda dan Olahraga dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa (pasal 4).

Pembangunan keolahragaan dapat dilaksanakan melalui :

1. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
2. Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat, Olahraga masyarakat dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.
3. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga.
4. Pemasalahan Olahraga sebagai Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat.
5. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat.
6. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
7. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan olahraga professional.

8. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.
9. Pendanaan olahraga.
10. Penyelenggaran akreditasi dan sertifikasi.
11. Pemberian penghargaan.
12. Pelaksanaan pengawasan
13. Evaluasi nasional terhadap pencapaian standard nasional keolahragaan.

3.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2024

Perumusan program dan kegiatan untuk Tahun 2024, menyesuaikan antara indetifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional, dan Kebijakan Provinsi.

Secara keseluruhan, total belanja pada perubahan Renja 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 6.873.414,996,- dari yang semula Rp. 6.763.414,996,- atau bertambah sebesar Rp. 110.000.000,- . Pertambahan dana ini digunakan untuk membiayai Pengadaan Alat-alat Olahraga sebesar Rp.80.000.000,- dan Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi sebesar Rp.30.000.000,-. Secara rinci perubahan Belanja dalam Program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara

Perangkar Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
							Renja PD 2024	P-Renja PD 2024	Renja PD 2024	P-Renja PD 2024	
1					2	3	4	5	6	**7**	8
2	19				Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga				4,260,647,126	3,445,438,079	
2	19	O1			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Layanan Penunjang yang tertangani	100 %	100 %	2.794.647.126	2.504.338.761	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			26.810.350	26.810.350	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bln	12 Bln	2,259,000	2,259,000	
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1,936,150	1,936,150	
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1,645,300	1,645,300	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 Dok	1 Dok	2,655,900	2,655,900	
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18,314,000	18,314,000	

2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.360.182.460	2.069.874.095	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bln	12 Bln	2,306,885,910	2,117,676,863
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifokasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan PD	12	Bln	12 Bln	50,587,200	50,587,200
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	12	Bln	12 Bln	2,709,350	2,709,350
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananaya Administrasi Umum Perangkat Daerah			180.419.400	180.419.400	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bln	12 Bln	9 ,058,900	9 ,058,900
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	12	Bln	12 Bln	10,866,900	10,866,900
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Bln	12 Bln	9,427,800	9,427,800
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bln	12 Bln	11,066,800	11,066,800
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bln	12 Bln	139,999,000	139,999,000
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			185.811.116	185.811.116	

2	19	01	2.01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bln	12	Bln	57,900,000	57,900,000	
2	19	01	2.01	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bln	12	Bln	127,411,116	127,411,116	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					41.423.800	41.423.800	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bln	12	Bln	9.584.100	9.584.100	
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bln	12	Bln	5.728.300	5.728.300	
2	19	01	2.01	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bln	12	Bln	6.111.400	6.111.400	
2	19	02			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	Persentase Persentase pembinaan pemuda Wira Usaha Muda Pemula	100	%	100	%	246.000.000	70,000,000	
						Persentase Pembinaan Pemuda Pelopor	100	%	100	%			
						Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan	100	%	100	%			

2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader			176.000.000,	0	
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader	45	14	176.000.000,	0	Rekofusing
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah			70.000.000	70.000.000	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumem Data Organisasi Kepemudaan	2 Dok	2 Dok	70.000.000	70.000.000	
2	19	03			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	Persentase pembinaan prestasi olahraga	100 %	100 %	1.220.000.000	770.000.000	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah			380.000.000	380.000.000	

2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga	1	Pkt	1 Pkt	380.000.000	380.000.000	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				140.000.000	140.000.000	
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Berprestasi	6	Org	6 Org	140.000.000	140.000.000	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				700.000.000	250.000.000	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	2	Org	2 Org	700.000.000	250.000.000	Rekofusing

Tarutung, Juli 2024
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Ir. MARCO T.P. PANGGABEAN M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670317 199203 1 009

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 ini, maka kebijakan, program dan kegiatan DISPORA Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 akan mengacu pada Renja ini.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Tapanuli Utara ini dapat terealisasi dengan baik, sehingga Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara dengan Visi dan Misi Kabupaten yang tertuangkan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2025-2029 dapat diwujudkan.

Tarutung, Juli 2025
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Ir. MARCO T. P. PANGGABEAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670317 199203 1 009

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)
TAHUN 2024








DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih karuniaNya semata sehingga **"Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara''** Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 belum sempurna, untuk itu di harapkan kritik dan sarannya, agar masa mendatang dapat lebih disempurnakan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024, sekaligus sebagai landasan pijakan guna penyusunan program dan kegiatan pada tahun - tahun berikutnya.

Pada akhirnya semoga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini bermanfaat bagi kita semua.

Tarutung, 15 Agustus 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten
Tapanuli Utara

Dalan N.P. Simanjuntak, ST., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19730214 200502 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenan 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 14

2.4 Review terhadap RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli UtaraKabupaten 18

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi 25

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja SKPD 26

3.3. Program dan Kegiatan 35

BAB IV. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 45

BAB V. PENUTUP 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, disebutkan bahwa proses penyusunan Perubahan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Perubahan Renja SKPD. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja SKPD yang definitif. Keterkaitan antara Perubahan Renja SKPD dengan dokumenperencanaan lainnya, bahwa Perubahan Renja merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra SKPD. Kemudian Perubahan Renja tersebut dijabarkan melalui Perubahan RKA SKPD yang berisi rincian Perubahan APBD untuk disusun menjadi Rancangan Perubahan APBD (R. P APBD). Sedangkan kaitannya dengan RKPD, Perubahan Renja menjadi landasan dalam penyusunan RKPD dimaksud.

Renja menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan berupa penganggarannya, yang menjembatani antara perencanaan strategis jangkamenengah dan tahunan.

Adapun ruang lingkup Perubahan Renja Tahun 2024 adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara selama satu tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dapat dicapai, dimana Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja(Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat IIMandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dimaksudkan sebagai upaya melakukan penyesuaian atas perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan tahun 2024.

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.
2. Tersedianya acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai pedoman 1 (satu) tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPJ).

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- **BAB I. PENDAHULUAN**
  - **1.1. Latar Belakang**
  - **1.2. Landasan Hukum**
  - **1.3. Maksud dan Tujuan**
  - **1.4. Sistematika Penulisan**
- **BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**
  - **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**
  - **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD**
  - **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**
  - **2.4. Review trehadap Rancangan Awal RKPD**
  - **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**
- **BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA DINAS PUPR**
  - **2.5. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**
  - **2.6. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**
  - **2.7. Program dan Kegiatan**
- **BAB IV. RENCANA KERJA PD**
- **BAB V. PENUTUP**

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/ program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada Triwulan II, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari 5 (Lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 63.834.739.272 dan Realisasi Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli UtaraKabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. *20.358.960.476* atau mencapai 31,89 %.Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli UtaraKabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Utara Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Hasil) Kegiatan (Keluaran)	Target Capaian Kinerja		Jumlah Pagu	Realisasi Kinerja per Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja terhadap Renja tahun 2024 (%)
						I	II	III	IV	
1	2	3			4					
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**3**			**63,834,739,272.00**	**1,980,485,473.00**	**18,378,475,003.00**			31.89
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100**	**%**	**9,767,571,039.00**	**1,557,089,234.00**	**2,964,766,617.00**			**41.30**
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7**	**Dokumen**	**31,000,100.00**	**6,700,000.00**	**10,244,000.00**			**54.65**
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	**Dokumen**	12,000,100.00	6,700,000.00				55.83
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	**Laporan**	5,000,000.00		**1,572,000.00**			31.44

1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi perangkat Daerah	1	**Laporan**	14,000,000.00		**8,672,000.00**			61.94
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani**	**20**	**Dokumen**	**8,216,943,694.00**	**1,193,501,283.00**	**2,681,846,073.00**			**47.16**
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	8,128,798,694.00	1,193,501,283.00	**2,680,068,873.00**			47.65
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1	**Laporan**	78,145,200.00	-	**-**			-
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	**Laporan**	4,999,700.00	-	**924,000.00**			1,848.00
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	**Laporan**	5,000,100.00	-	**853,200.00**			17.06
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3**	**Laporan**	**4,999,625.00**	**-**	**590,400.00**			**11.81**
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**3**	**Laporan**	4,999,625.00	-	**590,400.00**			11.81
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**11**	**Dokumen**	**407,999,125.00**	**36,275,560.00**	**121,782,495.00**			**38.73**
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	5,000,400.00					-

1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	49,998,925.00		**14,668,290.00**			29.33
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	15,000,000.00		**3,762,000.00**			25.08
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	15,000,000.00	3,899,000.00	**8,000,000.00**			79.32
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Doumen	14,999,800.00		**8,209,800.00**			54.73
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	8,000,000.00					-
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	300,000,000.00	32,376,560.00	**91,041,405.00**			41.13
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani**	**36**	**Laporan**	**156,581,574.00**	**13,487,900.00**	**32,810,507.00**			**29.56**
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	15,999,000.00	1,377,500.00	**850,500.00**			13.92
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	49,653,594.00		**15,308,207.00**			30.83
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	90,928,980.00	12,110,400.00	**16,651,800.00**			31.63

1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**Bulan**	**950,046,921.00**	**299,204,491.00**	**125,413,142.00**			**44.69**
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51	Unit	130,077,721.00	30,419,100.00	**19,543,058.00**			38.41
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	51	Unit	800,000,000.00	266,992,391.00	**97,885,084.00**			45.61
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	14,969,200.00		**7,985,000.00**			53.34
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	5,000,000.00	1,793,000.00	**-**			35.86
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%)**	**22,08**	**%**	**10,966,971,000.00**	**70,185,039.00**	**876,354,000.00**			**8.63**
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6,11**	**KM**	**10,966,971,000.00**	**70,185,039.00**	**876,354,000.00**			**8.63**
1.03.02.2.02.0014	**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	**Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi**	**6,04**	**KM**	**10,591,821,000.00**	**49,185,039.00**	**687,846,000.00**			**6.95**
1.03.02.2.02.0021	**Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**	**Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara**	**0,071**	**KM**	**138,500,000.00**	**21,000,000.00**	**30,000,000.00**			**36.82**

1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3	Dokumen	236,650,000.00	-	158,508,000.00			66.97
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	69,95	%	43,080,197,233.00	353,211,200.00	14,537,354,386.00			34.56
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap 2. Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	15.124	KM	43,080,197,233.00	353,211,200.00	14,537,354,386.00			34.56
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	9	Dokumen	1,631,598,250.00	207,596,000.00	261,595,100.00			28.75
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	60	KM	1,375,782,983.00	62,536,000.00	861,371,598.00			67.15
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	92,28	KM	37,247,226,000.00	2,600,000.00	12,886,093,888.00			34.60
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang direhabilitasi	8,8	Unit	200,000,000.00	1,120,000.00	-			0.56
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	165	Jembatan	1,000,000,000.00	-	-			-
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	7	Dokumen	589,950,000.00	-	-			-
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	8,08	KM	650,000,000.00	36,120,000.00	413,135,000.00			69.11
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2,1	KM	385,640,000.00	43,239,200.00	115,158,800.00			41.07

1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang**	**6**	**Dokumen**	**20,000,000.00**	**-**	**-**			**-**
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**1**	**Dokumen**	**20,000,000.00**	**-**	**-**			**-**
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	**1**	**Dokumen**	20,000,000.00	-	**-**			**-**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Kajian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tersusun dalam tabel 2.2. Berikut kinerja pelayanan OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli UtaraKabupaten Tapanuli Utara

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	-	-	65	66	66,75	69,05	69,95	64,75	67,15	67,87	68,83	69,43	69,95
2	Persentase jumlah jembatan kondisi baik	-	-	78	84,6	84,00	89	90	82,00	82,81	85,87	89,62	90,16	92,05
3	Cakupan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat	-	-	N/A	N/A	57	-	-	N/A	N/A	57	-	33	0
4	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (%)	-	-	72,5	67,64	67,66	73,10	75,10	67,62	69,00	69,49	73,71	75,01	76,10
5	Cakupan ketersediaan dokumen Tata Ruang (%)	-	-	N/A	33,33	35	25	31,25	N/A	0	20,00	-	20	40
	Persentase Jumlah Kecamatan yang memiliki RDTR	-		N/A	33,33	33,33	25,00	31,25	N/A	6,25	20,00	20,00	20	40
6	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	-	-	60,00	70,00	72,00	75,00	78,00	59,8	53,66	53,66	-	70,87	80
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		66,30	53,66	72,00	75,00	78,00	59,8	53,66	53,66	61,10	62,56	
7	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	100	100

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tingkat Kinerja Pelayanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja	Predikat
					Target	Realisasi		
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan	1.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen	69,45	69.43	99.97	Sangat tinggi
		2.	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	Persen	90,00	90,16	100,17	Sangat tinggi
2.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Air	1.	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi	Persen	75,10	75,01	99,88	Sangat tinggi
3.	Meningkatkan fungsi Penataan dan Pengendalian Tata Ruang	1.	Persentase Kecamatan yang sudah memiliki RDTR	Persen	31,25	20,00	64,00	Tinggi
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,00	70,87	90.86	Sangat Tinggi
Jumlah rata-rata capaian kinerja							**88,70**	**Sangat tinggi**

**Angka perhitungan Kertas Kerja Evaluasi AKIP Dinas PUTR tahun 2023*

Tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian kinerja dari keempat sasaran strategis adalah tahun 2023 adalah 88,70 %.

Sasaran strategis **Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan** mempunyai 2 (dua) indikator yaitu :

1. Indikator Kinerja Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap

Hal ini menunjukkan keadaan jalan mantap jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Kondisi jalan kewenangan Kabupaten dibagi dalam 4 (empat) katagori yaitu kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Jalan mantap merupakan penjumlahan kondisi baik ditambah kondisi sedang (Permen PU No.13 Tahun 2011).

Persentase kondisi jalan mantap tahun 2023 ditargetkan sebesar 69,45% dapat direalisasikan sebesar 69.43 % dengan capaian kinerja sebesar 99,97%, dicapai melalui Program Penyelenggaraan Jalan. Dalam mewujudkan pencapaian target indikator tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2023 melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 4,80 km, rekonstruksi jalan sepanjang 35,45 km, rehabilitasi jalan sepanjang 7,27 km, Peningkatan Jalan sepanjang

0,21 km dan pemeliharaan jalan sepanjang 0,16 km.

Adapun rincian realisasi fisik jenis penanganan program tersebut pada tahun 2023 adalah perkerasan hotmix sepanjang 32,26 km, perkerasan lapis penetrasi macadam sepanjang 8,84 km, perkerasan telford sepanjang 3,99 km, perkerasan beton sepanjang 1,72 km, gorong-gorong 69 unit serta dyk semen sepanjang 0,63 km Pembangunan jembatan sebanyak 12 unit dan Rehabilitasi Jembatan sebanyak 3 Unit. Sumber pembiayaan adalah bersumber dari APBD (DAU, DAK, Bonus Produksi).

Untuk mempertahankan capaian kondisi jalan mantap ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara perlu secara serius menangani pemeliharaan jalan yang sudah baik dan perlu lebih memaksimalkan potensi sumber dana yang lain dalam upaya meningkatkan capaian kondisi jalan mantap di Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Indikator Kinerja Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik

Persentase jumlah jembatan kondisi baik menunjukkan keadaan jumlah jembatan dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Persentase jumlah jembatan kondisi baik tahun 2023 ditargetkan sebesar 90,00 % dapat direalisasikan sebesar 90,16 % dengan capaian kinerja sebesar 100,17 % dicapai melalui Program Penyelengaraan Jalan. Realisasi fisik jembatan tahun 2023 adalah p embangunan jembatan dan rahabilitasi jembatan dengan total 15 unit jembatan.

Sumber pembiayaan adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara T.A 2023. Untuk mempertahankan capaian jembatan dalam kondisi baik ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara perlu secara serius menangani pemeliharaan jembatan yang kondisinya saat ini masih baik dan perlu lebih memaksimalkan potensi sumber dana yang lain dalam upaya meningkatkan capaian kondisi jembatan baik di Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Sasaran Meningkatnya **Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air** merupakan upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan persentase pelayanan air irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu **Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi** dengan kategori Sangat tinggi. Persentase Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi tahun 2023 ditargetkan sebesar 75,10% dapat direalisasikan sebesar 75,01 % dengan capaian kinerja sebesar 99,88 %, dicapai melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Dalam mewujudkan pencapaian target indikator tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan membangun saluran semen dan saluran talang sepanjang 6,64 km, melaksanakan operasi dan pemeliharaan saluran irigasi sepanjang 700 m', melaksanakan normalisasi/restorasi sungai sepanjang

8 km serta melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 27 orang.

Indikator sasaran Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 99,88 %, predikat sangat tinggi. Capaian tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,83 % dengan predikat sangat tinggi.

Adapun pencapaian melalui indkator kinerja Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Persentase areal terdampak kondisi jaringan irigasi** menunjukkan keadaan jaringan irigasi mantap yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Kondisi saluran irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dibagi dalam 4 (empat) katagori yaitu panjang saluran irigasi kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Panjang saluran irigasi kondisi mantap merupakan penjumlahan kondisi baik ditambah kondisi sedang. Persentase irigasi kondisi baik tahun 2023 ditargetkan sebesar 75,10% dapat direalisasikan sebesar 75,01 %, dengan capaian kinerja sebesar 99,88 % dicapai melalui Program Pengembangan Sumber Daya Air. Adapun realisasi fisik dari program tersebut pada tahun 2023 adalah saluran semen sepanjang 6.640,70 m',Rehab Pintu Air sebanyak 4 Unit, talang sepanjang 45,50 m, Plat sepanjang 20 m' serta Box Culvert sepanjang 18,30 m'. Sumber pembiayaan adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara T.A.2023. Capaian ini dapat diperoleh dengan adanya Dana alokasi Khusus Bidang sumber daya air.

  Sasaran **Meningkatkan fungsi penataan dan pengedalian tata ruang** merupakan upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan jumlah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara yang memiliki dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pada tahun 2022 dilakukan perubahan RENSTRA sesuai dengan reviu Tim Sakip, dimana **indikator sasaran dan target indiktor sasaran Meningkatkan fungsi penataan dan pengedalian tata ruang yang semula dengan indikator Cakupan ketersediaan dokumen Tata Ruang (%) berubah menjadi Persentase jumlah kecamatan yang memiliki RDTR.** Adapun capaian kinerja sasaran Meningkatkan fungsi penataan dan pengedalian tata ruang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase kecamatan yang sudah memiliki RDTR dengan kategori tinggi. Persentase kecamatan yang sudah memiliki RDTR tahun 2023 ditargetkan sebesar 35% dengan realisasi 20% sehingga capaian kinerja sebesar 64,00%, dicapai melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dalam mewujudkan pencapaian target indikator tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan penyusunan 2 (dua) RDTR pada tahun 2022 yaitu RDTR Muara dan RDTR Siborongborong tidak dapat direalisaskan mengingat pada tahun 2021

terbit Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang provinsi, kabupaten, kota dan rencara detail tata ruang, sehingga meteri teknis yang sebelumnya telah dibuat mengikuti pedoman peraturan sebelumnya yaitu Permen ATR BPN No. 16 tahun 2018 harus direvisi kembali sesuai peraturan terbaru.

Dalam pemenuhan sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai AKIP perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas ini adalah melakukan perubahan terhadap sasaran strategis, indikator sasaran strategis dan target indikator. Capaian kinerja Nilai AKIP perangkat daerah tahun 2023 sebesar 70,87.

2.4. Review terhadap RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 merupakan rancangan program kegiatan Renja satu tahun yaitu tahun 2024. Sampai saat penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan, perkiraan kebutuhan masih tetap sama, dengan kata lain tidak ada perubahan kondisi yang mengharuskan adanya penyesuaian.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari 5 (Lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 63.834.739.272 sebagaimana tersaji dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu Indikatif	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**56,657,694,689.76**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**63,834,739,272.00**	
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**11,045,398,909.14**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100 %**	**9,767,571,039.00**	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	158,723,800.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	**31,000,100.00**	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Cakupan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani	20 Dokumen	7,975,570,978.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Cakupan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani	20 Dokumen	**8,216,943,694.00**	

3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan	7,992,900.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan	**4,999,625.00**	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Dokumen	675,382,100.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Dokumen	**407,999,125.00**	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	354,894,116.14	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan		
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Cakupan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani	36 Laporan	146,063,700.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Cakupan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani	36 Laporan	**156,581,574.00**	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,656,812,315.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	**950,046,921.00**	
II.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%)**	**22,08 %**	**7,115,869,805.79**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%)**	**22,08 %**	**10,966,971,000.00**	
8.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,11 KM	7,084,414,282.37	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,11 KM	**10,966,971,000.00**	

9.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tapanuli Utara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6,04 KM	6,222,647,540.60	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tapanuli Utara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6,04 KM	**10,591,821,000.00**	
10.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tapanuli Utara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,071 KM	358,118,500.00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tapanuli Utara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,071 KM	**138,500,000.00**	
11.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tapanuli Utara	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	503,648,241.77	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tapanuli Utara	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	**236,650,000.00**	
III.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap**	**69,95 %**	**38,021,425,994.83**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap**	**69,95 %**	**43,080,197,233.00**	
12.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap 2. Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	15.124 KM	38,021,425,994.83	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap 2. Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	15.124 KM	**43,080,197,233.00**	
13.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	9 Dokumen	1,000,000,000.00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	9 Dokumen	**1,631,598,250.00**	
14.	Pembangunan Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang Dibangun	60 KM	2,992,687,850.00	Pembangunan Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang Dibangun	60 KM	**1,375,782,983.00**	
15.	Rekonstruksi Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	92,28 KM	24,319,326,672.00	Rekonstruksi Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	92,28 KM	**37,247,226,000.00**	

16.	Rehabilitasi Jembatan	Tapanuli Utara	Panjang Jembatan yang direhabilitasi	8,8 Unit	266,959,228.79	Rehabilitasi Jembatan	Tapanuli Utara	Panjang Jembatan yang direhabilitasi	8,8 Unit	**200,000,000.00**	
17.	Pembangunan Jembatan	Tapanuli Utara	Panjang Jembatan yang dibangun	165 Jembatan	4,758,696,588.50	Pembangunan Jembatan	Tapanuli Utara	Panjang Jembatan yang dibangun	165 Jembatan	**1,000,000,000.00**	
18.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tapanuli Utara	Panjang Jembatan yang dibangun	7 Dokumen	400,000,000.00	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tapanuli Utara	Panjang Jembatan yang dibangun	7 Dokumen	**589,950,000.00**	
19.	Rehabilitasi Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	8,08 KM	3,686,490,940.00	Rehabilitasi Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	8,08 KM	**650,000,000.00**	
20.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2,1 KM	597,264,715.54	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tapanuli Utara	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2,1 KM	0	
IV.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang**	**4 Dokumen**	**400,000,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang**	**4 Dokumen**	**20,000,000.00**	
21.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	135,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	
22.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	90,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000.00	

23.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	175,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
JUMLAH					**56,657,694,689.76**					**63,834,739,272.00**	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun hasil dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten serta memperhatikan usulan-usulan masyarakat pada kunjungan kerja Bupati Tapanuli Utara ke Desa-desa terdapat beberapa usulan-usulan yang sesuai yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas poko dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara

NO	Rancangan Awal RKPD					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		
1	2	3	4	5		6
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%)	26	Paket	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kabupaten Tapanuli Utara	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	36	Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERENGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi Kementerian PU **"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**, ditetapkan Misi Kementerian PU tahun 2015 – 2019, yaitu:

- Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatanpangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip **"infrastruktur untuk semua"**;
- Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dankawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
- Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untukmendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk mendukung prioritas pembangunan Daerah dan Nasional sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Tujuan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun atau kapan harus dicapai. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 selaras dengan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 **:** Meningkatnya mobilitas dan aksesibilitas jalan
Sasaran : Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan
Tujuan 2 **:** Meningkatnya pengelolaan sumber daya air
Sasaran : Meningkatkan pengelolaan sumber daya air
Tujuan 3 **:** Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang
Sasaran : Meningkatkan fungsi dan pengendalian tata ruang
Tujuan 4 **:** Meningkatnya kualitas manejemen perkantoran
Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Berikut adalah penjabaran atas keselarasan misi yang diemban, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TAPANULI UTARA

SEBELUM PERUBAHAN

No	Keterangan		Rumus/Formula	Satuan	2019	2020	2021		2022		2023		2024	
					Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**												
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	(Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap + Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik)/2	Persen	55.80	56.54	57.20	76.87	79.03	79.23	79.73	79,79	81.00	
	Sasaran	**Indikator Sasaran**												
	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	1. (Panjang Jalan kondisi mantap/panjang jalan seluruhnya) x 100%	Persen	64.75	67.15	66.75	67.87	69.05	68.83	69.45	69,43	69.95	
		2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	2. (Jumlah Jembatan kondisi baik/jumlah jembatan seluruhnya) x 100%	Persen	82	82.81	84.00	85.87	89	89.62	90	90,16	92.05	
	Program	**Indikator Program**												

	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	1. (Panjang Jalan kondisi mantap/panjang jalan seluruhnya) x 100%	Persen	64.75	67.15	66.75	67.87	69.05	68.83	69.45	69,43	69.95	
		2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	2. (Jumlah Jembatan kondisi baik/jumlah jembatan seluruhnya) x 100%	Persen	82.00	82.81	84.00	85.87	89.00	89.62	90.00	90,16	92.05	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	SDM Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat (orang)	Jumlah Tenaga kontruksi bersertifikat	Orang	N/A	N/A	57.00	57.00	77.00	83.00	97.00	33	117.00	
2	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**												
	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah Persentase Prasarana Fisik, Produktivitas, Sarana Penunjang, Organisasi Personalia, Dokumentasi, P3A/GP3A/IP3A	Persen	24.00	58.00	60.00	60.00	62.00	63.56	64.00	65,91	66.00	
	Sasaran	**Indikator Sasaran**												
	Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (%)	Areal Terdampak Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (Ha) /Areal Terdampak Jaringan Irigasi Kabupaten (Ha) x 100%	Persen	67.62	69.00	67.66	69.49	73.10	73.71	75.10	75,01	76.10	
	Program	**Indikator Program**												

	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi(%)	Persentase Panjang Saluran Irigasi + Persentase Jumlah Bangunan Pelengkap	Persen	15	22.00	22.02	22.02	22.04	22.04	22.06	22,06	22.08	
3	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**												
	Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang	Persentase Kesesuaian penataan dan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	Luas pemanfaatan ruang yang sudah sesuai /Luas kabupaten Tapanuli Utara x 100%	Persen	20	25	35	60	40	70	60	60	70	
	Sasaran	**Indikator Sasaran**												
	Meningkatkan fungsi penataan dan pengendalian Tata Ruang	Persentase Jumlah kecamatan yang memiliki RDTR	Jumlah Kecamatan yang sudah memiliki RDTR/Jumlah Kecamatan Seluruhnya x 100%	Persen	6.25	6.25	33,33	20.00	25.00	20	31.25	20,00	40.00	
	Program	**Indikator Program**												
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang	Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang	Dokumen	1	1	3	3	4	3	5	0	6	
4	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**												
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja kabupaten	Hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP oleh Kementerian PAN-RB	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Sasaran	**Indikator Sasaran (Pemerintah)**												

	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	66.30	53.66	72.00	66,37	75.00	66.37*	78.00	70,87	80.00	
	Program	**Indikator Program**												
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi yang tertangani		Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	

SETELAH PERUBAHAN

Keterangan		Rumus/Formula	Satuan	2019	2020	2021		2022		2023		2024	
				Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tujuan	**Indikator Tujuan**												
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	(Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap + Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik)/2	Persen	55.80	56.54	57.20	76.87	79.03	79.23	79.73	79,80	80.79	
Sasaran	**Indikator Sasaran**												
Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	1. (Panjang Jalan kondisi mantap/panjang jalan seluruhnya) x 100%	Persen	64.75	67.15	66.75	67.87	69.05	68.83	69.45	69,43	69.53	
	2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	2. (Jumlah Jembatan kondisi baik/jumlah jembatan seluruhnya) x 100%	Persen	82	82.81	84.00	85.87	89	89.62	90	90,16	92.05	
Program	**Indikator Program**												
Program Penyelenggaraan Jalan	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	1. (Panjang Jalan kondisi mantap/panjang jalan seluruhnya) x 100%	Persen	64.75	67.15	66.75	67.87	69.05	68.83	69.45	69,43	69.95	

	2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	2. (Jumlah Jembatan kondisi baik/jumlah jembatan seluruhnya) x 100%	Persen	82.00	82.81	84.00	85.87	89.00	89.62	90.00	90,16	92.05	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	SDM Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat (orang)	Jumlah Tenaga kontruksi bersertifikat	Orang	N/A	N/A	57.00	57.00	77.00	83.00	97.00	33	117.00	
Tujuan	**Indikator Tujuan**												
Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah Persentase Prasarana Fisik, Produktivitas, Sarana Penunjang, Organisasi Personalia, Dokumentasi, P3A/GP3A/IP3A	Persen	24.00	58.00	60.00	60.00	62.00	63.56	64.00	65,91	66.00	
Sasaran	**Indikator Sasaran**												
Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (%)	Areal Terdampak Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (Ha) /Areal Terdampak Jaringan Irigasi Kabupaten (Ha) x 100%	Persen	67.62	69.00	67.66	69.49	73.10	73.71	75.10	75,01	76.10	
Program	**Indikator Program**												
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi(%)	Persentase Panjang Saluran Irigasi + Persentase Jumlah Bangunan Pelengkap	Persen	15	22.00	22.02	22.02	22.04	22.04	22.06	22,06	22.08	

Tujuan	**Indikator Tujuan**												
Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang	Persentase Kesesuaian penataan dan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	Luas pemanfaatan ruang yang sudah sesuai /Luas kabupaten Tapanuli Utara x 100%	Persen	20	25	35	60	40	70	60	60	70	
Sasaran	**Indikator Sasaran**												
Meningkatkan fungsi penataan dan pengendalian Tata Ruang	Persentase Jumlah kecamatan yang memiliki RDTR	Jumlah Kecamatan yang sudah memiliki RDTR/Jumlah Kecamatan Seluruhnya x 100%	Persen	6.25	6.25	33,33	20.00	25.00	20	31.25	20,00	40.00	
Program	**Indikator Program**												
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang	Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang	Dokumen	1	1	3	3	4	3	5	0	2	
Tujuan	**Indikator Tujuan**												
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja kabupaten	Hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP oleh Kementerian PAN-RB	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Sasaran	**Indikator Sasaran (Pemerintah)**												
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	66.30	53.66	72.00	66,37	75.00	66.37*	78.00	70,87	80.00	

Program	Indikator Program												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi yang tertangani		Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	

3.2 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Pada Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan Program Pembangunan yang direncanakan sebanyak 5program dan 13 kegiatan dan 37 Sub kegiatan. Rincian rencana kegiatan per program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Ada pun rencana program dan kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat tabel 3.2. di bawah ini :

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. TAPANULI UTARA TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						**56.657.694.689,76**							**56.657.694.689,76**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**56.657.694.689,76**							**56.657.694.689,76**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**56.657.694.689,76**							**56.657.694.689,76**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi***	**-**			**100 persen**	**11.045.398.909,14**						**-**	**11.045.398.909,14**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlayani Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			7 Dokumen 100 persen	158.723.800,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAN INFRASTRUKTUR	ASN Dinas PUTR	-	158.723.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	66.044.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAN INFRASTRUKTUR	ASN Dinas PUTR		66.044.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7.779.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAN INFRASTRUKTUR	ASN Dinas PUTR		7.779.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	84.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAN INFRASTRUKTUr	ASN Dinas PUTR		84.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlayani Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined*	-			20 Dokumen 12 bulan undefined undefined	7.975.570.978,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAN INFRASTRUKTUR	Perangkat Daerah	-	7.975.570.978,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/bulan	7.887.663.178,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Perangkat Daerah		7.887.663.178,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	77.809.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Perangkat Daerah		77.809.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	5.098.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Perangkat Daerah		5.098.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			3 Laporan 1 dokumen	7.992.900,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah	-	7.992.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	7.992.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		7.992.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah undefined*	-			1 kegiatan undefined undefined	69.959.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN Dinas PUTR	-	69.959.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	69.959.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN Dinas PUTR		69.959.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah undefined*	-			11 Dokumen 12 persen undefined undefined	675.382.100,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah	-	675.382.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	10.241.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		10.241.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	94.998.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		94.998.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	26.513.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		26.513.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	31.249.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		31.249.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	34.985.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		34.985.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	19.996.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		19.996.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	457.396.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		457.396.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			14 Unit 12 bulan	354.894.116,14			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTU	Perangkat Daerah	-	354.894.116,14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	214.903.916,14	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	Perangkat Daerah		214.903.916,14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	109.795.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	Perangkat Daerah		109.795.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30.194.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	Perangkat Daerah		30.194.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			36 Laporan 12 bulan	146.063.700,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah	-	146.063.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.240.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		5.240.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	49.995.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		49.995.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	90.828.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		90.828.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan	1.656.812.315,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah	-	1.656.812.315,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				51 Unit	222.800.355,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		222.800.355,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				51 Unit	1.246.250.772,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		1.246.250.772,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	27.699.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		27.699.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	140.071.288,00	-	-	-	-	ASN dan Perangkat Daerah		140.071.288,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	19.990.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	ASN dan Perangkat Daerah		19.990.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi***	**-**			**22,08 persen**	**7.155.869.805,79**						**-**	**7.155.869.805,79**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pemenuhan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			2 kegiatan 600 Ha	71.455.523,42			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat disekitar Sungai yang dinormalisasi/direstorasi dan petugas yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	71.455.523,42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				8 KM	71.455.523,42	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat disekitar Sungai yang dinormalisasi/direstorasi dan petugas yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		71.455.523,42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			6.11 KM	7.084.414.282,37			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat	-	7.084.414.282,37	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				6.04 KM	6.222.647.540,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		6.222.647.540,60	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,071 KM	358.118.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	Masyarakat		358.118.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				3 Dokumen	503.648.241,77	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	Masyarakat		503.648.241,77	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik*** ***Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap***	**-**			**92,05 persen 69,95 persen**	**38.021.425.974,83**						**-**	**38.021.425.974,83**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya penanganan Jalan Kabupaten/Kota*	-			15.124,73 meter	38.021.425.974,83			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	Masyarakat Pengguna Jalan dan Jembatan	-	38.021.425.974,83	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				9 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	Masyarakat Pengguna Jalan dan Jembatan		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				60 KM	2.992.687.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	Masyarakat Pengguna Jalan dan Jembatan		2.992.687.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				92.28 KM	24.319.326.672,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	Masyarakat Pengguna Jalan dan Jembatan		24.319.326.672,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				8.8 Jembatan	266.959.228,79	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	Masyarakat Pengguna Jalan dan Jembatan		266.959.228,79	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				165 Jembatan	4.758.696.568,50	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	Masyarakat Pengguna Jalan dan Jembatan		4.758.696.568,50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1 KM	400.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	Masyarakat Pengguna Jalan dan Jembatan		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				8.08 KM	3.686.490.940,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	Masyarakat Pengguna Jalan dan Jembatan		3.686.490.940,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2.1 KM	597.264.715,54	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	Masyarakat Pengguna Jalan dan Jembatan		597.264.715,54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***SDM Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat***	**-**			**117 orang**	**35.000.000,00**						**-**	**35.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	-			117 orang	35.000.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				117 Orang	35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Jumlah Ketersediaan Dokumen Tata Ruang***	**-**			**6 dokumen**	**400.000.000,00**						**-**	**400.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penatapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*	-			2 Dokumen	135.000.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRA STRUKTUR	Masyarakat	-	135.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota														
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				27 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang														
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				1 Orang	100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen	90.000.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat	-	90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	-			12 bulan	175.000.000,00			-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat	-	175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR	Masyarakat		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	J U M L A H							**56.657.694.689,76**							**56.657.694.689,76**	

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam perencanaan Perubahan Renja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli
UtaraKabupaten Tapanuli Utara

Kode Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Target Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3		3	4	5	6
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		**100%**	**100%**	**63,834,739,272.00**	**64,334,663,531.00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**	**100%**	**100%**	**9,767,571,039.00**	**9,232,901,638.00**	
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7 Dokumen, Laporan**	**7 Dokumen, Laporan**	**31,000,100.00**	**41,000,100.00**	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	12,000,100.00	12,000,100.00	

1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	14,000,000.00	24,000,000.00	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani**	**20 Dokumen, 12 Bulan**	**20 Dokumen, 12 Bulan**	**,216,943,694.00**	**7,552,513,953.00**	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	8,128,798,694.00	7,464,368,953.00	
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1 Dolumen	1 Dolumen	78,145,200.00	78,145,200.00	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	4,999,700.00	4,999,700.00	
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	5,000,100.00	5,000,100.00	
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**4,999,625.00**	**4,999,625.00**	
1.03.01.2.03.0006	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	3 Laporan	3 Laporan	**4,999,625.00**	**462,999,525.00**	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1Dokumen, 9 Paket 2 Laporan**	**1Dokumen, 9 Paket 2 Laporan**	**07,999,125.00**	**457,999,125.00**	

1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	,000,400.00	5,000,400.00	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	9,998,925.00	49,998,925.00	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000.00	15,000,000.00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dolumen	14,999,800.00	14,999,800.00	
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	8,000,000.00	8,000,000.00	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	300,000,000.00	350,000,000.00	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani**	**36 Laporan**	**36 Laporan**	**156,581,574.00**	**126,271,914.00**	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15,999,000.00	15,999,000.00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	49,653,594.00	49,653,594.00	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	90,928,980.00	60,619,320.00	

1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**950,046,921.00**	**1,050,116,921.00**	
1..03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51 Unit	51 Unit	130,077,721.00	175,077,721.00	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	51 Unit	51 Unit	800,000,000.00	855,070,000.00	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	14,969,200.00	14,969,200.00	
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%)**	**22,08 %**	**22,08 %**	**10,966,971,000.00**	**10,797,325,000.00**	
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Kegiatan, 600 Ha**	**2 Kegiatan, 600 Ha**	**10,966,971,000.00**	**10,797,325,000.00**	
1.03.02.2.02.0014	**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	**Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi**	**6,04 km**	**6,04 km**	10,591,821,000.00	10,431,175,000.00	
1.03.02.2.02.0021	**Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**	**Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara**	**0,071 km**	**0,071 km**	138,500,000.00	129,500,000.00	

1.03.02.2.02.0035	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa**	**Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	236,650,000.00	236,650,000.00	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap**	**69,95 %**	**69,95 %**	**43,080,197,233.00**	**44,284,436,893.00**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang jalan kabupaten yang ditangani**	**15.124,73 meter**	**15.124,73 meter**	43,080,197,233.00	44,284,436,893.00	
1.03.10.2.01.0029	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**	**Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian**	**9 Dokumen**	**9 Dokumen**	1,631,598,250.00	1,682,398,250.00	
1.03.10.2.01.0032	**Pembangunan Jalan**	**Panjang Jalan yang Dibangun**	**60 Km**	**60 Km**	1,375,782,983.00	1,347,382,972.50	
1.03.10.2.01.0033	**Rekonstruksi Jalan**	**Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan**	**92,28 Km**	**92,28 Km**	37,247,226,000.00	37,547,226,000.00	
1.03.10.2.01.0039	**Rehabilitasi Jembatan**	**Panjang Jembatan yang direhabilitasi**	**8,8 Jembatan**	**8,8 Jembatan**	200,000,000.00	200,000,000.00	
1.03.10.2.01.0040	**Pembangunan Jembatan**	**Panjang Jembatan yang dibangun**	**165 Jembatan**	**165 Jembatan**	1,000,000,000.00	800,000,000.00	
1.3.10.2.01.0043	**Survey Kondisi Jalan/Jembatan**	**Panjang Jembatan yang dibangun**	**1 Km**	**1 Km**	589,950,000.00	589,950,000.00	
1.03.10.2.01.0044	**Rehabilitasi Jalan**	**Panjang Jalan yang Direhabilitasi**	**8,08 Km**	**8,08 Km**	650,000,000.00	1,742,983,920.50	
1.03.10.2.01.0046	**Pemeliharaan Rutin Jalan**	**Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin**	**2,1 Km**	**2,1 Km**	385,640,000.00	374,495,750.00	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	

1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	20,000,000.00	20,000,000.00	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	
					63,834,739,272.00	**64,334,663,531.00**	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. ***Output Perubahan*** **Rencana Kerja** Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara adalah **Program Tahunan** Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Perubahan RENJA digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Perubahan RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 ini dapat dijadikan acuanbagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024. Demikian Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini untuk dilaksanakan.

Tarutung, 15 Agustus 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten
Tapanuli Utara

Dalan N.P Simanjuntak, ST., MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19730214 200502 1 003

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara perlu menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Renstra PD, disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis PD dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2024. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun 2024.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731025 199304 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan perencanaan kerja. Perencanaan terdiri dari dua elemen penting, yaitu sasaran (goals) dan rencana itu sendiri (plan). Dalam menetapkan sasaran, masyarakat sebagai stake holder diharapkan menjadi pemain utama. Partisipasi masyarakat dan kemampuan untuk menangkap dan menerjemahkan tuntutan publik menjadi faktor penting dalam proses perencanaan.

Sejak awak triwulan I (pertama) Tahun 2020 hingga saat ini, hampir seluruh negara di dunia telah terjangkit penyebaran pandemic covid 19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia cukup besar dengan terganggunya mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi khususnya pada sektor Transportasi yang berdampak meningkatnya angka-angka penganguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2024, yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Ruang lingkup Rencana Kerja Perubahan adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai. Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024, yaitu “Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung SDM yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata”, pencapaiannya didukung dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government.

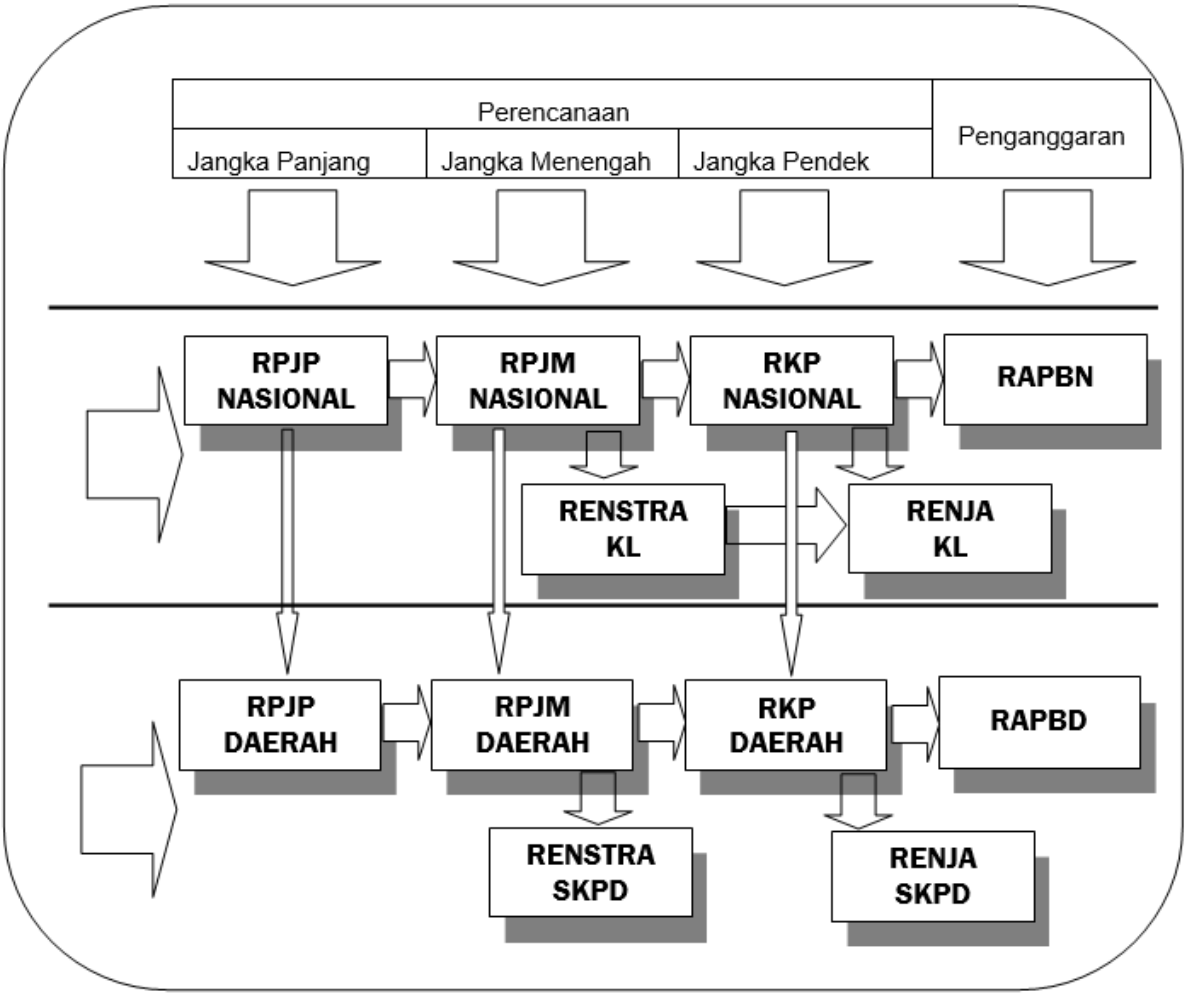
Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara mengampu misi ke 6 (enam) yang erat kaitannya dengan Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang secara rinci pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara nomor : 14 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD.

Hubungan Renja Perubahan dengan dokumen perencanaan lainya dapat dilihat pada diagram alir di bawah ini :



1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang- undang Nomor 7 Drt Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, jo Undang - undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, jo Undang - undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan ini dimaksudkan untuk membuat Rencana Kerja Perubahan tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 dan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten

Tapanuli Utara 2020–2024 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang Perhubungan tahun 2024;
2. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di bidang Perhubungan tahun 2024;
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dan menjelaskan kedudukan Renja Perubahan terhadap dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021

2.2. Analisis Pelayanan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
Mengemukakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4. Review Terhadap RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Tahun 2023

Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman kepada Renstra Tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target, sasaran tahunan dan pencapaiannya dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja, outcome yang dikaitkan dengan capaian sasaran.

Tingkat capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja yang meliputi indikator input, output, outcomes, sedangkan untuk indikator kinerja benefit dan impact belum dikembangkan pengukurannya. Beberapa penyebab belum dapat dikembangkannya pengukuran antara lain : Kesulitan untuk menetapkan secara tepat apa yang mesti diukur, penampakan indikator benefit dan impact adalah hasil integrasi dari banyak kegiatan bahkan lebih dari satu program dengan jangka waktu melebihi satu tahun, disamping belum tersedianya media atau sistem pengumpulan data kinerja.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target s/d Tahun 2023	
					Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
	Perhubungan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusuann Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KInerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KInerja SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Koordinasi dan Penyusnan Laporan Keuangan SKPD	Tersedianyan Laporan Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianyan Alat Tulis Kanotr	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersdianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daeran									
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BAngunan LAinnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BAngunan LAinnya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
				Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota									
				Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	100 persen	15 unit	15 unit	100 persen
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	8 lokasi	8 lokasi	100 persen
				Pengujian Berkala Kendraan Bermotor									
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	750 set	750 set	750 set	750 set	100 persen	750 set	750 set	100 persen
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan Bermotor	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100 persen	4 unit	4 unit	100 persen
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen

				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalan Trayek Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota									
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100 persen	1 tahun	1 tahun	100 persen
				Program Pengelolaan Pelayaran									
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabunan Sungai dan Danau									
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100 persen	1 tahun	1 tahun	100 persen

2.2. Analisis Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2020-2024, Untuk Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam mencapai sasaran kinerja. Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kinerja yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (performance plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2023 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (performance gap).

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator		IKK	Satuan	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2022	2023	2023	2024	
1	**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**												
	a	Jumlah Penumpang Bus dan Mini Bus		Orang	2.870.000	2.898.700	2.927.687	2.956.963	2.856.930	2.852.200	2.927.678	2.956.963	
	b	Jumlah Penumpang Kapal Danau		Orang	22.600	23.052	23.913	23.983	55.750	58.854	23.913	23.983	
	c	Jumlah Penumpang Pesawat Udara		Orang	200.000	203.052	206.045	209.135	1.450.365	300.537	206.045	209.135	
2	**Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**			Unit	311	1.326	1.342	1.360	1.670	1.097	1.342	1.360	
3	**Jumlah Pelabuhan Udara/Danau/Terminal Bis**												
	a	Jumlah Pelabuhan Udara		Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	
	b	Jumlah Pelabuhan Danau		Unit	2	3	3	3	3	3	3	3	
	c	Jumlah Terminal Bis		Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	**Jumlah Angkutan Darat**			Unit	1.600	1.610	1.620	1.600	1.550	1.632	1.620	1.600	
5	**Lama Pengujian Kelaikan Angkutan Umum**			Menit	30	30	30	30	30	30	30	30	
6	**Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu**			Unit	325	350	375	400	8	21	400	425	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

a. Tingkat Kinerja Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada publik, Dinas Perhubungan diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pengembangan objek Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan memanfaatkan sarana prasarana dan SDM yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara maka diharapkan institusi ini dapat meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kinerja dan pelayanan yang baik.

b. Permasalahan/ Hambatan

Dalam upaya pelayanan perhubungan ditemukan berbagai hambatan/permasalahan yang timbul, diantaranya :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**

  Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah terbatasnya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah, sehingga survey lapangan dan monitoring pelaksanaan kegiatan sangat terbatas. Masalah lain adalah kurangnya ASN yang memiliki kompetensi sehingga berpengaruh terhadap pelayanan perhubungan yang kurang optimal. Strategi Pemecahan masalah: Perlunya penambahan Biaya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, dan peningkatan kualitas SDM agar pelaksanaan pelayanan administrasi umum pemerintahan berhasil dalam menunjang pelaksanaan program yang ditetapkan. Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah terlalu minimnya dana perbaikan maupun pengadaan sarana dan prasarana kantor. Sarana kantor yang masih jauh dari cukup diakibatkan terbatasnya dana untuk program ini. Melihat kondisi kenaikan standar harga-harga barang kebutuhan kantor. Strategi pemecahan masalah : perlunya pemberi wewenang memberikan perhatian yang serius kepada sarana dan prasarana aparatur khususnya pemberian kenaikan anggaran dalam APBD TA 2024 agar sarana dan prasarana kantor lebih memadai. Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah kurangnya dana, sehingga volume pelatihan maupun sosialisasi peningkatan SDM terhadap Aparatur di dalam daerah ataupun di luar

daerah terbatas. Strategi pemecahan masalah : perlu penambahan dana agar volume atau jumlah aparatur yang ikut serta dalam sosialisasi, pelatihan maupun Bimtek yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta bertambah, baik di dalam daerah maupun di luar daerah sehingga dapat menambah kualitas dan ilmu pengetahuan aparatur. Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah minimnya dana APBD untuk peningkatan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

  Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah minimnya anggaran yang ada pada Dinas Perhubungan, sehingga penyediaan sarana prasarana perhubungan sangat terbatas, dan juga ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang perhubungan masih terbatas sehingga kinerja pelayanan perhubungan tidak maksimal. Hal itu juga diakibatkan oleh minimnya dana yang ditampung di APBD. Strategi pemecahan masalah : agar kedepannya Pemkab Tapanuli Utara lebih meningkatkan jumlah anggaran pada dinas perhubungan sehingga penyediaan sarana prasarana perhubungan dapat terpenuhi serta kualitas SDM yang komperten dapat ditingkatkan.

- **Program Pengelolaan Pelayaran**

  Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah minimnya SDM yang kompeten dalam bidang angkutan sungai danau dan penyeberangan sehingga pengelolaan pelayaran khususnya angkutan danau belum dapat dikelola secara maksimal. Strategi pemecahan masalah : Agar kedepannya perlu peningkatan kualitas SDM yang kompeten dalam bidang angkutan danau. Sehingga pelayanan pengelolaan pelayaran angkutan danau dapat terlaksana secara optimal.

c. Dampak Program Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Pencapaian Visi/Misi Bupati Tapanuli Utara

Dinas Perhubungan sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi kepala daerah Tapanuli

Utara dalam RPJMD 2019-2024 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian misi ke 6 (enam) yaitu ; ***"Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan mengacu pada Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup"***, dan misi ke 8 (delapan) yaitu : ***"meningkatkan Kualitas Pelayaanan Publik dengan Sistem E-GOVERNMENT".***

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dipastikan ada tantangan dan peluang. Salah satu tantangan dalam peningkatan pelayanan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanui Utara diantaranya belum terpenuhinya ketersediaan Fasiltas Keselamatan laulintas, kurangnya kesadaran masyarakat tentang peraturan berlalulintas, serta masih terbatasnya ASN yang kompeten di bidang perhubungan sehingga sangat mempengaruhi kinerja terhadap pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) RKPD

Berbagai program kegiatan telah ditampung pada kegiatan 2023. Namun demikian masih banyak kegiatan yang telah tertuang pada RENSTRA 2020-2024 yang tidak tertampung pada anggaran 2023 maupun 2024. Hal ini disebabkan masalah dana yang terbatas, permohonan dari masyarakat yang tidak dianggarkan sebelumnya. Sehingga pada kegiatan yang direncanakan Tahun Anggaran 2024 terdapat kegiatan yang baru yang tidak terdapat di RKPD. Namun diharapkan program yang tidak dapat ditampung di APBD dapat dianggarkan di APBD Provinsi maupun APBN.

Tabel 2.3
Review Terhadap RKPD Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Keterangan
Nama Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Nama Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**5.321.025.583,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tertangani**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tertangani**		**4.267.177.645,00**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**27.497.000,00**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.499.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.999.000,00	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	14.999.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Terciptanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terciptanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**3.510.430.023,00**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	528 Orang/ bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	528 Orang/ bulan	3.454.674.823,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50.755.200,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**150.371.200,00**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	6.995.200,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	23.706.100,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	4.996.200,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	14.097.200,00	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	10.458.500,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	90.118.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**93.000.000,00**	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	93.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**384.019.600,00**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	48.714.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	334.305.600,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**101.859.822,00**	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	97.097.822,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	4.762.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		**Cakupan Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Cakupan Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan**		**1.042.008.138,00**	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		**Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**176.056.300,00**	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	20 Unit		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	20 Unit	176.056.300,00	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		**Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C**			**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		**Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C**		**73.500.100,00**	
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dinas Perhubungan	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	2 Unit		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dinas Perhubungan	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	2 Unit	73.500.100,00	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		**Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**95.070.238,00**	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	59.083.200,00	

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Unit		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Unit	35.987.038,00	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		**Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**			**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**697.381.500,00**	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	667.381.500,00	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	30.000.000,00	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**0,00**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		**Cakupan Pelayanan Keselamatan Pelayaran**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		**Cakupan Pelayanan Keselamatan Pelayaran**		**11.839.800,00**	
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		**Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**			**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**		**Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**		**11.839.800,00**	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit	11.839.800,00	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang. Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan dan Sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Program
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Cakupan Pelayanan Perhubungan	1.	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	a.	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan
						Program Pengelolaan Pelayaran
				b.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan
						Program Pengelolaan Pelayaran
				c.	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan
						Program Pengelolaan Pelayaran
		2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a.	Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target dan realisasi dari Sasaran Strategis pada Dinas Perhubungan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2024
1.	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	a.	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas	Persen	23,00%	18,92%	82,26%	25%
		b.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	49,00%	30,28%	61,80%	51%
		c.	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	19,00%	5,59%	29,44%	21%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a.	Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Nilai	65	68,22	104,95%	65

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 tertuang dalam program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan untuk Tahun 2024.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan
- Program Pengelolaan Pelayaran

Rencana Kerja Perubahan program dan kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian kinerja untuk Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut (terlampir).

RENCANA KERJA PERUBAHAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja						Anggaran Tahun 2024
			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5		6	7		8
	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA								**4.560.650.769,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								**4.309.371.769,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**17.494.400,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	7.497.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	4.998.200,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	4.999.200,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**3.753.833.725,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	528	Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	528	Orang/bulan	3.698.082.225,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	50.755.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	4.996.300,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								**95.219.156,00**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.485.800,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	18.989.350,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.076.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	11.717.406,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	3.710.600,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	55.240.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**383.061.688,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	58.820.400,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	323.241.288,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**59.762.800,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	56.841.800,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	2.921.000,00

	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								**243.799.000,00**
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								**25.000.000,00**
	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	25.000.000,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								**0,00**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1	Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Unit	0,00
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								**8.790.000,00**
	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C		Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	2	Unit	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	2	Unit	8.790.000,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								**40.000.000,00**
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Dokumen	0,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	5	Unit	40.000.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	0,00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								**170.009.000,00**
	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)		Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	1	Laporan	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	1	Laporan	0,00

	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1	Laporan	170.009.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								**7.480.000,00**
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								**7.480.000,00**
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Unit	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	Unit	7.480.000,00

BAB IV
PENUTUP

Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang good governance merupakan komitmen dari penyelenggara ditingkat atas sampai bawah, dimana semua kebijakannya disusun dalam kerangka yang jelas dan terletak pada bingkai ideologi dan konstiuante dalam suatu wilayah yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 berdasarkan pada peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang termuat dalam susunannya membutuhkan mewujudkan semua kegiatan perlu mendapatkan prasarana dan sarana guna mendukung kegiatan dimaksud sehingga semua kegiatan yang tersusun dalam kerangka kerja pada Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara ini merupakan bagian penyelenggara pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara agar dapat terakomodir sesuai dengan mekanisme yang ada, sehingga semua kegiatan dimaksud sekiranya dapat bermanfaat bagi pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731025 199304 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH …. 18

BAB IV PENUTUP 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program/kegiatan tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang disusun dengan perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD untuk Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 tersebut memuat rencana program dan kegiatan Tahun 2024 dengan mengacu pada permasalahan program dan kegiatan Tahun 2023 dan didasarkan pada rencana kerja perubahan pemerintah daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024. Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus disusun oleh OPD yang bertujuan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara.

1.2. Landasan Hukum

Pedoman penyusunan Rencana Perubahan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara ini disusun atas berbagai Landasan Hukum, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negafa Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri **Republik Indonesia** Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara **Perencanaan,** Pengendalian **Dan Evaluasi** Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi **Rancangan Peraturan Daerah Tentang** Rencana Pembangunan **Jangka** Panjang Daerah **Dan Rencana Pembangunan Jangka** Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka **Panjang** Daerah, **Rencana** Pembangunan **Jangka Menengah** Daerah, Dan Rencana Keqa Pemerintah Daerah:
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri **Republik** Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, **Kodefikasi,** Dan **Nomenklatur** Perencanaan Pembangunan Dan **Keuangan** Daerah;
7) Peraturan menteri dalam negeri republik **indonesia nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan** anggaran pendapaan dan belanja daerah tahun anggaran 2021:

8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil **Verifikasi dan Validasi** Pemutakhiran Klasifikasi, **Kodefikasi,** dan Nomenklatur **Perencanaan Pembangunan dan Keuangan** Daerah;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
10) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
11) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
12) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
13) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.
14) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka penyusunan rencana kerja perubahan anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.

Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Meningkatkan penyebarluasan informasi dan komunikasi publik dalam 1 Tahun anggaran melalui program : Informasi dan Komunikasi Publik

2. Meningkatkan sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara dalam 1 Tahun anggaran melalui program : Aplikasi dan Informatika

3. Meningkatkan Perangkat daerah yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar dalam 1 Tahun anggaran melalui program : Penyelenggaraan statistik sektoral

4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun anggaran melalui program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakn program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Pada tahun 2024 pengukuran kinerja kegiatan dilaporkan secara rutin setiap triwulan, disamping juga secara rutin melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran dalam sistem informasi manajemen pelaporan setiap bulan (laporan dinamis). Pengukuran kinerja tahun 2024 dilakukan setiap triwulan berdasarkan sasaran yang ditetapkan karena pengukuran berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja program dan kegiatan yang dijalankan pada sasaran tersebut. Adapun capaian kinerja untuk masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Pada triwulan II Tahun 2024 program ini menargetkan realisasi fisik sebesar 50% dan target keuangan sebesar Rp. 3.431.505.716,-, realisasi yang dicapai pada program ini yaitu kegiatan fisik 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.637.038.833,-

Secara keseluruhan dapat disimpulkan program ini mendapatkan realisasi fisik 50% dan keuangan 47% dari target tersebut di atas.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

   Pada triwulan II Tahun 2024 program ini menargetkan realisasi fisik sebesar 50% dan target keuangan sebesar Rp. 350.537.500.,- realisasi yang dicapai pada program ini yaitu kegiatan fisik 47% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 151.920.200.,-

Secara keseluruhan dapat disimpulkan program ini mendapat realisasi fisik 47% dan keuangan 43%, tidak tercapainya target diakarenakan adanya pergesaran anggaran pada program informasi dan komunikasi publik.

3. Program Aplikasi dan Informatika

   Pada triwulan II Tahun 2024 program ini menargetkan realisasi fisik sebesar 50% dan target keuangan sebesar Rp. 40.255.325,-

Realisasi yang dicapai pada program ini yaitu kegiatan fisik 45% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.810.700

Pada program Aplikasi dan informatika belum bisa mencapai target dikarenakan adanya pergeseran anggaran

4. Program penyelenggaraan statistik sektoral

   Pada triwulan II Tahun 2024 program ini menargetkan realisasi fisik 50% dan target keuangan sebesar Rp. 69.936.050,,.

   Pada program ini realisasi fisik 65% dan realisasi keuangan Rp. 25.060.000, ketidak tercapainya target yang dilaksanakan pada program ini yaitu adanya pergeseran anggaran.

Capaian keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 ini, masih belum menunjukkan hasil yang optimal, tetapi ada hal yang perlu di perhatikan anggaran yang kurang optimal tersebut dikarenakan adanya beberapa pergeseran refocusing anggaran kebijakan Pemerintah Kabupaten tapanuli Utara dalam efisiensi anggaran, sehingga banyak rasionalisasi dan aturan yang menyebabkan pencairan dana kegiatan tidak bisa dilaksanakan sebagaimana tatakelola kegiatan yang telah dirancang. Evaluasi terhadap hasil renja SKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam lampiran tabel 2.1

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2,16.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				
2,16.01 .2.01	**Perencanaan.Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja**			
2.16.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	Rp.68.000	
2,16.01 .2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	Rp.0	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2,16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	Rp.6.750.000	
2,16.01.2.02	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah**			
2,16.01.2.02.01	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	Rp.1.149.396.546	
2,16.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp.102.000	
2,16.01.2.02.05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 dokumen	Rp.11.756.800	
2,16.01.2.06	**Administrasi Umum perangkat daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah**			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2,16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp.2.787.500	
2,16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Paket	Rp.0	
2,16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Paket	Rp.0	
2,16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Paket	Rp.0	
2,16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Dokumen	Rp.0	
2,16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Rp.11.551.000	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen peralatan dan Mesin lainnya	-	-	
2.16.02.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**			
2.16.02.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Rp.0	
2.16.02.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 laporan	Rp. 158.988.722	
2.16.02.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	Rp. 25.681.028	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2.16.02.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
2.16.02.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	Rp. 6.005.821	
2.16.02.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Rp.0	
	Program Informasi dan Komunikasi Publik				
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	1 Konten	Rp. 60.250.000	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2 Media	Rp. 48.280.000	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2 komunitas	Rp. 106.250.000	
	Program Aplikasi dan Informatika				
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen) Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp. 2.650.000	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
	Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				
2.16.03.2.02.01	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 dokumen	Rp 8.310.294	
2.16.03.2.02.020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	-	-	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	-	Rp.0	
2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	-	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	44 orang	Rp. 2.656.000	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Realisasi Sampai Triwulan II		Keterangan
			Kinerja	Anggaran	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	-	Rp0	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2024 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2023. Kesinambungan kegiatan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun program dan kegiatan. Mengingat saat ini secara struktur Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas salah satunya mendukung visi misi Bupati Tapanuli Utara yaitu salah satunya yang menjadi tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik".***

Dalam perencanaan kerja perubahan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 telah kami cermati beberapa output yang perlu kami sesuaikan baik target maupun besarnya anggaran yang diperlukan mengingat efisiensi dan target kerja yang harus dilaksanakan secara lengkap, rencana kerja perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 kami rinci sebagi berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Pada perubahan anggaran 2024, program ini mengalami pengurangan sejumlah target fisik dan keuangan berkaitan dengan adanya efisiensi anggaran, adapun anggaran semula Rp. 3.600.564.331 menjadi Rp. 3.431.505.716.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   Pada perubahan anggaran 2024, program ini mengalami pengurangan anggaran yang semula Rp. 549.968.000 menjadi Rp. 350.537.500.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
   Pada perubahan anggaran 2024, program ini mengalami penambahan anggaran yang semula Rp. 80.060.325 menjadi 40.255.325.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   Pada perubahan anggaran 2024, program ini tidak mengalami Pengurangan Pagu anggaran yang semula Rp. 69.936.050 menjadi Rp. 69.936.050.

Adapun program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang masuk dalam rencana perubahan tercantum dalam lampiran tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) kegiatan dan sub kegiatan	Renja 2024		Perubahan renja 2024		Alasan perubahan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Urusan Wajib						
01	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Realisasi Anggaran (%)	100%				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	**14.382.050**	**4 dokumen**	**14.382.050**	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	**2.181.000**	1 laporan	**2.181.000**	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	**20.800.000**	12 Laporan	**10.400.000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	**2.552.406.406**	23 orang	**2.498.646.341**	Penyesuaian anggaran

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) kegiatan dan sub kegiatan	Renja 2024		Perubahan renja 2024		Alasan perubahan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2	Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	**2.652.000**	1 laporan	**2.652.000**	Efisiensi anggaran
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	**34.274.400**	12 dokumen	**34.274.400**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	**5.068.500**	1 paket	**2.103.800**	Efisiensi anggaran
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	**14.876.075**	1 paket	**7.089.875**	Efisiensi anggaran
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	**7.698.000**	1 paket	**3.024.000**	Efisiensi anggaran
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	**18.472.800**	1 paket	**9.238.800**	Efisiensi anggaran
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	**14.350.000**	**1 dokumen**	**3.593.000**	Efisiensi anggaran
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	**158.470.000**	12 laporan	**103.330.000**	Efisiensi anggaran

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) kegiatan dan sub kegiatan	Renja 2024		Perubahan renja 2024		Alasan perubahan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	**3.000.000**	**1 laporan**	**2.000.000**	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	**534.199.500**	12 laporan	**572.875.300**	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	**145.324.800**	1 laporan	**104.162.400**	Efisiensi anggaran
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**2 Unit**	**72.408.800**	**3 unit**	**61.552.750**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
1	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan	2 komunitas	**50.000.000**	2 komunitas	**50.000.000**	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) kegiatan dan sub kegiatan	Renja 2024		Perubahan renja 2024		Alasan perubahan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)					
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2 Media	**387.768.000**	5 media	**250.520.000**	
3	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	1 konten	**72.200.000**	1 konten	**29.967.500**	
	PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1 dokumen	**29.005.100**	1 dokumen	**15.005.100**	
2	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	1 dokumen	**51.055.225**	1 dokumen	**25.250.225**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
1	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah SDM Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	44 orang	**38.212.050**	44 orang	**38.212.050**	
2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang	Jumlah dokumen Penyelenggaraan	1 dokumen	**31.724.000**	1 dokumen	**31.724.000**	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) kegiatan dan sub kegiatan	Renja 2024		Perubahan renja 2024		Alasan perubahan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia					
JUMLAH ANGGARAN				**4.300.528.706**		**3.892.234.591**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan penjabaran dari P-RKPD Tahun 2024 yang mengacu pada RPJMD. Rencana kerja perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara memuat program, kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan hasil analisis sebagai pedoman didalam pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 serta program dan kegiatan yang telah berjalan di Tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

Tarutung, 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPANULI UTARA,

HENDRIK TARUNA, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780126 199612 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA



2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih karuniaNya sehingga Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 belum sempurna, untuk itu di harapkan kritik dan sarannya, agar masa mendatang dapat lebih disempurnakan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada semua semua pihak yang telah membantu penyelesaian Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024, sekaligus sebagai landasan pijakan guna penyusunan program dan kegiatan pada tahun - tahun berikutnya.

Pada akhirnya semoga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini bermanfaat bagi kita semua.

Tarutung,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

HANNINGGOS BUHA PANDIANGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19940802 199402 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAAN **5**

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan III Tahun Berkenan 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara 30

2.4. Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara 33

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 45

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **47**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 47

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD 48

3.3. Program dan Kegiatan 49

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH **54**

BAB V PENUTUP **64**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2024 7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara 29
Tabel 2.3 Review terhadap P-RKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 34
Tabel 2.4 Usulan Program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan dan Kelompok Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 45
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara Tahun 2024 49
Tabel 3.2 Rencana Aksi Kinerja Perubahan Tahun 2024 50
Tabel 4.1 Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, disebutkan bahwa proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, bahwa renja merupakan penjabaran dari renstra SKPD. Kemudian Renja tersebut dijabarkan melalui RKA SKPD yang berisi rincian APBD untuk disusun menjadi Rancangan APBD (RAPBD). Sedangkan kaitannya dengan RKPD, renja menjadi landasan dalam penyusunan RKPD dimaksud.

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka 1 (satu) tahun, sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan berupa penganggarannya, yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan tahunan.

Adapun ruang lingkup Renja Tahun 2024 adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara selama satu tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang

ada dan tujuan pembangunan peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan yang realistis yang dapat dicapai, dimana Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

B. TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara disusun dengan tujuan :

1. Acuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengoperasionalkan RKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Ketahanan

Pangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan III Tahun Berkenan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2024

BAB IV. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan III Tahun Berkenan

Tingkat capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja yang meliputi *input*, *output* dan *income*, sedangkan untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* dikembangkan pengukurannya. Beberapa faktor penyebab belum dapat dikembangkannya pengukuran tingkat indikator kinerja *benefit* dan *impact* adalah sulitnya untuk menetapkan secara tepat apa yang akan diukur, penampakan indikator benefit dan impact adalah hasil dari integrasi dari banyak kegiatan bahkan lebih dari satu program dengan jangka waktu lebih satu tahun; disamping belum tersedianya media atau sistem pengumpulan data kinerja.

Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada Triwulan III, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Berikut pada tabel 2.1 akan ditampilkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024 Triwulan III.

Table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2024	Indikator Kinerja Program /Kegiata n/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100		15=12/7 x 100	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	500	16.789.048.961	400	11.658.739.271	100	4.583.707.513	20,71	949.244.879	25,97	1.190.585.803	20,87	956.478.512			75	3.096.309.194	475	14.755.048.465	95	88	75	68
2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis	20	242.000.000	5	129.464.100	7	18.708.000			3	5.459.800	0	0			3	5.459.800	8	134.923.900	40	56	43	29
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	42.000.000	6	25.912.500	2	1.908.000			2	1.730.000	0	0			2	1.730.000	8	27.642.500	89	66	100	91
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	41.000.000	3	24.916.800	1	1.700.000			1	1.373.000	0	0			1	1.373.000	4	26.289.800	100	64	100	81
5		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	32.000.000	3	16.939.900	1	1.700.000			1	1.557.800	0	0			1	1.557.800	4	18.497.700	100	58	100	92
6		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4				1	1.720.000			0	507.500	0	0			-	507.500	-	507.500	0	0	0	30

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2024	Indikator Kinerja Program /Kegiata n/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100		15=12/7 x 100	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
7		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4				1	1.480.000				0		0			-	-	-	-	0	0	0	0
8		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	127.000.000	5	61.694.900	4	10.200.000			0	291.500	0	0			-	291.500	5	61.986.400	83	49	0	3
9		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis	15	13.549.105.739	3	9.271.415.833	3	3.834.696.037	1	865.444.879	1	990.561.755	1	808.007.182			2	2.664.013.816	5	11.935.429.649	33	88	67	69
10		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	648	13.324.427.939	480	9.095.085.533	48	3.775.001.437	39	865.444.879	39	963.189.455	48	795.798.382			36	2.624.432.716	516	11.719.518.249	80	88	75	70
11		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	4	39.695.400	4	24.554.300	1	3.089.400			1	2.954.700	0				1	2.954.700	5	27.509.000	125	69	100	96
12		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	64	184.982.400	64	151.776.000	12	56.605.200			6	24.417.600	3	12.208.800			9	36.626.400	73	188.402.400	114	102	75	65
13		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum PD	Jenis	30	1.062.931.500	6	855.832.665	78	70.732.600			24	38.530.400	24	17.613.200			48	56.143.600	54	911.976.265	180	86	62	79
14		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	26	31.996.300	18	21.974.000	1	1.848.700			1	893.000	0	98.000				991.000	18	22.965.000	69	72	0	54
15		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	47	121.308.500	43	90.964.600	1	11.336.900			1	9.516.600	0	0			-	9.516.600	43	100.481.200	91	83	0	84
16		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	39	48.991.000	35	38.905.900	1	4.000.000			1	2.350.000	0	775.000			-	3.125.000	35	42.030.900	90	86	0	78

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2024	Indikator Kinerja Program /Kegiata n/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100		15=12/7 x 100	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
17		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	15	63.691.400	11	48.690.100	1	7.432.000			1	2.474.800	0	2.475.200			-	4.950.000	11	53.640.100	73	84	0	67
18		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	17.564	86.000.000	12876	66.000.000	00	0			0	0	0	0			-	-	12.876	66.000.000	73	77	0	0
19		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	120	710.944.300	90	589.298.065	47	46.115.000			11	23.296.000	12	14.265.000			23	23.296.000	113	612.594.065	94	86	49	51
20		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis pengadaan barang milik daerah	Jenis	8	185.306.800	2	137.938.800	0	0				0		0			-	-	2	137.938.800	25	74	0	0
21		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit/set	86	28.322.800	61	26.192.800	0	0				0		0			-	-	61	26.192.800	71	92	0	0
22		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit/set	17	156.984.000	13	111.746.000	0	0				0		0			-	-	13	111.746.000	76	71	0	0
23		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1.012	1.303.198.360	5	934.690.579	5	543.942.876	1	83.800.000	5	128.029.424	0	106.063.130			3	317.892.554	8	1.252.583.133	85	96	60	58
24		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	784	8.339.000	634	6.800.000	40	400.000			10	100.000	11	110.000			21	210.000	655		84	0	53	53
25		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	144	112.810.500	108	64.855.979	12	508.242.876	2	83.800.000	3	118.879.988	4	99.470.757			9	302.150.745	117	367.006.724	81	325	75	59
26		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	84	1.182.048.860	65	863.034.600	36	35.300.000			6	9.049.436	6	6.482.373			12	15.531.809	77	878.566.409	92	74	33	44
27		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	15	446.506.562	16	329.397.294	3	115.628.000			1	28.004.424	1	24.795.000			2	52.799.424	18	382.196.718	81	86	67	46

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2024	Indikator Kinerja Program /Kegiata n/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100		15=12/7 x 100	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
28		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	12	315.465.350	9	229.660.694	3	110.628.000			1	28.004.424	1	24.795.000			2	52.799.424	11	282.460.118	92	90	67	48
29		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17	23.501.100	13	17.062.800	2	2.000.000				0		0			-	-	13	17.062.800	76	73	0	0
30		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	93	107.540.112	69	82.673.800	1	3.000.000				0		0			-	-	69	82.673.800	74	77	0	0
31	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan yang difasilitasi	persen	100	5.393.774.400	43	2.693.540.900	0	0				0		0			-	-	43	2.693.540.900	43	50	0	0
32		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan, Infrastruktur Lantai Jemur dan Mesin Rice Milling Unit (RMU)	LPM	7	5.393.774.400	3	2.693.540.900	0	0				0		0			-	-	3	2.693.540.900	62	50	0	0
33		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	9	2.240.080.000	5	1.033.015.000	0	0				0		0			-	-	5	1.033.015.000	56	46	0	0
34		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	unit	5	375.582.400	3	154.579.500	0	0				0		0			-	-	3	154.579.500	60	41	0	0
35		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	unit	7	2.778.112.000	5	1.505.946.400	0	0				0		0			-	-	5	1.505.946.400	71	54	0	0
36	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukupi 2. Persentase Kawasan Yang	persen persen	54 88	1.945.086.320	47,804 44,19	1.585.379.872	0,341 13,89	320.000.000				0	0,569 13,89	62.820.700			0,569 13,89	62.820.700	48,37 58,08	1.648.200.572	90 66	85	167 100	20

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2024	Indikator Kinerja Program /Kegiata n/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100		15=12/7 x 100	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Pangan Masyarakat		Dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari																							
37		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	jenis	10	354.010.100	10	495.964.675	2	65.000.000				0	2	47.978.400			2	47.978.400	12	543.943.075	76	154	100	74
38		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	14	190.008.500	8	364.115.375	2	35.000.000				0	2	22.859.600			2	22.859.600	10	386.974.975	71	204	100	65
39		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	26	164.001.600	21	131.849.300	5	30.000.000				0	5	25.118.800			5	25.118.800	26	156.968.100	100	96	100	84
41		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Stock Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	ton	14.567	400.982.820	8447	215.712.497	0,569	20.000.000				0	0,569	14.842.300			0,569	14.842.300	8.448	230.554.797	57	57	100	74
42		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Stock Cadangan Pangan)	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	14.567	215.981.320	8447	115.885.597	0,569	20.000.000				0	0,569	14.842.300			0,569	14.842.300	8.448	130.727.897	58	61	100	74
43		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	ton	14.567	185.001.500	8447	99.826.900	0	0				0		0			-	-	8.447	99.826.900	58	54	0	0
44		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Jenis Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	jenis	10	1.190.093.400	7	873.702.700	2	235.000.000				0		0			-	-	7	873.702.700	54	73	0	0
45		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis	laporan	12	870.093.600	7	639.299.000	1	160.000.000				0		0			-	-	7	639.299.000	58	73	0	0

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2024	Indikator Kinerja Program /Kegiata n/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100		15=12/7 x 100	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			Sumber Daya Lokal																							
47		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	4	319.999.800	3	234.403.700	1	75.000.000				0		0			-	-	3	234.403.700	75	73	0	0
48	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Desa/Kel.	46	710.006.900	13	392.091.350	13	50.000.000				0		46.974.400			-	46.974.400	13	439.065.750	28	62	0	94
49		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jenis	5	710.006.900	3	392.091.350	1	50.000.000				0	1	46.974.400			1	46.974.400	4	439.065.750	60	62	100	94
50		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	8	710.006.900	6	392.091.350	2	50.000.000				0	2	46.974.400			2	46.974.400	8	439.065.750	100	62	100	94
51		Pembinaan Desa Mandiri Pangan di di Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae	Jumlah ternak ayam umur 3 bulan yang diserahkan untuk daerah yang rawan pangan	ekor					622	50.000.000				0	622	46.974.400			622	46.974.400	622	46.974.400			100	94
52	Meningkatnya Keamanan/ Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	persen	100	174.999.650	65	94.089.996	11,11	10.000.000				0		0				-	65	94.089.996		54	0	0
53		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sample Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	sampel	54	174.999.650	32	94.089.996	4	10.000.000				0		0				-	32	94.089.996	60	54	0	0
54		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal	Jumlah Rekomendasi Keamanan	Dokumen	54	174.999.650	32	94.089.996	4	10.000.000				0		0				-	32	94.089.996	59	54	0	0

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2024	Indikator Kinerja Program /Kegiata n/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100		15=12/7 x 100	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																							
55	Terlaksananya Pengelolaan Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1. Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	800	6.817.442.432	330	5.696.833.794	55	795.193.648				14.959.200		382.699.900				397.659.100	330	6.094.492.894	41	89	0	50
			2. Luas Lahan Budidaya	Ha	109		68,7		7												69	-	63		0	
			3. Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan	Ekor	4.623.344		1.672.580		400.000												1.672.580	-	36		0	
56		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jenis	20	6.817.442.432	16	5.696.833.794	3	795.193.648				14.959.200	1	382.699.900			1	397.659.100	17	6.094.492.894	60	89	33	50
57		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	20	1.154.380.000	9	1.328.247.594	0	0				0	0	0			0	-	9	1.328.247.594	45	115	0	0
58		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	8	807.199.232	6	619.209.200	2	50.000.000				14.520.000	2	8.096.000			2	22.616.000	8	641.825.200	100	80	100	45
59		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	orang	540	2.590.000.000	330	2.067.142.250	55	510.000.000				371.600	0	290.713.900			0	291.085.500	330	2.358.227.750	61	91	0	57
60		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	4	2.265.863.200	3	1.682.234.750	1	235.193.648				67.600	0	83.890.000			0	83.957.600	3	1.766.192.350	75	78	0	36
61	Tersedianya dan berkembangnya Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah Bibit ternak yang disebar	ekor	15.685	3.320.919.497	12661	1.197.309.935	2427	250.000.000				6.960.000		1.469.700			-	8.429.700	12.661	1.205.739.635	81	36	0	3
				ekor	6.715		3598														3.598	-	54			
			2. Jumlah Kelompok Tani Penerima	kelompok	159		145														145	-	91			
			3. Jumlah Ternak Akseptor Inseminasi Buatan	ekor	460		300														300	-	65			

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2024	Indikator Kinerja Program /Kegiata n/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100		15=12/7 x 100	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
62		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	laporan	3	1.668.542.385	1	236.482.520	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1	236.482.520	60	14	0	0
63		Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	ekor	346	1.570.661.251	300	198.411.320	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	300	198.411.320	87	13	0	0
64		Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah pelaksanaan monitoring	monitoring	180	97.881.134	50	38.071.200	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	50	38.071.200	28	39	0	0
65		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak	ekor	28.500	1.652.377.112	15539	960.827.415	2427	250.000.000				6.960.000		1.469.700			-	8.429.700	15.539	969.257.115	60	59	0	3
66		Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	28.500	1.652.377.112	15539	960.827.415	2427	250.000.000				6.960.000		1.469.700			-	8.429.700	15.539	969.257.115	55	59	0	3
67	Tersedianya dan berkembangnya Prasarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	unit	6	1.722.068.200	2	1.080.236.985	4	1.600.000.000				0		16.294.000			-	16.294.000	2	1.096.530.985	33	64	0	1
68		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	unit	6	1.722.068.200	2	1.080.236.985	4	1.600.000.000				0		16.294.000			-	16.294.000	2	1.096.530.985	33	64	0	1
69		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah dokumen Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	dokumen	1	149.999.200	0	124.807.000	0	0				0		0			-	-	-	124.807.000	0	83	0	0
70		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	6	1.572.069.000	2	955.429.985	4	1.600.000.000				0		16.294.000			-	16.294.000	2	971.723.985	33	62	0	1

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2024	Indikator Kinerja Program /Kegiata n/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100		15=12/7 x 100	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
71	Meningkatnya pengendalian terhadap penyakit hewan menular	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Jumlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)	Kasus	10.550	1.874.867.870	6700	1.123.151.598	940	120.000.000				11.523.900		7.147.200			-	18.671.100	6.700	1.141.822.698	64	61	0	16
			2. Jumlah kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)	Kasus	14.500		8850		1150										-		8.850	-	61		0	
			3. Jumlah Kasus Penyakit Yang Ditangani Puskeswan	Kasus	878		680		342										-		680	-	77		0	
72		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang terjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah	45	1.420.659.238	30	919.454.558	15	100.000.000				4.612.400		1.970.800			-	Rp6.583.200	30	926.037.758	60	65	0	7
73		Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	45	569.405.919	30	363.500.085	15	50.000.000				3.772.400		161.200			-	3.933.600	30	367.433.685	67	65	0	8
74		Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewanmenular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	45	851.253.319	30	555.954.473	15	50.000.000				840.000		1.809.600			-	2.649.600	30	558.604.073	67	66	0	5
75		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	878	454.208.632	680	203.697.040	12	20.000.000				6.911.500		5.176.400			-	12.087.900	680	215.784.940	77	48	0	60

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2024	Indikator Kinerja Program /Kegiata n/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 + 6		14 = 13/5 x 100		15=12/7 x 100	
				Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
76		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	laporan	878	454.208.632	680	203.697.040	200	20.000.000			12	6.911.500	12	5.176.400			24	12.087.900	704	215.784.940	80	48	12	60
TOTAL				**-**	**4.798.940**	**38.748.214.230**	**1.779.908**	**25.521.373.701**	**411.202**	**7.728.901.161**	**64**	**949.244.879**	**157**	**1.224.028.903**	**796**	**1.473.884.412**	**-**	**-**	**927**	**3.647.158.194**	**1.780.834**	**26.474.990.995**	**37**	**68**	**0**	**47**
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA																			**0,23**	**47,19**			**37**	**68**	**0**	
PREDIKAT KINERJA																				**Sangat Rendah**				**Sedang**		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Kajian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara tersusun dalam tabel 2.2. Berikut kinerja pelayanan OPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara :

Table 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan			NA	NA	18,25	13,89	9,52	5,16	NA	NA	18,25	13,10	8,73	5,16	
2.	Indeks Ketersediaan (IK)			92,78	94,45	95,94	96,95	97,96	98,97	92,78	94,45	95,94	95,48	95,45	98,97	
3.	Indeks Keterjangkauan (IA)			75,33	74,57	75,07	75,57	76,03	76,57	75,33	74,57	76,97	75,04	75,25	76,57	
4.	Produksi Ikan Air Tawar			2.136,60	2.988,75	2.860,68	2.900	2.950	3.000	2.136,60	2.988,75	2.860,68	2.901,40	2.958,40	3.000	
5.	Produktivitas Ikan Air Tawar			1,77	2,37	2,22	2,3	2,34	2,38	1,77	2,37	2,22	2,27	2,19	2,38	
7.	Produksi Daging			1054,87	277,85	415,28	539,86	701,82	842,19	1054,87	277,85	415,28	749	730,,83	842,19	
8.	Populasi Ternak :															
	Kerbau			9.748	9.768	10.028	10.078	10.129	10.179	9.748	9.768	10.028	10.043	10.048	10.179	
	Sapi			493	535	654	661	664	790	493	535	654	814	895	790	
	Kambing			1.998	2.296	2.393	2.417	2.429	2.441	1.998	2.296	2.393	2.185	2.105	2.441	
	Babi			43.698	2.955	9.438	10.382	12.458	16.196	43.698	2.955	9.438	21.483	20.013	16.196	
	Ayam			4320	445.730	480.039	484.839	489.688	492.136	4320	445.730	480.039	511.843	543.733	492.136	
	Itik			38.380	45.473	60.044	60.644	61.251	61.863	38.380	45.473	60.044	62.512	64.617	61.863	
9	PPHKonsumsi			85	85	87	88	89	90	85	85	87	88,90	89,10	90	
10	Konsumsi Energi ; Protein			2143; 51	2143; 51	2144; 52	2145; 53	2146; 54	2147; 55	2143; 51	2143; 51	2144; 52	2144; 52	2156,80; 54,20	2147; 55	
11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			77,72	62,89	67	68	69	70	77,72	62,89	67	69,23	71	70	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Bertitik tolak dari isu tingkat Nasional dan Regional serta diselaraskan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

A. Sub Sistem Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masalah pangan global merupakan krisis akses pangan yang terkait dengan masih tingginya angka kemiskinan. Krisis pangan global yang melanda dunia saat ini memang belum memberikan imbas yang relative besar terhadap Indonesia umumnya atau Tapanuli Utara khususnya, hal ini disebabkan iklim di daerah ini masih mendukung produksi pangan, namun demikian untuk lima tahun kedepan kemandirian pangan akan menghadapi tantangan yang cukup serius baik dari aspek ketersediaan dan kerawananan pangan,distribusi dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan maupun aspek manajemen ketahanan pangan. Swasembada dan Swasembada berkelanjutan harus tetap diperhatikanuntuk menjamin ketahanan pangan.

Perubahan iklim mengakibatkan degradasi kesuburan lahan yang berdampak terhadap pemicu penurunan luas pertanaman dan produksi. Dari beberapa laporanyang telah ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara terjadi gagal panen akibat kekeringan. Namun dilain pihak ada juga gagal panen akibat banjir bandang. Kesemuanya kejadian tersebut diakibatkan oleh cuaca yang ekstrim dan akibat perubahan anomali iklim. Untuk kebutuhan komsumsi penduduk Tapanuli Utara masih tergolong surplus tetapi penyiapan pangansebagai antisipasi penanganan cadangan sangat dibutuhkan berupa cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah untuk antisipasi masalah kekurangan pangan terutama di daerah- daerah kantong kemiskinan/rawan pangan maupun bencana alam transien.

B. Sub Sistem Distribusi dan Akses Pangan

Kestabilan harga dan rendahnya efisiensi system pemasaran hasil-hasil pangan pada saat ini merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen maupun konsumen. Hal ini antara lain disebabkan karena lemahnya disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin sistem pemasaran yang adil dan bertanggung jawab, terbatasnya fasilitas perangkat keras maupun lunak untuk membangun transparansi informasi pasar. Penurunan harga pada saat panen raya cenderung merugikan petani, sebaliknya pada saat tertentu pada musim paceklik dan hari- hari besar harga pangan meningkat tinggi menekan

konsumen, tetapi harga tersebut sering tidak dinikmati oleh petani produsen. Terbatasnya kelembagaan yang menyediakan permodalan bagi petani dan prosedur penyaluran yang kurang mengapresiasikan sifat usahatani dan resiko yang dihadapi, merupakan kendala bagi berkembangnya usahatani.

C. Sub sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan

Dalam mengembangkan produksi bahan pangan dan mengembangkan diversifikasi pangan harus mengacu pada sumberdaya lokal dan budaya lokal yang ada dan pola makan yang dianut oleh masyarakat. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman. . Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, Antara lain; 1). Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga; 2) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi; 3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; 4) lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai social, citra dan daya terima;6) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam,bergizi seimbang dan aman (B2SA). Sampai saat ini, pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan masih belum optimal, yang ditandai oleh ; 1) keterbatasan dalam memberikan dukungan program usaha bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; dan 2) kurangnya fasilitas pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam,bergizi seimbang dan aman; 3) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas; dan 4) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain: 1). Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama produk pangan segar; 2). Masih banyaknya petani belum memahami dan menerapkan cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar; 3) belum efektifnya penanganan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM dan pedoman masih terbatas; 4). Merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar; 5) Koordinasi lintas sektor dan sub sektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal.

Jadi Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara disimpulkan sebagai berikut :

1. Kurangnya regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah;
2. Lemahnya Kelembagaan Pangan;
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam Sistem Informasi Harga Pangan;
4. Belum terkendalinya stabilitas pasokan dan harga pangan;
5. Belum optimalnya penggunaan cadangan pangan daerah;
6. Belum optimalnya sistem informasi dan pengendalian daerah rawan pangan dan gizi;
7. Belum Optimal pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
8. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan terutama produk pangan segar asal tumbuhan;
9. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat;
10. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan pangan local.

D. Sub Sistem Perikanan

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perikanan yaitu :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana produksi perikanan;
2. Belum tersedianya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
3. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan;
4. Terbatasnya jumlah tenaga teknis penyuluh perikanan;
5. Masih rendahnya pengetahuan pembudidaya ikan.

Isu ini muncul di bidang budidaya perikanan dikarenakan untuk mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan adanya peningkatan produksi dari budidaya perikanan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dari perikanan tangkap pemenuhan kebutuhan produksi tidak dapat dipastikan karena kondisi alam dan musim yang sulit diperkirakan dampak dari perubahan iklim global. Isu-isu yang teridentifikasi adalah :

- Tingginya harga pakan yang berakibat pada tingginya biaya produksi budidaya;
- Terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu;
- Perlunya pengembangan budidaya ikan skala kecil/rumah tangga;
- Masih rendahnya nilai tambah produk hasil perikanan;
- Perlunya peningkatan kontribusi perikanan (darat) bagi perekonomian daerah
- Fluktuasi ketersediaan benih ikan. Upaya yang dapat dilakukan dengan

peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan, peningkatan teknologi perikanan

E. Sub Sistem Peternakan

Pembangunan pada Sektor Peternakan di Kabupaten Tapanuli Utara ditujukan untuk peningkatan produksi peternakan. Permasalahan yang dihadapi dalam sektor peternakan adalah:

1. Terjadinya wabah penyakit hewan menular (African Swine Fever/ASF, Penyakit Mulut dan Kuku/ PMK, New Castle Disease/ND, dll);
2. Tingginya kasus penyakit rabies pada Hewan Pembawa Rabies (HPR);
3. Rendahnya Populasi ternak dan unggas;
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
5. Masih rendahnya pengetahuan petani peternak;
6. Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur pada bidang peternakan.

2.4. Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan rancangan program kegiatan Perubahan Renja satu tahun yaitu tahun 2024. Sampai saat penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dilakukan, perkiraan kebutuhan masih tetap sama, dengan kata lain tidak ada perubahan kondisi yang mengharuskan adanya penyesuaian.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan KabupatenTapanuli Utara tahun 2024 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari 8 (delapan) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp7.728.901.161 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus seribu seratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tersaji dalam tabel 2.3 berikut :

Table 2.3 Review terhadap P-RKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	P-RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			**4.963.707.513**		**4.963.707.513**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**4.583.707.513**	**100**	**4.583.707.513**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7 Jenis**	**18.708.000**	**7 Jenis**	**18.708.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.908.000	2 Dokumen	1.908.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.700.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.700.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.720.000	1 Dokumen	1.720.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.480.000	1 Laporan	1.480.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.200.000	4 Laporan	10.200.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Jenis**	**3.834.696.037**	**3 Jenis**	**3.834.696.037**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/bulan	3.775.001.437	48 orang/bulan	3.775.001.437	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	P-RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	3	4	5	6	7	8
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	56.605.200	12 dokumen	56.605.200	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan	3.089.400	1 Laporan Keuangan	3.089.400	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah administrasi umum PD**	**10 Jenis**	**70.732.600**	**10 Jenis**	**70.732.600**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.848.700	1 Paket	1.848.700	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.336.900	1 Paket	11.336.900	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.432.000	1 Paket	7.432.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	46.115.000	47 Laporan	46.115.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5 Jenis**	**543.942.876**	**5 Jenis**	**543.942.876**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 laporan	400.000	40 laporan	400.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	35.300.000	36 laporan	35.300.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	508.242.876	12 laporan	508.242.876	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**JumlahPemeliharaan BarangMilikDaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6 Jenis**	**115.628.000**	**6 Jenis**	**115.628.000**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	P-RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit mobil	110.628.000	3 unit mobil	110.628.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2.000.000	2 unit	2.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	3.000.000	1 unit	3.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**- Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukupi** **- Persentase Desa Percontohan untuk Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebagai Sumber Gizi Keluarga**	**0,34%** **13,89%**	**320.000.000**	**0,34%** **13,89%**	**320.000.000**	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Jumlah Jenis Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya**	**2 Jenis**	**65.000.000**	**2 Jenis**	**65.000.000**	
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	*Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan*	5 Unit	30.000.000	5 Unit	30.000.000	
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	*Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota*	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**JumlahStock Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**0,341 ton beras**	**20.000.000**	**0,341 ton beras**	**20.000.000**	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	0,341 ton beras	20.000.000	0,341 ton beras	20.000.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	P-RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	3	4	5	6	7	8
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Jumlah Jenis Pencapaian Target Konsumsi Pangan**	**2 Jenis**	**235.000.000**	**2 Jenis**	**235.000.000**	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	160.000.000	1 laporan	160.000.000	
Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebagai Sumber Gizi Keluarga	*Jumlah Desa Percontohan untuk Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebagai Sumber Gizi Keluarga*	***5 Kelompok***	*160.000.000*	***5 Kelompok***	*160.000.000*	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Pangan**	**13 Desa/Kelurahan**	**50.000.000**	**13 Desa/Kelurahan**	**50.000.000**	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1 Jenis**	**50.000.000**	**1 Jenis**	**50.000.000**	
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	
Pembinaan Desa Mandiri Pangan	*Jumlah ternak ayam umur 3 bulan yang diserahkan untuk daerah yang rawan pangan*	*622 ekor ternak ayam umur 3 bulan*	*50.000.000*	*622 ekor ternak ayam umur 3 bulan*	*50.000.000*	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi**	**11,11%**	**10.000.000**	**11,11%**	**10.000.000**	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah sampel Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi**	**4 Sampel**	**10.000.000**	**4 Sampel**	**10.000.000**	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	P-RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			***2.765.193.648***		***2.765.193.648***	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			***795.193.648***		***795.193.648***	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	***Jumlah Pembudidaya Ikan, Luas Lahan Budidaya dan Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan***	**55 orang, 7 Ha** **400.000 ekor**	***795.193.648***	**55 orang, 7 Ha** **400.000 ekor**	***795.193.648***	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	***Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan***	**3 Jenis**	***795.193.648***	**3 Jenis**	***795.193.648***	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	
Penyediaan Operasional UPTD BBI Purbatua	*Jumlah Benih Ikan di BBI Purbatua*	*75.000 ekor benih ikan*	*25.000.000*	*75.000 ekor benih ikan*	*25.000.000*	
Penyediaan Operasional UPTD BBI Silangkitang	*Jumlah Benih Ikan di BBI Silangkitang*	*45.000 ekor benih ikan*	*25.000.000*	*45.000 ekor benih ikan*	*25.000.000*	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	55 orang	510.000.000	55 orang	510.000.000	
Pengembangan Benih Ikan Mas untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan	*Jumlah Benih Ikan Mas*	*54.000 ekor benih ikan*	*100.000.000*	*54.000 ekor benih ikan*	*100.000.000*	
Pengembangan Benih Ikan Nila untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan	*Jumlah Benih Ikan Nila*	*52.500 ekor benih ikan*	*75.000.000*	*52.500 ekor benih ikan*	*75.000.000*	
Pengembangan Benih Ikan Lele Dumbo untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan	*Jumlah Benih Ikan Lele Dumbo*	*52.600 ekor benih ikan*	*75.000.000*	*52.600 ekor benih ikan*	*75.000.000*	
Pengembangan Budidaya Air Tawar di Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Pahae Jae	*Jumlah Benih Ikan Lele Dumbo, Ikan Nila dan Ikan Mas*	*120.900 ekor benih ikan*	*200.000.000*	*120.900 ekor benih ikan*	*200.000.000*	
Pelatihan Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan di UPTD Balai Benih Ikan	*Jumlah Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan*	*55 orang*	*60.000.000*	*55 orang*	*60.000.000*	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	P-RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	3	4	5	6	7	8
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	7 Ha	235.193.648	7 Ha	235.193.648	
Penyediaan Jasa Operasional Alat Berat Excavator	*Luas Lahan Budidaya*	*7 Ha*	*235.193.648*	*7 Ha*	*235.193.648*	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			***1.970.000.000***		***1.970.000.000***	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	***- Jumlah Bibit ternak yang disebar***	**2.427 ekor**	***250.000.000***	**2.427 ekor**	***250.000.000***	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	***Jumlah Benih/Bibit Ternak***	**2.427 ekor**	***250.000.000***	**2.427 ekor**	***250.000.000***	
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2.427 ekor	250.000.000	2.427 ekor	250.000.000	
Pengembangan Ternak Ayam Buras	*Jumlah Ternak Ayam Buras*	*1.885 ekor*	*190.000.000*	*1.885 ekor*	*190.000.000*	
Pengembangan Ternak Ayam Buras di Lokasi Stunting	*Jumlah Ternak Ayam Buras di Lokasi Stunting*	*542 ekor*	*60.000.000*	*542 ekor*	*60.000.000*	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	***Jumlah Prasarana Pertanian yang tersedia***	**4 Unit**	***1.600.000.000***	**4 Unit**	***1.600.000.000***	
Pembangunan Prasarana Pertanian	***Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun***	**4 Unit**	***1.600.000.000***	**4 Unit**	***1.600.000.000***	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	1.600.000.000	4 Unit	1.600.000.000	
Pembangunan Olahan Pakan Konsentrat Babi	*Jumlah Olahan Pakan Konsentrat Babi yang dihasilkan*	*288 ton*	*1.520.000.000*	*288 ton*	*1.520.000.000*	
Biaya Penunjang DAK Fisik TA. 2024	*Jumlah pakan konsentrat yang dihasilkan*	*288 ton*	*80.000.000*	*288 ton*	*80.000.000*	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	P-RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	***- Jumlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)***	**940 Kasus**	***120.000.000***	**940 Kasus**	***120.000.000***	
	- Jumlah kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)	**1150 Kasus**		**1150 Kasus**		
	- Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	**342 Kasus**		**342 Kasus**		
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Kasus Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota***	**15 wilayah**	***100.000.000***	**15 wilayah**	***100.000.000***	
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	15 laporan	50.000.000	15 laporan	50.000.000	
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)	*Jumlah Kasus Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)*	*940 Kasus*	*50.000.000*	*940 Kasus*	*50.000.000*	
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewanmenular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	15 Laporan	50.000.000	15 Laporan	50.000.000	
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)	*Jumlah Kasus Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)*	*1150 Kasus*	*50.000.000*	*1150 Kasus*	*50.000.000*	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota***	**12 laporan**	***20.000.000***	**12 laporan**	***20.000.000***	
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	20 layanan	20.000.000	20 layanan	20.000.000	
Penyediaan Pelayanan Puskeswan	*Jumlah Hewan yang ditangani*	*200 ekor*	*20.000.000*	*200 ekor*	*20.000.000*	
	TOTAL		***7.728.901.161***		***7.728.901.161***	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara, penjaringan kebutuhan masyarakat melalui acara pertemuan dan sosialisasi, serta melalui surat dan proposal yang dikirimkan ke Dinas Ketahanan Kabupaten Tapanuli Utara. Usulan kegiatan masyarakat tahun 2024 pada umumnya selaras dengan isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta program yang direncanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

DinasKetahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara menyusun usulan program dan kegiatan sebahagian berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan, LSM, assosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Penyusunan RKPD dilakukan melalui program “bottom up’ dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan elemen pendukungnya. Dapat melalui Musrenbang tingkat desa sampai dengan kecamatan, maupun permohonan yang langsung disampaikan masyarakat ke Pemerintah Daerah. Usulan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Table 2.4 Usulan Program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan dan Kelompok Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Pengusul	Fraksi	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien
Jonri Tampubolon	Partai Hanura	Penyediaan Benih Ikan Mas	Masyarakat meminta pengadaan Ikan mas, Lele dan Mujahir masing masing 1500 ekor	Desa Parratusan Kecamatan Pangaribuan	4.500 ekor
Jonri Tampubolon	Partai Hanura	Penyediaan Benih Ikan Nila	Benih Ikan Mas Masyarakat meminta pengadaan Ikan mas, Lele dan Mujahir masing masing 1500 ekor	Desa Sigotom Julu Kecamatan Pangaribuan	4.500 ekor
Jonri Tampubolon	Partai Hanura	Penyediaan Benih Ikan Nila	Benih Ikan Mas Masyarakat meminta pengadaan Ikan mas, Lele dan Mujahir masing masing 1500 ekor	Desa Sigotom Timur Kecamatan Pangaribuan	4.500 ekor
Jonri Tampubolon	Partai Hanura	Penyediaan Benih Ikan Mas	Masyarakat meminta pengadaan Ikan mas, Lele dan Mujahir masing masing 1500 ekor	Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan	4.500 ekor
Jonri Tampubolon	Partai Hanura	Penyediaan Benih Ikan Mas	Masyarakat meminta pengadaan Ikan mas, Lele dan Mujahir masing masing 1500 ekor	Desa Sigotom Dolok Nauli Kecamatan Pangaribuan	4.500 ekor

Pengusul	Fraksi	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien
Arnol Panggabean		Ternak Kambing	Mahalnya ternak kambing per ekornya masyarakat tidak mampu membeli kambing, dengan bantuan pemerintah untuk kelompok tani dapat memberi bantuan ternak kambing, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sibalanga	Desa Sibalangan, Kecamatan Adiankoting	
Manto Sianturi		Pengadaaan Mesin Pellet	Belum ada di kelompok	Desa Pagaran, Kecamatan Pagaran	
Luhut Hutabarat		Ternak Ayam Buras	Ayam Buras (ayam kampung) sudah mulai langka di desa Sitoluama karena pernah terkena penyakit sehingga banyak ayam yang mati	Dusun I, II, dan III Desa Sitoluama, Pahae Julu	800 ekor
Paian Sihombing, A.Md		Penyediaan Kebun Bibit, Bibit sayuran dan polibag	Kurangnya penyediaan bibit bagi para kelompok tani	Desa Hutaraja, Kecamatan Sipoholon	
Sabungan Sihombing		Ternak Itik	Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	Desa Bahal Batu I, Kecamatan Siborongborong	
Tagor Nababan		Ternak Ayam Buras	Masih Kurangnya Peternakan di Desa	Desa Sitabotabo, Kecamatan Siborongborong	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam memantapkan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara terintegrasi. Yang telah dijabarkan dalam PPNomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Kedaulatan pangan memberikan dukungan kekuatan dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang diarahkan untuk menyediakan beraneka ragam pangan dari produksi dalam negeri sesuai potensi sumber daya yang kita miliki. Ketersediaan pangan yang beraneka ragam akan mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 22/2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Permentan 43/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, serta 27 Peraturan/Surat Edaran Gubernur di 27 Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, dapat segera terwujud manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif.

Kebijakan Nasional dalam pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan adalah :

“Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Untuk Kesejahteraan Rakyat”

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 - 2024 adalah :

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan.

2. Mongoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Untuk mendukung prioritas pembangunan Daerah dan Nasional sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara. Tujuan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun atau kapan harus dicapai. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli UtaraTahun 2024 selaras dengan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Menurunnya Daerah Rentan Pangan.

Sasaran :

1. Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat
2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya Air Tawar
3. Meningkatkan Produksi Ternak

Tujuan 2 :

Meningkatnya Diversifikasi Pangan

Sasaran :

1. Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berikut penjabaran atas keselarasan misi yang diemban, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Table 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi				Target Kinerja 2024	
				2020	2021	2022	2023	APBD	P-APBD
Tujuan1									
Menurunkan Daerah Rentan Pangan	Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Persen	NA	NA	18,25	13.10	8.73	5,16	5,16
Sasaran									
1.Meningkatkan akses pangan masyarakat	Indeks Ketersediaan (IK)	Skor	92,78	94,45	95,94	95.48	95.45	98,97	98,97
	Indeks Keterjangkauan (IA)	Skor	75,33	74,57	76,97	75,04	75.25	76,57	76,57
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya Air Tawar	Produksi Ikan Air Tawar	Ton	2.136,60	2.988,75	2.860,68	2,901.40	2,958.40	3.000	3.000
	Produktivitas Ikan Air Tawar	Ton/Ha	1,77	2,37	2,22	2.27	2.19	2,38	2,38
3. Meningkatkan Produksi Ternak	Produksi Daging	Ton	1.054,87	277,85	415,28	749	730.83	842,19	842,19
	Populasi Ternak :								
	Kerbau	Ekor	9.748	9.768	10.028	10,043	10,048	10.179	10.179
	Sapi	Ekor	493	535	654	814	895	667	790
	Kambing	Ekor	1.998	2.296	2.393	2,185	2,105	2.441	2.441
	Babi	Ekor	43.698	2.955	9.438	21,483	20,013	16.196	16.196
	Ayam	Ekor	4320	445.730	480.039	511,843	543,733	492.136	492.136
	Itik	Ekor	38.380	45.473	60.044	62,512	64,617	61.863	61.863
Tujuan 2									
MeningkatkanDiversifikasi Pangan	PPHKonsumsi	Skor	85	85	87	88.90	89.10	90	90
Sasaran									
1.Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Konsumsi Energi ; Protein	kkal/kapita/hari ; gr/kapita/hari	143; 51	2143; 51	2144; 52	2144; 52	2156,80; 54,20	2147; 55	2147; 55
2.Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	77,72	62,89	67	69,23	71	70	70

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasamadengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Pada Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan Program Pembangunan yang direncanakan sebanyak 8 program dan 16 kegiatandan 43 Sub Kegiatan. Rincian rencana kegiatan per program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TapanuliUtara sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TapanuliUtara Tahun 2024.

Ada pun rencana program dan kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat tabel 3.2. di bawah ini :

Table 3.2 Rencana Aksi Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
1	Menurunkan Daerah Rentan Pangan	1	Meningkatkan akses pangan masyarakat	- Indeks Keterjangkauan (IA) - Indeks Ketersediaan (IK)	1		Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Rawan Pangan	1		Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	
					2				2				2	1 Jenis
					3				3				3	1 Jenis
					4	- Skor 76,57 - Skor 98,97			4	13 Desa/ Kelurahan			4	1 Jenis
		2	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya Air Tawar	- Produksi Ikan Air Tawar - Produktivitas Ikan air Tawar	1		Terlaksananya Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Jumlah Pembudidaya Ikan	1		Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1	
					2			2. Luas Lahan Budidaya	2				2	3 Jenis
					3			3. Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan	3				3	3 Jenis
					4	- 3.000 ton - 2,38 ton			4	- 400.000 ekor benih - 7 Ha - 55 orang			4	3 Jenis
		3	Meningkatkan Produksi Ternak	- Produksi Daging	1		Tersedianya dan berkembangnya Sarana Pertanian	Jumlah Bibit ternak yang disebar	1		Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak	1	
				Meningkatnya Produksi Ternak: -Kerbau - Sapi - Kambing - Babi - Ayam - Itik	2				2				2	
					3				3				3	
					4	- 842,19 ton - 10.179 Ekor - 790 Ekor - 2.441 Ekor - 16.196 Ekor - 492.136 Ekor - 61.863 Ekor			4	2.427 ekor			4	2.427 ekor
							Tersedianya dan berkembangnya Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	1		Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	1	
									2				2	
									3				3	
									4	4 Unit			4	4 Unit
							Meningkatnya pengendalian terhadap penyakit hewan menular	1. Jumlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)	1		Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang terjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	15 wilayah
								2. Jumlah kasus dalam Pencegahan,	2				2	15 wilayah

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
								Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)						
								3. Jumlah Kasus Penyakit Yang Ditangani Puskeswan	3				3	15 wilayah
									4	- 940 Kasus - 1.150 Kasus - 342 Kasus			4	15 wilayah
											Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	3 laporan
													2	6 laporan
													3	9 laporan
													4	12 laporan
	Meningkatkan diversifikasi pangan	1	MeningkatkanPenganekaragaman Konsumsi Pangan	Komsumsi Energi; Protein	1		Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukupi - Persentase Kawasan Yang Dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	1		Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	1	1 Jenis
					2				2				2	2 Jenis
					3				3				3	2 Jenis
					4	2.147 kkal/kap/hari ; 55 gr/kap/hari			4	- 0,34 - 13,89			4	2 Jenis
											Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	JumlahStock Cadangan Pangan Kabupaten/Kotata	1	
													2	
													3	0,341 ton beras
													4	0,341 ton beras
											Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Jenis Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1	
													2	
													3	2 Jenis
													4	2 Jenis
							Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang	1		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sample Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1	
									2				2	
									3				3	4 Sampel Tanaman

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
								Aman di Konsumsi						Buah dan Sayuran
									4	11,11 Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi			4	4 Sampel Tanaman Buah dan Sayuran
		2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1 Jenis
					2				2				2	1 Jenis
					3				3				3	3 Jenis
					4	Nilai 70			4	100			4	7 jenis Laporan
											Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3 jenis
													2	3 jenis
													3	3 jenis
													4	3 jenis
											Terlaksananya administrasi umum PD	Jumlah Jenis Administrasi Umum PD	1	10 Jenis
													2	10 Jenis
													3	10 Jenis
													4	10 Jenis
											Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	5 Jenis
													2	5 Jenis
													3	5 Jenis
													4	5 Jenis
											TerlaksananyaPemeliharaan BarangMilikDaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan BarangMilikDaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	
													2	
													3	6 Jenis
													4	6 Jenis

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III, secara keseluruhan pagu indikatif Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 yang semula sebesar Rp8.036.428.384 (delapan miliar tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ributiga ratus delapan puluh empat rupiah) pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 turun menjadi Rp7.728.901.161 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus seribu seratus enam puluh satu ribu rupiah), ada penurunan sebesar Rp307.527.223.

Adapun kebijakan dalam perubahan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara secara garis besar diantaranya adalah:

1. Pengurangan dan efisiensi belanja makan dan minum rapat pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta su kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan hanya ditampung pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
2. Pengurangan anggaran pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yakni Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, serta penghapusan anggaran untuk Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
3. Penambahan anggaran pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan penambahan jumlah ASN dari penerimaan PPPK Paramedik Veteriner.
4. Penambahan anggaran pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan yakni belanja perbaikan.penggantian dan pengecatan kendaraan operasional dinas.

5. Pengurangan dan efisiensi belanja biaya uji laboratorium tanaman dan sayuran pada Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dari 8 sampel menjadi 4 sampel.
6. Pengurangan dan efisiensi belanja Pelatihan Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan di UPTD Balai Benih Ikan dari target 200 orang menjadi 55 orang karena keterbatasan anggaran.
7. Perubahan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain dari komoditi ternak itik menjadi ternak ayam buras dikarenakan kelangkaan ternak itik yang mengakibatkan naikkan harga ternak dan tidak sesuai dengan harga pada DPA Murni.
8. Pengurangan belanja vaksin rabies pada kegiatan Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R) dari 430 botol menjadi 163 botol dan belanja obat-obatan Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM).
9. Pengurangan belanja pada Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan pengurangan jumlah pembelian spuit, alat tulis kantor, alcohol, povidone iodin 10%, serta biaya perjalanan dinas dalan kota maupun perjalanan dinas biasa.

Perubahan Rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam perencanaan Perubahan Renja OPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Table 4.1 Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Perikiraan Maju Rencana Tahun 2025		PENANGGUNG JAWAB	KET.
					Murni	P-APBD	Murni	P-APBD	Bertambah/ Berkurang (8-7)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Rawan Pangan**			**13 Desa/Kelurahan**	**13 Desa/Kelurahan**	**50.000.000**	**50.000.000**	**0**	**11 Desa/Kelurahan Rentan Pangan**	**25.000.000**	**Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan**	
Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**			**1 Jenis**	**1 Jenis**	**50.000.000**	**50.000.000**	**0**	**1 Jenis**	**25.000.000**	**Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan**	
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	50.000.000	0	1 Dokumen	25.000.000	Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	
Tersedianya ternak ayam umur 3 bulan yang diserahkan untuk daerah yang rawan pangan	*Pembinaan Desa Mandiri Pangan*	*Jumlah ternak ayam umur 3 bulan yang diserahkan untuk daerah yang rawan pangan*	*Pahae Julu dan Pahae Jae*	*Bonus Produksi*	*622 ekor ternak ayam umur 3 bulan*	*622 ekor ternak ayam umur 3 bulan*	*50.000.000*	*50.000.000*	*0*	*345 ekor ternak ayam umur 2 bulan*	*25.000.000*	*Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan*	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukupi**			**4,57%**	**0,34%**	**320.000.000**	**320.000.000**	**0**	**0,69%**	**2.653.000.000**	**Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan**	
		Persentase Kawasan Yang Dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari			**27,91%**	**13,89%**				**9,92%**		**Kepala Konsumsi dan Keamanan Pangan**	
Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Jenis Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya**			**2 Jenis**	**2 Jenis**	**65.000.000**	**65.000.000**	**0**	**4 Jenis**	**45.000.000**	**Kepala Konsumsi dan Keamanan Pangan**	
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	10.000.000		
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Pahae Julu dan Pahae Jae	Bonus Produksi	5 Unit	5 Unit	30.000.000	30.000.000	0	3 unit (602 kg padi)	15.000.000	J.F Analis Ketahanan Pangan; Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
Tersedianya informasi harga dan pasokan pangan	Pemantauan Harga Bahan Pokok Strategis	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Tarutung	DBH BEBAS	1 Dokumen	1 laporan	15.000.000	15.000.000	0	1 laporan	10.000.000	J.F Analis Ketahanan Pangan; Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
Tersedianya laporan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tarutung	DBH BEBAS	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	0	1 dokumen	10.000.000	J.F Analis Ketahanan Pangan; Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Stock Cadangan Pangan Kabupaten/Kotata**			**3,076 ton beras**	**0,341 ton beras**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0,686 ton**	**18.000.000**	**Kepala Konsumsi dan Keamanan Pangan**	
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Tarutung*	DBH BEBAS	3,076 ton beras	0,341 ton beras	20.000.000	20.000.000	0	0,686 ton	18.000.000	JF. Analis Ketahanan Pangan	
Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Jumlah Jenis Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**			**2 Jenis**	**2 Jenis**	**235.000.000**	**235.000.000**	**0**	**2 Jenis**	**2.590.000.000**	**Kepala Konsumsi dan Keamanan Pangan**	
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam			1 laporan	1 laporan	235.000.000	235.000.000	0	1 Laporan	2.530.000.000	Kepala Konsumsi dan Keamanan Pangan	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Perikiraan Maju Rencana Tahun 2025		PENANGGUNG JAWAB	KET.
					Murni	P-APBD	Murni	P-APBD	Bertambah/ Berkurang (8-7)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
Terlaksananya Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebagai Sumber Gizi Keluarga	*Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	*Jumlah Kelompok Penerima*	*Pahae Julu dan Pahae Jae*	*Bonus Produksi*	*5 Kelompok*	*5 Kelompok*	*160.000.000*	*160.000.000*	*0*	*1 Kelompok*	*30.000.000*	JF. Analis Ketahanan Pangan; Pengelola Penganekaragaman Pangan	
B2SA DAK NON FISIK TA. 2025	B2SA DAK NON FISIK TA. 2025	Jumlah desa penerima								25 Desa	2.500.000.000	JF. Analis Ketahanan Pangan; Pengelola Penganekaragaman Pangan	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Tarutung	DAU	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	75.000.000	0	1 Laporan	60.000.000	JF. Analis Ketahanan Pangan; Pengelola Penganekaragaman Pangan	
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	***PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN***	***Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi***			***36,00%***	***11,11%***	***20.000.000***	***10.000.000***	***-10.000.000***	***8,69%***	***10.000.000***	**Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**	
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sample Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**			**8 Sampel Tanaman Buah dan Sayuran**	**4 Sampel Tanaman Buah dan Sayuran**	**20.000.000**	**10.000.000**	**-10.000.000**	**4 sampel pangan segar**	**10.000.000**	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tarutung	DAU	8 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	10.000.000	-10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	JF. Analis Ketahanan Pangan; Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	
Terlaksananya Pengelolaan Perikanan Budidaya	***PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA***	**1. Jumlah Pembudidaya Ikan**			***200 orang***	***55 orang***	***875.193.648***	***795.193.648***	***-80.000.000***	***30 orang***	***446.360.000***	**Kepala Bidang Perikanan**	
		2. Luas Lahan Budidaya			***30 Ha***	***7 Ha***				***5 Ha***			
		3. Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan			***963.235 ekor benih***	***400.000 ekor benih***				***478.100 ekor benih***			
Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	***Pengelolaan Pembudidayaan Ikan***	***Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan***			***3 Jenis***	***3 Jenis***	***875.193.648***	***795.193.648***	***-80.000.000***	***3 Jenis***	***446.360.000***	**Kepala Bidang Perikanan**	
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*			*2 unit*	*2 unit*	100.000.000	50.000.000	-50.000.000	*2 Unit*	100.000.000	Kepala Bidang Perikanan	
Tersedianya Benih Ikan di BBI Purbatua	*Penyediaan Operasional UPTD BBI Purbatua*	*Jumlah target Benih Ikan*	*Purbatua*	*DBH BEBAS*	*260.000 ekor benih ikan*	*75.000 ekor benih ikan*	*45.000.000*	*25.000.000*	*-20.000.000*	*200.000 ekor benih ikan*	*50.000.000*	Kepala UPT BBI Purbatua; Pramu Benih Ikan	
Tersedianya Benih Ikan di BBI Silangkitang	*Penyediaan Operasional UPTD BBI Silangkitang*	*Jumlah target Benih Ikan*	*Sipoholon*	*DBH BEBAS*	*190.000 ekor benih ikan*	*45.000 ekor benih ikan*	*55.000.000*	*25.000.000*	*-30.000.000*	*150.000 ekor benih ikan*	*50.000.000*	Kepala UPT BBI Silangkitang	
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			100 orang	55 orang	510.000.000	510.000.000	0	30 Unit	245.000.000	Kepala Bidang Perikanan	
Tersedianya Benih Ikan Mas	*Pengembangan Benih Ikan Mas untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan*	*Jumlah Benih Ikan Mas*	*15 Kecamatan*	*DID*	*54.000 ekor benih ikan*	*54.000 ekor benih ikan*	*100.000.000*	*100.000.000*	*0*	*35.500 ekor benih ikan*	*65.000.000*	*JF. Penyuluh Perikanan*	
Tersedianya Benih Ikan Nila	*Pengembangan Benih Ikan Nila untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan*	*Jumlah Benih Ikan Nila*	*15 Kecamatan*	*DID*	*52.500 ekor benih ikan*	*52.500 ekor benih ikan*	*75.000.000*	*75.000.000*	*0*	*46.400 ekor benih ikan*	*65.000.000*	*JF. Penyuluh Perikanan*	
Tersedianya Benih Ikan Lele Dumbo	*Pengembangan Benih Ikan Lele Dumbo untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan*	*Jumlah Benih Ikan Lele Dumbo*	*15 Kecamatan*	*DID*	*52.600 ekor benih ikan*	*52.600 ekor benih ikan*	*75.000.000*	*75.000.000*	*0*	*46.200 ekor benih ikan*	*65.000.000*	*JF. Penyuluh Perikanan*	
Tersedianya Benih Ikan Air Tawar	*Pengembangan Budidaya Air Tawar*	*Jumlah Benih Ikan Lele Dumbo, Ikan Nila dan Ikan Mas*	*Pahae Julu dan Pahae Jae*	*Bonus Produksi*	*120.900 ekor benih ikan*	*120.900 ekor benih ikan*	*200.000.000*	*200.000.000*	*0*	*0*	*0*	*JF. Penyuluh Perikanan*	
Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan	*Pelatihan Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan di UPTD Balai Benih Ikan*	*Jumlah Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan*	*15 Kecamatan*	*DID*	*45 orang*	*55 orang*	*60.000.000*	*60.000.000*	*0*	*30 orang*	*50.000.000*	*JF. Penyuluh Perikanan*	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Perikiraan Maju Rencana Tahun 2025		PENANGGUNG JAWAB	KET.
					Murni	P-APBD	Murni	P-APBD	Bertambah/ Berkurang (8-7)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi			1 Dokumen	7 Ha Luas Lahan Budidaya	265.193.648	235.193.648	-30.000.000	1 Dokumen	101.360.000	Kepala Bidang Perikanan	
Tersedianya Luas Lahan Budidaya	*Penyediaan Jasa Operasional Alat Berat Excavator*	*Luas Lahan Budidaya*	*15 Kecamatan*	*PAD*	*30 Ha*	*7 Ha Luas Lahan Budidaya*	*265.193.648*	*235.193.648*	*-30.000.000*	*5 Ha Luas Lahan Budidaya*	*101.360.000*	*JF. Penyuluh Perikanan*	
Tersedianya dan berkembangnya Sarana Pertanian	***PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN***	**1. Jumlah Bibit ternak yang disebar**			***3.085 ekor itik***	***2.427 ekor***	***250.000.000***	***250.000.000***	***0***	***500 ekor***	***55.000.000***	**Kepala Bidang Peternakan**	
Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	***Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain***	***Jumlah Bibit Ternak***			***3.085 ekor***	***2.427 ekor***	***250.000.000***	***250.000.000***	***0***	***500 ekor***	***55.000.000***	***Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan***	
Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain**			**3.085 ekor**	**2.427 ekor**	*250.000.000*	*250.000.000*	*0*	**500 ekor**	*55.000.000*	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	
Tersedianya Ternak Ayam Buras	*Pengembangan Ternak Ayam Buras*	*Jumlah Ternak Ayam Buras*		*DID*	*2.450 ekor itik*	*1.885 ekor ayam buras umur 3 bulan*	*190.000.000*	*190.000.000*	*0*	*500 ekor*	*55.000.000*	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	
Tersedianya Ternak Ayam Buras di Lokasi Stunting	*Pengembangan Ternak Ayam Buras di Lokasi Stunting*	*Jumlah Ternak Ayam Buras di Lokasi Stunting*	*Pahae Julu dan Pahae Jae*	*Bonus Produksi*	*635 ekor itik*	*542 ekor ayam buras umur 3 bulan*	*60.000.000*	*60.000.000*	*0*	*0*	*0*	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	
Tersedianya dan berkembangnya Prasarana Pertanian	***PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN***	**Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian**			***2 Unit***	***4 Unit***	***1.600.000.000***	***1.600.000.000***	***0***	***2 unit***	***1.200.000.000***	**Kepala Bidang Peternakan**	
Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	***Pembangunan Prasarana Pertanian***	***Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian***			***2 Unit***	***4 Unit***	***1.600.000.000***	***1.600.000.000***	***0***	***2 Unit***	***1.200.000.000***	**Kepala Bidang Peternakan**	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya**	***Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara***			***2 Unit***	***4 Unit***	**1.600.000.000**	**1.600.000.000**	**0**	***144 Ton***	**1.200.000.000**	Kepala Bidang Peternakan	
Terlaksananya Pengembangan Unit Pengolahan Pakan Konsentrat Ruminansia	*Pembangunan Olahan Pakan Konsentrat Babi*	*Jumlah Olahan Pakan Konsentrat Babi yang dihasilkan*	*Pagaran dan Pangaribuan*	*DAK FISIK*	*288 ton*	*288 ton*	*1.520.000.000*	*1.520.000.000*	*0*	*144 Ton*	*1.140.000.000*	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	
Tersedianya Pakan Konsentrat	*Biaya Penunjang DAK Fisik TA. 2024*	*Jumlah pakan konsentrat yang dihasilkan*	*Pagaran dan Pangaribuan*	*DAK FISIK*	*288 ton*	*288 ton*	*80.000.000*	*80.000.000*	*0*	*144 Ton*	*60.000.000*	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	
Meningkatnya pengendalian terhadap penyakit hewan menular	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**1. Jumlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)**			2800 Kasus	940 Kasus	**260.000.000**	**100.000.000**	**-160.000.000**	2300 Kasus	**429.400.000**	**Kepala Bidang Peternakan**	
		2. Jumlah kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)			3450 Kasus	1150 Kasus				1860 Kasus			
		3. Jumlah Kasus Penyakit Yang Ditangani Puskeswan			12 Laporan	342 Kasus				1300 kasus			
Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah wilayah yang terjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota***			15 wilayah	15 wilayah	***260.000.000***	***100.000.000***	***-160.000.000***	15 laporan	***200.000.000***	***Kepala Bidang Peternakan***	
Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali			15 Laporan	15 laporan	*130.000.000*	*50.000.000*	*-80.000.000*	15 laporan	*100.000.000*	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Perikiraan Maju Rencana Tahun 2025		PENANGGUNG JAWAB	KET.
					Murni	P-APBD	Murni	P-APBD	Bertambah/ Berkurang (8-7)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)	*Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)*	*Jumlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)*	*15 Kecamatan*	*DBH BEBAS*	*2800 Kasus*	*940 Kasus*	*130.000.000*	*50.000.000*	*-80.000.000*	*1860 Kasus*	*100.000.000*	*Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan*	
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			15 laporan	15 Laporan	130.000.000	50.000.000	-80.000.000	15 laporan	100.000.000	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	
Terlaksananya Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)	*Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)*	*Jumlah kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)*	*15 Kecamatan*	*DBH BEBAS*	*3450 Kasus*	*1150 Kasus*	*130.000.000*	*50.000.000*	*-80.000.000*	*2300 Kasus*	*100.000.000*	*Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan*	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota***			***12 laporan***	***12 laporan***	***0***	***0***	***0***	***12 laporan***	***229.400.000***	**Kepala Bidang Peternakan**	
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Siborongborong	DBH BEBAS	12 Laporan	20 layanan (200 ekor)	*30.000.000*	*20.000.000*	*-10.000.000*	1300 kasus	*35.000.000*	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	
Biaya Operasional Puskeswan DAK NON FISIK 2025	Biaya Operasional Puskeswan DAK NON FISIK 2025	Jumlah Hewan yang ditangani			0	0	*0*	*0*	*0*	1800 ekor	*194.400.000*	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	
Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***100%***	***100%***	***4.631.234.736***	***4.583.707.513***	***-47.527.223***	***100%***	***4.588.967.053***	**Sekretaris Dinas**	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***7 jenis***	***7 jenis Laporan***	***51.000.000***	***18.708.000***	***-32.292.000***	***5 jenis Laporan***	***50.000.000***	**Sekretaris Dinas**	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Tarutung*	*PAD*	*2 Dokumen*	*2 dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)*	*8.000.000*	*1.908.000*	*-6.092.000*	*7 dokumen*	*15.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Keuangan	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Tarutung*	*PAD*	*1 dokumen*	*1 Dokumen RKA-SKPD*	*5.000.000*	*1.700.000*	*-3.300.000*	*0*	*0*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Keuangan	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Tarutung*	*PAD*	*1 dokumen*	*1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*5.000.000*	*1.700.000*	*-3.300.000*	*0*	*0*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Keuangan	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*Tarutung*	*PAD*	*1 dokumen*	*1 Dokumen DPA-SKPD*	*5.000.000*	*1.720.000*	*-3.280.000*	*0*	*0*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Keuangan	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Tarutung*	*PAD*	*1 laporan*	*1 Laporan Capaian Kinerja*	*6.000.000*	*1.480.000*	*-4.520.000*	*1 Laporan Capaian Kinerja*	*5.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Keuangan	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Perikiraan Maju Rencana Tahun 2025		PENANGGUNG JAWAB	KET.
					Murni	P-APBD	Murni	P-APBD	Bertambah/ Berkurang (8-7)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tarutung*	*PAD*	*4 laporan*	*4 Laporan Evaluasi*	*22.000.000*	*10.200.000*	*-11.800.000*	*13 Laporan*	*30.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Keuangan	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			***3 Jenis***	***3 Jenis***	***3.800.999.460***	***3.834.696.037***	***33.696.577***	***3 Jenis***	***3.707.554.805***	**Sekretaris Dinas**	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Tarutung*	*DAU BEBAS*	*39 orang/bulan*	*48 orang/bulan*	*3.738.394.260*	*3.775.001.437*	*36.607.177*	*48 orang/bulan*	*3.645.481.605*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Keuangan	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Tarutung*	*PAD*	*12 dokumen*	*12 dokumen*	*56.605.200*	*56.605.200*	*0*	*1 Laporan Keuangan*	*6.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Keuangan	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Tarutung*	*PAD*	*1 Laporan*	*1 Laporan Keuangan*	*6.000.000*	*3.089.400*	*-2.910.600*	*12 dokumen*	*56.073.200*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengadministrasi Keuangan	
Terlaksananya administrasi umum PD	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Jenis Administrasi Umum PD***			***6 Jenis***	***10 Jenis***	***149.664.400***	***70.732.600***	***-78.931.800***	***12 Jenis***	***245.000.000***	**Sekretaris Dinas**	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Tarutung*	*PAD*	*1 Paket*	*1 Paket*	*6.000.000*	*1.848.700*	*-4.151.300*	*1 Paket*	*10.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Tarutung*	*PAD*	*1 Paket*	*1 Paket*	*15.000.000*	*11.336.900*	*-3.663.100*	*1 Paket*	*30.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Tarutung*	*PAD*	*1 Paket*	*1 Paket*	*9.604.400*	*4.000.000*	*-5.604.400*	*4 Paket*	*10.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Tarutung*	*PAD*	*1 Paket*	*1 Paket*	*14.830.000*	*7.432.000*	*-7.398.000*	*12 Paket*	*15.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*Tarutung*	*PAD*	3750 Dokumen	0 Dokumen	*12.000.000*	*0*	*-12.000.000*	1340 Dokumen	*10.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Tarutung*	*PAD*	*380 Laporan*	*47 Laporan*	*92.230.000*	*46.115.000*	*-46.115.000*	*141 Laporan*	*170.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***5 Jenis***	***5 Jenis***	***543.942.876***	***543.942.876***	***0***	***5 Jenis***	***441.531.800***	**Sekretaris Dinas**	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Tarutung*	*PAD*	*40 laporan*	*40 laporan*	*400.000*	*400.000*	*0*	*100 Laporan*	*1.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber*	*Tarutung*	*PAD*	*36 laporan*	*36 laporan*	*35.300.000*	*35.300.000*	*0*	*36 Laporan*	*46.298.200*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian,	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Perikiraan Maju Rencana Tahun 2025		PENANGGUNG JAWAB	KET.
					Murni	P-APBD	Murni	P-APBD	Bertambah/ Berkurang (8-7)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan										Pengadministrasi Umum	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Tarutung*	*PAD*	*12 laporan*	*12 laporan*	*508.242.876*	*508.242.876*	*0*	*12 Laporan*	*394.233.600*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***3 Jenis***	***6 Jenis***	***85.628.000***	***115.628.000***	***30.000.000***	***3 Jenis***	***144.880.448***	**Sekretaris Dinas**	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Tarutung*	*PAD*	*3 unit mobil*	*3 unit mobil*	*80.628.000*	*110.628.000*	*30.000.000*	*3 Unit*	*119.947.548*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Tarutung*	*PAD*	*2 Unit*	*2 unit*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*10 unit*	*9.932.900*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Tarutung*	*PAD*	*1 Unit*	*1 unit*	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	*4 Unit*	*15.000.000*	Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum	
	JUMLAH						***8.006.428.384***	***7.708.901.161***	***-297.527.223***		***9.407.727.053***		

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun 2024.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS KETAHANAN PANGAN

Ir. LONGGOS BUHA PANDIANGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19940802 199402 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024

PD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPANULI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019- 2024. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan Rencana Kerja merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS). Dokumen ini akan memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah, perubahan target indikator kinerja dan perubahan kerangka pendanaan pembangunan. Bagi Perangkat Daerah (PD), Perubahan RKPD akan digunakan untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan

sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Mengingat Rencana Kerja merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJP Nasional, RPJMN, Perubahan RKP, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara, RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dan terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada sisa tahun anggaran tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaa Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;
15. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
20. Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
21. Surat Edaran Mendagri Nomor : 440/2622/Sj Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun Rencana Kerja merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu produk perencanaan, Rencana Kerja tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Rencana Kerja ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Secara substansi, keberadaan Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dimaksudkan sebagai upaya melakukan penyesuaian atas perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi acuan untuk penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020.
2. Tersedianya acuan untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

Bab IV Penutup.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBD adalah :

a. *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota* dengan jenis kegiatan terdiri dari Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

   Fokus Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota adalah tersedianya operasional untuk mendukung kegiatan berjalan dengan baik selama 10 bulan terakhir ini dengan baik.

b. *Program Pengendalian Penduduk* dengan jenis kegiatan terdiri dari Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana dimana isi kegiatan ini adalah Operasional Sekretariat Stunting dan Aksi-aksi dalam rangka Penurunan Stunting dan juga Kegiatan yang bermitra dengan Stakeholders terkait Stunting maupun Keluarga Berencana.

c. *Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)* dengan jenis kegiatan terdiri dari : Pelakanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan Kearifan Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayananan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

   Program ini beruraikan Penyuluhan dan Penggaran Para Kader seperti Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan juga Kader KB (PPKBD dan Sub - PKBD) dalam rangka komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Kelompok KB atau Akseptor KB maupun masyarakat dan juga melakukan penggarapan Akseptor KB yang untuk dapat dilakukan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan (Faskes) maupun di Rumah Sakit.

d. *Program Pemberdayaan dan Peningaktan Keluarga Sejahtera (KS)* dengan jenis kegiatan terdiri dari ; Pelakanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

   Dimana kegiatan ini bertujuan dalam melakukan Pembinaan pada Kelompok Tribina, PIK-R maupun Kelompok UPPKA (usaha Peningkatan Pendapan Keluarga Akseptor) da Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan dalam rangka Penurunan Angka Stunting yang dilakukan Oleh Kader

Tim Pendamping Keluarga

e. *Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan* dengan jenis kegiatan terdiri dari ; Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dimana kegiatan ini seperti Pemberian Hibah kepada Persit dan Bhayangkari.
f. *Program Perlindungan Perempuan*, kegiatan Pencengahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan kepada Perempuan berupa Pendapingan atau Biaya Visum dan Pengganti Transport untuk Konseling dengan Psikiater atau Psikolog.
g. *Program Peningkatan Kualitas Keluarga* dengan jenis kegiatan Penngkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
h. *Program Pemenuhan Hak Anak* dengan jenis kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. Dimana Kegiatan bertujuan memberikan sosialiasasi dan koordinasi kepada anak-anak dalam rangka pencegahan kekerasan kepada anak maupun orang tua.
i. *Program Perlindungan Khusus Anak* dengan jenis kegiatan terdiri dari ; Pencengahan Kekeran Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan pencengahan dan Pendampingan Korban Kekesanan Fisik maupun Non Fisik kepada Anak sebagai korban.

Program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBD adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
   a) PenyediaaPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
   c) Adminitrasi Umum Perangkat Daerah,
   d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
   e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
   f) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum, dan
   g) Pemelirahaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengendalian Penduduk :
   a) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   a) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Local,
   b) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
   c) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelyanana dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
   a) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Program Pengarusutamaa Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   a) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
   b) Penguatan dan Pengenbangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota
6. Program Perlindungan Perempuan
   a. Pencengahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
   a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Program Prlindungan Khusus Anak
   a) Pencengahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

Hasil evaluasi lebih rinci pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renstra PD tahun 2024 yang mengacu pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, disajikan dalam dengan format tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara (Lampiran Tabel Rekaputilasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara terlampir).

2.2 Analisis Kinerja Palayanan SKPD

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk manganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara digunakan beberapa indicator.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan berdasarkan indicator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan SKPD yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Total Fertility Rate (TFR)

2. Contraceptive Prevalance Rate (CPR)
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
4. Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan politik
5. Cakupan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti
6. Cakupan anak korban kekerasan yang yang ditindaklanjuti
7. Capaian hasil evaluasi SAKIP
8. Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti

Data untuk analisis akan menunjukkan tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2021 disajikan sebagaimana Tabel 2.2 berikut : (exel)

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara

NO.	**Indikator Tujuan/Sasaran**	**Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun**					**Realisasi capaian**		**Proyeksi capaian**
		2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah Anak yang dilahirkan wanita usia subur (TFR)	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.91	2.85	3.6
	Contraceptive Prevalance Rate (CPR) (Cakupan Peserta KB Aktif)	67,00	67.03	67.30	67.60	68.96	41.58	50.63	67.60
	Persentase Pasangan Usia Subur yang tidak terlayani (Unmeet Need)	21.30	21.20	20.82	20.71	20.60	28.56	15.18	20.71
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97.51	97.52	97.53	97.54	97.55	97.93	97.80	97.54
	Persentase kasus kekerasan pada perempuan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	95.35	100	100
	Persentase kasus kekerasan pada Anak yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	92.37	100	100
	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan politik	4.07	4.12	4.17	4.22	4.27	4.16	4.16	4.22
3	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran Yang Terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	100

2.3. Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Hasil analisis isu-isu penting selanjutnya dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara, maka hambatan dan masalah yang dihadapi adalah :

Tabel 2.4.
Hambatan dan Masalah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata jumlah anak dari WUS	3	Angka Kelahiran Total (TFR)/ Wanita Usia Subur (WUS)(15-49 Tahun)	Promosi, Informasi dan edukasi belum optimal	Dukungan dan sinergitas dengan sektor terkait belum optimal	- Masih tingginya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk secara aktif mengikuti program KB - Rendahnya pengguna metoda kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
Contraceptive Prevalance Rate (CPR)	41.58 %	Jumlah Peserta KB Aktif / Pasangan Usia Subur	Promosi, Informasi dan edukasi belum optimal	Ratio Petugas PLKB dan PKB belum memadai	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk secara aktif mengikuti program KB
Perentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan politik	5.16 %	Jumlah Perempuan yang bekerja di Lembaga pemerintah dan DPRD/Jumlah Perempuan yang ada	Promosi, Informasi dan edukasi belum optimal	Masih rendahnya akses perempuan dalam bidang Politik dan Ekonomi	Kurangnya kualitas SDM, sarana/prasarana dan anggaran untuk mendukung program
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	Jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditindaklanjuti /jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ada	Promosi, Informasi dan edukasi belum optimal	Tingkat Pendidikan/Pengetahuan, ekonomi dan social masyarakat Masih Rendah	- Kurangnya Sosialisasi yg dilakukan Petugas tentang kebiajakan-kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Nilai SAKIP	61.69 %	Nilai hasil review seluruh dokomen SAKIP	Pemahaman dan Kualitas kinerja SDM belum optimal	Sumberdaya OPD masih terbatas	- Kualitas SDM OPD terkait standar pelayanan masih kurang
Temuan APIP yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah temuan APIP yang ditindaklanjuti/ Jumlah temuan APIP yang ada	Pemahaman SDM tentang akuntabilitas kinerja belum seragam	Dukungan dan sinergitas dengan sektor terkait belum optimal	- Kurangnya sosialisasi terkait akuntabilitas kinerja

Dari tabel hambatan dan masalah serta permasalahan, tantangan dan solusi dapat ditentukan isu-isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas adalah Meningkatkan pengelolaan pengendalian penduduk dan meningkatkan efektifitas Keluarga Berencana serta meningkatkan efektifitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di tahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan didapatkan dari hasil Musrenbang maupun usulan lainnya dari masyarakat. Untuk usulan Program/kegiatan yang telah dibahas dalam musrenbang kecamatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 yang telah lalu, usulan desa maupun kecamatan yang ditujukan ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Tapanuli Utara tidak ada, pada dasarnya usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana lainnya yang tidak terkait dengan tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.	**Program peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender**				
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
II.	**Program Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak**				
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
III.	**Program Keluarga Berencana dantiPembinaan Keluarga**				
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
IV.	**Program advokasi dan pengendalian penduduk**				
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Jumlah		

Sumber : Musrenbang Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Agenda pembangunan Nasional selama 20 tahun telah di tuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Saat ini Indonesia memasuki periode terakhir RPJMN IV tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup

1. Pembangunan Infrastruktur,
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
3. Penyederhanaan Regulasi,
4. Penyederhanaan Birokrasi, dan
5. Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Visi Misi dan 5 (lima) arahan utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalam hal ini, BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung pada PN “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, dan PN “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing;

1) Program Prioritas (PP) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; 1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan 2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

2) PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.

3) PP Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP; 1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan 2)

Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, dengan fokus strategi untuk:

a) perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah;
b) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender;
c) peningkatan kompetensi PKB/PLKB;
d) penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi; dan
e) penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.

b. Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan : PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP Revolusi mental dalam sistem social untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari KP tersebut, BKKBN berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:

1) Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.
2) Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.
3) Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
4) Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

a. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:

1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.

b. menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:

1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.

c. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:

1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
4) Peningkatan KB Pria.
5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
6) Peningkatan kemandirian PUS dalamber-KB.

d. meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.

e. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:

1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Berbagai arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tersebut diatas tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program BanggaKencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta Penguatan Kerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

a. peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi;

b. peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai *input*/masukan atas rumusan kebijakan;
c. peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat kelembagaan.

2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Utama memiliki arah kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

a. penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana;
b. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN;
c. penguatan Perencanaan Program dan Anggaran;
d. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur; dan
e. penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah-tanggaan yang berkualitas.

3. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, Inspektorat Utama memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui strategi:

a. mendorong pengelolaan keuangan BKKBN secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, eisien, dan efektif;
b. mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan eisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi;
c. mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala BKKBN dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
d. mendorong pencapaian sasaran strategis BKKBN secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana terteradiatas, terutama dalam implemetasinya, BKKBN akan terus memperhatikan perkembangan situasi/kondisi dan isu strategis nasional serta prioritas strategi pembangunan nasional.

Salah satu strategi pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baik oleh Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. BKKBN berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan) mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana serta memperhatikan konsep Pegarusutamaan Gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Program/Kegiatan Bangga Kencana yang inklusif gender.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun focus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka DPPKBP3A menetapkan Tujuan dan Sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukurannya sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terwujudnya layanan Kesehatan yang berkualitas		Jumlah Anak yang dilahirkan wanita usia subur (TFR)
		1.Menurunnya Angka Kelahiran	Contraceptive Prevalance Rate (CPR) (Cakupan Peserta KB Aktif)
		2.Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur yang tidak terlayani (Unmeet Need)
II	Mengoptimalkan Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		3.Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	entase kasus kekerasan pada perempuan yang ditindaklanjuti
			entase kasus kekerasan pada Anak yang ditindaklanjuti
		4.Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan politik
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran		ingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen
		Terpenuhinya dunkungan manajemen perkantoran	ingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran
		Program Penunjang Urusan	akupan Layanan Manajemen Perkantoran Yang Terpenuhi

3.4. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program-program diharapkan akan dapat memacu peningkatan kinerja aparatur. Pelaksanaan dari program adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dan turunannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada 9 (sembilan) Program yang telah ditetapkan sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan sebagai berikut
    1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
    2. Program perlindungan perempuan
    3. Program peningkatan kualitas keluarga
    4. Program pemenuhan hak anak (PHA)
    5. Program perlindungan khusus anak

B. Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ditetapkan sebagai berikut
    6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
    7. Program pengendalian penduduk
    8. Program pembinaan keluarga berencana (KB)
    9. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN PAGU PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program Baru/ Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru/Berkurang	Perangkat Daerah Penanggungj awab
		Renja 2024	DPA PD 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	DPA PD 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	DPA PD 2024	Perubahan Renja 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	9	9	9	18	18	18	12.317.927.742	12.317.927.742	12.182.725.041	-	18	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024

NO	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Semula	Menjadi		Renja 2020	Renja Perubahan PD Tahun 2020	Renja 2020	Renja Perubahan PD Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran Yang Terpenuhi**	**100%**	**100%**	**5.152.820.891**	**5.180.326.091**	
		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				*14.346.000*	*14.346.000*	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediaya Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan	12 Bulan	9.346.000	9.346.000	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Daerah*				*4.301.383.042*	*4.648.694.841*	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	4.234.987.442	4.582.299.241	Kebutuhan Sesuai dengan Jumlah ASN

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pentausahan dan Pengujian/ Verifikasi	12 bulan	12 bulan	61.395.600	61.395.600	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum PErangkat Daerah*				*187.486.300*	*187.486.300*	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	12 bulan	12 bulan	2.171.700.000	2.171.700	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	19.987.000	19.987.000	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	7.724.800	7.724.800	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	10.064.800	10.064.800	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bahan Bacaan	12 bulan	12 bulan	4.995.000	4.995.000	-
		Pennyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pennyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	142.543.000	142.543.000	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				*27.505.200*	*27.505.200*	

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit	27.505.200	27.505.200	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				*213.483.400*	*213.483.400*	
		Penyediaan jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	4.000.000	4.000.000	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	26.999.400	26.999.400	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	182.484.000	173.484.000	Penyesuaian dengan Kebutuhan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				*88.819.500.*	*97.810.350*	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	88.819.500	97.810.350	Penyesuaian dengan Kebutuhan
		Program Pengendalian Penduduk	**Program Pengendalian Penduduk**	**Jumlah Anak yang dilahirkan Wanita Usia Subur (TFR)**	**3.6 %**	**3.6 %**	**499.999.900**	**349.999.900**	
		Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian	*Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian*				*499.999.900*	*499.999.900*	

		Kuantitas Penduduk	*Kuantitas Penduduk*						
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Tersedianya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	499.999.900	399.999.900	Refokusing
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Contraceptive Pravalance Rate (CPR)/ Cakupan Peserta KB Aktif**	**67.60 %**	**67.60 %**	**3.928.112.900**	**3.828.112.550**	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sesuai Kearifan Lokal	*Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sesuai Kearifan Lokal*				*1.164.225.900*	*1.064.225.000*	
		Pengelolaan Operasinal dan Sarana Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Pengelolaan Operasinal dan Sarana Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Tersedianya Operasinal dan Sarana Balai Penyuluhan Bangga Kencana	12 Balai	12 Balai	739.241.000	739.241.000	-
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	15 Kecamatan	15 Kecamatan	224.985.000	224.985.000	-
		Komunikasi, Indormasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Indormasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksanany Komunikasi, Indormasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	3 Kecamatan	3 Kecamatan	199.999.900	199.999.500	Penyesuaian Sesuai Kebutuhan
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB	*Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*				*1.117.200.000*	*1.117.200.000*	

		(PKB/PLKB)							
		Pendayagunaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pendayagunaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tersedianya Pergerakan Kader IMP	756 Orang	756 Orang	1.117.200.000	1.117.200.000	-
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*				*1.312.440.000*	*1.312.440.000*	
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tersedianya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	27 Fasilitas Kesehatan	27 Fasilitas Kesehatan	16.770.000	16.770.000	-
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya Pelayanan KB Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	50 Orang	50 Orang	157.935.000	157.935.000	-
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tersedianya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27 Fasilitas Kesehatan	27 Fasilitas Kesehatan	157.035.000	157.035.000	-

		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Tersedianya Pelayanan KB Pecabutan dan Pemasangan Implant dan IUD	3123 Orang	3123 Orang	964.100.0000	964.100.000	-
		Peningkatan Kesertaan KB Pria	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Tersedianya Pelayanan KB Pria	10 Orang	7 Orang	16.600.000	16.600.000	Penyesuaian sesuai Kebutuhan
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*				*334.247.000*	*334.247.000*	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Tersedianya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	25 Desa	25 Desa	334.247.000	334.247.000	-
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Persentase Pasangan Usia Subur yang tidak terlayani (Unmeet Need)**	**20.71 %**	**20.71 %**	**2.471.791.500**	**2.371.791.700**	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				2.471.993.000	2.371.791.700	
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R	Tersedianya Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	79.993.000	79.993.000	-

		BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	200.000.500	100.000.700	Refocusing
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.076.600.000	2.076.600.000	Penyesuaian sesuai kebutuhan
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha	Tersedianya Konseling dan Edukasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi	15 Kecamatan	15 Kecamatan	115.198.000	115.198.000	Penyesuaian sesuai kebutuhan

		Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Keluarga)				
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Indek Pembangunan Gender (IPG)**	**97.54 %**	**97.54 %**	**241.000.000**	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota*				*120.000.000*	*120.000.000*
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terseediannya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	4 Organisasi	2 Organisasi	120.000.000	40.000.000	Refokusing
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*				102.420.700	102.420.700	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 Kegiatan	102.420.700	102.420.700	Penyesuaian

		Program Perlindungan Perempuan	**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase Kekerasan pada Perempuan yang ditindaklanjuti**	**100%**	**100 %**	71.835.800		
		Pencengahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Pencengahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*				71.835.800		
		Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			71.835.800	71.835.800	Penyesuaian Kegiatan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase Kekerasan pada Perempuan yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**100 %**	**100.743.500**	**75.743.500**	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				*100.743.500*	*75.743.500*	
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.743.500	75.743.500	Refokusing
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Persentase Kekerasan pada Anak yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**100 %**	**100.000.000**	**100.000.000**	

		Pelembangaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Pelembangaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				*100.000.000*	*100.000.000*	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	Penyesuaian Kegiatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000.000	50.000.000	
		Program Perlindungan Khusus Anak	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase Kekerasan pada Anak yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**100 %**	**140.000.000**	**90.000.000**	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*				*140.000.000*	*90.000.000*	
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Tersedianya Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	140.000.000	90.000.000	Refokusing

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara dalam penyusunan Renja 2024 tetap berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat bergantung dari sistem informasi yang ada dan konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama, karena pengukuran kinerja bersifat *on going proces* sehingga wajib secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator kinerja yang benar-benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai. Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performa organisasi, merupakan *entry point* terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan baik tergantung dari bagaimana merumuskan dan menjabarkan jenis atau bentuk intervensi sesuai dengan masalah-masalah spesifik yang ada. Dengan demikian metode dan tehnik melaksanakan program kegiatan merupakan hal yang sangat penting, sehingga program-program dimaksud dapat terlaksana dengan baik, efektif dan tepat sasaran.

Tarutung, Oktober 2024
KEPALA DINAS,

DONNA NURSITI SITUMEANG, S.IP
PEMBINA TK. I
NIP. 19750705 200312 2 006

PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2024

DINAS KETENAGAKERJAAN

KABUPATEN TAPANULI UTARA

TARUTUNG

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Rahmat dan KaruniaNya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019–2024 dan juga Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk memberikan arahan dan acuan dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara yang menyesuaikan dinamika perubahan yang terjadi di tahun 2024.

Atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang terkait dalam penyiapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini kami ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan menolong kita. Amin.

TARUTUNG, OKTOBER 2024

KEPALA DINAS,

JOSUA J. E. HUTABARAT, ST, ME
PEMBINA
NIP. 19800218 200604 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan..... 4
1.4. Sistematika Penyusunan 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan dan Capaian Renstra SKPD 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..... 11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 13
2.4. Review terhadap RKPD 17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 23

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 30
4.2. Rencana Tindak Lanjut 31

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 s/d Triwulan II	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara	12
Tabel 2.3	Review terhadap RKPD Tahun 2024	18
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	22
Tabel 3.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2024	24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terjadinya perubahan dinamika kehidupan sosial dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara mengharuskan terjadinya perubahan arah kebijakan pembangunan yang telah disusun di awal tahun pembangunan. Kebijakan pembangunan yang disusun kembali didasarkan pada kondisi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara dan berorientasi pada potensi yang ada serta hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun pembangunan. Kondisi yang terjadi saat inilah yang menjadi salah satu penyebab dilakukannya perubahan atas Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024.

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan Rencana Kerja merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Dokumen ini akan memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi,

perubahan target indikator kinerja dan perubahan kerangka pendanaan pembangunan. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Mengingat Rencana Kerja merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJP Nasional, RPJMN, Perubahan RKP, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara, RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dan terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada sisa tahun anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai upaya melakukan penyesuaian atas perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 adalah :

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2024 yang menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor ketenagakerjaan;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;

1.4. Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan

Bab ini memuat informasi tentang evaluasi renja tahun berjalan dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review atas RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini memuat informasi tentang rencana kerja dan pendanaan yang akan dicapai.

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan dan Capaian Renstra SKPD

Capaian Kinerja dan Keuangan Renja tahun 2023 berisi target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang sudah ditetapkan. Target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Perubahan RPJMD tahun 2019-2024 dan Perubahan Renstra tahun 2020-2024, sedangkan jumlah anggaran untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja digunakan untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaian dengan Renstra.

Untuk tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan 4 program, 10 kegiatan, dan 22 sub kegiatan. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.031.056.378,00 atau 27,14% dari total APBD sebesar Rp. 3.799.494.500,00. Realisasi anggaran belanja belanja langsung berdasarkan Perangkat Daerah ditampilkan pada tabel berikut :

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 S/D TRIWULAN II

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15=12/7 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					**6.816.043.725**		**14.462.454.766**		**3.799.494.500**		**453.289.487**		**577.766.891**		-		-		**1.031.056.378**		**15.493.511.144**		**92,14**		**27,14**
1	**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan**		**Nilai Hasil Evaluasi AKIP (Nilai)**	**81,00**	**14.173.406.675**		**10.843.185.321**	**81,00**	**2.570.367.950**		**436.057.487**		**561.639.822**		-		-		**997.697.309**		**11.840.882.630**		**83,54**		**38,82**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG YANG TERTANGANI (%)**	**100,00**	**14.173.406.675**	**100,00**	**10.843.185.321**	**100,00**	**2.570.367.950**	**25,00**	**436.057.487**	**25,00**	**561.639.822**		-		-	**50**	**997.697.309**	**50,00**	**11.840.882.630**	**50,00**	**83,54**	**50,00**	**38,82**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)**	**15**	**119.999.900**	**12**	**19.551.500**	**3**	**13.634.475**	**3**	**3.614.000**	**0**	**1.501.500**		-		-	**3**	**5.115.500**	**15**	**24.667.000**	**100,00**	**20,56**	**100,00**	**37,52**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	100.000.000	6	11.048.000	6	9.070.550	3	3.614.000	0	-		-		-	3	3.614.000	9	14.662.000	75,00	14,66	50,00	39,84
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	19.999.900	4	8.503.500	1	4.563.925	1	-	0	1.501.500		-		-	1	1.501.500	5	10.005.000	100,00	50,03	100,00	32,90

		Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)**	**5**	**11.995.944.700**	**4**	**9.286.930.661**	**1**	**2.194.587.975**	**0**	**370.951.030**	**0**	**510.578.560**		**-**		**-**	**0**	**881.529.590**	**4**	**10.168.460.251**	**80,00**	**84,77**	**0,00**	**40,17**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	1500	11.807.340.000	1200	9.112.424.361	300	2.147.704.650	60	370.951.030	60	488.439.460		-		-	120	859.390.490	1.320	9.971.814.851	88,00	84,45	40,00	40,01
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	20	168.604.800	16	165.912.800	4	42.431.200	1	-	1	20.673.600		-		-	2	20.673.600	18	186.586.400	90,00	110,66	50,00	48,72
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	19.999.900	4	8.593.500	1	4.452.125	1	-	0	1.465.500		-		-	1	1.465.500	5	10.059.000	100,00	50,30	100,00	32,92
		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)**	**60**	**1.154.527.235**	**48**	**780.854.043**	**12**	**146.137.500**	**3**	**20.528.000**	**3**	**15.817.400**		**-**		**-**	**6**	**36.345.400**	**54**	**817.199.443**	**90,00**	**70,78**	**50,00**	**24,87**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	64.999.200	16	25.566.500	4	5.272.800	1	1.234.000	0	-		-		-	1	1.234.000	17	26.800.500	85,00	41,23	25,00	23,40
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	126.998.200	16	87.188.600	4	23.529.700	0	-	0	-		-		-	0	-	16	87.188.600	80,00	68,65	0,00	0,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20	50.220.600	16	25.357.000	4	4.808.000	1	1.971.000	1	-		-		-	2	1.971.000	18	27.328.000	90,00	54,42	50,00	40,99
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20	93.971.830	16	43.871.250	4	16.869.000	1	3.286.000	1	720.000		-		-	2	4.006.000	18	47.877.250	90,00	50,95	50,00	23,75
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	750	818.337.405	600	598.870.693	150	95.658.000	28	14.037.000	32	15.097.400		-		-	60	29.134.400	660	628.005.093	88,00	76,74	40,00	30,46

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)**	**60**	**661.316.300**	**48**	**615.890.460**	**12**	**175.809.200**	**3**	**34.184.157**	**3**	**25.310.362**		**-**		**-**	**6**	**59.494.519**	**54**	**675.384.979**	**90,00**	**102,13**	**50,00**	**33,84**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5	18.000.000	4	8.969.000	1	500.000	1	495.000	0	-		-		-	1	495.000	5	9.464.000	100,00	52,58	100,00	99,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	124.997.900	48	97.796.260	12	48.150.000	3	6.689.157	3	6.979.162		-		-	6	13.668.319	54	111.464.579	90,00	89,17	50,00	28,39
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	518.318.400	48	509.125.200	12	127.159.200	3	27.000.000	3	18.331.200		-		-	6	45.331.200	54	554.456.400	90,00	106,97	50,00	35,65
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)**	**60**	**241.618.540**	**48**	**139.958.657**	**12**	**40.198.800**	**3**	**6.780.300**	**3**	**8.432.000**		**-**		**-**	**6**	**15.212.300**	**54**	**155.170.957**	**90,00**	**64,22**	**50,00**	**37,84**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	45	152.301.540	36	115.118.657	9	35.317.300	9	6.780.300	0	6.932.000		-		-	9	13.712.300	45	128.830.957	100,00	84,59	100,00	38,83
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	89.317.000	36	24.840.000	10	4.881.500	0	-	3	1.500.000		-		-	3	1.500.000	39	26.340.000	65,00	29,49	30,00	30,73
2	**Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja**		**Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)**	**98,79**	**130.000.000**	**98,97**	**204.920.650**	**98,79**	**79.995.375**		**2.989.500**		**16.127.069**		**-**		**-**		**19.116.569**		**224.037.219**		**172,34**	**0,00**	**23,90**
###		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**PERSENTASE PENYAMPAIAN INFORMASI KERJA (%)**	**100,00**	**130.000.000**	**100,00**	**204.920.650**	**100,00**	**79.995.375**	**25,00**	**2.989.500**	**25,00**	**16.127.069**		**-**		**-**	**50,00**	**19.116.569**	**50,00**	**224.037.219**	**50,00**	**172,34**	**50,00**	**23,90**
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pencari Kerja yang Terlayani (Orang)**	**2700**	**130.000.000**	**1404**	**204.920.650**	**600**	**79.995.375**	**32**	**2.989.500**	**80**	**16.127.069**		**-**		**-**	**112**	**19.116.569**	**1.516**	**224.037.219**	**56,15**	**172,34**	**18,67**	**23,90**

		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKAL (Orang)	2500	100.000.000	1304	177.636.050	500	43.060.750	32	2.989.500	80	3.498.800		-		-	112	6.488.300	1.416	184.124.350	56,64	184,12	22,40	15,07
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	200	30.000.000	100	27.284.600	100	36.934.625	0	-	0	12.628.269		-		-	0	12.628.269	100	39.912.869	50,00	133,04	0,00	34,19
3	**Meningkatkan SDM (Keterampilan) Pencari Kerja**		**Persentase Pencari Kerja yang Memperoleh Pelatihan/Keterampilan (%)**	**42,11**	**2.278.013.350**	**56,96**	**3.063.911.145**	**42,11**	**400.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**-**	**56,96**	**12.947.240.996**	**135,26**	**568,36**	**0,00**	**0,00**
			Persentase Pencari Kerja yang Telah Bekerja dan Mandiri Setelah Dilatih (%)	**80,83**		**80,68**		**80,83**										**0,00**		**80,68**		**99,81**		**0,00**	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**PERSENTASE PENCARI KERJA YANG MEMPEROLEH PELATIHAN/KETERAMPILAN (%)**	**42,11**	**2.278.013.350**	**56,96**	**3.063.911.145**	**42,11**	**400.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**-**	**56,96**	**3.063.911.145**	**135,26**	**134,50**	**0,00**	**0,00**
		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)**	**256**	**2.218.013.350**	**1350**	**3.035.571.845**	**64**	**350.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**		**-**		**-**	**0**	**-**	**1.350**	**3.035.571.845**	**527,34**	**136,86**	**0,00**	**0,00**
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	256	2.218.013.350	1350	3.035.571.845	64	350.000.000	0	-	0	-		-		-	0	-	1.350	3.035.571.845	527,34	136,86	0,00	0,00
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)**	**4**	**60.000.000**	**10**	**28.339.300**	**2**	**50.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**		**-**		**-**	**0**	**-**	**10**	**28.339.300**	**250,00**	**47,23**	**0,00**	**0,00**
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	4	60.000.000	10	28.339.300	2	50.000.000	0	-	0	-		-		-	0	-	10	28.339.300	250,00	47,23	0,00	0,00

4	**Meningkatkan Perlindungan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**		**Persentase Tenaga Kerja Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)**	**5,16**	**234.623.700**	**4,06**	**350.437.650**	**5,16**	**749.131.175**		**14.242.500**		**-**		**-**		**-**	**0**	**14.242.500**	**4**	**364.680.150**	**78,68**	**155,43**		**1,90**
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**PERSENTASE PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN (%)**	**50,16**	**234.623.700**	**35,48**	**350.437.650**	**50,16**	**749.131.175**	**5,18**	**14.242.500**	**33,56**	**-**		**-**		**-**	**38,74**	**14.242.500**	**74**	**364.680.150**	**147,97**	**155,43**		**1,90**
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)**	**75**	**139.785.900**	**81**	**270.849.150**	**15**	**79.782.025**	**2**	**14.242.500**	**1**	**-**		**-**		**-**	**3**	**14.242.500**	**84**	**285.091.650**	**112,00**	**203,95**	**20,00**	**17,85**
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	75	139.785.900	81	270.849.150	15	79.782.025	2	14.242.500	1	-		-		-	3	14.242.500	84	285.091.650	112,00	203,95	20,00	17,85
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)**	**6**	**94.837.800**	**2**	**79.588.500**	**3**	**669.349.150**	**0**	**-**	**0**	**-**		**-**		**-**	**0**	**-**	**2**	**79.588.500**	**33,33**	**83,92**	**0,00**	**0,00**
			Jumlah Tenaga Kerja Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Orang)	**18000**		**26616**		**3000**		**0**		**0**						**0**		**26.616**		**147,87**		**0,00**	
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	6	20.000.000	2	8.927.000	3	34.609.150	0	-	0	-		-		-	0	-	2	8.927.000	33,33	44,64	0,00	0,00
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	18000	74.837.800	26616	70.661.500	3000	634.740.000	0	-	0	-		-		-	0	-	26.616	70.661.500	147,87	94,42	0,00	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disajikan pada tabel berikut ini :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
						2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*14*	
1	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			Persen	83,95	83,96	82,23	82,25	82,29	81,78	82,18	82,63	81,07	81,20
			Meningkatkan SDM (Keterampilan) Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Memperoleh Pelatihan/Keterampilan	Persen	70,81	29,00	40,00	41,82	42,11	69,91	12,50	29,00	43,47	56,96
				Persentase Pencari Kerja yang Telah Bekerja dan Mandiri Setelah Dilatih	Persen	43,80	65,52	80,00	80,43	80,83	50,63	54,74	79,62	80,72	80,68
			Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	98,69	97,12	98,57	98,68	98,79	98,67	97,06	98,46	98,93	98,97
			Meningkatkan Perlindungan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	3,89	4,77	4,90	5,03	5,16	2,36	4,63	3,01	3,87	4,06
			Meningkatkan Sumberdaya Manusia Warga Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang dibina untuk Meningkatkan SDM (Keterampilan)	Persen	10	10	10	20	20	50	50	10	10	20
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	65,00	65,80	72,00	78,00	81,00	61,13	54,90	68,15	70,67	69,46

Dari data yang disajikan pada Tabel 2.2 diatas, realisasi yang dapat dicapai pada rentang tahun 2019-2023 secara umum mengalami peningkatan. Selain itu, target per tahunnya secara umum juga dapat tercapai.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja merupakan salah satu cara untuk menciptakan calon-calon tenaga kerja yang handal dan kapabel dalam bidang tertentu. Hal ini bertujuan untuk dapat memenuhi permintaan pasar terhadap tenaga kerja yang berkompeten disamping diperlukan perluasan dan penempatan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan.

Menurut data BPS Kabupaten Tapanuli Utara, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 adalah sebanyak 1.933 orang dengan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 1,03%. Hal ini mengalami peningkatan jumlah pengangguran terbuka apabila dibandingkan pada kondisi tahun 2022 yaitu sebanyak 1.870 orang. Walaupun jumlah pengangguran terbuka menurun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2023 mengalami penurunan apabila dibandingkan pada kondisi tahun 2022 yaitu 1,07%. Hal ini akibat dari melonjaknya jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2023 yaitu sebesar 187.311 orang dibandingkan pada kondisi tahun 2022 yaitu sebesar 174.506 orang.

Hal inilah yang menjadi salah satu target Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara untuk dapat semakin meningkatkan kualitas dan kompetensi Angkatan Kerja agar dapat semakin bersaing dalam dunia kerja sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

2.3.2. Tantangan dan Peluang

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (*Opportunities*) diantaranya :

1. Banyaknya angkatan kerja lulusan SLTA;
2. Perusahaan yang dapat bermitra dengan Dinas Ketenagakerjaan;

3. Adanya integrasi program dengan pemerintah baik Kementerian maupun tingkat Provinsi;
4. Sudah terdapat Himpunan Perundangan Ketenagakerjaan;
5. Pendidikan khusus untuk pendidikan teknis pengantar kerja;
6. Peningkatan SDM untuk Tenaga Instruktur;
7. Tersedianya lahan penyiapan permukiman transmigrasi dan penduduk setempat;
8. Tingkat kemandirian warga transmigrasi;
9. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat.

Selain itu, analisa lingkungan eksternal mengingatkan kepada tantangan (*treaths*) diantaranya :

1. Banyaknya jumlah tenaga kerja yang sudah bekerja namun tidak memiliki keterampilan;
2. Budaya masyarakat untuk membuat kesepakatan bersama dalam pembangunan masih lemah;
3. Banyaknya perusahaan yang belum menjalankan UU No. 13 Tahun 2003;
4. Rendahnya kesadaran perusahaan melaksanakan peraturan;
5. Sistem kontrak kerja outsourcing menyebabkan terjadinya PHK;
6. Rendahnya SDM Tenaga Kerja Lokal;
7. Rendahnya kualitas Pemukiman Transmigrasi (Banjir, Bencana Alam);
8. Status kepemilikan lahan Transmigrasi.

Analisa SWOT dilakukan untuk mengkaji kekuatan (*Strenght*) dan peluang (*Opportunity*) yang dimiliki dibandingkan dengan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threat*) yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Matriks Analisa SWOT

			INTERNAL	
			Kekuatan (*Strenght*)	**Kelemahan (*Weakness*)**
			- Dinas Ketenagakerjaan memiliki UPT. Balai Latihan Kerja; - Program kerjasama dengan pihak swasta/mitra; - Tersedianya instruktur; - Kelembagaan (khususnya aturan) pengawasan sudah ada; - Pimpinan memberikan kebebasan kepada staf untuk menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya dan wewenangnya (terutama petugas teknis).	- Kurangnya tenaga teknis pengantar kerja; - Tenaga Instruktur yang masih kurang dengan aneka SDM; - Jaringan ke perusahaan masih terbatas; - Belum terbentuknya forum jejaring pemagangan; - Masih terbatasnya SDM Pegawai terutama dalam penggunaan jaringan internet dalam pelaksanaan tugas; - Kurang tenaga teknis pengawas; - Tidak ada tenaga mediasi tenaga kerja.
EKSTERNAL	***Peluang (Opportunity)***	- Banyaknya angkatan kerja lulusan SLTA; - Perusahaan yang dapat bermitra dengan Dinas Ketenagakerjaan; - Adanya integrasi program dengan pemerintah baik Kementerian maupun tingkat Provinsi; - Sudah terdapat Himpunan Perundangan Ketenagakerjaan; - Pendidikan khusus untuk pendidikan teknis pengantar kerja; - Peningkatan SDM untuk Tenaga Instruktur; - Tersedianya lahan penyiapan permukiman transmigrasi dan penduduk setempat; - Tingkat kemandirian warga transmigrasi; - Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat.	- Semakin meningkatkan kerjasama dengan lembaga pelatihan swasta dalam peningkatan keterampilan lulusan SLTA; - Semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas instruktur UPT. Balai Latihan Kerja	- Mengajukan penambahan tenaga teknis pengantar kerja; - Semakin meningkatkan kualitas tenaga teknis pengantar kerja yang ada
	Tantangan (Threat)	- Banyaknya jumlah tenaga kerja yang sudah bekerja namun tidak memiliki keterampilan; - Budaya masyarakat untuk membuat kesepakatan bersama dalam pembangunan masih lemah; - Banyaknya perusahaan yang belum menjalankan UU No. 13 Tahun 2003; - Rendahnya kesadaran perusahaan melaksanakan peraturan; - Sistem kontrak kerja outsourcing menyebabkan terjadinya PHK; - Rendahnya SDM Tenaga Kerja Lokal; - Rendahnya kualitas Pemukiman Transmigrasi (Banjir, Bencana Alam); - Status kepemilikan lahan Transmigrasi.	- Semakin meningkatkan pembinaan bagi perusahaan-perusahaan untuk senantiasa mematuhi peratuan perundang-undangan; - Semakin meningkatkan keterampilan/keahlian tenaga kerja lokal	- Memanfaatkan pegawai yang menguasai internet dalam mengakses peraturan perundang-undangan

2.3.3. Isu-isu Penting

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara mengurusi 2 (dua) urusan yaitu Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan tenaga kerja merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan transmigrasi merupakan urusan pilihan.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Adapun yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yaitu :

1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
2. Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta;
3. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
4. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil;
5. Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
7. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kabupaten/Kota;
8. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
9. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah Kabupaten/Kota;
13. Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
14. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan dinas serta hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

a. Keterampilan/keahlian tenaga kerja sebagai tenaga kerja terampil masih kurang;
b. Pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan penyediaan lapangan kerja;
c. Minat tenaga kerja untuk berwirausaha masih rendah;

d. Masih rendahnya kesadaran pemberi kerja untuk mendaftarkan tenaga kerja menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

2.4. Review terhadap RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat pusat, provinsi maupun daerah, maka arah pembangunan pada sektor tenaga kerja dan transmigrasi tahun 2024 yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi;
2. Peningkatan jumlah pencari kerja yang ditempatkan/memiliki pekerjaan;
3. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang terdaftar pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Review terhadap RKPD tahun 2024 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	RKPD		Hasil Analisa Kebutuhan		Catt
				Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					**4.678.034.983,00**		**3.799.494.500,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG YANG TERTANGANI (%)**	**100**	**3.891.851.651,00**	**100**	**2.570.367.950,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD (Dokumen)**	**3**	**69.164.900,00**	**3**	**13.634.475,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	50.000.000,00	6	9.070.550,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	4.999.900,00	1	4.563.925,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	14.165.000,00	-	-	
	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bulan)**	**12**	**3.109.347.100,00**	**12**	**2.194.587.975,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	25	3.063.000.000,00	25	2.147.704.650,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	41.347.200,00	4	42.431.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	4.999.900,00	1	4.452.125,00	
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)**	**12**	**333.725.900,00**	**12**	**146.137.500,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	19.999.200,00	4	5.272.800,00	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	31.741.200,00	4	23.529.700,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	11.997.800,00	4	4.808.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	25.999.900,00	4	16.869.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	11	11.996.800,00	-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	280	231.991.000,00	150	95.658.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)**	**12**	**88.029.831,00**	**-**	**-**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	88.029.831,00	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)**	**12**	**176.158.600,00**	**12**	**175.809.200,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	1	500.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	47.999.400,00	12	48.150.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	127.159.200,00	12	127.159.200,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)**	**12**	**115.425.320,00**	**12**	**40.198.800,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	36.999.120,00	9	35.317.300,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	14.657.000,00	10	4.881.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	63.769.200,00	-	-	

	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		**PERSENTASE PENYAMPAIAN INFORMASI KESEMPATAN KERJA (%)**	**100**	**39.065.010,00**	**100**	**79.995.375,00**	
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Pencari Kerja yang Terlayani (Orang)**	**600**	**39.065.010,00**	**600**	**79.995.375,00**	
	Pelayanan Antar Kerja	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	500	19.065.010,00	500	43.060.750,00	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker Kab. Taput	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	100	20.000.000,00	100	36.934.625,00	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		**PERSENTASE PENCARI KERJA YANG MEMPEROLEH PELATIHAN/KETERAMPILAN (%)**	**41,82**	**683.637.680,00**	**41,82**	**400.000.000,00**	
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		**Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (Pelatihan)**	**6**	**653.637.680,00**	**6**	**350.000.000,00**	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Taput	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	64	653.637.680,00	64	350.000.000,00	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Lembaga)**	**2**	**30.000.000,00**	**2**	**50.000.000,00**	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Taput	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2	30.000.000,00	2	50.000.000,00	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		**PERSENTASE PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN (%)**	**46,28**	**63.480.642,00**	**46,28**	**749.131.175,00**	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Peraturan Perusahaan/Pendataan Jumlah Perusahaan di Kabupaten Tapanuli Utara (Perusahaan)**	**15**	**43.480.642,00**	**15**	**79.782.025,00**	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Taput	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	15	43.480.642,00	15	79.782.025,00	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)** **Jumlah Tenaga Kerja Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Orang)**	**3** **3600**	**20.000.000,00**	**3** **3000**	**669.349.150,00**	

	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Taput	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	3	10.000.000,00	3	34.609.150,00	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Taput	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	3600	10.000.000,00	3600	634.740.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai suatu institusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat tentunya menerima usulan dan masukan program/kegiatan demi memajukan sektor tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Tapanuli Utara dari kelompok masyarakat maupun para *stakeholder*s lainnya.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 serta tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2024

No	Program / Kegiatan	Pengusul	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
A	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**Persentase Pencari Kerja yang Meperoleh Pelatihan/ Keterampilan**		
1	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**			**Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**		
a	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		
	- Pelatihan Keliling (Mobile Training Unit) Pembuatan Pupuk Organik, pakan Ternak di 15 Kecamatan	Lambok Panjaitan	Dusun I parhaporasan dan Dusun II Parhaporasan Berdamai Desa Silosung Kec. Simangumban		20.000.000,00	Usulan dapat diterima dengan memperhatikan urgenitas kebutuhan di lokasi

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada misi keempat “Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan Iptek dan Pengembangan Kewirausahaan”, khususnya mendukung capaian pada tujuan Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM.

Rencana kerja dan kebutuhan pendanaan pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA		KET
							SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH PERUBAHAN (Rp)	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.799.494.500**	**3.472.593.537**	**768.628.800**			
2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**3.799.494.500**	**3.472.593.537**	**768.628.800**			
2	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG YANG TERTANGANI**	**100%**	**100%**	**2.570.367.950**	**2.980.894.187**	**410.526.237**			
2	**7**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**13.364.475**	**6.420.900**	**(6.943.575)**			
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	9.070.550	4.420.900	(4.649.650)	PAD	PAD	

2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.563.925	2.000.000	(2.563.925)	PAD	PAD	
2	**7**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**2.194.587.975**	**2.633.863.887**	**439.275.912**			
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	2.147.704.650	2.589.432.487	441.727.837	DAU	DAU	
2	7	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	42.431.200	42.431.200	-	SILPA	SILPA	
2	7	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.452.125	2.000.200	(2.451.925)	PAD	PAD	
2	**7**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**146.137.500**	**142.767.000**	**(3.370.500)**			
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.272.800	2.529.100	(2.743.700)	PAD	PAD	

2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	23.529.700	23.529.700	-	PAD	PAD	
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.808.000	4.808.000	-	PAD	PAD	
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	16.869.000	16.242.200	(626.800)	PAD	PAD	
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	95.658.000	95.658.000	-	PAD	PAD	
2	**7**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**175.809.200**	**157.643.600**	**(18.165.600)**			
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	-	PAD	PAD	
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	48.150.000	48.150.000	-	SILPA	SILPA	
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	127.159.200	108.993.600	(18.165.600)	SILPA	SILPA	
2	**7**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**40.198.800**	**40.198.800**	**-**			

2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	35.317.300	35.317.300	-	PAD, SILPA	PAD, SILPA	
2	7	1	2.09	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14 Unit	4 Unit	4.881.500	4.881.500	-	PAD	PAD	
2	**7**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PERSENTASE PENCARI KERJA YANG MEMPEROLEH PELATIHAN/KETERAMPILAN**	**41,82%**	**41,82%**	**400.000.000**	**169.999.800**	**(230.000.200)**			
2	**7**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n**	**64 Orang**	**32 Orang**	**350.000.000**	**148.844.800**	**(201.155.200)**			
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	32 Orang	350.000.000	148.844.800	(201.155.200)	DAU PENDIDIKAN	DAU PENDIDIKAN	
2	**7**	**3**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina**	**13 Lembaga**	**13 Lembaga**	**50.000.000**	**21.155.000**	**(28.845.000)**			
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	13 Lembaga	13 Lembaga	50.000.000	21.155.000	(28.845.000)	DAU PENDIDIKAN	DAU PENDIDIKAN	
2	**7**	**4**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**PERSENTASE PENYAMPAIAN INFORMASI KESEMPATAN KERJA**	**100,00%**	**100,00%**	**79.995.375**	**40.000.000**	**(39.995.375)**			

2	**7**	**4**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pencari Kerja yang Terlayani**	**600 Orang**	**600 Orang**	**79.995.375**	**40.000.000**	**(39.995.375)**			
2	7	4	2.01	2	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	500 Orang	500 Orang	43.060.750	20.000.000	(23.060.750)	PAD	PAD	
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	100 Orang	36.934.625	20.000.000	(16.934.625)	PAD	PAD	
2	**7**	**5**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**PERSENTASE PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN**	**46,28%**	**46,28%**	**749.131.175**	**281.699.550**	**(467.431.625)**			
2	**7**	**5**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online**	**15 Perusahaan**	**15 Perusahaan**	**79.782.025**	**35.649.625**	**(44.132.400)**			
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perusahaan	15 Perusahaan	79.782.025	35.649.625	(44.132.400)	PAD	PAD	

2	**7**	**5**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perselisihan yang Dicegah** **Jumlah Tenaga Kerja Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja**	**3 Perkara** **3000 Orang**	**3 Perkara** **1000 Orang**	**669.349.150**	**246.049.925**	**(423.299.225)**			
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 Perkara	3 Perkara	34.609.150	24.449.925	(10.159.225)	PAD	PAD	
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3000 Orang	1000 Orang	634.740.000	221.600.000	(413.140.000)	DBH SAWIT	DBH SAWIT	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 serta memperhatikan prioritas skala pembangunan akibat perubahan dinamika kehidupan sosial dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 merupakan perubahan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Perubahan Renja tahun 2024 dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Komitmen tersebut selanjutnya diharapkan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan ditandatangani baik di tingkat Eselon II, Eselon III, Jabatan Fungsional, dan Staf.
3. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja tahun 2024 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja tahun 2024, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

TARUTUNG, OKTOBER 2024

KEPALA DINAS,

JOSUA J. E. HUTABARAT, ST, ME
PEMBINA
NIP. 19800218 200604 1 012

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TAPANULI UTARA

2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun 2024 ini, dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara merupakan perencanaan satu tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sarana strategis sebagai komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik ***(Good Governance)*** dan pemerintahan yang bersih ***(Clean Government)*** di Kabupaten Tapanuli Utara.

Dengan adanya Rencana Kerja ***(RENJA) Perubahan*** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun 20254 ini, akan sangat berguna dalam menyusun pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Kerja ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga bermanfaat.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

BUDIMAN GULTOM, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741014 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANGAN AWAL OPD

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

4.1 LAMPIRAN KEGIATAN TAHUN 2025

BAB V : PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan upaya pemerintah untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan permukiman yang layak huni, sebagai tempat aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang berkualitas, terintegrasi dalam kawasan perkotaan dan perdesaan secara serasi dan seimbang serta berkelanjutan dengan sarana dan prasarana dasar seperti air bersih untuk perumahan yang sehat, sarana dan prasarana lingkungan seperti sanitasi, serta drainase yang dapat mencegah terjadinya genangan air yang berlebihan di permukiman, penataan bangunan yang aman, serta lingkungan dan kawasan perkotaan dan perdesaan yang serasi sehingga dapat mendukung sistem ekonomi, sosial budaya dan sistem ekologi lingkungan. Pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dawasa ini, disadari sepenuhnya masih belum dapat memuaskan semua pihak, karena kita masih banyak menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik terkait jumlah penduduk yang demikian besar tersebar di 15 (lima belas) kecamatan dan 252 desa/kelurahan, dengan kehidupan masyarakat yang masih belum sejahtera dengan income/capita yang masih relatif rendah,bila dibandingkan dengan kondisi Kabupaten tetangga yang terdekat yang relatif sudah maju.

Kemampuan pemerintah sangat terbatas sehingga pemerintah hanya dapat membiayai sebagian pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan. Masyarakat dan dunia usaha mau atau tidak mau harus membiayai sebagian besar kebutuhannya sendiri. Berbagai tantangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- Kebutuhan akan prasarana dan sarana (seperti Air Bersih, sanitasi, prasarana Perumahan dan permukiman dan sebagainya) yang terus meningkat sebagai akibat keterbatasan pemerintah;
- Pertambahan jumlah penduduk, ditambah lagi kekurangan backlog dari tahun-tahun sebelumnya, serta
- Adanya kebutuhan untuk memenuhi komitmen pemerintah kepada masyarakat internasional dalam pencapaian MDG,s 2025 yang akan datang.

Adanya perubahan organisasi dan lingkungan stategis perlu dilihat secara positif sebagai peluang untuk menghadapi tantangan (mancari solusi). Perubahan organisasi perlu disikapi secara bijak sebagai peluang untuk mewujudkan pola kerja yang efektif dan efisien menghadapi tantangan ke depan. Fungsi dan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sangat penting dalam mendorong terjadinya perubahan paradigma pembangunan, pengelolaan konfik soaial, dengan perubahan kebijakan yang lebih proporsional dan mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi lokal, pembinaan perencanaan kebijakan dan strategis pembangunan, tata pemograman dan anggaran yang lebih transparan, penataan

data dan sistem informasi pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyiapkan Rencana Kerja ***(RENJA)*** OPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini untuk mewujudkan pemerintah yang baik (Good Governance) dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Rencana Kerja ***(RENJA)*** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara ini, merupakan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran stategis (cara mencapai tujuan dan sasaran). Perencanaan ini disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dalam meningkatkan akuntabitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran untuk mewujudkan secara proporsional dan terukur.

Sebagaimana amanat Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap 0PD wajib menyusun Rencana Kerja ***(RENJA)***, dengan sumberdaya yang tersedia, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara berupanya menyusun dan melaksankan Rencana Kerja ***(RENJA)*** guna mewujudkan *Good Governance*.

Dalam menyusun Rencana Kerja ***(RENJA)*** ada beberapa hal sangat perlu diperhatikan, seperti :

a) Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara,
b) Capaian kinerja tahun sebelumnya,
c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang, dan
d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga diwajibkan menyusun Rencana Kinerja ***(RENJA)*** yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan. Rencana Kerja ***(RENJA)*** tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Sebagaimana disebutkan diatas, dengan terbitnya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara yang mengemban tugas membantu Bupati Tapanuli Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka pelaksana Rencan Kenerja ***(RENJA)***, Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Keputusan Kepala Lembaga Administarasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;
l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
m. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang RPD Tahun 2025-2026
n. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2005-2025:
o. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah; dan
p. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 13 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.
q. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 tahun 2024 tentang RPD Tahun 2025-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara merupakan rencana pembangunan dalam urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman seperti Sanitasi, Drainase/Gorong-gorong, Sarana dan prasarana permukiman, Sarana Air Bersih dan pertanahan

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, maka Rencana Keja ***(RENJA)*** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ditetapkannya dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan penyusunan Rencana Renja ***(RENJA)*** Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai pedoman 1 (satu) tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ***(RKA)*** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan program Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 1 (satu) tahun.
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ***(LKIP)***.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penyusunan perencanaan kerja ***(RENJA) Perubahan*** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang penyusunan Rencana Kerja ***(RENJA)*** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

Pada bab ini menguraikan tentang : Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, dan realisasi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

0PD dan/atau realisasi APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

Bab ini memuat : Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupeten Tapanuli Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Bab ini memuat : Lampiran Rencana Program Kegiatan Tahun Anggaran 2025

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang : cacatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersedianan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

2.1 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2024 memiliki pagu murni sebesar Rp. 21.799.692.800 (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi anggaran sampai TW III sebesar 20.262.476.479 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atas persentase realisasi sebesar 52,68 %. Diharapkan Realisasi Belanja tahun 2024 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan. Pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan III secara keseluruhan program dan kegiatan serta sub kegiatan belum mencapai target dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 sampai dengan triwulan III disajikan sebagaimana tabel 1 (Tabel T-C.29) berikut:

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025 per Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja terhadap Renja Tahun 2025 (%)
						I		II		III		IV		
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(%)
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman**	**35.28%**	**1,342,490 ,160**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**			0
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100	1,342,490 ,160	0	-	0	-		-			0

		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	0	-	0	-	0	-	0	-		
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	terselenggaranya rehab/peningkatan jaringan air minum	200 liter/detik	1,342,490,160	0	-	0	-	0	-		0
		Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	0	-	0	-	0	-	0	-		
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tangga berakses sanitasi aman**	**12 %**	**710,775,000**	**0**	**-**	**0**	**-**				0
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	100	710,775,000	0	-	0	-	0			0
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	0	-	0	-	0	-	0	-		

		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	65 KK	710.775,000	0	-	0	-	0	-			0
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK**	**100%**	**197,096,640**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**58,000,000**			29.43
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya penataan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1	197,096,640	0	-	0	-	0	58,000,000			29.43
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1	97,096,640	0	-	0	-	-	58,000,000			59.73

		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1	100,000,000	0	-	0	-	0	-			0
	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Realisasi Anggaran**	**100%**	**11,851,537,801**	**33%**	**3,855,216,831**	**56%**	**2.149.951.487**					50.67
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	77,624,450	0	-	0	-					0
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	75,592,250	0	-	0	-	0	-			0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	2,032,200	0	-	0	-	0	-			0
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	8,020,000	0		0	-	0	-			0

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan dinas	1	3,762,957,801	26.1	983,710,197	-	703,221,644		636,855,821			61.75
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	3,695,533,601	0	969,938,397	0	686,876,294	0	632,265,221			61.94
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	55,087,200	0	13,771,800	0	9,181,200		4,590,600			50
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	12,337,000	0	-	1	7,164,150	0	-			58.07
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum dinas	5	153,878,210	0	19,669,200		21,755,006		46,175,217			56.93
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6,281,520	0	-	0	-	0	-			0
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	32,476,650	0	-	0	3,140,000	0	-			9.67

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	9,080,000	0	-	0	2,975,000	0	-		32.76
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	11,261,040	0	-	0	3,540,000				31.44
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	-	0	-	0	-	0	-		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	3,404,000	0	-	0	1,000,000	0	-		29.38
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	77,975,000	0	19,669,200	0	11,100,006		46,175,217		98.68
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8,088,580,000		2,871,506,634		1.370.663.147		1,772,178,985		74.36
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1,980,000	0		0	990,000	0	-		50

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	7,132,000,000	3	2,812,496,634	3	1.129.673.147	3	1,691,803,985			79.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	954,600,000	3	59,010,000	3	240,000,000	3	80,375,000			39.74
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	83,493,000	0	28,092,500	0	6,550,000	0	13,152,000			57.24
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	58,820,240	1	28,092,500	1	750,000	1	750,000			50.31
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	12,590,160	0	-	0	-	1	12,402,000			98.51

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	20 Unit	12,082,600	0	-	0	5,800,000	0	-		48.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13,400,000		-		-		-		0
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	-		-		-		-		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	13,400,000	0	-	0	-	0	-		0
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase rumah layak huni bagi warga negara korban bencana**	**100%**	**131,628,500**	**0%**	**-**	**0%**	**19,000,000**		**49,159,855**		51.78

		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksanya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	96,805,000	0	-	0	19,000,000		14,359,855		34.46
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	100	96,805,000	0	-	0	19,000,000	0	14,359,855		34.46
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50	34,823,500		-	0	-	0	34,800,000		99.93
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	250	234,823,500		-	0	-	50	34,800,000		14.82
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**89,50%**	**356,669,000**		**-**		**-**				0

		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0	-		-		-	0	-			
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	0	-		-		-					
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0	356,669,000		-		-		3,649,551			1.02
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	15	316,150,000		-		-	0	3,649,551			1.15
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	5	40,519,000		-		-	0	-			0

	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase kawasan pemukiman kumuh**	**5.94%**	**589,313,891**		**-**		**-**	**0**	**138,286,549**			23.47
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	1	589,313,891		-	0	-		138,286,549			23.47
		Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terselenggaranya Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	2	589,313,891		-	0	-	0	138,286,549			23.47
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)**	**89%**	**4,567,688,518**		**-**	**89%**	**488,724,300**	**89%**	**154,703,700**			14.09

		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya pemenuhan PSU perumahan	1	4,845,688 ,518		-	0	488,724,300	0	154,703,700			13.28
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	32	3,688,140 ,000		-	0	-	0	-			0
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5	1,157,548 ,518		-		488,724,300		154,703,700			55.59
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase lingkungan kondisi baik**	**80%**	**1,294,109 ,000**		**-**		**-**					0
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	TerselenggaranyaPengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,294,109 ,000		-		-					0

		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1500	1,294,109,000		-		-				0
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan kebutuhan dasar di permukiman	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase lahan untuk kepentingan umum**		-		-		-				
		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		-		-		-				
		Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana PengadaanTanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	0	-		-		-				
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta pemenuhan	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase mediasi sengketa/konflik tanah**	**100.00 %**	**21,439,800**		**-**		**-**	**0**	**5,290,000**		24.67

	kebutuhan dasar di permukiman												
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah	100	21,439,800	0	-	0	-	0	5,290,000			24.67
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	-	0	-	0	-	0	-			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	10	21,439,800	0	-	0	-	2	5,290,000			0

2.2 ANALISIS PELAYANAN KINERJA OPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang menjadi target pelayanan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi.Berdasarkan analisis capaian kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberi penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program.

Tabel T-C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator Kinerja Program	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi		catatan analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman	√	√	33,28%	34,28%	35,28%	33,28%	34,28%	-	36,28%	37,28%	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
2	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK		√	100%	100%	100%	100%	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
3	Persentase rumah tangga berakses sanitasi aman	√	√	10 %	11 %	12 %	10 %	11 %	-	13 %	14 %	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
4	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)		√	87,04%	88,04%	88,50%	87,04%	88,04%	-	89 %	89,50 %	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra

No	Indikator Kinerja Program	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi		catatan analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
5	Persentase kawasan pemukiman kumuh		√	6,44%	6.49 %	5,94%	6,74%	6,45%	-	5,54%	5,14%	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
6	Persentase rumah layak huni	√	√	86,39%	88,40%	88.97%	87,94%	88,44%	_	89,97%	90,47%	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
7	Persentase rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	√	√	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
7	Persentase drainase lingkungan kondisi baik		√	78%	80%	80%	78%	80%	_	82 %	84 %	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
8	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum		√	86,71%	87,66%	86.71%	86,28%	86,35%	-	87,71%	88,71%	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra
9	Persentase mediasi sengketa/konflik tanah		√	100 %	100%	100%	100%	100 %	_	100 %	100 %	Nomenklatur dan cara perhitungan nya sesuai dengan Renstra

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Pelaksanaan kegiatan dan program dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut diatas secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik dengan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata pada tahun 2024 dari 9 (Sembilan) indikator kinerja program kegiatan yang direncanakan, terdapat 7 (tujuh) program kegiatan yang dilasanakan dengan capaian indikator ***"baik"***.

Keberhasilan capaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mengalokasikan dalam P- APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 36.874.136.492,- (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)**

Beberapa hal sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapakan untuk dapat mendukung tercapainya sasaran sebagaimana diuraikan di atas antara lain adalah :

1. Perencanaan (planning) yang sistematis dan akurat dengan mempetimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) yang memadai;
3. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan, baik berupa Peraturan Bupati, Peraturan Daerah maupun peraturan perundangan yang lebih tinggi;
4. Kemampuan (kualitas dan kuantitas) Sumber Daya Manusia aparatur yang memadai;
5. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
6. Terpenuhinya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar instansi dan lintas sector terkait yang terbina dengan baik dan harmonis.

Guna menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 3 (tiga) urusan yaitu urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan. Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara juga memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan peraturan menteri dalam negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal dan turunannya yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

a) Tingkat pelayanan dan hal kritis terkait pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

   Terdapat 3 (tiga) isu strategis pembangunan yang dihadapi pada bidang urusan pekerjaan umum dan perumahan dan kawasan permukiman, yaitu :

   1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
   2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
   3. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

      Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menangani urusan bidang Pekerjaan Umum bertanggung jawab terhadap Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup *sehari*-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci. Demi

mewujudkan pelayanan ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengaplikasikan melalui program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Begitu juga dengan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik merupakan standar *pelayanan* minimal yang berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik yang memadai, serta menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.

Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan pelayanan pemerintah di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan melalui program Pengembangan Perumahan melalui kegiatan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana.

Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yaitu terkait dengan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan urusan perumahan dan kawasan permukiman senantiasa berkoordinasi dengan kementerian PUPR dan urusan bidang pertanahan yang selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Tapanuli Utara.

b) Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada setiap kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut.

Dibawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 antara lain :

a. Masih kurang optimal koordinasi dalam menyusun perencanaan kegiatan sehingga masih terkesan parsial, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan);
b. Masih belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Manusia;
c. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah (APBD Kabupaten) sehingga belum semua indikator kinerja didukung oleh kegiatan yang teranggarkan;
d. Dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah yang masih belum mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya;
e. Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;

f. Belum optimalnya dukungan, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Suatu permasalahan atau masalah pada dasarnya timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksaan kegiatan pasti akan menemui sesuatu masalah, kendala dan hambatan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi setiap permasalah yang timbul.

Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain :

a. Perencanaan kegiatan yang sistematik, terkoordinir dan komprehensif;
b. Peningkatan dan pembembangan SDM selalu ditingkatkan;
c. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representative;
d. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat diperlukan, untuk itu perlu juga adanya perencanaan dan klasifikasi yang baik terhadap fasilitas, sasrana dan prasarana penunjang; mengupayaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
e. Pengembangan system jaringan informasi dan peningkatan kualitas dasar;
f. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis;
g. Perlu meningkatkan dukungan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara;
h. Koordinasi dalam rangka peninjauan kembali serta evaluasi.

Issu-issu Strategis Pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara meliputi issu-issu baru dan penting yang diperkirakan akan memberikan akan memberi dampak potensial bagi pelayanan prasarana dan sarana bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu meliputi:

a. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah;

Saat ini arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam. Proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat. Diperkiraan tren yang berkembang akan terus terjadi.

Tetapi disisi lain, hal ini juga mengindikasikan kuatnya pengaruh kota, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan wilayah yan tidak konstruktif antara kota besar-kota menengah atau antara kota-desa. Proses urbanisasi yang terjadi saat ini lebih banyak didorong oleh terbatasnya lapangan kerja di daerah perdesaan.

b. Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan Lingkungan Hidup perkotaan berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukiman, di bawah dan diatas tanah kawasan perkotaan yang tidak terkendali. Misalnya, penggunaan air tanah yang sudah berlebihan menyebabkan sulitnya masyarakat memperoleh air bersih, sementara penyediaan air bersih oleh PDAM belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan.

c. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan bagi kita, dan memang tidak hanya sekarang, namum ini perlu diperhitungkan secara cermat dalam konteks pembangunan perkotaan. Dampak perubahan iklim dengan intensitas hujan yang meningkat, dan meningkatnya permukaan air laut, dapat menyebabkan permasalahan tersendiri. Peran infrastruktur menjadi penting dalam mitigasi perubahan iklim.

d. Modal Sosial

Dalam konteks pembangunan perkotaan saat ini yang menjadi masalah bukan pada modal finansial, namun perlu dilihat pada tataran modal sosial. Apaun yang kita lakukan, Apabila aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka inventasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan.

e. Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Pengembangan Nilai Tambah

Dalam menjawab tantangan ke depan, kita harus mampu mempertahankan ***cultural expression*** yang mampu mendorong berkembangannya ekonomi kreatif menjadi daya saing. Oleh karena itu kedepan harus diupayakan mendukung ekonomi kreatif yang didukung dengan desain yang baik, serta didukung dengan marketing yang terintegrasi. Kebijakan pemerintah diharapkan harus mampu menjembatani dalam mengekplorasi pasar pada tataran nasional.

c. Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam peningkatan pelayanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Tingkat pendidikan yang relative masih rendah
2. Jumlah penduduk yang tinggi
3. Kualitas dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4. Masih tingginya degradasi lingkungan
5. Perlunya komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi

Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara :

1. Meningkatnya pemahaman Aparatur terhadap Tugas, Pokok dan Fungsi
2. Dukungan berbagai pihak terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara
3. Adanya hubungan yang harmonis dalam menjalin koordinasi lintas sector
4.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA AWAL OPD

RKPD tahun 2024 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas dan merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024. Kegiatan-kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara tetap mengacu kepada Rencana Strategis

(RENSTRA) Tahun 2019-2024. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Renstra tersebut kemudian dijabarkan menjadi Rencana Kerja Tahunan ***(RKT)*** yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun dalam penyusunan Ranwal Renja tahun 2025 hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan adalah identifikasi program/kegiatan prioritas dan review terhadap Rancangan Awal RKPD seperti tabel dibawah ini :

Tabel T-C 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bidang Urusan Pekerjaan Umum											
I	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum	78,80 %	1.425.000.000	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum	78,80 %	1.425.000.000	Dukungan terhadap: -Pencapaian SPM - Percepatan penurunan *stunting*
II	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	93,71 %	315.000.000	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	93,71 %	315.000.000	
III	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	100%	164.870.600	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	100 %	164.870.600	
iv	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase drainase kondisi baik di perkotaan dan lingkungan	80 %	1.310.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase drainase kondisi baik di perkotaan dan lingkungan	80 %	1.310.000.000	
Bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman											
IV	Program Pengembangan Perumahan	Kabupaten Tapan	Persentase perhitungan kerugian akibat	100%	194.8	Program Pengembangan Perumahan	Kabupaten Tapan	Persentase perhitungan kerugian akibat	100 %	200.020.000	Dukungan terhadap : - Percepatan penurunan

	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
		uli Utara	bencana alam		23.500		uli Utara	bencana alam			lokasi kawasan kumuh -Pencapaian SPM bidang perumahan
V	Program Kawasan Permukiman	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Rumah Layak Huni	89 %	415.000.000	Program Kawasan Permukiman	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Rumah Layak Huni	89 %	415.000.000	
VI	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase kawasan pemukiman kumuh	6%	615.479.891	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase kawasan pemukiman kumuh	6 %	615.479.891	
VII	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kabupaten Tapanuli Utara	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung PSU	85,65 %	6.276.784.410	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kabupaten Tapanuli Utara	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung PSU	85,65 %	6.276.784.410	
Bidang urusan Pertanahan											
VIII	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	86,70 %	—	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	86,70 %	—	
IX	Program Penatagunaan Tanah	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Mediasi Sengketa/Konflik tanah	100%	—	Program Penatagunaan Tanah	Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Mediasi Sengketa/Konflik tanah	100%	—	
Bidang Urusan Non Penunjang Pemerintah Daerah											
X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi	100%	10.888.815.106	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tapanuli Utara	Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi	100%	10.888.815.106	Termasuk dengan gaji dan tunjangan

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sasaran kinerja malalui program dan kegiatan mengambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam melaksankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan indikator kinerja yang terdiri dari indikator output dan outcome.

Indikator kinerja output adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Sedangkan indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam penentuan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Tahunan ***(RENJA)*** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan sharing melalui musrenbang kecamatan/Desa, musrenbang Kabupaten, musrenbang Provinsi dan musrenbang Nasional untuk mengsinkronkan setiap program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil rakapitulasi tersebut dikaji dan dilakukan survey lapangan untuk menghasilkan outcome yang lebih. maksimal dan dapat langsung bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	120 m	Hasil Musrenbang kecamatan
2	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	100 m	Hasil Musrenbang kecamatan
3	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Parsibarungan Kecamatan Pangaribuan	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	110 m	Hasil Musrenbang kecamatan
4	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	100 m	Hasil Musrenbang kecamatan
5	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	120 m	Hasil Musrenbang kecamatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
6	Pembangunan Drainase Lingkungan	di Desa Lumban Tonga Kecamatan Pahae Julu	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	120 m	Hasil Musrenbang kecamatan
7	Pembangunan Jalan Lingkungan	Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	100 m	Hasil Musrenbang kecamatan
8	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	di Dusun III sigurung-gurung Kecamatan Pahae Jae	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	40 m	Hasil Musrenbang kecamatan
9	Pembangunan Jalan Lingkungan	Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	120 m	Hasil Musrenbang kecamatan
10	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan	menuju SMP 1 Purba Tua di Desa Janji Nauli Kecamatan Purba Tua	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	120 m	Hasil Musrenbang kecamatan
11	Pembangunan Tembok penahan tanah	Desa Pardamean Nainggolan Kecamatan Pahae Jae	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	35 m	Hasil Musrenbang kecamatan
12	Pembangunan Jalan Lingkungan	Desa Hutanagodang Kecamatan Purbatua	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	120 m	Hasil Musrenbang kecamatan
13	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan	Desa Dolok Sanggul Kecamatan Simangumban	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	120 m	Hasil Musrenbang kecamatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur yang pelaksanaanya dibagi kedalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.

Amanat untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada level Nasional (RPJMN) dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada level kementrian/Lembaga (K/L) atau unit di bawahnya tercantum pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 melalui Perpres Nomor 18 tahun 2020. Selama periode 2020-2024 pembangunan akan difokuskan pada 5 aspek, yaitu:

a. Pembangunan SDM
b. Pembangunan Infastruktur
c. Penyederhanaan Regulasi
d. Penyederhanaan Birokrasi
e. Transformasi Ekonomi

No	Kebijakan		Keterangan
1	**RPJP 2005-2025**		
	A	Pembangunan dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	
	B	Pemenuhan Perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya	
	C	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa air minum dan sanitasi	
2	**SDG'S**		
	Tujuan 6.1 pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua		

	Tujuan 11.1 pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman terjangkau dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh		
3	**RPJMN 2020-2024**		**7 Agenda**
	A	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024
	B	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	
	C	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	
	D	Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa	
	E	Memperkuat Infastruktur untuk mendukung Pengemangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
	F	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	
	G	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	

Kebijakan pelaksanaan Pembangunan secara Nasional sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Bertitik tolak pada fungsi sesuai tugas pembinaan program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam situasi dan kondisi saat ini serta lingkungan strategis dalam upaya pencapaian target diharapkan pada berbagai tantangan strategis terkait dengan :

1) Perencanaan kebijakan dan pengendalian program nasional bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional.
2) Mengelola perubahan secara cepat, dengan bekerja keras, dan bertindak tetap untuk kepentingan daerah.

Beberapa tugas yang perlu diantisipasi dan dikelola secara profesional diantaranya adalah :

- Penjabaran dan review pelaksanaan rencana dan strategi (RENSTRA) tahunan.
- Penyiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
- Penyiapan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Kinerja.
- Pengembangan sistem pembiayaan dan pola inventasi melalui kemitraan.
- Peningkatan kapasitas daerah dalam penyiapan rencana dan program inventasi pembangunan jangka menengah dalam rangka pengendalian kebijakan strategis nasional pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Pengembangan sistem informasi nasional pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Penyiapan Norma Standart Prosedur Manual bantuan teknis (bantek), serta pembinaan teknis (bintek) perencanaan dan pemprogramanserta penataan kawasan permukiman.
- Ikut mendorong upaya pemberdayaan masyarakat malaui sosialisasi.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam era desentralisasi dan perkuatan otonomi daerah.

Mengingat besarnya tantangan dan tugas tersebut maka program kerja ini disusun dengan memperhatikan aspek keterpaduan antar unit kerja dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi. Keterpaduan antara unit kerja hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama yang harmonis serta kebersamaan dan mendukung semua unit kerja. Oleh karena itu rasa kebersamaan harus senantiasa dipertahankan. Melalui kerjasama yang baik diharapkan pelaksanaan program kerja tahun 2025 dapat ikut memberikan manfaat bagi terwujudnya pengelolaan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih responsif, adil terhadap perubahan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin).

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organinasi mengambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan Organisasi memperjatam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara yang tersusun dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara serta didasarkan isu-isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya telah merumuskan tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
2. Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/ permukiman layak
2. Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak
4. Meningkatnya kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan
5. Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah
6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari program yang secara langsung menunjang pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024.

Adapun Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada tahun 2024 terdiri dari 8 (delapan) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar 36.874.136.492. Adapun rinciannya terdiri dari :

- ✓ Belanja Pegawai Rp. 3.474.744.668
- ✓ Belanja Barang dan Jasa Rp. 31.477.601.264
- ✓ Belanja Bantuan Sosial Rp. 90.000.000
- ✓ Belanja Modal Tanah Rp. 164.000.000
- ✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 87.790.500
- ✓ Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 1.580.000.000



Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa lebih dari 80 persen anggaran dinas perumahan dan kawasan permukiman di alokasikan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan Sistem Pembangunan Air Minum, Tangki Septic Individual, Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan jalan lingkungan.

Tabel T.C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum	Tapanuli Utara	77,80%	15.319.937.000		78,80%	1.425.000.000
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tapanuli Utara**	100%	3.087.241.631		100%	15.385.517.000
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak**	**Tapanuli Utara**	95,71%	5.050.000.000		93,71%	315.000.000
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Tapanuli Utara**	100%	5.050.000.000		100%	315.000.000

1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik**	**Tapanuli Utara**	80%	—	**Karena Keterbatasan Anggaran, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase tidak dianggarkan pada APBD murni TA 2024**	80%	1.310.000.000
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah kabupaten/kota**	**Tapanuli Utara**	100%	—		80%	1.310.000.000
1	**3**	**8**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Kesesuaian Bangunan Gedung Pemerintah dengan NSPK**	**Tapanuli Utara**	100%	1.424.361.720		100%	164.870.600
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Tapanuli Utara**	100%	1.424.361.720		100%	164.870.600
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							
1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**Tapanuli Utara**	88,40%	125.070.000	**Karena Keterbatasan Anggaran,kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak dianggarkan pada APBD murni TA 2024**	88,44%	194.823.500
1	**04**	**02**	**2.01**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Tapanuli Utara**	1 Laporan	35.070.000		1 Laporan	160.000.000
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Tapanuli Utara**	1 Laporan	90.000.000		1 Laporan	34.823.500
1	**4**	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh**	**Tapanuli Utara**	5,94%	64.955.000	**Karena Keterbatasan**	5,94%	415.000.000

1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**	**Tapanuli Utara**	100%	—	**Anggaran,kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha tidak dianggarkan pada APBD murni TA 2024**	0	0
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Tapanuli Utara**	100%	64.955.000		100%	415.000.000
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU**	**Tapanuli Utara**	88,00%	1.693.902.580	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Ha tidak dianggarkan pada APBD TA 2024**	89 %	4.779.450.008
1	**4**	**5**	**2.01**	02	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Tapanuli Utara**	17 Lokasi	1.693.902.580		26 Lokasi	3.558.152.000
1	**4**	**5**	**2.01**	03	**Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan**	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan**	**Tapanuli Utara**	1 Laporan	—		1 Laporan	1.221.298.008
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase Ketersediaan Lahan untuk kepentingan umum**	**Tapanuli Utara**	87,66%	0	**Karena Keterbatasan Anggaran,PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE tidak dianggarkan pada APBD TA 2023 dan APBD TA 2024**	87,66%	0
2	**10**	**06**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksnanya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tapanuli Utara**	0	-		0	-
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Mediasi/Sengketa Konflik Tanah**	**Tapanuli Utara**	100%	209.761.810	**Karena Keterbatasan Anggaran,**	100%	45.000.000

2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Tapanuli Utara**	1 Laporan	209.761.810	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH tidak dianggarkan pada APBD murni TA 2024**	1 Laporan	45.000.000
1	04				Bidang Urusan Non Penunjang Pemerintah Daerah							
1	04	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi**	**Tapanuli Utara**	100%	11.857.675.962		100%	12.535.073.565

BAB IV
RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun secara detail alokasi anggaran tersaji dalam tabel Program dan Kegiatan Tahun 2025 beserta summber dana dapat dilihat pada tebel berikut ini :

LAMPIRAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
P APBD TA. 2025

Kode						URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu P-APBD	Sumber Dana	Ket
1	2	3	4	5		6			
1	**03**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		`	
1	**03**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**1,502,490,160**		
1	**03**	**03**	**2.01**			**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**1,502,490,160**		
1	**03**	**03**	**2.01**	**28**		***Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan***			
1	**03**	**03**	**2.01**	**30**		***Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota***			
1	**03**	**03**	**2.01**	**26**		***Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan***	**1,502,490,160**		
						Biaya Umum Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	42,490,160	DID	
						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Tapian Nauli III Kecamatan Sipahutar	1,000,000,000	DID	
						Peningkatan SPAM di Dusun Sosor Dolok Desa Unte Mungkur Kecamatan Muara	152,000,000		P Apbd
						Biaya Umum Peningkatan SPAM di Dusun Sosor Dolok Desa Unte Mungkur Kecamatan Muara	8,000,000		
						Perbaikan Bak Penampung Air (Dam Air) dan Perbaikan Perpipaan Saluran Air di Dusun 3 Tor Nauli Desa Manalu Kecamatan Parmonangan	100,000,000	DAU	
						Rehabilitasi Jaringan Perpipaan Air Minum di Desa Sitompul Kecamatan Siatas Barita	200,000,000	DID	
1	**03**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**710,775,000**		
1	**03**	**05**	**2.01**			**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**710,775,000**		
1	**03**	**05**	**2.01**	**39**		***Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat***	**710,775,000**		

						Biaya Umum Kegiatan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	8,775,000	**DID**	
						Pembangunan MCK di Desa Simangumban Julu Kecamatan Simangumban	100,000,000	Bonus Produksi	
						Pembangunan Jamban beserta Utilitasnya di Kabupaten Tapanuli Utara	389,500,000		
						Biaya Umum Pembangunan Jamban beserta Utilitasnya di Kabupaten Tapanuli Utara	12,500,000		P Apbd
						Pembangunan MCK di Dusun Parik Matia Desa Sitolu Ama Kecamatan Pahae Julu	100,000,000	DID	
						Pembangunan MCK di Desa Parsosoran Kecamatan Garoga	100,000,000	DID	
1	**03**	**05**	**2.01**	**41**		***Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)***			
1	**03**	**06**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**1,294,109,000**		
1	**03**	**06**	**2.01**			**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1,294,109,000**		
1	**03**	**06**	**2.01**	**12**		***Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan***	**1,294,109,000**		
						Biaya umum Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	44,109,000	DID	
						Rehabilitasi Jaringan Drainase di Aek Nasia desa Hutatoruan 8 Kecamatan Tarutung	50,000,000	DAU	
						Pembangunan Drainase Lingkungan Jalan Ringroad Peaniburan Desa Silando, Kecamatan Muara	150,000,000	DID	
						Pembangunan Drainase Lingkungan Dusun Sosor Liang Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar	100,000,000	DID	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga	150,000,000	DID	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga	130,000,000	DID	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Jalan Pancasila Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon	100,000,000	DID	
						Pembangunan Drainase di Kompleks jalan GKPI Rambing, Kecamatan Tarutung	100,000,000	DID	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Parsibarungan Kecamatan Pangaribuan	120,000,000	DID	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae	100,000,000	Bonus Produksi	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae	125,000,000	Bonus Produksi	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Lumban Tonga Kecamatan Pahae Julu	-	Bonus Produksi	
						Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Lumban Tonga menjadi Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Lumban Gaol	125,000,000	Bonus Produksi	P Apbd
1	**3**	**8**				**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**197,096,640**		
1	**03**	**08**	**2.01**			**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**197,096,640**		
1	**03**	**08**	**2.01**	**2**		**Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	**100,000,000**		
						Rehabilitasi Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Tarutung	**100,000,000**		P Apbd
`	**03**	**08**	**2.01**	**21**		***Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota***			
1	**03**	**08**	**2.01**	**23**		***Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG***	**97,096,640**		

						Biaya Operasional Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG)	87,148,200	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD
						Penyediaan Jasa Koordinasi SHSTBGN (Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara)	9,948,440	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD
1	04					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**17,299,271,380**	
1	04	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11,715,285,362**	
1	04	01	2.01			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**83,612,250**	
1	04	01	2.01	01		***Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***	**73,560,050**	
						Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	1,296,000	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,184,800	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	815,000	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	889,000	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,163,000	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD
						Prasurvey pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025	15,212,250	DID
1	04	01	2.01	05		***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD***	**2,032,200**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD
1	04	01	2.01	07		***Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**8,020,000**	
1	**4**	**1**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3,279,241,902**	
1	**04**	**01**	**2.02**	**01**		***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN***	**3,211,817,702**	DAU GAJI
						Gaji PNSD	**2,165,909,088**	
						Gaji PPPK	**406,824,314**	
						TPP PNSD	**639,084,300**	
1	**04**	**01**	**2.02**	**03**		***Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD***	**55,087,200**	DAU Honorarium Pengelolaan Keuangan
1	**04**	**01**	**2.02**	**05**		***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***	**12,337,000**	
						Penyusunan Laporan Keuangan/Aset Akhir Tahun	9,839,500	DAU Rutin & Program/K

								egiatan OPD	
						Penyusunan laporan Keuangan Bulanan	2,497,500	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**4**	**1**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**153,878,210**		
1	**04**	**01**	**2.06**	**01**		***Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor***	**6,281,520**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.06**	**02**		***Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	**32,476,650**		
						Alat Tulis Kantor	15,857,050	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
						Laptop	16,619,600	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.06**	**03**		***Penyediaan Peralatan Rumah Tangga***	**9,080,000**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.06**	**05**		***Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan***	**11,261,040**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.06**	**06**		***Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan***			
1	**4**	**1**	**2.06**	**08**		***Fasilitasi Kunjungan Tamu***	**3,404,000**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.06**	**09**		***Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***	**77,975,000**		
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	25,505,000	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	52,470,000	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**		
1	**04**	**01**	**2.07**	**02**		***Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan***	**-**		
						Pengadaan Kendaraan Beroda Dua			
						Pengadaan Kendaraan Beroda Empat			
1	**04**	**01**	**2.07**	**07**		**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**13,400,000**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	04	01	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8,059,080,000**		
1	**04**	**01**	**2.08**	**01**		***Penyediaan Jasa Surat Menyurat***	**1,980,000**	DAU Rutin & Program/K	

								egiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.08**	**02**		***Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik***	**7,143,000,000**	DAU LISTRIK, AIR DAN INTERNET	
1	**04**	**01**	**2.08**	**04**		***Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***	**914,100,000**	DAU NON ASN	
1	**04**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**139,473,000**		
1	**04**	**01**	**2.09**	**01**		***Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan***	**114,800,240**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.09**	**09**		***Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya***	**12,590,160**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**04**	**01**	**2.09**	**11**		***Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***	**12,082,600**	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
1	**4**	**2**				**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**381,628,500**		
1	**04**	**02**	**2.01**			**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**146,805,000**		
1	**04**	**02**	**2.01**	**04**		***Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana***	**70,950,000**	DID	
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			
						Identifikasi Perumahan dan Permukiman di Lokasi Rawan Bencana	75,855,000	DID	
1	**04**	**02**	**2.03**			**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**234,823,500**		
1	**04**	**02**	**2.03**	**01**		***Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana***	**234,823,500**		
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	234,823,500	DAU	
						Identifikasi Perumahan dan Permukiman di Lokasi Rawan Bencana			
1	**4**	**3**				**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**356,669,000**		
1	**04**	**03**	**2.02**			**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		`	
1	**04**	**03**	**2.03**			**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**356,669,000**		
1	**04**	**03**	**2.03**	**02**		***Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni***	**316,150,000**	**DAU**	
						Updating Database RTLH di Kabupaten Tapanuli Utara			
1	**04**	**03**	**2.03**	**03**		***Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU***	**40,519,000**		
						Biaya Pendamping Pelaksanaan Program BSPS, Koridor dan Homestay di Kabupaten Tapanuli Utara	20,519,000	DID	
						Biaya Pendamping kegiatan Provinsi di Kabupaten Tapanuli Utara	20,000,000	DID	
						Pembangunan/Rehabilitasi RTLH bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			
						Biaya Pendukung Pelaksanaan RTLH bagi MBR di Kabupaten Tapanuli Utara			
1	**04**	**04**				**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**589,313,891**		
			2.01			**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota**			
1	**04**	**04**	**2.01**	**00 07**		***Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru***	**589,313,891**		
						Revisi Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tapanuli Utara	450,000,000	DID	

						Revisi DED Kawasan Aek Ristop	105,472,500	DAU	
						Biaya Umum Revisi Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tapanuli Utara	12,631,391	DID	
						Verifikasi Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)	21,210,000	DID	
1	**04**	**05**				**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**4,845,688,518**		
1	**4**	**5**	**2.01**			**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**4,845,688,518**		
1	**04**	**05**	**2.01**	**02**		***Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian***	**3,688,140,000**		
						Biaya Umum Pengelolaan Kegiatan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	91,988,000	DID	
						Lanjutan pembangunan jalan lingkungan di Desa Pariksabungan Kecamatan Siborong-borong	111,152,000	DID	
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Sitompul Kecamatan Siatas Barita	100,000,000	DAU	
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Sangkaran Kecamatan Siatas Barita	100,000,000	DID	
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Silando Kecamatan Muara	100,000,000	DID	
						Pembangunan jalan lingkungan di Dusun Hapoltahan Desa Banuaji IV Kecamatan Adiankoting	100,000,000	DID	
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sabungan ni huta IV Kecamatan Sipahutar	100,000,000	DID	
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Desa Parbaju Tonga Kecamatan Tarutung	100,000,000	DID	
						Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pagaran Lambung IV, Kecamatan Adiankoting	100,000,000	DID	
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Binumbun Kecamatan Muara	100,000,000	DID	
						Pembangunan Jalan Lingkungan Simpang SD Latihan Aek Ristop Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung	100,000,000	DID	
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong	100,000,000	DID	
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun III sigurung-gurung Kecamatan Pahae Jae	125,000,000	BONUS PRODUKSI	
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu	125,000,000	BONUS PRODUKSI	
						Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan menuju SMP 1 Purba Tua di Desa Janji Nauli Kecamatan Purba Tua	125,000,000	BONUS PRODUKSI	
						Pembangunan Tembok penahan tanah di Desa Pardamean Nainggolan Kecamatan Pahae Jae	125,000,000	DID	
						Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Dolok Sanggul Kecamatan Simangumban	125,000,000	BONUS PRODUKSI	
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Hutanagodang Kecamatan Purbatua	125,000,000	DID	
						Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Gang Sentosa Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung	200,000,000	DID	
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu	200,000,000	BONUS PRODUKSI	
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Gang Agave kelurahan Hutatoruan VII kecamatan Tarutung	100,000,000	DID	
						Pembangunan Jalan Alternatif dari Jalan Mahligai menuju Desa Banuaji di desa Banuaji II kecamatan Adiankoting	-	DAU	
						Perbaikan Jalan Kompleks Fatimah Regency di Desa Pagar Batu Kecamatan Sipoholon	175,000,000	DAU	
						Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Dusun Lumban Baringin Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran	100,000,000	DID	

						Peningkatan Jalan Huta Siraya Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong	90,000,000	DAU	
						Lanjutan Pembangunan Jalan Lapen dari Jalan Jeges Menuju Sigambogambo Kecamatan Siborongborong	90,000,000	DAU	
						Penataan Lingkungan di Desa Hutapea Banuarea Kecamatan Tarutung	150,000,000		P Apbd
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Pansinaran desa Dolok Sanggul kecamatan Simangumban	-	DID	
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah di SD 173160 Kecamatan Sipahutar	100,000,000		P Apbd
						Pembangunan Jalan Lingkungan Di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung	100,000,000		P Apbd
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah Di SMP Negeri 2 Tarutung	80,000,000		P Apbd
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kreasi Anak Muda (3 Titik) di Kabupaten Tapanuli Utara	150,000,000		P Apbd
						Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Aritonang Kecamatan Muara	200,000,000	DID	
1	**04**	**05**	**2.01**	**03**		***Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan***	**1,157,548,518**		
						Pemeliharaan Lampu Taman dan Lampu Kota	208,094,908	DID	
						Pemeliharaan Taman dan Pohon Lindung	205,552,960	DID	
						Monitoring dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara	739,119,250	DID	
						Pemeliharaan Rutin TPU Pagar Batu Kec, Sipoholon dan TPU Siarang-arang Kec, Tarutung	4,781,400	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
2	**10**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**21,439,800**		
2	**10**	**06**				**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**-**		
2	**10**	**06**	**2.01**			**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**-**		
2	**10**	**06**	**2.01**	**03**		***Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota***			
2	**10**	**10**				**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**			
			2.01			**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**21,439,800**		
			2.01	**01**		***Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah***	**-**		
				02		***Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota***	**-**		
						Penentuan zona nilai tanah di Kabupaten Tapanuli Utara			
				03		***Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota***	**21,439,800**		
						Mediasi Sengketa Tanah di Kabupaten Tapanuli Utara	21,439,800	DAU Rutin & Program/Kegiatan OPD	
TOTAL							**21,614,495,871**		

BAB V

PENUTUP

Penyusunan program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara merupakan kegiatan tahunan yang seyogyannya dilakukan penyusunannya oleh masing-masing instansi pada awal tahun pelaksanaan program kerjanya. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini cukup penting karena berisi arah, tujuan, pelaksanaan tugas pokok, serta pengorganisasian dari instansi yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai kedudukan dan peran yang cukup straregis, hal ini disebabkan karena instansi ini mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan rumusan kebijakan dan strategis pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang berbasis kinerja yang telah ditetapkan dewasa ini, maka rencana kerja ini mempunyai arti yang cukup penting pula, karena rencana kerja ini tertuang kemajuan dan langka-langka yang hendak dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan rencana kerja perubahan tahun 2024 ini, berbagai usulan serta masukan penyempurnaan rencana kerja ini kami terima dengan tangan terbuka serta pengertian yang diberikan terhadap berbagai upaya yang belum terselesaikan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA,



BUDIMAN GULTOM, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741014 200003 1 002

RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAPANULI UTARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2024 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 12
2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD 14
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 17
3.3 Program dan Kegiatan 17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 25
BAB V PENUTUP 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan K/L yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja K/L), dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra dan Renja OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya RPJM ini menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya sebagai dasar Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Namun demikian dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan keluarnya Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Tapanuli Utara dan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 12/SKB/TU/2016 dan Nomor : 06/PB/DPRD-TU/2016 tanggal 18 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Mengharuskan Pemerintah Daerah membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang baru, yang sesuai dengan amanat peraturan tersebut, menggabungkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam rangka memenuhi amanat tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 ini menyusun Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 berdasarkan usulan masyarakat baik secara bottom up dan top down melalui musrenbang kecamatan, konsultasi publik, forum OPD, musrenbang RKPD Kabupaten serta mengacu kepada Renja Perubahan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2024 antara lain :

1. Percepatan pencapaian prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana antara lain dengan program;
   - Pengendalian kerusakan lingkungan
   - Pengendalian pencemaran dan peningkatan kapasitas SDM
2. Penguatan pencapaian SPM daerah, untuk kabupaten :
   - Pencegahan pencemaran air
   - Pencegahan pencemaran udara stasioner
   - Info status kerusakan lahan untuk produksi biomassa
   - Tindak lanjut pengaduan
3. Investasi pada infrastruktur lingkungan hidup
   - Infrastruktur pemanfaatan kualitas lingkungan
   - Infrastruktur pengelolaan limbah dan sampah
   - Infrastruktur pemulihan kualitas lingkungan akibat pencemaran
   - Infrastruktur pengendalian kerusakan ekosistem
4. Pelaksanaan inventaris data secara menyeluruh
5. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
6. Focussing pada isu isu strategis menurut kondisi wilayah.

Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara disusun atas berbagai landasan hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara, jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dairi, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
10. Peraturan Presiden Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037.
22. Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara
24. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara adalah menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan, pengangaran dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun 2024 dalam prinsip tata pemerintahan yang baik.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah:

1. Pedoman/acuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan RKPD nya sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Merumuskan Rencana, Kebijakan dan Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

Bab I **PENDAHULUAN** merupakan penjelasan mengenai latar belakang penulisan, landasan hukum yang digunakan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

Bab II **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU** merupakan penjelasan mengenai evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perubahan Lingkungan Hidup tahun lalu dan capaian renstra Dinas Lingkungan Hidup, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH** menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja SKPD, serta Program dan Kegiatan.

Bab V **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab IV **PENUTUP** merupakan gambaran kondisi yang diharapkan untuk pencapaian pelaksanaan Renja Tahun 2024

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 secara keseluruhan sangat baik memenuhi target penyerapan dana sebesar 96% , adapun hasil-hasil yang telah dicapai pada Kegiatan Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup adalah :

Secara umum rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Lingkungan Hidup dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Utara

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	100
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya proses perencanaan dan evaluasi kinerja dinas	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100
Administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya administrasi keuangan	100%	100%	100%	86%	86%	100%	95%	0,95
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian dinas	100%	100%	100%	85%	85%	100%	95%	0,95
Administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya administrasi Umum dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Barang Milik daerah	100%	100%	100%	155%	155%	100%	118%	118
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Biaya Jasa Tenaga Pelayana Umum	100%	100%	100%	93%	93%	100%	97%	0,97
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	126%	126%	100%	108%	108

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	-	-	-	100%	66%	0,66
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) yang Terintegrasi dengan Setiap Dokumen Rencana Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara	100%	100%	-	-	-	100%	66%	0,66
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlasakanya Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	94%	94%	100%	98%	0.98
Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Terselengaranya upaya pencegahan pencemaran/kerussakan lingkungan hidup	100%	100%	100%	139%	139%	100%	113%	113
Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Terselengaranya Penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%	0	0	100%	66%	0,66
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terselengaranya pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%	0	0	100%	66%	0,66
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terciptanya Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	100%	100%	0	0	100%	66%	0,66
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten	100%	100%	100%	0	0	100%	66%	0,66

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	TERLAKSANANYA ROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	100%	100%	100%	95%	95%	100%	98%	0,98
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	95%	95%	100%	98%	0,98
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100%	100%	100%	120%	120%	100%	106%	106
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	120%	120%	100%	106%	106
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100%	100%	100%	98%	98%	100%	99%	0,99
Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	98%	98%	100%	99%	0,99
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%	100%	100%	95%	95%	100%	98%	0,98

Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	95%	95%	100%	98%	0,98
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan Sampah yang dikelola	100%	100%	100%	96%	96%	100%	98%	0,98
Pengelolaan sampah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan persampahan	100%	100%	100%	96%	96%	100%	98%	0,982

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja pelayanan urusan Lingkungan Hidup dapat diukur dengan 6 indikator kinerja pelayanan yaitu :

Tabel 2.2

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Rumus Perhitungan Kinerja	Keterangan
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(0,376xIKA) + (0,405xIKU) + (0,219xIKTL)	
2	Indeks Kualitas Air	$IPj = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 M + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 A}{2}}$ IPj = Indeks Pencemaran bagi peruntukan j Ci = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij = Baku Mutu Parameter i bagi peruntukan j M = Maksimum, A =Average (Rata-rata)	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKL = 100 - ((84{,}3 - ((\frac{LTL}{LW} - DKK)\ X\ 100))\ X\ \frac{50}{54{,}3})$ DKK = ∑Rumus W ditutupan Hutan + Rumus W ditutupan belukar DKK= Dampak kebakaran dan kanal	
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU=100-(50/0,9X (PU-0,1)) Dimana PU= 50% indeks SO2+Indeks NO2 PU= Indeks Pencemaran Udara	
5	Persentase Penanganan Sampah	Tidak Ada	
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tidak Ada	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten

Adapun pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara disajikan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capain		Proyeksi	Catatan Analisis
		2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	*2*	*5*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	84,01	72,26	72,75	73,05	73,35	76,78	77,81	78	
2	Indeks Kualitas Air	80	50	53,81	53,91	54,01	63,33	63,33	65	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	73,5	74,45	75,50	76,50	77,50	74,45	75,85	76	
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,42	91,60	88,86	88,96	89,06	90,52	92,31	93	
5	Persentase Penanganan Sampah	22	22	26	27	28	24	22	24	

6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	51,43	65,43	80	80	85	65,43	70,18		

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Menurunnya kualitas lingkungan yang ditunjukkan dengan meningkatknya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pertambangan, limbah rumah tangga yang memanfaatkan bahan kimia.
2. Menurunnya kualitas air (pencemaran) Danau Toba dan sumber daya air lainnya di Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Pengalihan fungsi kawasan tidak terbangun menjadi areal pertanian/perkebunan, perumahan dan kebutuhan pembangunan yang juga mengakibatkan hilangnya sumber mata air, serta penurunan ketersediaan air, sementara permintaan kebutuhan akan air baku meningkat.
4. Kurangnya pengendalian eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup pada kawasan yang rentan terhadap kerusakan.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan.
6. Penegakan hukum yang belum tegas terhadap pelaku pelanggaran perusak lingkungan. Meningkatnya permasalahan lingkungan tidak dibarengi dengan kesiapam perangkat hukum daerah, dengan keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
7. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten di bidang lingkungan hidup (PPNS, PPLHD, penilai amdal, auditor lingkungan, fungsional laboratorium).
8. Meningkatkan kepedulian dan peran serta dunia pendidikan terhadap kelestarian lingkungan hidup.
9. Meningkatkan kinerja kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap indikasi perusakan lingkungan, pendataan kegiatan/usaha yang berjalan yang memiliki/tidak memiliki UKL/UPL.
10. Pengelolaan sampah yang belum mencapai kemitraan antar pemerintah daerah dan masyarakat dan belum optimalnya upaya pemisahan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
11. Dilaksanakannnya peringatan dini bencana dalam upaya antisipasi terhadap bencana terkait perubahan iklim seperti banjir, longsor, kekeringan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah , adalah :

1. Keterbatasan dana/anggaran yang tidak sebanding dengan kecenderungan peningkatan permasalahan lingkungna hidup yang ada.
2. Status kelembagaan pengelola lingkungan hidup yang sudah Dinas (eselon II) di Kabupaten Tapanuli Utara. yang berdampak terhadap koordinasi dan pengambilan keputusan.
3. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Dukungan Peraturan Daerah terhadap kelestraian lingkungan hidup.
5. Sumber daya aparatur yang terbatas baik jumlah personel dan tenaga teknis di bidang lingkungan hidup.
6. Partisipasi masyarakat dan pemerhati lingkungan yang masih kurang dalam pelestarian lingkungan hidup.

Secara keseluruhan program dan kegiatan yang diselenggarakan melalui tugas dan fungsi Dinas Lingkugan Hidup mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalaui RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dan capaian Program Nasional/Internasional.

Adapun tantangan dan peluang dalam penyelenggraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Isu lingkungan merupakan isu global yang berdampak pada tuntutan Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih inovatif, inisiatif dan kreatif menyusun kebijakan, rencana dan program/kegiatan.
2. Semakin berkembangnya organisasi masyarakat/non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
3. Perhatian dunia internasional terhadap perubahan iklim dunia, memberikan alternatif pendanaan membantu perbaikan lingkungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD dengan rencana kebutuhan dikaitkan dengan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup perencanaannya dilakukan dengan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara dan dilakukan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan kendala yang kemungkinan akan timbul. Perencanaan strategis adalah integrasi antara keahlian sumber daya manusia,

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan pemanfaatan kondisi lingkungan strategis. Dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan usulan Dinas Lingkungan Hidup sebelum penetapan RKPD tidak begitu terjadi perbedaan, semua usulan terakomodir di dalam rancangan awal RKPD tersebut dan dapat diuraikan pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***14***
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.252.563	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.252.563	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	1.612.879	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	1.612.879	
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Tapanuli Utara	Terlaksananya Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	39.814	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Tapanuli Utara	Terlaksananya Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	39.814	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	80.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	80.000	

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Tapanuli Utara	Terlaksanaya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	27.407	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Tapanuli Utara	Terlaksanaya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	47.082	
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	34.957	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	34.957	
7	Program Pengelolaan Persampahan	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	100%	1.088.999	Program Pengelolaan Persampahan	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	100%	1.088.999	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun hasil dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten serta memperhatikan usulan-usulan masyarakat pada kunjungan kerja Bupati Tapanuli Utara ke Desa-desa terdapat beberapa usulan-usulan yang sesuai yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dapat disajikan pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Tapanuli Utara	Tersedianya bibit tanaman berbuah	3000 batang	-
2	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	5 pengaduan	-
3	Program Pengelolaan Persampahan	15 Kecamatan	Tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	100 unit	-

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sangat terkait dengan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumtera Utara. Program/kegiatan yang ada pada Program/kegiatan Nasional melalui program/kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup diadopsi dan disesuaikan dengan program/kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara , beberapa hal yang mengacu kepada Renja Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Percepatan pencapaian prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana antara lain dengan program;
- Pengendalian kerusakan lingkungan
- Pengendalian Pencemaran dan Peningkatan Kapasitas

2. Penguatan pencapaian SPM daerah, untuk kabupaten :
- Pencegahan pencemaran air
- Pencegahan pencemaran udara stasioner
- Info status kerusakan lahan untuk produksi biomassa
- Tindak lanjut pengaduan

3. Investasi pada infrastruktur lingkungan hidup
- Infrastruktur pemanfaatan kualitas lingkungan
- Infrastruktur pengelolaan limbah dan dan sampah
- Infrastrukktur pemulihan kualitas lingkungan akibat pencemaran
- Infrastruktur pengendalaian kerusakan ekosistem

4. Pelaksanaan inventaris data secara menyeluruh

5. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

6. Focussing pada isu isu strategis menurut kondisi wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan Renja SKPD

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan

" Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah"

3.2.2 Sasaran Renja SKPD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran yaitu :

1. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara

Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks KualitaS Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	**84.01**	**72.26**	**72,75**	**73,05**	**73,35**
1. Indeks Kualitas Air	**80**	**50**	**53,81**	**53,91**	**54,01**
2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**73.5**	**74.45**	**75,50**	**76,50**	**77,50**
3. Indeks Kualitas Udara	**93.42**	**91.60**	**88,86**	**88,96**	**89,06**
4. Persentase penanganan sampah	**22**	**22**	**26**	**27**	**28**
5. Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	**51.43**	**65.43**	**80**	**80**	**85**

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan ditentukan berdasarkan metode strategis untuk mendukung program Internasional dan Nasional yang terkait dengan lingkungan dari visi misi Kementerian Lingkungan Hidup; pencapaian MDGs, pencapaian SPM, pengentasan kemiskinan, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir dll. , pencapaian visi misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, pencapaian misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 5 (lima)

tahun ke depan, penampungan aspirasi secara bottom up melalui musrenbang ditingkat desa, kecamatan dll.

3.3.2. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun 2024 terdiri dari 7 Program dan 14 Kegiatan, antara lain meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
    - ❖ Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
    - ❖ Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota
3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
    - ❖ Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota
4. Program Pengelolaan Persampahan
    - ❖ Pengelolaan sampah
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
    - ❖ Penyimpanan Sementara Limbah B3
6. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    - ❖ Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota
    - ❖ Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota
    - ❖ Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
    - ❖ Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan tersebut diatas dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang meliputi 15 kecamatan dan rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tertuang pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel **3.3**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP.000)
							4	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				**10.136.623**				**11.150.285**
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan layanan penunjang yang tertangani**	Tapanuli Utara	100%	**7.252.563**	DAU		100%	**7.977.819**
2	11	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**TerlaksananyaPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tapanuli Utara	100%	**44.815**	DAU		100%	**49.296**
2	11	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Terlaksananya pendukung untuk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tapanuli Utara	1 Dok	8.354	DAU		1 Dok	9.189
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Belanja SKPD	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapanuli Utara	1 Dok	3.969	DAU		1 Dok	4.365
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	1 Dok	32.491	DAU		1 Dok	35.740
2	11	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun**	Tapanuli Utara	100%	**2.871.537**	DAU		100%	**3.158.690**
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tapanuli Utara	12 bln	2.786.717	DAU		12 bln	3.065.388
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan tersedianya jasa administrasi keuangan	Tapanuli Utara	12 bln	79.819	DAU		12 bln	87.800
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapanuli Utara	12 bln	5.000	DAU		12 bln	5.500
2	11	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**TerlaksananyaAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tapanuli Utara	100%	**123.750**	DAU		100%	**136.125**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP.000)
							4	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	11	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Tersedianya pakaian kerja petugas kebersihan (PHL)	Tapanuli Utara	12 bln	123.750	DAU		12 bln	**136.125**
2	11	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**TerlaksanayaAdministrasi Umum Perangkat Daerah**	Tapanuli Utara	100%	**261.237**	DAU		100%	**287.360**
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terjaganya kebersihan dan keasrian Kantor	Tapanuli Utara	12 bln	39.999	DAU		12 bln	43.998
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang Cukup	Tapanuli Utara	12 bln	59.795	DAU		12 bln	65.774
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercukupinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tapanuli Utara	12 bln	20.000	DAU		12 bln	21.000
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapanuli Utara	12 bln	4.980	DAU		12 bln	5.478
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Pemerintah Atasan ke Luar Daerah	Tapanuli Utara	12 bln	136.461	DAU		12 bln	150.107
2	11	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**TersedianyaPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tapanuli Utara	100%	**2.864.680**	DAU		100%	**3.155.148**
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TersedianyaPenyediaan Jasa Surat Menyurat	Tapanuli Utara	12 bln	2.000	DAU		12 bln	2.200
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TersedianyaPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapanuli Utara	12 bln	25.100	DAU		12 bln	27.610
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TersedianyaPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapanuli Utara	12 bln	2.837.580	DAU		12 bln	3.121.338
2	11	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Tapanuli Utara	100%	**1.086.544**			100%	**1.195.198**
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya biaya jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang siap pakai	Tapanuli Utara	12 bln	57.280	DAU		12 bln	63.008

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP.000)
							4	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya jasa pemeliharaan kenderaan angkutan sampah	Tapanuli Utara	12 bln	989.461	DAU		12 bln	1.088.407
2	11	01	2.09	07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Tersedianya biaya jasa pemeliharaan TPA dan TPS	Tapanuli Utara	12 bln	25.000	DAU		12 bln	27.500
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Tapanuli Utara	100%	9.965	DAU		100%	10.961
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya dan Bangunan Lainnya Sarana Kantor	Tapanuli Utara	12 bln	4.836	DAU		12 bln	5.319
2	11	03			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Terlaksannya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tapanuli Utara	100%	**1.612.879**	DAU/DAK		100%	**1.774.166**
2	11	03	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	TerlaksananyaPencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	100%	**57.448**	DAU		100%	**63.192**
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	TerlaksananyaKoordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Tapanuli Utara	1 dok	29.999	DAU		1 dok	32.998
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	TerlaksananyaKoordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tapanuli Utara	1 dok	27.449	DAU		1 dok	30.193
2	11	03	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	TerlaksananyaPenanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	100%	**1.505.430**	DAU/DAK		100%	**1.655.973**
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	TerlaksananyaPemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tapanuli Utara	1 dok	25.002	DAU		1 dok	27.502
2	11	03	2.02	02	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pemberhentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tapanuli Utara	1 dok	1.480.428	DAK		1 dok	1.28.470

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP.000)
							4	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	11	03	2.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	TerlaksananyaPemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	100%	**50.000**	DAU		100%	**55.000**
2	11	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	TerlaksananyaKoordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Tapanuli Utara	1 dok	50.000	DAU		1 dok	55.000
2	11	05			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Terselenggaranya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Tapanuli Utara	100%	**39.814**	DAU		100%	**43.795**
2	11	05	2.01		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Terselenggaranya Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) sesuai peraturan	Tapanuli Utara	35%	**39.814**	DAU		50%	**43.795**
2	11	05	2.01	01	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan ADministrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terselenggaranya verifikasi lapangan unyuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara linbah B3	Tapanuli Utara	35%	39.814	DAU		50%	43.795
2	11	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Terlaksannnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tapanuli Utara	100%	**80.000**	DAU		100%	**88.000**
2	11	06	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	TerlaksannyaPembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	70%	**80.000**	DAU		70%	**88.000**
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	TerlaksannyaFasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Tapanuli Utara	80 usaha	30.000	DAU		75 usaha	33.000
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi dan Peraturaan Perundang-Undangan di Bidang Perlindunga dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengawasan Perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi dan Peraturaan Perundang-Undangan di Bidang Perlindunga dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tapanuli Utara	540 usaha	50.000	DAU		540 usaha	55.000
2	11	08			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Terciptanya Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Tapanuli Utara	100%	**27.407**	DAU		100%	**30.147**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP.000)
							4	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	11	08	2.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	100%	**27.407**	DAU		100%	**30.147**
2	11	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Acara Peringatan LIngkungan Hidup dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Tapanuli Utara	100%	27.407	DAU		100%	30.147
2	11	10			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Tapanuli Utara**	**100%**	**34.957**	DAU		100%	**38.452**
2	11	10	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	TerlaksannyaPenyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	100%	**34.957**	DAU		100%	**38.452**
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dibidang PPLH Kabupaten/Kota	TerlaksannyaPengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	100%	34.957	DAU		100%	38.452
2	11	11			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Cakupan Pengelolaan Persampahan**	**Tapanuli Utara**	**28%**	**1.088.999**	DAU/DAK		24%	**1.197.898**
2	11	11	2.01		**Pengelolaan Sampah**	TerlaksannyaPengelolaan Sampah	Tapanuli Utara	28%	**1.088.999**	DAU/DAK		24%	**1.197.898**
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan pengolahan sampah di Instalasi pengoklahan sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSA,RDF,PUSAT Pengomposan,Biodigester,Bank Sampah dan Fasilitasi lainnya sesuai dengan Peraturaan Perundangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan pengolahan sampah di Instalasi pengoklahan sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSA,RDF,PUSAT Pengomposan,Biodigester,Bank Sampah dan Fasilitasi lainnya sesuai dengan Peraturaan Perundangan Kabupaten/KotaKabupaten/Kota	Tapanuli Utara	12 dok	44.999	DAU		12 dok	49.498
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	TerlaksannyaPenyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	100%	1.044.000	DAK		100%	1.148.400

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Adapun rencana kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka	
						Tahun 2024	
						Target	Anggaran
Tujuan Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	**Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang yang tertangani**	**12**	**12**	**7.252.563.877**
			Kegiatan: **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya proses perencanaan dan evaluasi kinerja dinas	12	100	**44.815.200**
			Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan rencana kerja dinas	100	100	8.354.600
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	100	100	3.969.600
			Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	32.491.000
			Kegiatan: **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi keuangan	100	100	**2.871.537.007**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka	
						Tahun 2024	
						Target	Anggaran
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujuian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	12	12	79.819.200
			Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	1	2.786.717.707
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	1	1	5.000.000
			Kegiatan: **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi Umum dinas	100	100	**123.750.000**
			Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	125	125	123.750.000
			Kegiatan: **Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi Umum dinas	100	100	**261.237.050**
			Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	12	12	4.980.600
			Sub Kegiatan :	Tersedianya alat tulis kantor	12	12	59.795.550

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka	
						Tahun 2024	
						Target	Anggaran
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	12	12	39.999.900
			Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	12	20.000.000
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya biaya rapat rapat ke luar daerah	12	12	136.461.000
			Kegiatan: **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Biaya Jasa Tenaga Pelayana Umum	12	12	**2.864.680.470**
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya biaya surat menyurat	12	12	2.000.000
			Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan lsitrik	Tersedianya biaya komuikasi, kebutuhan air dan listrik	12	12	25.100.000
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Biaya Jasa Non PNS	12	12	2.837.580.470

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka	
						Tahun 2024	
						Target	Anggaran
			<u>Kegiatan:</u> **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	12	**1.086.544.150**
			<u>Sub Kegiatan</u> : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12	12	57.280.650
			<u>Sub Kegiatan</u> : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Tersedianya pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	12	12	989.461.600
			<u>Sub Kegiatan</u> : Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan TPS dan TPA	100%	100%	25.000.000
			<u>Sub Kegiatan</u> : Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan	12	12	9.965.700
			<u>Sub Kegiatan:</u>	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	12	12	4.836.200

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka	
						Tahun 2024	
						Target	Anggaran
			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	bangunan lainnya			
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Terselenggaranya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3	12	`12	**39.814.900**
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Sasaran : Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan		**Kegiatan:** **Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Terselenggaranya Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) sesuai peraturan	12	12	**39.814.900**
			Sub Kegiatan: Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Adminisrtrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Terselenggaranya verifikasi lapangan unyuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara linbah B3	`12	12	39.814.900
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Cakupan usaha yang wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan**	**100**	**100**	**80.000.900**
			Kegiatan: **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	100	100	**80.000.900**
			Sub Kegiatan:	Banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan pemenuhan kewajiban	30	50	30.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2024	
						Target	Anggaran
			Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin lingkungan dan/atau Izin PPLH	pengelolaan lingkungan hidup			
			Sub Kegiatan: Pengawasan Perijinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provnsi dan Peraturan PerUndang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Pengawasan Perijinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provnsi dan Peraturan PerUndang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	57	235	**50.000.000**
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Cakupan Pengaduan masyarakat yang terselesaikan**	**55**	**60**	**34.957.000**
			Kegiatan: **Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota**	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	55	60	**34.957.000**
			Sub Kegiatan: Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	18	20	34.957.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Cakupan Sampah yang dikelola**			**1.088.999.525**
			Kegiatan:	Terkelolanya sampah sampai ke TPA	100	100	**1.088.999.525**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka	
						Tahun 2024	
						Target	Anggaran
			Pengelolaan Sampah				
			Sub Kegiatan: Penanganan sampah melalui Pemilhan dan Pengolahan sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSA,RDF,Pusat Pengomposan,Biodigester,Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Peerundangan	Penanganan sampah melalui Pemilhan dan Pengolahan sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSA,RDF,Pusat Pengomposan,Biodigester,Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Peerundangan	1	1	44.999.900
			Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyediaan Sarana da Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	100	100	1.044.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Terlaksananya Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**30**	30	**1.612.879.850**
			Kegiatan: **Pencegahan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**	Terselengaranya upaya pencegahan pencemaran/kerussakan lingkungan hidup	100	100	**57.448.950**
			Sub Kegiatan:		1	1	29.999.250

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka	
						Tahun 2024	
						Target	Anggaran
			Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air,udara dan laut	Terselengaranya penelitian dan pengujian mutu kualitas air			
			Sub Kegiatan: Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Terselengaranya upaya pengendalian dampak perubahan iklim	1	2 Titik	27.449.700
			Kegiatan: **Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**	Terlaksananya **Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**	1	1 Buku	**1.505.430.900**
			Sub Kegiatan : Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Tersedianya buku informasi pengelolaan lingkungan hidup	buku	1	25.002.500

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka	
						Tahun 2024	
						Target	Anggaran
			Sub Kegiatan : Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	1.480.428.400
			Kegiatan: **Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**	Terselengaranya pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	100	100	50.000.000
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	6	6 Ha	50.000.000
			Kegiatan: **Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**	Terlaksananya **Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**	1	1 Buku	1.505.430.900
			Sub Kegiatan : Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Tersedianya buku informasi pengelolaan lingkungan hidup	buku	1	25.002.500

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran,Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka	
						Tahun 2024	
						Target	Anggaran
			Sub Kegiatan : Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	1.480.428.400
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	100	27.407.475
			Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	27.407.475
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	100	100	27.407.475

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 yang merupakan acuan dalam penyusunan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama 1 (satu) tahun kedepan dan merupakan program dan kegiatan sangat prioritas yang harus dilaksanakan dan dicapai targetnya mengingat setiap saat kemungkinan terjadinya keterbatasan ketersediaan anggaran pembangunan dan pencapaian program dan kegiatan prioritas ini dapat menjadi bahan untuk pertimbangan dalam mengukur capaian kinerja OPD selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, maka keseluruhan rencana kegiatan setiap tahunnya telah tertuang dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara ini disusun dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

TARUTUNG, Oktober 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAPANULI UTARA



HEBER SAUR MARULI TAMBUNAN, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741212 199303 1 001

RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2024

DINAS PERPUSTAKAAN KAB.TAPANULI UTARA
TARUTUNG
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,yang telah memberikan berkat rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Diharapkan kedepannya dengan adanya perubahan daripada Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan perencanaan dan program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ini berisikan tentang gambaran tentang program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2024, hasil-hasil yang telah dicapai serta masalah yang dihadapi, tujuan dan sasaran program kegiatan, penentuan target dan indikator kinerja serta pagu indikatif dan sumber dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program dan kegiatan guna meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan Dinas Perpustakaan.

Melalui Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu meningkatkan rasio perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara yang didukung oleh meningkatnya minat baca masyarakat melalui peningkatan pelayanan baik dalam peningkatan koleksi perpustakaan maupun peningkatan kuantitas maupun kualitas sarana prasarana perpustakaan, peningkatan Indeks Pelayanan Publik melalui peningkatan jumlah perangkat daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku serta meningkatnya Nilai AKIP Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara

Disadari bahwa Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara untuk selanjutnya.

Tarutung, Oktober 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

BUHA M. AUGUS SINAGA, S.P, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19730825 199803 1 003

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023 DAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... **9**

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dan Target Capaian Renstra Dinas Perpustakaan Tahun 2019-2024 serta Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 19

2.3 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara 21

2.4 Kondisi Umum Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara 22

2.5 Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.... 24

2.7 Review terhadap Rancangan RKPD 25

2.8 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **29**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 29

3.2 Tujuan Dinas Perpustakaan 30

3.3 Sasaran Dinas Perpustakaan 31
3.4 Program dan Kegiatan 38
BAB IV : RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2024 41
BAB V : PENUTUP 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dan Target Capaian Renstra Tahun 2019-2024	10
Tabel 2.2	Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024	16
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan	20
Tabel 2.4	Keterkaitan Misi,Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan Sesuai RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024	23
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Perpustakaan Tahun 2024	26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	33
Tabel 3.2	Perubahan Target dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	34
Tabel 3.3	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021-2023,Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan Perpustakaan	35
Tabel 3.4	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021-2023, Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	36
Tabel 3.4	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021-2023, Nilai Hasil Evaluasi AKIP	37
Tabel 4.1	Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan Pendidikan. Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat yang menghendaki peruahan dan evaluasi serta penyempurnaan ke arah terwujudnya administrasi publik yang semakin transparan dan akuntabel, erta tuntutan untuk dapat dilayani berbagai macam jasa layanan perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang sesuai dengan tuntutan zaman untuk menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar yang efektif.

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cakupan perencanaan pembangunan harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik dokumen perencanaan antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahun (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh sindikator kinerja kegiatan.Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Dinas Perpustakaan wajib mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance). Hal tersebut sudah merupakan komitmen untuk terus berbenah menata pelayanan prima terhadap masyarakat luas. Membudayakan 3 S (Senyum,Sapa,Salam) dalam setiap pelayanan. Melayani dengan setulus hati apa yang menjadi kebutuhan yang dapat diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini sejalan dengan reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

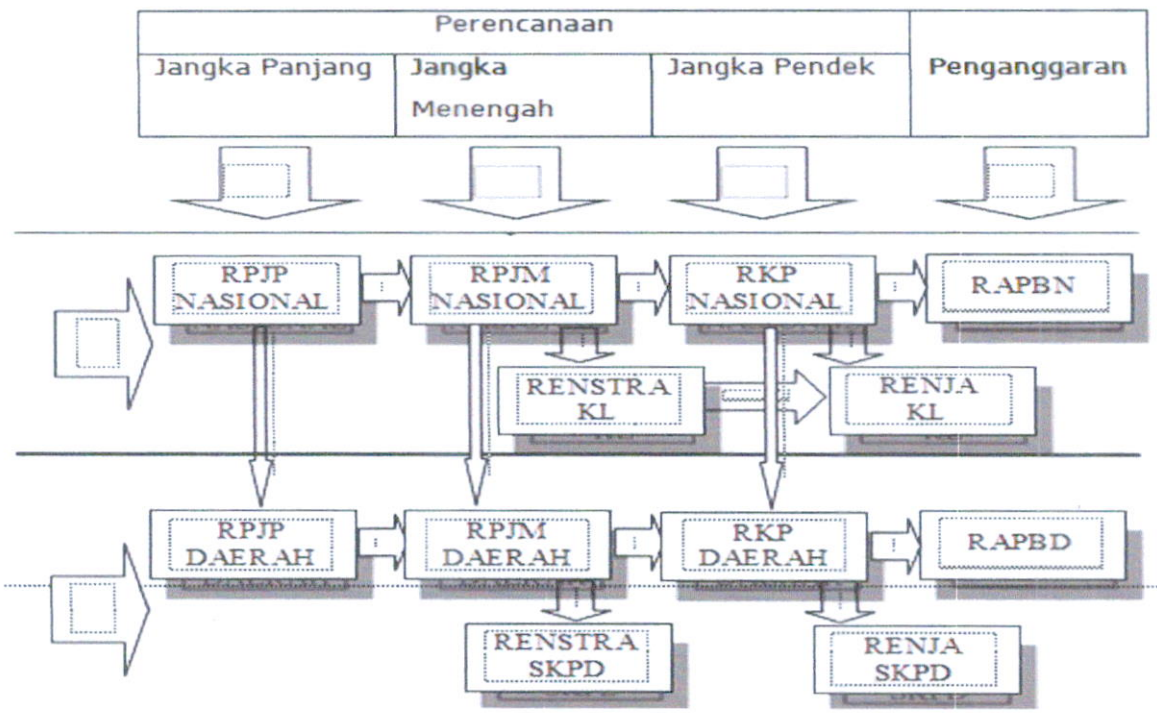
Proses penyusunan dokumen RKPD, sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, Renja-SKPD yang memiliki jangka waktu 1 tahun disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD serta mengacu kepada RKPD, dan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sehubungan dengan hal itu, di bidang perencanaan setiap instansi pemerintah dituntut untuk menyiapkan dan menyusun rencana kinerja tahunan dengan mengacu pada Renstra. Hal tersebut akan menjadi tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/unit kerja pada akhir tahun.

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perpustakaan Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja anggaran (RKA) 2024 dan untuk selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Rencana Kinerja Dinas Perpustakaan Tahun 2024 berisi usulan ataupun masukan yang disusun secara kolektif, partisipasif dan melibatkan semua unsur dalam unit kerja. Perencanaan kinerja yang merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan Visi Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Perpustakaan 2020-2024. Renja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Sekaitan dengan itu Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah dokumen perubahan perihal perencanaan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2024, yang memuat program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ruang lingkup Renja Perubahan adalah perubahan pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara di dalam 1 (satu) tahun berjalan dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan maupun hambatan yang ada. Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategia (Renstra) Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2024, dengan mengakomodir visi dan misi yang digariskan oleh Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Adapun hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainya dapat dilihat pada diagram alir di bawah ini :



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2024 mempedomani ketentuan pada Pasal 346 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana melalui Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA-P) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-P) Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Pada akhirnya dengan dilaksanakannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan tahun 2024 selanjutnya serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun 2024 dan juga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undnag-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarea Republik Inonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunh 2019, Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 –2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 adalah untuk menetapkan perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang

menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan akan disesuaikan dengan situasi/kondisi yang dialami oleh Dinas Perpustakaan pada waktu yang berjalan saat ini.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 adalah :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
2. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja unit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai acuan Dinas Perpustakaan Arsip dan merupakan indikator program dalam Renstra Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Merupakan komitmen bersama antara Pimpinan, Kepala Bidang,Kasubbag/Pejabat Fungsional dan semua pelaksana program/kegiatan pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara terhadap program dan kegiatan yang telah dituangkan selama satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN yang terdiri dari :

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN TAHUN 2023 DAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2024, yang terdiri dari :

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dan Target capaian Renstra Dinas Tahun 2019-2024 serta Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Periode Triwulan II Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara

2.4 Kondisi Umum Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara

2.5 Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara

2.6 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan Dinas Perpustakaan

3.3 Sasaran Dinas Perpustakaan

3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023 DAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dan Target capaian Renstra Dinas Perpustakaan Tahun 2019-2024 serta Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Periode Triwulan II Tahun 2024

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahaan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perpustakaan dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 kondisi di atas ini nantinya akan dijelaskan faktor- faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perpustakaan. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 dan Target Capaian Renstra Tahun 2019-2024 disajikan pada **Tabel 2.1** dibawah ini:

TABEL 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2023 DAN TARGET CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2019-2024

KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023					Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2019-2024 (Awal Periode Renstra OPD)
			Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	
			Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp)	Realisasi Capaian Kerja	Realisasi Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/5)	9
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							
2.23.01.2.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani**	**100 Persen**	**2.823.491.461**	**100 Persen**	**2.719.410.929**	96,31	
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**17.787.400**	**100 Persen**	**16.525.300**	**92,90**	100 Persen
2. 23. 01. 2. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.890.300	2 Dokumen	2.668.000	92,31	2 Dokumen
2. 23. 01. 2. 01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.672.500	1 Dokumen	1.529.100	91,43	1 Dokumen
2. 23. 01. 2. 01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.989.600	1 Dokumen	4.636.700	92,93	1 Laporan
2. 23. 01. 2. 01. 06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	8.235.000	12 laporan	7.691.500	93,40	12 laporan
2. 23. 01. 2. 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.360.791.041**	**100 Persen**	**2.290.812.119**	**97,04**	100 Persen
2. 23. 01. 2. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 laporan	2.325.321.741	12 laporan	2.255.399.819	96,99	12 laporan
2. 23. 01. 2. 02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	32.859.600	12 Dokumen	32.859.600	100,00	12 Dokumen
2. 23. 01. 2. 02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.609.700	1 Laporan	2.552.700	97,82	1 Laporan
2. 23. 01. 2. 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 Persen**	**121.949.700**	**100 Persen**	**102.841.300**	**84,33**	100 Persen
2. 23. 01. 2. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi disediakan	1 Paket	1.063.200	1 Paket	1.063.200	100,00	1 Paket
2. 23. 01. 2. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	29.637.100	1 Paket	25.256.900	85,22	1 Paket
2. 23. 01. 2. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	8.009.700	12 Paket	7.909.000	98,74	12 Paket

2. 23. 01. 2. 06. 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	14.096.200	12 Paket	13.667.200	96,96	12 Paket
2. 23. 01. 2. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	500 eksemplar	5.803.500	500 eksemplar	4.440.000	76,51	500 exmplar
2. 23. 01. 2. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 laporan	63.340.000	70 laporan	50.505.000	79,74	90 laporan
2. 23. 01. 2. 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang**	**100%**	**17.220.000**	**100%**	**16.920.000**	**98,26**	
2. 23. 01. 2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	17.220.000	2 unit	16.920.000	98,26	
2. 23. 01. 2. 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani**	**100 Persen**	**273.857.200**	**100 Persen**	**262.684.900**	**95,92**	
2. 23. 01. 2. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	150.000	1 laporan	150.000	100,00	12 laporan
2. 23. 01. 2. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	23.320.000	36 laporan	16.104.300	69,06	36 laporan
2. 23. 01. 2. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakanr	12 laporan	250.387.200	12 laporan	246.430.600	98,42	12 laporan
2. 23. 01. 2. 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**31.886.120**	**100 Persen**	**29.627.310**	**92,92**	
2. 23. 01. 2. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	29.505.120	2 Unit	27.327.310	92,62	2 Unit
2. 23. 01. 2. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.381.000	4 Unit	2.300.000	96,60	4 Unit
2. 23. 02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**2,86 Persen**	**265.149.600**	**4,87%**	**223.880.066,00**	84,44	
2. 23. 02. 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Layanan yang dikelola oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara	6 layanan	265.149.600	9 layanan	223.880.066,00	84,44	7 layanan
2. 23. 02. 2.01. 01	**Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik**	**Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)**	**1 layanan**	**68.190.000**	**2 layanan**	**67.866.900**	**99,53**	
2. 23. 02. 2.01. 01. 01	Penyediaan Jasa ICT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa ICT	1 paket/tahun	1.500.000	1 paket/tahun	1.500.000	100,00	1 paket/tahun
2. 23. 02. 2.01. 01. 02	Penyediaan E-book Perpustakaan Digital	Jumlah layanan e-book digital	1 paket	66.690.000	1 paket	66.366.900	99,52	1 paket
2. 23. 02. 2.01. 02	**Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya**	**170 Perpustakaan**	**186.699.300**	**262 perpustakaan**	**147.285.566,00**	**78,89**	
2. 23. 02. 2.01. 02. 01	Operasional MPK	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Operasional MPK	318 laporan	104.338.800	320 laporan	84.894.066	81,36	350 laporan
2. 23. 02. 2.01. 02. 02	Koordinasi, Pembinaan dan Supervisi pada Perpustakaan Umum,Khusus, Perpustakaan Sekolah	Jumlah Laporan Koordinasi, pembinaan dan supervisi pada perpustakaan umum, khusus, perpustakaan sekolah	63 Laporan	36.828.200	66 Laporan	33.513.500	91,00	75 laporan
	Pengelola Pelayanan Perpustakaan	Jumlah laporan pengelola pelayanan perpustakaan	300 laporan	13.349.700	140 laporan	5.438.000	40,73	400 laporan
2. 23. 02. 2.01. 02. 03	Jasa Administrasi UPTD Pahae	Jumlah paket Jasa Administrasi UPTD Pahae yang tersedia	12 Paket	3.995.500	12 Paket	1.580.000	39,54	12 Paket
2. 23. 02. 2.01. 02. 04	Jasa Administrasi UPTD Siborong-borong	Jumlah paket Jasa Administrasi UPTD Siborong-borong yang tersedia	12 Paket	3.436.600	12 Paket	2.441.100	71,03	12 Paket
2. 23. 02. 2.01. 02. 05	Jasa Administrasi UPTD Pangaribuan	Jumlah paket Jasa Administrasi UPTD Pangaribuan yang tersedia	12 Paket	15.000.000	12 Paket	10.918.500	72,79	12 Paket
2. 23. 02. 2.01. 02. 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan yang dilaksanakan	1 paket	4.596.800	1 paket	4.596.800	100,00	1 paket
2. 23. 02. 2.01. 02. 07	Pembuatan ID Card Anggota Perpustakaan	Jumlah ID Card Anggota Perpustakaan yang dicetak	300 Kartu	5.153.700	402 Kartu	3.903.600	75,74	400 Kartu
2. 23. 02. 2.01. 09	**Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka**	**Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan**	26.500 eksmp	**10.260.300**	27.648 eksmp	**8.727.600**	**85,06**	

2. 23. 02. 2.01. 09. 01	Pengolahan dan Penataan Bahan Koleksi Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dirawat dan ditata	500 eksemplar	10.260.300	520 eksemplar	8.727.600	**85,06**	600 eksemplar
2. 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							
2. 24. 02	**Program Pengelolaan Arsip**	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	30%	**60.000.000**	19,82%	**52.878.500**	**88,13**	
2. 24. 02. 2. 01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola secara baku	48%	**60.000.000**	30,52%	**52.878.500**	**88,13**	
2. 24. 02. 2. 01. 01	**Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis**	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan digunakan	45 berkas	48.000.000	42 berkas	42.329.000	**88,19**	55 berkas
2.24.02.2.01.01.01.01	Pendataan dan Penataan Arsip Daerah	Jumlah arsip daerah yang telah dilakukan pendataan dan pengelolaan arsip secara baku	500 berkas	23.000.000	395 berkas	18.749.500	81,52	650 berkas
2.24.02.2.01.01.01.02	Peraturan Bupati Tapanuli Utara Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingk. Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Bupati yang diciptakan dan digunakan yang mengatur tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingk. Pemerintah Daerah	1 peraturan	25.000.000	1 peraturan	23.579.500	94,32	-
2.24.02.2.03	**Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota**	**15 laporan**	**12.000.000**	**14 laporan**	**10.549.500**	**87,91**	15 laporan
2. 24. 02. 2. 03. 01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah yang telah dimonitoring, evaluasi dan dibuat laporan kearsipan	45 laporan	12.000.000	15 laporan	10.549.500	87,91	15 laporan
TOTAL				**3.148.641.061**		**2.996.169.495,00**	**95,16**	

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki nilai total pagu anggaran sebesar Rp 2.823.491.461,- (dengan rincian Pagu Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah selain anggaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 498.169.720,- sementara pagu anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.325.321.741,-. Dimana realisasi anggaran sebesar untuk kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 2.719.410.929,- (dengan rincian: realisasi penyerapan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 2.255.399.819,- dan penyerapan Kegiatan dan sub kegiatan lainnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp 464.011.110,-) dengan persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar 95,16% dimana pada Program ini terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan secara maksimal 100%, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

   a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dimana pagu sub kegiatan yang tersedia sebesar Rp. 63.340.000,- sementara realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp 50.505.000,- atau sebesar 79,74%. Adapun penyerapan anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun 2023 belum dapat tercapai maksimal berhubung biaya penginapan untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebagian besar dicairkan dengan cara *lonsum* (dibayarkan 30% dari anggaran berhubung tidak menggunakan fasilitas Hotel/penginapan) sehingga anggaran bersisa sebesar Rp. 12.835.000,- (20,26%).

   b. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dimana pagu sub kegiatan yang tersedia sebesar Rp. 23.320.000,- sementara realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp 16.104.300,- atau sebesar 69,05%. Adapun penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini belum cukup maksimal disebabkan kapasitas kecepatan internet yang didaftarkan masih lebih kecil daripada kapasitas internet yang direncanakan sebelumnya sehingga pagu anggaran untuk menyisakan anggaran sebesar Rp. 7.215.700,- (sebesar 30,94%).

2. Program Pembinaan Perpustakaan dimana Program ini memiliki nilai total pagu anggaran sebesar Rp 265.149.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 223.880.066,- atau dengan persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar 84,44%, dimana penyerapan anggaran untuk program pembinaan perpustakaan ini mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian realisasi

penyerapan di tahun 2022 sebesar 80,91%, Adapun kegiatan/sub kegiatan yang menyebabkan program ini tidak dapat menyerap anggaran seluruhnya adalah:

a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dan rincian sub kegiatan ialah Penyediaan Jasa Information Communication Technology (ICT) dengan pagu rincian sub kegiatan sebesar Rp. 11.492.400,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.954.900,- atau sebesar 77,92%. Hal ini disebabkan oleh Pagu Indikatif Biaya Wifi Kantor yang dianggarkan jauh lebih besar daripada jumlah biaya 1 paket penggunaan wifi kantor selama 1 tahun sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 2.537.500,-(22,08%).

b. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan rincian sub kegiatan ialah Operasional Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dengan rincian total pagu anggaran sebesar Rp. 104.338.800,- sementara realisasi penyerapan anggaran rincian sub kegiatan sebesar Rp. 84.894.066,- atau dengan persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar 81,36%. Adapun yang menyebabkan penyerapan anggaran padan rincian sub kegiatan Operasional MPK belum maksimal disebabkan karena jadwal pelaksanaan kegiatan Perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah sering terbentur dengan keadaan sekolah yang sedang ujian atau libur serta periode realisasi pelaksanaan Perpustakaan keliling mundur dari target jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu adanya perbaikan dan penambahan prasarana perpustakaan berupa rak buku Mobil Perpustakaan Keliling yang memerlukan waktu resparasi sehingga jadwal pelaksanaan perpustakaan keliling juga tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai jadwal turun ke lapangan yang telah direncanakan, sehingga mengakibatkan pengembalian dana sebesar Rp. 19.444.734,- atau sebesar 18,64%.

c. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan rincian sub kegiatan ialah Pengelola Pelayanan Perpustakaan dengan rincian total pagu anggaran sebesar Rp. 13.349.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.438.000,- atau sebesar 40,73%. Adapun yang menyebabkan sub kegiatan ini tidak dapat diserap secara maksimal berhubung pelaksanaan kegiatan lembur kantor dilaksanakan melewati jadwal kegiatan lembur yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga penyerapan anggaran yang tersedia tidak maksimal atau menyisakan anggaran sebesar Rp. 7.911.700,- atau sebesar 59,26%.

d. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sub kegiatan Jasa Administrasi UPTD Pahae dimana pada rincian sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran

sebesar Rp. 3.995.500,- sementara realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.580.000,- atau sebesar 39,54%. Hal ini disebabkan keterbatasan pegawai dimana pegawai yang bertugas di UPTD Pahae hanya 1orang dan pegawai tersebut telah pensiun per bulan Juni 2023 sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 2.415.500 atau sebesar 60,45%.

Sedangkan untuk Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara periode Januari s/d Juni (Triwulan II) Tahun 2024 nampak pada **tabel 2.2** di bawah ini:

TABEL 2.2
EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2023 PER TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI	
						I		II			
1	2	3	4	5		6		7		8= 6+7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		DINAS PERPUSTAKAAN			**3.440.905.014**		**488.956.781**		**963.801.925**		**1.452.758.706**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang tertangani**	**100%**	**3.170.834.189**	**25%**	**488.956.781**	**25%**	**962.301.925**	**50%**	**1.451.258.706**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tertangani**	**100%**	**14.118.300**	**0%**	**0**	**25%**	**3.589.000**	**25%**	**3.589.000**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	2 Dok	2.499.700	0	0	0	0	0	0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.843.900	0	0	0	0	0	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	2.499.700	0	0	1 lap	0	1 lap	0
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	7.275.000	0	0	2 lap	3.589.000,00	0	3.589.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertangani**	**100%**	**2.792.549.371**	**25%**	**451.156.781**	**25%**	**871.457.850**	**50%**	**1.322.614.631**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 laporan (39org/bulan)	2.757.686.771	3 lap	451.156.781	3 lap	863.242.950	6 lap	1.314.399.731
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	32.859.600	3 lap	0	3 lap	8.214.900	6 lap	8.214.900
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.003.000	1 lap	0	0	0	1 lap	0

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang tertangani**	**100%**	**80.265.050**	**16,6%**	**0**	**25%**	**27.825.125**	**41,6%**	**27.825.125**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi disediakan	1 paket	1.888.800	0	0	0	0	0	0
I	**Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	16.519.150	0	0	0	0	0	0
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	4.991.000	0	0	3 paket	2.500.000	3 paket	2.500.000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	5.581.600	0	0	3 paket	0	0	0
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dok	3.905.500	60 dok	0	60 dok	976.375	120 dok	976.375
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Lap	47.379.000	0	0	21 lap	24.348.750	0	24.348.750
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi penunjang yang Tertangani**	**100%**	**254.194.268**	**25%**	**37.800.000**	**25%**	**57.695.550**	**50%**	**95.495.550**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	150.000	0	0	0	0	0	0
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	25.026.800	9 Lap	0	9 lap	2.795.550	18 lap	2.795.550
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	229.017.468	2 lap.	37.800.000	3 lap	54.900.000	5 lap	92.700.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani**	**100%**	**29.707.200**	**0%**	**0**	**25%**	**1.734.400**	**25%**	**1.734.400**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	28.786.200	0	0	1 unit	1.734.400	0%	1.734.400
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	921.000	0	0	0	0	0	0
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**4,90%**	**250.070.825**	**0,80%**	**0**	**1,32%**	**1.500.000**	**2,12%**	**1.500.000**
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Jenis Layanan yang dikelola oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara**	**9 layanan**	**247.070.825**	**9 layanan**	**0**	**9 layanan**	**1.500.000**	**9 layanan**	**1.500.000**

II	**Meningkatkan Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara**	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 layanan	50.334.200	2 layanan	0	2 layanan	1.500.000	2 layanan	1.500.000
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	180 perpustakaan	152.440.225	0	0	45 perpustakaan	60 perpustakaan	0	105 perpustakaan
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	27.000 eksm	44.296.400	0	0	0	0	0	0
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah masyarakat/pelajar yang berprestasi gemar membaca**	**6 orang**	**3.000.000**	0	0	0	0	0	0
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2 lokus	3.000.000	0	0	0	0	0	0
III	**Meningkatkan tata kelola kearsipan yang baku pada Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
		Program Pengelolaan Arsip	**Persentase Pengelolaan Arsip Daerah**	**35%**	**20.000.000**	**27,35%**	**0**	**27,95%**	**27,95%**		**0**
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola secara baku**	**50%**	**20.000.000**	**27,35%**	**0**	**32,35%**	**32,35%**		**0**
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	**Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan**	55 berkas	17.471.125	128 berkas	0	105 berkas	233 berkas	0	0
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota**	4 laporan	2.528.875	0	0	0	0	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya yang memerlukan pelayanan perpustakaan maupun pelayanan kearsipan.

Tolak ukur kinerja yang dapat diterapkan dalam penetapan Indikator Kinerja adalah berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perpustakaan
2. Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun
3. Persentase peningkatan pengelolaan dan penyelamatan arsip daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dan dapat dilihat capaian pada **Tabel 2.3** dibawah ini.

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-	Rasio Capaian Tahun ke-	Realisasi Capaian Tahun ke-	Rasio Capaian Tahun ke-	Realisasi Capaian Tahun ke-	Rasio Capaian Tahun ke-
					2020	2021	2022	2023	2024	I (2020)	I (2020)	II (2021)	II (2021)	III (2022)	III (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PERPUSTAKAAN															
1	Rasio Perpustakaan per satuan penduduk	-	-	-	0,42	0,44	0,45	0,46	0,47	0,42	100,00	0,81	184,09	0,81	180
2	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan	-	-	-	2,74	2,78	2,82	2,86	2,90	2,74	100,00	2,66	95,68	4,37	154,96
3	Persentase peningkatan jumlah pembinaan perpustakaan	-	-	-	1,50	1,30	1,90	2,40	2,80	2,24	149,33	2,73	210,00	15,27	803,68
4	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	-	-	-	8,68	9,01	9,34	9,67	10,00	8,52	98,16	8,35	92,67	8,53	91,33
KEARSIPAN															
5	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	-	-	-	48,89	48,89	51,10	53,33	55,56	48,89	100,00	51,11	104,54	51,11	100,00
6	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	-	-	-	20	20	25	30	35	20	100	20	100	14,12	56,48

2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak yang dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.Tujuan dari perumusan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu-isu strategis Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam lima tahun mendatang (2020-2024) adalah:

1. Urusan Perpustakaan :
   a. Rendahnya minat baca masyarakat;
   b. Kurangnya SDM bidang perpustakaan dan IT;
   c. Minimnya anggaran untuk operasional perpustakaan;
   d. Perlunya sarana publikasi yang lebih masif agar perpustakaan milik daerah menjadi rujukan bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara;
   e. Pesatnya perkembangan dunia teknologi informasi sehingga menuntut perubahan sistem dan layanan perpustakaan secara digital.
   f. Regulasi tentang perpustakaan yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan masih terbatas.
2. Urusan Kearsipan :
   a. Penyediaan anggaran kearsipan yang masih terbatas;
   b. Penanganan arsip di Pemerintah Daerah belum sesuai dengan standar kearsipan;
   c. Belum adanya SDM yang ahli dan terampil di bidang kearsipan;

d. Minimnya sarana dan prasarana kearsipan;
e. Regulasi tentang kearsipan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan maupun pengelolaan arsip secara baku masih terbatas;
a. Adanya kesalahan persepsi mengenai arsip dan tanggung jawab kearsipan;
b. Belum adanya sistem JIKN dan SIKD kearsipan (e-archive).

2.4 Kondisi Umum Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara

a. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2019-2024

- **Visi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara**

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, maka program Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara tidak lepas dari visi, misi dan program Kabupaten Tapanuli Utara. Sedangkan Visi Kabupaten Tapanuli Utara periode 2019-2024 yang dijadikan rujukan adalah ***"Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata".*** Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan.

- **Misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara**

Sebagai upaya pencapaian visi, ditetapkan 8 (delapan) misi Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal.
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaaatan Iptek dan pengembangan jiwa kewirausahaan
5. Meningkatkan Destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata.
6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dengan mengacu pada penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Meningkatkan Kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan sistem E-Government

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan maka Dinas Perpustakaan termasuk di dalam Misi ke-3 dan ke-8 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sesuai yang tertuang pada RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 dan terlihat pada Tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4

Keterkaitan Misi,Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan

Sesuai RPJMD Perubahan 2019-2024

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	**Misi ke-3:** Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya sistem Pendidikan daerah	Memenuhi Standar Pendidikan
2	**Misi ke-8:** Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabitas kinerja
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diatur berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara diuraikan sebagai berikut :

- **Kedudukan** : Dinas Perpustakaan merupakan Unsur pendukung tugas Bupati, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- **Tugas** : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- **Fungsi** :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerinahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5 Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam Pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara

1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan

Tantangan yang dihadapi Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan ke depan antara lain :

a. Tantangan yang dihadapi Bidang Perpustakaan:
   1. Rendahnya minat baca masyarakat;
   2. Koleksi berbagai jenis perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
   3. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di Bidang perpustakaan masih terbatas;
   4. Layanan perpustakaan keliling belum menjangkau ke seluruh wilayah/pedesaan di Kabupaten Tapanuli Utara karena keterbatasan tersedia sarana mobil keliling perpustakaan.

b. Tantangan yang dihadapi bidang Kearsipan:
   1. Belum optimalnya kerjasama pengelola kearsipan antar OPD;
   2. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola kearsipan;
   3. Belum satu pemahaman dan kesetaraan pemikiran aparatur terhadap arti pentingnya arsip sehingga kearsipan kurang mendapat perhatian
   4. Sarana kerja untuk pengelolaan arsip masih belum memadai;
   5. Belum adanya sistem kearsipan *(e-Archive);*
   6. Belum memiliki ruang transit Arsip dan Depo Arsip.

2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara ke depan antara lain :

a. Dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemerintahan berbasis TIK *(e-Government)* terbuka peluang bagi Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara untuk menyediakan Pelayanan Perpustakaan berbasis TIK *(e-Perpustakan)* dan Pelayanan Kearsipan berbasis TIK, kearsipan *(e-Archive);*

b. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara dapat menjadi simpul pemersatu bangsa dan sumber naskah arsip bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana motto ANRI, melalui akuisisi arsip-arsip penting (asli/salinan/fotocopy) OPD yang direncanakan akan disimpan di Depo Arsip Kabupaten Tapanuli Utara ;

c. Rekam jejak *(track record)* berbagai kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dapat ditelusuri melalui pendokumentasian kegiatan-kegiatan penting Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ;
d. Merintis pelayanan perpustakaan berbasis IT yang terintegrasi : Katalog online, Sirkulasi menggunakan IT.
e. Menambah armada layanan mobil perpustakaan keliling.
f. Promosi layanan perpustakaan melalui brosur, poster, web dan facebook serta media sosial lainnya.
g. Dukungan anggaran untuk mewujudkan sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai tuntutan yang diharapkan organisasi Pemerintah dan masyarakat ke depan.

2.6 Review terhadap Rancangan RKPD

Adapun hasil perbandingan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam Renja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara tertuang pada **Tabel 2.5** di bawah ini.

Tabel 2.5

REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH- PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Sumber Dana	Catatan Penting
						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Hasil)/ Kegiatan (Keluaran)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Hasil)/ Kegiatan (Keluaran)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1						**DINAS PERPUSTAKAAN**				**4.122.155.009**					**3.726.349.784**		
	2	23				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**4.072.155.409**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**3.706.349.784**		
	2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani**	Dinas Perpustakaan	100%	**3.551.294.384**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani**	Dinas Perpustakaan	100%	**3.456.278.784**	P-APBD	
	2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		100%	**26.370.900**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		100%	**14.118.900**	P-APBD	
	2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan	2 Dokumen	4.998.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan	2 Dokumen	2.500.000	P-APBD	
	2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan	1 Dokumen	1.843.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan	1 Dokumen	1.843.900	P-APBD	
	2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perpustakaan	1 Dokumen	4.978.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dinas Perpustakaan	1 Dokumen	2.500.000	APBD	
	2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan	12 Laporan	14.550.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan	12 Laporan	7.275.000	P-APBD	
	2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dinas Perpustakaan	100%	**3.079.461.366**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan**	Dinas Perpustakaan	100%	**3.077.990.866**	P-APBD	
	2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan	12 bulan (39 orang/bulan)	3.043.131.266	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan	35 orang/bulan	3.043.131.266	P-APBD	
	2	23	01	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perpustakaan	12 Dokumen	32.859.600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dinas Perpustakaan	12 Dokumen	32.859.600	APBD	
	2	23	01	2.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perpustakaan	1 Laporan	3.470.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perpustakaan	1 Laporan	2.000.000	P-APBD	
	2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang terlaksana**		100%	**135.486.850**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang**		100%	**68.113.650**	P-APBD	
	2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi disediakan	Dinas Perpustakaan	1 Paket	1.888.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Dinas Perpustakaan	1 Paket	1.888.800	P-APBD	
	2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Perpustakaan	1 Paket	29.664.150	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Dinas Perpustakaan	1 Paket	16.519.150	P-APBD	
	2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas Perpustakaan	12 Paket	10.656.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas Perpustakaan	12 Paket	5.000.000	P-APBD	
	2	23	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Dinas Perpustakaan	12 Paket	10.458.400	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Dinas Perpustakaan	12 Paket	5.229.200	P-APBD	
	2	23	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dinas Perpustakaan	500 dok	6.314.500	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dinas Perpustakaan	500 dok	3.905.500	APBD	
	2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perpustakaan	95 Laporan	76.505.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perpustakaan	70 Laporan	35.571.000	P-APBD	
	2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Dinas Perpustakaan**	100%	**5.602.300**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Dinas Perpustakaan**	0	0	P-APBD	
	2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Dinas Perpustakaan	1 Unit	5.602.300	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Dinas Perpustakaan	0	0	P-APBD	

	2	**23**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani**	Dinas Perpustakaan	100%	**265.763.968**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani**	Dinas Perpustakaan	100%	**265.763.968**	P-APBD	
	2	23	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perpustakaan	12 Laporan	150.000	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perpustakaan	12 Laporan	150.000	APBD	
	2	23	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Perpustakaan	36 Laporan	36.596.500	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Perpustakaan	36 Laporan	36.596.500	P-APBD	
	2	23	01	2.08	04		Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perpustakaan	12 Laporan	229.017.468	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perpustakaan	12 Laporan	229.017.468	P-APBD	
	2	**23**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100%	**38.609.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		100%	**30.291.400**	P-APBD	
	2	23	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Perpustakaan	4 Unit	36.043.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Perpustakaan	4 Unit	29.370.400	P-APBD	
	2	23	01	2.03	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Dinas Perpustakaan	3 Unit	2.565.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinas Perpustakaan	2 Unit	921.000	P-APBD	
	2	**23**	**02**				**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	Dinas Perpustakaan	**2,90%**	**520.861.025**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan**		**4,90%**	**250.071.000**	P-APBD	
	2	**23**	**02**	**2.01**			**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jenis Layanan yang dikelola oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara**	Dinas Perpustakaan	9 Layanan	470.790.025	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jenis Layanan yang dikelola oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Tapanuli**		9 Layanan	200.000.000	P-APBD	
	2	**23**	**02**	**2.01**	**01**		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Dinas Perpustakaan	2 Layanan	79.590.000	**Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik**	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	**Dinas Perpustakaan**	2 Layanan	**50.000.000**	P-APBD	
	2	**23**	**02**	**2.01**	**02**		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Dinas Perpustakaan	180 Perpustakaan	231.644.525	**Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai	Dinas Perpustakaan	180 Perpustakaan	**100.000.000**	P-APBD	
	2	**23**	**02**	**2.01**	**09**		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	27.000 eksemplar	159.555.500	**Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka**	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman	Dinas Perpustakaan	27.000 eksemplar	**50.000.000**	P-APBD	
	2	**23**	**02**	**2.02**			**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah masyarakat/pelajar yang berprestasi gemar membaca**	Dinas Perpustakaan	6 orang	**50.071.000**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah masyarakat/pelajar yang berprestasi gemar membaca**		6 orang	**50.071.000**	P-APBD	
	2	**23**	**02**	**2.02**	**01**		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah lokus Pembudayaan Kegemaran membaca dan literasi pada Satuan Pendidikan	Dinas Perpustakaan	2 Lokus	50.071.000	**Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat**	Jumlah lokus Pembudayaan Kegemaran membaca dan literasi pada Satuan Pendidikan	Dinas Perpustakaan	2 Lokus	50.071.000	P-APBD	
3	**2**	**24**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						
	2	**24**	**02**				**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Pengelolaan Arsip Daerah**	**Dinas Perpustakaan**	**35%**	**49.999.600**	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase arsip daerah yang diselamatkan**	**Dinas Perpustakaan**	**30%**	**20.000.000**	P-APBD	
	2	**24**	**02**	**1.01**			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola secara baku	Dinas Perpustakaan	50%	49.999.600	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola secara baku	Dinas Perpustakaan	50%	20.000.000	P-APBD	
	2	**24**	**02**	**1.01**	**01**		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	Dinas Perpustakaan	55 Berkas	49.999.600	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	Dinas Perpustakaan	55 Berkas	20.000.000	P-APBD	
	2	**24**	**02**	**1.01**	**03**		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota											

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dari masyarakat yang merupakan salah satu instrumen penyusunan perencanaan pembangunan dengan sistem partisipasi langsung masyarakat dengan melalui Musrenbang yang dimulai dengan Musrenbang tingkat lingkungan/dusun, Kelurahan/Desa, Kecamatan serta kabupaten sampai dengan musrenbang tingkatnasional.

Berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten yang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara, tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM maupun asosiasi-asosiasi yang langsung ditujukan kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi pada tahap ini Dinas Perpustakaan tidak melakukan penelahaan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Identifikasi arah kebijakan dan strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 43 Tahun 2007. Berdasarkan BAB VII Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Pasal 74 bahwasanya:

a. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui :
   1. Gerakan nasional gemar membaca;
   2. Penyediaan buku murah dan berkualitas;
   3. Pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
   4. Pengadaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu;
   5. Taman bacaan masyarakat;
   6. Rumah baca;
   7. Kegiatan sejenis lainnya.
b. Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
c. Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghargaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Salah satu ayat pada pasal 74 point1 sampai dengan 7 yang berkaitan dengan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yakni pengadaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu, pembentukan taman bacaan dan rumah baca bagi masyarakat sebagai sarana yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pada Bab VIII Kewajiban Penyelenggaraan Perpustakaan, Pasal 80 penyelenggara perpustakaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk :

a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah.
b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing masing.
c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.

d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.
e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah
f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pada pasal 81 memuat sanksi bagi pemerintah provinsi dan dan kabupaten/kota yang melanggar ketentuan pasal 80 dikenai sanksi administratif berupa :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian bantuan pembinaan.

3.2 Tujuan Dinas Perpustakaan

Perumusan visi dan misi jangka menengah Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Adapun Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara di dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara termasuk dalam Misi ke-3 yaitu Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan dan Misi ke-8 yaitu:Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan sistem E-Government.

Sejalan dengan Misi ke-3 dan Misi ke-8 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara maka fungsi yang diemban Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dan sasaran organisasi yang diinginkan untuk diwujudkan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses penetapan Visi dan Misi. Perencanaan yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program

operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi, perlu dicermati dengan sebaik-baiknya.

Untuk menjabarkan dan mengimplementasi dari Visi dan Misi sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini diuraikan tujuan Dinas Perpustakaan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, yaitu: Memenuhi standar Pendidikan.

3.3 Sasaran Dinas Perpustakaan

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Tujuan Dinas Perpustakaan Tapanuli Utara yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu:

1. **Sasaran Pertama dari Tujuan Dinas Perpustakaan: "Meningkatkan Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara".**

   Tujuan Pertama Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara yaitu meningkatkan Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara, dimana hal ini dapat dicapai dengan cara meningkatkan persentase jumlah Perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara yang telah mendapatkan pembinaan mengenai pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

2. **Sasaran Kedua dari Tujuan Dinas Perpustakaan: " Meningkatkan tata kelola kearsipan yang baku pada perangkat daerah di Kab.Tapanuli Utara".**

   Sasaran Kedua Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara ialah Meningkatkan tata kelola kearsipan yang baku pada perangkat daerah di Kab.Tapanuli Utara yang dapat diukur melalui persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku.

3. **Sasaran Ketiga dari Tujuan Dinas Perpustakaan ialah : "Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah".**

   Sasaran Ketiga dari Tujuan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara ialah meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah yang dapat diukur melalui pencapaian Nilai Hasil AKIP Perangkat Daerah dan Persentase temuan BPK/Inspektorat yang telah ditindaklanjuti.

Tujuan dan sasaran organisasi yang diinginkan untuk diwujudkan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses penetapan Visi dan Misi. Perencanaan yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi, perlu dicermati dengan sebaik-baiknya.

Untuk menjabarkan dan mengimplementasi dari Visi dan Misi sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini diuraikan tujuan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, yaitu

a. Meningkatkan sumber daya manusia pengelola perpustakaan dan kearsipan;
b. meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pemakai perpustakaan
c. Meningkatkan minat baca masyarakat
d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sistem pembinaan perpustakaan dan kearsipan yang baik
e. Terwujudnya Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan jaringan terpadu yang efektif
f. Melestarikan hasil karya budaya bangsa dalam bentuk karya cetak dan karya rekam.

Adapun target kinerja daripada tujuan dan sasaran strategis Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara mengalami perubahan untuk tahun anggaran 2024. Penetapan target kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisis internal maupun ekternal baik faktor pendorong/penghambat dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan perubahan target kinerja di Tahun 2024 untuk indikator strategis pada Tujuan Pertama sesuai Perubahan rencana strategis Dinas Perpustakaan, dimana target kinerja sasaran startegis yang akan dicapai tidak lagi bernilai sama dengan yang telah dituangkan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Tahun 2024.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara seperti yang tertuang pada Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Tabel 3.1** dibawah ini:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kelompok Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Memenuhi standar pendidikan	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Meningkatkan Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase peningkatan jumlah pembinaan perpustakaan	Perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah perpustakaan yang telah dilakukan pembinaan / Jumlah perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara x 100%	%	1,5	1,5	1,3	1,9	2,4	2,8
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	Perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah koleksi perpustakaan yang tersedia (eksemplar) / jumlah penduduk di wilayahnya x 100	Nilai	8,35	8,68	9,01	9,34	9,67	10
			Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	*Sesuai dengan Hasil Penilaiam oleh Inspektorat Daerah*	Nilai	60	60	70	70	72	75
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola kearsipan yang baku pada perangkat daerah di Kab.Tapanuli Utara	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku / jumlah perangkat daerah x 100%	%	48,89	48,89	48,89	51,1	53,33	55,56

Tabel 3.2

Perubahan target Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kelompok Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Memenuhi standar pendidikan	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Meningkatkan Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase peningkatan jumlah pembinaan perpustakaan	Perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah perpustakaan yang telah dilakukan pembinaan / Jumlah perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara x 100%	%	1,5	1,5	1,3	1,9	2,4	40,44
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	Perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah koleksi perpustakaan yang tersedia (eksemplar) / jumlah penduduk di wilayahnya x 100	Nilai	8,35	8,68	9,01	9,34	9,67	8,51
			Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	*Sesuai dengan Hasil Penilaiam oleh Inspektorat Daerah*	Nilai	60	60	70	70	72	68
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola kearsipan yang baku pada perangkat daerah di Kab.Tapanuli Utara	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku / jumlah perangkat daerah x 100%	%	48,89	48,89	48,89	51,1	53,33	55,56

Pada Tabel 3.2 diatas jelas terdapat perubahan target kinerja pada sasaran strategis perpustakaan. Adapun perubahan target sasaran strategi dilakukan berhubung :

1. Pencapaian realisasi target kinerja yang telah melebihi angka 100%. Hal ini telah terjadi selama 3 tahun berturut-turut pada Indikator sasaran strategis persentase peningkatan jumlah pembinaan perpustakaan yaitu:
   - pada tahun 2021 capaian target kinerja telah sebesar 2,73% sementara target kinerja sebesar 1,3% sehingga atau dengan rasio capaian sebesar 210%;
   - pada tahun 2022 capaian target kinerja telah sebesar 15,27% sementara target kinerja sebesar 1,9% sehingga atau dengan rasio capaian sebesar 803%;
   - pada tahun 2022 capaian target kinerja telah sebesar 29,96% sementara target kinerja sebesar 2,4% sehingga atau dengan rasio capaian sebesar 1.248%;

   Dengan adanya capaian yang sudah jauh melampaui target yang telah ditetapkan selama 3 tahun berturut-turut maka di tahun 2024 Dinas Perpustakaan memutuskan mengubah target kinerja persentase peningkatan jumlah pembinaan perpustakaan dari **2,8%** menjadi **40,44%.**

Tabel 3.3
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021-2023
Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan Perpustakaan

No	Tahun	Target Indikator sasaran (%)	Jumlah perpustakaan yang dibina	Jumlah Perpustakaan	Realisasi Indikator sasaran(%)	Rasio Capaian Indikator(%)
1.	2021	1,3	7	256	2,73	210
2.	2022	1,9	40	262	15,27	803
3.	2023	2,4	80	267	29,96	1.248

2. Realisasi pencapaian target indikator strategis yang tidak bisa diperoleh optimal secara 3 tahun berturut-turut yaitu pada indikator sasaran strategis Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dan Nilai Hasil Evaluasi AKIP.

   Adapun hal yang menyebabkan perubahan target kineja indikator sasaran strategis ini ialah:

   a) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan

   Realisasi pencapaian target kinerja selama 3 tahun berturut turut tidak dapat dicapai optimal yaitu: pada tahun 2021 target sebesar 9,01 sementara realisasi 8,35 atau dengan rasio capaian sebesar 92%; pada tahun 2022 target 9,34 sementara realisasi

kinerja sebesar 8,36 atau dengan rasio capaian 89% dan di tahun 2023 target kinerja sebesar 9,67 sementara realisasi kinerja sebesar 8,48 atau dengan rasio capaian 87%. Dari penjelasan diatas nampak tren menurun daripada capaian realisasi kinerja untuk indikator sasaran strategis rasio ketercukupan koleksi perpustakaan, hal ini salah satu disebabkan adanya refocusing anggaran sehingga perencanaan untuk peningkatan jumlah koleksi perpustakaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Perpustakaan. Sementara itu adanya sumbangan buku dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara maupun sumbangan buku dari masyarakat ke Dinas Perpustakaan telah membantu peningkatan capaian realisasi kinerja untuk indikator sasaran ini.

Melalui penjelasan diatas maka dalam rangka memperoleh capaian realisasi kinerja yang maksimal maka Dinas Perpustakaan merubah target kinerja di tahun 2024 yang semula bernilai **10** diganti menjadi **8,51.**

Tabel 3.4
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021-2023
Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan

No	Tahun	Target Indikator sasaran (%)	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	Jumlah Penduduk	Realisasi Indikator sasaran(%)	Rasio Capaian Indikator(%)
1.	2021	9,01	26.331	315.222	8,35	92
2.	2022	9,34	26.874	321.514	8,36	89
3.	2023	9,67	27.648	326.197	8,48	87

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perpustakaan

b) Nilai Hasil Evaluasi AKIP

Adapun Nilai Hasil Evaluasi AKIP yang diperoleh oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara selama 2 tahun berturut-turut tidak mencapai target yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2021 target Nilai Hasil Evaluasi AKIP sebesar 70 dengan realisasi capaian kinerja 54,70 (Predikat CC/cukup) atau rasio capain kinerja sebesar 78%, sementara tahun 2022 target Nilai Hasil Evaluasi AKIP sebesar 70 dengan realisasi capaian kinerja 59,71 (Predikat CC/Cukup) atau sebesar 85%. Melalui realisasi capaian yang belum maksimal ini maka Dinas Perpustakaan

merubah target Nilai Hasil evaluasi AKIP 75 (Predikat BB/Sangat Baik) menjadi Nilai 68 (predikat B/Baik).

Sementara itu berdasarkan Hasil Penilaian Inspektorat terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan maka faktor -faktor yang menyebabkan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara belum mendapatkan penilaian Predikat Baik (B) sampai 2 tahun berturut-turut ialah:

- Dokumen Perencanaan Kinerja belum memuat informasi perbaikan/penyempurnaan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik sesuai target yang direncanakan dalam RPJMD maupun renstra seperti:peningkatan inovasi maupun peningkatan program kerja dalam upaya mencapai target kinerja.
- Belum adanya SOP Pengukuran Kinerja baik dalam bentuk kebijakan *reward* maupun *punishment* dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maupun laporan capaian kinerja sehingga menyebabkan kurangnya perhatian dan tanggung jawab unit/bidang kerja maupun pegawai dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja maupun laporan kinerja;
- Adanya Refocusing anggaran yang menyebabkan banyak program kerja/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya akan dilaksanakan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 3.5
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022-2023
Nilai Hasil Evaluasi AKIP

No	Tahun	Target Indikator sasaran (Nilai)	Realisasi Indikator sasaran (Nilai)	Rasio Capaian Indikator(%)
1.	2021	70	54,70	78
2.	2022	70	59,71	85

Sumber Data: Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara, 2023

3.4 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Pada Tahun 2023 penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah, dimana seluruh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan telah diinput secara online melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan telah berlaku juga untuk seluruh Instansi di Republik Indonesia.

Program pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara guna mencapai tujuan dan sasaran. Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara :

1. Memperhatikan kepentingan masing-masing bidang, sub bagian, dan kepala seksi.
2. Memperhatikan program kerja kabupaten Tapanuli Utara.
3. Mempertimbangkan keadaan masa lampau, kini, dan masa yang akan dating, termasuk didalamnya unsur-unsur yang diperhatikan terkait orientasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
4. Memperhatikan skala prioritas yang menunjang visi dan misi
5. Memperhatikan realisasi setiap tahun rencana strategis Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun Program Kerja yang Dimaksud untuk dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Kepmen 050-3708 Tahun 2020 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pengelolaan Arsip;

Sedangkan penjabaran kegiatan dari Program-Program yang dimaksud yaitu:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan terdiri dari :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut:
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut:
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan terdiri dari :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan terdiri dari:
   - Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

B. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN, yang terdiri dari;

1. Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
      - Penyediaan Jasa ICT
      - Penyediaan E-book
   b. Sub Kegiatan: Pengembangan Perpustakaan di Tingkat daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
      - Operasional MPK
      - Koordinasi, Pembinaan dan Supervisi pada Perpustakaan Umum,Khusus dan Perpustakaan Sekolah
      - Pengelola Pelayanan Perpustakaan
      - Jasa Administrasi UPTD Siborong-borong
      - Jasa Administrasi UPTD Pangaribuan
      - Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
      - Pembuatan ID Card Anggota Perpustakaan
      - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Perpustakaan Daerah.
   c. Sub Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut:
      - Pengolahan dan Penataan Bahan Koleksi Pustaka;
      - Pengadaan Buku

C. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP, yang terdiri dari:

1. Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan : Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis, dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
      - Pembinaan Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Tapanuli Utara.
   b. Sub Kegiatan : Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :
      - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota.

BAB IV.
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2024

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai intrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Renstra (Rencana Strategis 2019-2024) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (Outcome) suatu program.

Program dan Kegiatan prioritas pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 berisi tentang program dan kegiatan untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dan perkiraan maju Tahun 2024 disajikan pada **Tabel 4.1** di bawah ini:

Tabel 4.1

RENCANA KERJA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 SERTA PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Kode						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Hasil)/ Kegiatan (Keluaran)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							DINAS PERPUSTAKAAN				**3.440.905.014**				**3.886.463.968**
1	**2**	**23**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang yang tertangani**	Dinas Perpustakaan	100 Persen	**3.170.834.189**	APBD	Utama	12 Bulan	**3.320.463.968**
	2	**23**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tertangani**	Dinas Perpustakaan	100 Persen	**14.118.300**	APBD			**26.150.000**
	2	23	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan	2 Dokumen	2.499.700	APBD	Utama	2 Dokumen	5.000.000
	2	23	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan	1 Dokumen	1.843.900	APBD	Utama	1 Dokumen	1.650.000
	2	23	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perpustakaan	1 laporan	2.499.700	APBD	Utama	1 Dokumen	4.500.000
	2	23	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan	12 Laporan	7.275.000	APBD	Utama	12 Laporan	15.000.000
	2	**23**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertangani**	Dinas Perpustakaan	100 Persen	**2.792.549.371**	APBD			**2.838.800.000**
	2	**23**	**01**	**2.02**	**01**		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan	12 laporan (39 orang/bulan)	2.757.686.771	APBD	Utama	12 Laporan	2.795.000.000
	2	23	01	2.02	02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perpustakaan	12 Dokumen	32.859.600	APBD	Utama	12 Dokumen	40.800.000
	2	23	01	2.02	03		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perpustakaan	1 laporan	2.003.000	APBD	Utama	1 Laporan	3.000.000
	2	**23**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang tertangani**	Dinas Perpustakaan	100 Persen	**80.265.050**	APBD		100 Persen	**153.200.000**
	2	23	1	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi disediakan	Dinas Perpustakaan	1 paket	1.888.800	APBD	Utama	1 paket	4.000.000
	2	23	1	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Perpustakaan	2 paket	16.519.150	APBD	Utama	2 paket	34.000.000
	2	23	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas Perpustakaan	12 paket	4.991.000	APBD	Utama	12 paket	15.000.000
	2	23	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Dinas Perpustakaan	12 paket	5.581.600	APBD	Utama	12 paket	14.000.000
	2	23	01	2.06	06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dinas Perpustakaan	300 dok	3.905.500	APBD	Utama	700 dokumen	6.200.000
	2	23	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perpustakaan	70 laporan	47.379.000	APBD	Utama	110 laporan	80.000.000
	2	**23**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani**	Dinas Perpustakaan	100 Persen	**254.194.268**	APBD		100 Persen	**261.813.968**
	2	23	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perpustakaan	12 laporan	150.000	APBD	Utama	12 laporan	200.000
	2	23	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Perpustakaan	36 Laporan	25.026.800	APBD	Utama	36 Laporan	32.596.500
	2	23	01	2.08	04		Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perpustakaan	12 laporan	229.017.468	APBD	Utama	12 laporan	229.017.468
	2	**23**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani**	Dinas Perpustakaan	100 Persen	**29.707.200**	APBD		100 Persen	**40.500.000**
	2	23	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Perpustakaan	4 Unit	28.786.200	APBD	Utama	4 Unit	36.000.000
	2	23	01	2.03	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Perpustakaan	2 unit	921.000	APBD	Utama	2 Unit	4.500.000

2	2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
	2	23	02				Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	4,90%	250.070.825	APBD		5,10%	461.000.000
	2	23	02	2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Layanan yang dikelola oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Perpustakaan	9 Layanan	247.070.825	APBD	Utama	7 layanan	391.000.000
	2	23	02	2.01	01		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Dinas Perpustakaan	2 Layanan	50.334.200	APBD	Utama	2 layanan	73.500.000
	2	23	02	2.01	01	01	Penyediaan Jasa Information Communication Technology (ICT)	Jumlah Laporan rekening pembayaran wifi	Dinas Perpustakaan	12 Laporan	7.434.200	APBD	Utama	1 Laporan	8.500.000
	2	23	02	2.01	01	02	Pengadaan E-book	Jumlah paket pengadaan E-book	Dinas Perpustakaan	1 paket	42.900.000	APBD	Utama	1 paket	65.000.000
	2	23	02	2.01	02		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Dinas Perpustakaan	120 perpustakaan	152.440.225	APBD	Utama	200 perpustakaan	242.500.000
	2	23	2	2.01	02	01	Operasional MPK	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Operasional MPK	Dinas Perpustakaan	270 laporan	84.068.400	APBD	Utama	360 laporan	95.000.000
	2	23	2	2.01	02	02	Koordinasi, Pembinaan dan Supervisi pada Perpustakaan Umum,Khusus dan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Laporan Koordinasi, pembinaan dan supervisi pada perpustakaan umum, khusus, perpustakaan sekolah	Dinas Perpustakaan	45 laporan	37.479.950	APBD	Utama	60 laporan	45.000.000
	2	23	2	2.01	02	04	Jasa Administrasi UPTD Pahae	Jumlah laporan Jasa Administrasi UPTD Pahae yang tersedia	Dinas Perpustakaan	0	0	APBD	Utama	12 paket	3.000.000
	2	23	2	2.01	02	05	Jasa Administrasi UPTD Siborong-borong	Jumlah laporan Jasa Administrasi UPTD Siborong-borong yang tersedia	Dinas Perpustakaan	12 paket	4.024.950	APBD	Utama	12 paket	4.500.000
	2	23	2	2.01	02	06	Jasa Administrasi UPTD Pangaribuan	Jumlah laporan Jasa Administrasi UPTD Pangaribuan yang tersedia	Dinas Perpustakaan	12 paket	7.549.925	APBD	Utama	12 paket	15.000.000
	2	23	2	2.01	02	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	1 paket	700.000	APBD	Utama	1 paket	30.000.000
	2	23	2	2.01	02	08	Pembuatan ID Card Anggota Perpustakaan	Jumlah ID Card Anggota Perpustakaan yang dicetak	Dinas Perpustakaan	500 kartu	7.488.000	APBD	Utama	500 kartu	10.000.000
		23	2	2.01	02	09	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Perpustakaan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Perpustakaan Daerah	Dinas Perpustakaan	1 laporan	11.129.000	APBD	Utama	30 laporan	40.000.000
	2	23	02	2.01	09		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	27.000 eksm	44.296.400	APBD	Utama	28.500 eksm	75.000.000
	2	23	02	2.01	09	01	Pengolahan dan Penataan Bahan Koleksi Pustaka	Jumlah bahan koleksi pustaka yang diolah dan ditata	Dinas Perpustakaan	500 Eksemplar	7.778.900	APBD	Utama	600 eksemplar	10.000.000
	2	23	02	2.01	09	02	Pengadaan Buku	Jumlah Paket Pengadaan Buku Perpustakaan yang dilaksanakan	Dinas Perpustakaan	1 Paket	36.517.500	APBD	Utama	1 Paket	65.000.000
	2	23	02	2.02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/pelajar yang berprestasi gemar membaca	Dinas Perpustakaan	6 orang	3.000.000	APBD	Utama	6 orang	70.000.000
	2	23	02	2.02	01		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Dinas Perpustakaan	2 lokus	3.000.000	APBD	Utama	2 lokus	70.000.000
	2	23	02	2.02	01	01	Publikasi dan Sosialisasi Gemar Membaca	Jumlah peserta yang mengikuti lomba membaca bagi siswa sekolah dasar	Dinas Perpustakaan	15 orang	3.000.000	APBD	Utama	30 orang	20.000.000
	2	23	02	2.02	01	02	Lomba Cerita	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Cerita bagi siswa-siswa sekolah dasar	Dinas Perpustakaan	0	0	APBD	Utama	50 orang	50.000.000
3	2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
	2	24	02				Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan	35%	20.000.000	APBD	Utama	35%	105.000.000
	2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola secara baku	Dinas Perpustakaan	50%	20.000.000			50%	105.000.000
	2	24	02	2.01	01		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan digunakan	Dinas Perpustakaan	55 berkas	17.471.125	APBD	Utama	1200 berkas	85.000.000
	2	24	02	2.01	01	01	Pembinaan Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Perangkat Daerah yang menerima pembinaan dan pengelolaan arsip secara baku	Dinas Perpustakaan	4 OPD	17.471.125	APBD	Utama	17 OPD	85.000.000
	2	24	02	2.01	03		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan	4 Laporan	2.528.875	APBD	Utama	17 laporan	20.000.000
	2	24	02	2.01	03	01	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerang yang dilakukan kegiatan pengawasan arsip daerah	Dinas Perpustakaan	4 OPD	2.528.875	APBD	Utama	17 OPD	20.000.000

BAB V.
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019–2024. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 adalah dokumen perubahan terhadap perencanaan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2024, dimana memuat perubahan program, dan kegiatan pada tahun berjalan yang didasarkan pada kondisi perubahan anggaran daerah, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara .

Tujuan daripada Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ialah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya antara lain: memenuhi standar pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara melalui peningkatan Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Utara, meningkatan jumlah perangkat daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku serta meningkatkan nilai AKIP Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan juga sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan juga setiap staf Dinas Perpustakaan terhadap pelaksanaan program serta kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan pada tahun yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tarutung, Oktober 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

BUHA M. AUGUS SINAGA, S.P, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19730825 199803 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PERPUSTAKAAN

Jl. Sisingamangaraja No. 198 Tarutung 22411
Website: http://www.taputkab.go.id; email: perpustaput@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR: 000.9.2/ 13.a / 9 / X / 2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan perlu disusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P)Dinas Perpustakaan;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli U.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang–Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentag Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undnag-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarea Republik Inonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunh 2019, Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dam Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tatat Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 –2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Menetapkan :

Kesatu : Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Tapanuli Utara;

Kedua : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan sebagai acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tarutung
Pada tanggal : 3 Oktober 2024

KEPALA DINAS

BUHA M. AUGUS SINAGA, S.P, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19730825 199803 1 003

RENCANA KERJA
(RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen 6
1.4. Maksud dan Tujuan 7
1.5. Sistematika Penulisan 8

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD 9
2.2 Analisis Kinerja Palayanan SKPD 18
2.3 Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD 29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB III Tuujan, sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 42
3.3. Program dan Kegiatan 43

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan 53

BAB V Penutup 236

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024.

Krisis kesehatan global yang terjadi pada triwulan pertama tahun 2020 berdampak tidak hanya pada kinerja perekonomian global dan dalam negeri namun, juga pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Diterapkannya lockdown di beberapa negara dan pembatasan sosial di Indonesia telah mengganggu kinerja dunia usaha yang. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat dan terhentinya kegiatan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan

kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, upaya pemerintah dalam mencegah serta menanggulangi penyebaran Covid-19 melalui realokasi dan realisasi percepatan anggaran berpotensi menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut.

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, Rencana Kerja Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan Rencana Kerja merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini akan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, target indikator kinerja dan kerangka pendanaan pembangunan. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD akan digunakan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Mengingat Rencana Kerja merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Rencana Kerja

Tahun 2024 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJP Nasional, RPJMN, RKP, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RKPD Provinsi Sumatera Utara, RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dan terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara.;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disiase;
19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah(SIPD) (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 Tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005- 2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan

daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun Rencana Kerja merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu produk perencanaan, Rencana Kerja Perubahan tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Rencana Kerja Perubahan ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-OPD, (4) RKPD dan (5) Renja-OPD. Secara substansi, keberadaan Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dimaksudkan sebagai upaya melakukan penyesuaian atas perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
2. Tersedianya acuan untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari :

BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab V Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBD adalah :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

V Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

VI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 Pengadaan Mebel
2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

IX Peningkatan Pelayanan BLUD

1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

I Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
4 Pengadaan Obat, Vaksin (FARMASI)
5 Pengadaan Bahan Habis Pakai
6 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serat Fasilitas Kesehatan Lainnya

II Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
17 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
18 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
19 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (HIBAH IBI, HIBAH YKI)
20 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
21 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
22 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
22 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota

III Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

III Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota

1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
2 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kessehatan

I Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota

1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

II Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kbupaten/Kota

1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

III Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan

1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan

4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

I Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

II Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan kelas I tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

2 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga

III Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

IV Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

V Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

I Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tabel TC-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Pada Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2021)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022							Target Program dan Kegiatan (Renja 2023)			Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023			
									Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022			Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4			5			6			7			8.00	9			10			11
			K	Satuan		K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	%	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Pemerintahan Daerah Terlaksana	100	persen	281,801,533,296	100	persen	61,499,175,627	100	persen	65,352,468,696	100	persen	64,924,433,607	863	100	persen	100,098,243,736	100	persen	191,299,934,080	100
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan	18 dok, 15 lap	Dokumen, Laporan	382,097,900	10	dokumen, laporan	97618000	4 dok, 3 lap	dokumen, laporan	66957000	4 dok, 3 lap	dokumen, laporan	Rp66,575,000	99.43	5 dok, 2 lap	dokumen, laporan	323640000	13 dok, 21 lap	dokumen, laporan	231150000	5 dok, 6 lap
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10	Dokumen	104,800,000	4	Dokumen	7208000	4	Dokumen	Rp25,950,000	4	Dokumen	Rp25,588,000	100.00	1	Dokumen	64800000	9	Dokumen	58746000	90
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	10,000,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	1	Dokumen	5000000	1	Dokumen	0	50
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	10,000,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	1	Dokumen	5000000	1	Dokumen	0	50
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	10,000,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	1	Dokumen	5000000	1	Dokumen	0	50
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	10,000,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	1	Dokumen	5000000	1	Dokumen	0	50
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5	Laporan	34,507,900	2	Laporan	7500000	1	Laporan	Rp6,057,000	1	Laporan	Rp6,057,000	100.00	1	Laporan	5000000	4	Laporan	19614000	80
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10	Laporan	202,790,000	4	Laporan	82910000	2	Laporan	Rp34,950,000	2	Laporan	Rp34,930,000	100.00	2	Laporan	233840000	8	Laporan	152790000	80
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	3745 org, 5 lap, 5 dok	org, lap, dok	247,339,193,600	1430 org, 2 lap, 2 dok	org, lap, dok	56895165788	745 org, 1 lap, 1 dok	org, lap, dok	Rp55,519,853,639	745 org, 1 lap, 1 dok	org, lap, dok	Rp55,230,080,214	100.00	746 Org, 3 dok, 1 lap	dokumen	92649776354	#VALUE!	dokumen	167645099641	#VALUE!
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3,725	orang	123,959,386,000	1,490	orang	56405264388	745	orang	Rp55,189,722,639	745	orang	Rp54,907,399,174	100.00	745	Orang/bulan	92320259954	2,980	Orang/bulan	166502386201	80
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	5	Laporan	122,557,325,200	2	Laporan	477901600	1	Laporan	Rp324,131,200	1	Laporan	Rp316,681,240	100.00	12	Dokumen	324516400	15	Dokumen	1118714040	300
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dokumen	822,482,400	2	Dokumen	11999800	1	Dokumen	Rp5,999,800	1	Dokumen	Rp5,999,800	100.00	1	Laporan	5000000	4	Laporan	23999400	80
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah	5	Laporan	480,018,800	2	Laporan	59999900	1	Laporan	80000000	1	Laporan	79560000	100.00	2	Laporan	80000000	5	Laporan	219559900	100
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	5	Laporan	480,018,800	2	Laporan	59999900	1	Laporan	Rp80,000,000	1	Laporan	Rp79,560,000	100.00	2	Laporan	80000000	5	Laporan	219559900	100
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepagawaian yang diselenggarakan	5	Dokumen	158,875,500	2	Dokumen	102955500	1	Dokumen	45000000	1	Dokumen	44529145	100.00	0	-	0	3	-	192484645	60
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dokumen	158,875,500	2	Dokumen	102955500	1	Dokumen	Rp45,000,000	1	Dokumen	Rp44,529,145	100.00	0	-	-	3	-	192484645	60

1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		paket, dok, lap			paket, dok, lap			paket, dok, lap			paket, dok, lap			34 paket, 45 dokumen, 42 laporan	paket, dok, lap	396986200		paket, dok, lap	0	#DIV/0!
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	15	paket	233,369,000	2	paket	65369000	1	paket	Rp28,000,000	1	paket	Rp21,288,300	100.00	9	Paket	35000000	12	Paket	114657300	80
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	50	paket	277,936,600	2	paket	64995800	33	paket	Rp75,197,100	33	paket	Rp75,176,400	100.00	12	Paket	60980100	47	Paket	215369300	94
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	40	paket	164,967,800	2	paket	53978600	17	paket	Rp35,160,400	17	paket	Rp34,891,975	100.00	7	Paket	30003000	26	Paket	124030975	65
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	15	paket	197,004,400	2	paket	43984500	7	paket	Rp45,010,600	7	paket	Rp45,005,125	100.00	6	Paket	51006100	15	Paket	134000225	100
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	dokumen	30,967,800	4	dokumen	8375000	2	dokumen	Rp4,990,000	2	dokumen	Rp4,940,000	100.00	2	Dokumen	10000000	8	Dokumen	18305000	80
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makanan dan Minuman)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2130	Laporan	262,514,000	852	Laporan	91880500	426	Laporan	Rp42,476,000	426	Laporan	Rp42,467,000	100.00	12	Laporan	29997000	1,290	Laporan	176823500	60.56338028
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	200	Laporan	906,473,300	20	Laporan	318161496	50	Laporan	Rp134,975,000	50	Laporan	Rp133,428,850	100.00	30	Laporan	180000000	100	Laporan	586565346	50
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	207	0	1170877400	0	unit	0	77	unit	258677400	69	unit	217466450	89.61	60	unit	150000000	129	0		
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	157	unit	480,000,000	0	unit	0	62	unit	Rp80,000,000	54	unit	Rp45,059,600	87.10	56	Unit	100000000	110	Unit	125059600	70.06369427
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	50	unit	690,877,400	0	unit	0	15	unit	Rp178,677,400	15	unit	Rp172,406,850	100.00	4	Unit	50000000	19	Unit	351084250	38
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penunjang umum yang diselenggarakan	77	0	29092497407	26	Laporan	3906508350	17	Laporan	8460383657	17	Laporan	8385301694	100.00	583	Laporan	5773352450	626	Laporan	20752193701	812.987013
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	2,225,720,548	24	Laporan	316008350	12	Laporan	Rp346,606,798	12	Laporan	Rp344,698,309	100.00	12	Laporan	297342850	48	Laporan	1007313457	80
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	Laporan	26,866,776,859	2	Laporan	3590500000	5	Laporan	Rp8,113,776,859	5	Laporan	Rp8,040,603,385	100.00	4	Laporan	5476009600	11	Laporan	19744880244	64.70588235
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	425	0	2810250089	106	unit	436928089	187	unit	921597000	176	0	900921104	273.8095238	53	unit	624488732	335	unit	2259446193	78.82352941
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	210	Unit	2,368,578,889	84	Unit	367230489	42	Unit	Rp806,608,400	31	Unit	Rp785,932,504	73.81	42	Unit	474997832	157	Unit	1959771393	74.76190476
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	243,748,800	6	Unit	41734400	1	Unit	Rp41,999,400	1	Unit	Rp41,999,400	100.00	3	Unit	75000000	10	Unit	125733200	66.66666667
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200	unit	197,922,400	16	unit	27963200	144	unit	Rp72,989,200	144	unit	Rp72,989,200	100.00	8	Unit	74490900	168	Unit	173941600	84
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah FKTP yang BLUD	4	unit	367,722,600	0	unit	0								2	Unit Kerja	100000000	2	Unit Kerja	0	50
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	FKTP yang BLUD	4	unit	367,722,600	0	unit	0	0	unit	Rp167,722,600	0	unit	Rp151,773,016	0.00	2	Unit Kerja	100000000	2	Unit Kerja	319495616	50
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	100	persen		100	persen		100	persen		100	persen			100	persen		300	persen	0	300
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia	600 unit, 474 paket	unit, paket	56,896,220,657	281 unit, 167 paket	unit, paket	14817344693		unit, paket	Rp12,127,523,000		unit, paket	Rp10,357,784,060	100.00	161 unit, 254 paket	unit, paket	20245361000	440 paket, 555 unit	unit, paket	37302651753	#VALUE!
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400	unit	6,086,017,200	281	unit	3955794284	80	unit	Rp719,248,000	80	unit	Rp646,598,000	100.00	4	unit	1690000000	365	unit	5321640284	91.25

1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400	paket	27,479,214,464	139	paket	5560256296	70	paket	Rp7,060,866,000	70	paket	Rp5,981,728,670	100.00	157	paket	14102085000	366	paket	18602850966	91.5
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Tersedianya Obat dan Vaksin	5	paket	13,718,025,493	2	paket	4881925413	1	paket	Rp1,950,997,000	1	paket	Rp1,729,343,750	100.00	1	paket	1940783000	4	paket	8562266163	80
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Tersedianya Bahan Habis Pakai	5	paket	8,589,203,000	2	paket	74404250	1	paket	Rp2,152,574,000	1	paket	Rp1,781,360,640	100.00	1	paket	4062070000	4	paket	4008338890	80
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serat Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan	84	paket	1,023,760,500	24	paket	344964450	12	paket	Rp151,788,000	21	paket	Rp130,138,000	175.00	21	paket	140423000	66	paket	626890450	78.57142857
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat yang Dikalibrasi	200	Unit	0	0	Unit	0	190	Unit	Rp92,050,000	190	Unit	Rp88,615,000	100.00	0	Unit	0	190	Unit	180665000	95
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia	27	layanan															0	0	0	0
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	27316	orang	1,267,410,400	6,829	orang	138508100	4,699	orang	Rp966,830,400	4699	orang	Rp911,485,200	100.00	6788	orang	289123500	18,316	orang	2016823700	67.05227705
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	32590	orang	6,903,733,100	13,036	orang	5040968625	4111	orang	Rp2,156,246,400	4111	orang	Rp1,839,290,775	100.00	6480	orang	246650000	23,627	orang	9036505800	72.49769868
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	24832	orang	181,920,000	12,016	orang	43649000	4133	orang	Rp290,922,100	4133	orang	Rp264,634,230	100.00	6171	orang	161461500	22,320	orang	599205330	89.88402062
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120,136	orang	1,787,843,500	30,034	orang	931900506	20764	orang	Rp499,618,200	19661	orang	Rp483,498,400	94.69	20462	orang	100520000	70,157	orang	1915017106	58.39798229
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	161,010	orang	193,051,000	0	orang	0	53670	orang	Rp390,677,500	53670	orang	Rp386,072,000	100.00	0	orang	0	53,670	orang	776749500	33.33333333
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	750,204	orang	397,800,000	234,432	orang	22400000	17290	orang	Rp95,000,000	17290	orang	Rp93,180,600	100.00	17290	orang	271000000	269,012	orang	210580600	35.85851315
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	409,004	orang	894,400,000	102,251	orang	359864115	36658	orang	Rp611,018,800	36570	orang	Rp594,656,517	99.76	36912	orang	321753600	175,733	orang	1565539432	42.96608346
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	384,936	orang	289,000,000	96,234	orang	50000000	5606	orang	Rp186,867,900	5606	orang	Rp186,486,900	100.00	46697	orang	179814000	148,537	orang	423354800	38.5874535
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	"Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	7492	orang	242,000,000	0	orang	0	902	orang	Rp165,851,700	888	orang	Rp165,851,700	98.45	1860	orang	117865300	2,748	orang	331703400	36.6791244
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2245	orang	1,209,999,900	898	orang	519991175	450	orang	Rp356,508,700	425	orang	Rp356,448,700	94.44	452	orang	402306800	1,775	orang	1232948575	79.06458797
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2145	orang	630,634,600	858	orang	92287600	671	orang	Rp231,947,500	679	orang	Rp231,856,500	101.19	3285	orang	52000000	4,822	orang	556091600	224.8018648
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	23530	orang	590,551,200	4,706	orang	42486000	4,971	orang	Rp157,564,500	1125.88	orang	Rp157,263,500	22.65	8538	orang	50000000	14,370	orang	357314000	61.07046324
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	5	dokumen	1,491,357,350	2	dokumen	733519630	2	dokumen	Rp1,392,138,850	2	dokumen	Rp1,309,510,100	100.00	0	dokumen	0	4	dokumen	3435168580	80
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	105	dokumen	4,361,804,900	42	dokumen	1203946130	21	dokumen	Rp2,022,199,100	21	dokumen	Rp1,919,828,469	100.00	7	dokumen	467040200	70	dokumen	5145973699	66.66666667
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	105	orang	2,956,800,640	42	orang	112222500	21	orang	Rp134,742,200	21	orang	Rp128,512,200	100.00	4	orang	88990600	67	orang	375476900	63.80952381
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	105	Dokumen	4,778,030,088	42	Dokumen	1514017913	21	Dokumen	Rp1,421,051,150	21	Dokumen	Rp1,344,144,942	100.00	4	Dokumen	801116500	67	Dokumen	4279214005	63.80952381
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	105	dokumen	1,227,128,540	42	dokumen	551456700	12	dokumen	Rp1,496,106,800	12	dokumen	Rp1,474,258,600	100.00	5	dokumen	439632700	59	dokumen	3521822100	56.19047619
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	15	Dokumen	3,000,000,000	6	Dokumen	94653600	3	Dokumen	Rp2,570,315,100	3	Dokumen	Rp2,570,245,100	100.00	5	Dokumen	143431000	14	Dokumen	5235213800	93.33333333

1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus"	25	Dokumen	279,990,000	10	Dokumen	34950000	3	Dokumen	Rp60,000,000	2	Dokumen	Rp49,970,000	66.67	3	Dokumen	165000000	15	Dokumen	144920000	60
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Sesuai Standar	550	orang	57,864,000	0	orang	0	466	orang	Rp58,064,000	466	orang	Rp57,864,000	100.00	0	orang	0	466	orang	115928000	84.72727273
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25	dokumen	2,060,364,300	10	dokumen	673739300	10	dokumen	Rp1,087,261,600	10	dokumen	Rp1,084,224,800	100.00	9	dokumen	581151900	29	dokumen	2845225700	116
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat"	182,500	Dokumen	129,912,964,356	34,432	Dokumen	32752815879	36,000	Dokumen	Rp32,561,270,985	72000	Dokumen	Rp27,641,818,498	200.00	37000	Dokumen	31114135200	143,432	Dokumen	92955905362	78.59287671
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas"	105	Dokumen	9,450,000,000	42	Dokumen	3696000000	21	Dokumen	Rp3,656,915,300	42	Dokumen	Rp3,601,572,608	200.00	21	Dokumen	17435652000	105	Dokumen	10954487908	100
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya"	105	Dokumen	9,450,000,000	42	Dokumen	3696000000	21	Dokumen	Rp188,509,500	2	Dokumen	Rp187,664,800	9.52	12	Dokumen	50000000	56	Dokumen	4072174300	53.33333333
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	"Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota"	21	Puskesmas	2,427,346,000	9	Puskesmas	111291000	11	Puskesmas	Rp526,900,000	0	Puskesmas	Rp0	0.00	21	Puskesmas	91585000	30	Puskesmas	638191000	142.8571429
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadin Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadin Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	orang	7,950,000	0	orang	0	12	orang	Rp7,950,000	12	orang	Rp7,950,000	100.00	0	orang	0	12	orang	15900000	12
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	36	Dokumen	30,050,000	0	Dokumen	0	12	Dokumen	Rp30,050,000	12	Dokumen	Rp30,050,000	100.00	0	Dokumen	0	12	Dokumen	60100000	33.33333333
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen informasi kesehatan yang tersedia	65	dokumen	901,299,400	26	dokumen	366,760,700	13	0	125,640,300	13	dokumen	122,661,017	100	13	dokumen	138,260,700	52	dokumen	615,062,017	80
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5	Dokumen	330,304,900	2	Dokumen	101271000	1	Dokumen	Rp70,536,600	1	Dokumen	Rp70,346,600	100.00	1	Dokumen	74785300	4	Dokumen	242154200	80
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	60	Dokumen	570,994,500	24	Dokumen	265489700	12	Dokumen	Rp55,103,700	12	Dokumen	Rp52,314,417	100.00	12	Dokumen	63475400	48	Dokumen	372907817	80
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	1105	dokumen	2778279730	442	dokumen	736814500	221	dokumen	270000000	371	dokumen	269591050	167.8733032	221	dokumen	537950000	1034	dokumen	1276405550	175
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	105	Dokumen	858,666,000	42	Dokumen	487594500	21	Dokumen	Rp80,000,000	21	Dokumen	Rp79,901,050	100.00	21	Dokumen	309950000	84	Dokumen	647495550	80
1.02.02.2.04.03	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1000	Dokumen	1,919,613,730	400	Dokumen	249220000	200	Dokumen	Rp190,000,000	350	Dokumen	Rp189,690,000	175.00	200	Dokumen	228000000	950	Dokumen	628910000	95
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESSEHATAN	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan minimal Puskesmas		persen			persen			persen			persen				persen		0	persen	0	#DIV/0!
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	3,052	0	266,000,000	500	dokumen	29,920,000	500	dokumen	20,000,000	609	dokumen	20,000,000	122	801	dokumen	103,000,000	1,910	dokumen	122,920,000	117
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2,250	Dokumen	160,000,000	500	Dokumen	29920000	500	Dokumen	Rp20,000,000	609	Dokumen	Rp20,000,000	121.80	400	Dokumen	50000000	1,509	Dokumen	69920000	67.06666667
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik	802	Dokumen	106,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401	dokumen	53000000	401	dokumen	53000000	50
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan		dok, org	2,280,010,000		dok, org	49500000		dok, org	1,568,010,000		dok, org	1,542,609,200			dok, org	135000000	0	dok, org	3160119200	#DIV/0!
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	736	dokumen	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368	Dokumen	60000000	368	Dokumen	60000000	50
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standart di Fasilitas	5,720	orang	2,000,000,000	0	orang	0	1,433	orang	Rp1,528,000,000	2866	orang	Rp1,502,660,000	200.00	2195	orang	35000000	5,061	orang	3030660000	88.47902098

1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	105	Dokumen	160,010,000	42	Dokumen	49500000	21	Dokumen	Rp40,010,000	21	Dokumen	Rp39,949,200	100.00	21	Dokumen	40000000	84	Dokumen	129459200	80
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan mutunya	2000	orang	240,000,000	0	orang	0	1350	orang	50000000	1350	orang	46539250	100.00	380	orang	995079700	1,730	orang	96539250	86.5
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2000	orang	240,000,000	0	orang	0	1350	orang	Rp50,000,000	1350	orang	Rp46,539,250	100.00	380	orang	995079700	1,730	orang	96539250	86.5
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standart Good Distribution Practice dan Good Manufacture Practice														100	persen	387800000	100	persen	0	#DIV/0!
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan	300	Dokumen	303,935,600	0	Dokumen	0	100	Dokumen	63935600	95	Dokumen	61750439	95.00	40	Dokumen	40000000	135	Dokumen	125686039	45
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	300	Dokumen	303,935,600	0	Dokumen	0	100	Dokumen	Rp63,935,600	95	Dokumen	Rp61,750,439	95.00	40	Dokumen	40000000	135	Dokumen	125686039	45
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan	10	dokumen	477989700	4	dokumen	76253700	2	dokumen	85000000	2	dokumen	84796000	100	2	dokumen	85000000	8	dokumen	246049700	80
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan kelas I tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	"Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"	5	Dokumen	241,989,900	2	Dokumen	26447900	1	Dokumen	Rp40,000,000	1	Dokumen	Rp39,923,000	100.00	1	Dokumen	40000000	4	Dokumen	106370900	80
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	5	Dokumen	235,999,800	2	Dokumen	49805800	1	Dokumen	Rp45,000,000	1	Dokumen	Rp44,873,000	100.00	1	Dokumen	45000000	4	Dokumen	139678800	80
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri yang diberikan	120	Dokumen	888,567,800	0	Dokumen	0	48	Dokumen	148849800	48	Dokumen	106265000	100.00	70	Dokumen	187800000	118	Dokumen	255114800	98.33333333
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	120	Dokumen	888,567,800	0	Dokumen	0	48	Dokumen	Rp148,849,800	48	Dokumen	Rp106,265,000	100.00	70	Dokumen	187800000	118	Dokumen	255114800	98.33333333
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	24	Dokumen	216,472,000	0	Dokumen	0	4	Dokumen	71932500	4	Dokumen	64866842	100.00	5	Dokumen	40000000	9	Dokumen	136799342	37.5

1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24	Dokumen	216,472,000	0	Dokumen	0	4	Dokumen	Rp71,932,500	4	Dokumen	Rp64,866,842	100.00	5	Dokumen	40000000	9	Dokumen	136799342	37.5
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	90	unit	285,550,600	0	unit	0	47	unit	285550600	47	unit	279651417	100.00	2	unit	30000000	49	unit	565202017	54.44444444
1.02.04.2.06.01	"Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan"	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	90	unit	285,550,600	0	unit	0	47	unit	Rp285,550,600	47	unit	Rp279,651,417	100.00	2	unit	30000000	49	unit	565202017	54.44444444
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	88	Persen			Persen			Persen			Persen			28	Persen	35000000	28	Persen	0	31.81818182
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	36	Dokumen	662,758,950	0	Dokumen	0	12	Dokumen	42000000	12	Dokumen	41652923	100.00	2	Dokumen	90000000	14	Dokumen	83652923	38.88888889
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	36	Dokumen	662,758,950	0	Dokumen	0	12	Dokumen	Rp42,000,000	12	Dokumen	Rp41,652,923	100.00	2	Dokumen	90000000	14	Dokumen	83652923	38.88888889
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84	Dokumen	1,269,000,000	0	Dokumen	0	21	Dokumen	401664000	21	Dokumen	401608000	100.00	0	Dokumen	0	21	Dokumen	803272000	25
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	84	Dokumen	1,269,000,000	0	Dokumen	0	21	Dokumen	Rp401,664,000	21	Dokumen	Rp401,608,000	100.00	0	Dokumen	0	21	Dokumen	803272000	25
			2148975		**Rp 536691257907**	**540,001**		**Rp 130639181**	**196220**		**Rp 134468634481**	**228860**		**Rp 125911518610**								

2.2. Analisis Kinerja Palayanan SKPD

2.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Indikator ini juga terkait langsung dengan kelangsungan hidup anak serta merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian bayi di Indonesia saat ini dipergunakan dari hasil berbagai sumber, yaitu Sensus Penduduk, Surkesnas/Susenas dan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

Tabel 2.1
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bayi lahir hidup (jiwa)	5.762	6.996	4.819	4.513	3776	4124
2	Angka kematian bayi (jiwa)	50	30	27	3	37	15
3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran	8,68	6,32	5.60	0,66	9,79	3,6

Berdasarkan data tersebut, AKB di Kabupaten Tapanuli Utara cukup rendah dan hal ini kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

2.2.2. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama disektor kesehatan. Angka harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia selain pendidikan dan ekonomi. Angka harapan hidup dapat diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Tabel 2.2
Angka Harapan Hidup Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2022

Uraian	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Tapanuli Utara	Tahun	67,86	68,11	68,46	68,63	68,76	69,16
Provinsi Sumatera Utara	Tahun	68,37	68,61	68,95	69,10	69,23	69,61
Nasional	Tahun	71,06	71,20	71,34	71,52	71,57	71,85

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini disebabkan faktor membaiknya pelayanan kesehatan, adanya kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan serta peningkatan keadaan sosial ekonomi penduduk yang selanjutnya memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup.

2.2.3. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per
100.000 kelahiran hidup. AKI dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Faktor penyebab utama kematian maternal adalah keterlambatan mencari, mencapai dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Disamping itu beberapa faktor lain yang turut memperburuk keadaan adalah pengetahuan ibu yang kurang, jarak yang sulit dicapai dan masih adanya beberapa desa yang belum mempunyai tenaga kesehatan utamanya bidan desa. Secara nasional target AKI adalah 306 per 100.000 penduduk. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan bahwa jumlah ibu melahirkan setiap tahunnya tidak mencapai angka

100.000 sehingga angka kematian ibu yang disajikan pada tabel berikut merupakan jumlah ibu meninggal per kelahiran bayi.

Tabel 2.3
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bayi lahir hidup (jiwa)	5.762	6.996	4.819	4.513	3776	4124
2	Jumlah ibu meninggal (jiwa)	8	4	4	8	5	4
3	Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4	79	73,2	71,7	68,7	60,2	63
4	Persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	38,33	44,56	51,1	78,6	85,8	92,4
5	Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	73	67,10	66,8	63,4	57,5	63,1
6	Persentase cakupan pelayanan nifas	72,90	64,6	60,5	60	57,7	63,0
7	Persetase cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	5,4	3	25,5	0	18,4	17,5

Apabila kita hitung secara persentase, maka rata-rata selama lima tahun terakhir angka kematian ibu melahirkan berdasarkan jumlah bayi yang lahir hidup berada pada kisaran 0,1 persen (lebih rendah dari target nasional sebesar 0,30 persen) dengan cakupan kunjungan ibu hamil yang berfluktuasi.

2.2.4. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk, terutama pertumbuhan yang terhambat, merupakan sebuah masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, sehingga salah satu arah kebijakan perbaikan gizi sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pemangunan Jangka Menengah Nasional adalah peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan. Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun.

Tabel 2.4
Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah balita (jiwa)	28.277	34.711	34.146	23.190	25499	20462
Jumlah balita gizi buruk (jiwa)	25	19	20	11	14	12
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100

Jumlah balita gizi buruk setiap tahun kecenderungannya mengalami penurunan. Hal ini harus tetap dipertahankan agar kualitas hidup anak dimasa yang akan datang semakin baik.

2.2.5. Pemberian ASI

Faktor yang mempengaruhi Angka Kematian Bayi selain kesehatan ibu, juga masa persalinan, pemberian ASI dan makanan tambahan serta pemberian imunisasi. Oleh karena itu, lamanya masa pemberian ASI dan lengkapnya pemberian imunisasi perlu diperhatikan. Pemberian ASI eksklusif juga akan mempengaruhi perkembangan dan tingkat inteligensi anak kelak.

Tabel 2.5
Jumlah Bayi yang Diberi ASI Eksklusif (Usia 0-6 bulan)
Tahun 2017 - 2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bayi (lahir hidup)	5.762	6.996	4.819	4.513	3776	4124
2	Jumlah bayi yang diberi asi eksklusif	820	961	2.914	2.898	2179	3543

Berdasarkan data pada tabel 2.5, mulai tahun 2016-2020 terjadi peningkatan jumlah bayi yang diberi asi eksklusif yaitu hanya 13,51 persen pada tahun 2016 menjadi 64,21 persen pada tahun 2020. Hal ini dapat dicapai berkat sosialisasi atau penyuluhan serta pendampingan oleh petugas kesehatan di tingkat poskesdes, puskesmas pembantu hingga puskesmas bagi ibu hamil mengenai pentingnya asi eksklusif bagi bayi sampai umur enam bulan.

2.2.6. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Program imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan

terjangkitnya penyakit tertentu, yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti tuberkulosis, difteri, tetanus, hepatitis B, polio dan campak. Imunisasi melindungi anak-anak dari beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100 persen desa/kelurahan.

Tabel 2.6
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan
Tahun 2017 - 2022

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Desa/Kel UCI (Tahun)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Parmonangan	14	13	7	9	11	10	2345
2	Adiankoting	16	15	13	13	16	16	16
3	Sipoholon	14	11	13	12	11	13	14
4	Tarutung	31	25	25	27	27	20	25
5	Siatas Barita	12	10	12	11	9	8	12
6	Pahae Julu	19	18	17	18	16	16	19
7	Pahae Jae	13	11	10	11	10	13	13
8	Purbatua	11	11	9	10	9	9	11
9	Simangumban	8	8	7	6	6	6	8
10	Pangaribuan	26	25	21	21	18	20	24
11	Garoga	13	8	10	9	9	10	10
12	Sipahutar	25	22	23	21	21	20	21
13	Siborongborong	21	20	21	20	18	19	21
14	Pagaran	14	12	11	13	14	14	14
15	Muara	15	15	13	15	15	15	15
	Kabupaten	**252**	**224**	**212**	**216**	**210**	**209**	**235**

Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan sasaran bayi dimana 80% dari jumlah bayi telah mendapatkan imunisasi secara lengkap pada satu kurun waktu tertentu. Pelayanan imunisasi bayi mencakup vaksinasi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis campak yang dilakukan melalui pelayanan rutin di posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Sesuai data pada tabel tersebut cakupan desa/kelurahan UCI tahun 2020 mencapai 210 desa/kelurahan atau sekitar 83,33 persen.

2.2.7. Sarana Kesehatan

Salah satu indikator kesehatan yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kesehatan suatu daerah dapat dilihat dari rasio antara penduduk dengan tenaga medis. Untuk kepentingan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan termasuk sarana kesehatan dan tenaga medis.

Tabel 2.7
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2017-2022

No	Sarana Kesehatan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Sakit Umum	1	1	1	2	2	2
2	Jumlah Puskesmas						
	a. Biasa	14	14	14	14	14	14
	b. Rawat Inap	6	6	7	7	7	7
	c. Puskesmas dengan akreditasi dasar	-	6	12	12	12	12
	d. Puskesmas dengan akreditasi madya	1	3	7	7	7	7
3	Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	60	61	61	62	61	61
	a. Parmonangan	4	4	4	4	4	4
	b. Adiankoting	6	6	6	6	6	6
	c. Sipoholon	5	5	5	5	5	5
	d. Tarutung	5	5	5	5	5	5
	e. Siatas Barita	4	4	4	4	4	4
	f. Pahae Julu	5	6	5	6	6	6
	g. Pahae Jae	1	1	1	1	1	1
	h. Purbatua	1	1	1	1	1	1
	i. Simangumban	1	1	1	1	1	1
	j. Pangaribuan	8	8	8	8	8	8
	k. Garoga	5	5	5	5	5	5
	l. Sipahutar	3	3	3	3	3	3
	m. Siborongborong	6	6	6	6	6	6
	n. Pagaran	4	4	4	4	4	4
	o. Muara	3	3	3	3	3	3
4	Poskesdes	95	95	95	95	95	95
	a. Parmonangan	14	14	14	14	14	14
	b. Adiankoting	3	3	3	3	3	3
	c. Sipoholon	5	5	5	5	5	5
	d. Tarutung	3	3	3	3	3	3
	e. Siatas Barita	1	1	1	1	1	1
	f. Pahae Julu	4	4	4	4	4	4
	g. Pahae Jae	1	1	1	1	1	1
	h. Purbatua	3	3	3	3	3	3

	i. Simangumban	3	3	3	3	3	3
	j. Pangaribuan	13	13	13	13	13	13
	k. Garoga	9	9	9	9	9	9
	l. Sipahutar	9	9	9	9	9	9
	m. Siborongborong	12	12	12	12	12	12
	n. Pagaran	9	9	9	9	9	9
	o. Muara	6	6	6	6	6	6

Kabupaten Tapanuli Utara terus berbenah dan berupaya meningkatkan pembangunan kesehatan untuk mencapai Kabupaten Sehat. Salah satu hal yang sangat penting dalam upaya tersebut adalah dengan mendirikan sarana pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau oleh masyarakat serta menyediakan tenaga medis yang dibutuhkan. Guna meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, penambahan tenaga medis khususnya jumlah dokter spesialis juga tetap dilakukan.

Selain pemenuhan fasilitas kesehatan, keberadaan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Sesuai data yang diperoleh, upaya penambahan tenaga kesehatan terus dilakukan baik di sarana pelayanan kesehatan dasar maupun lanjutan demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2.2.8. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu *fundamental right* yang menjadi tanggung jawab bersama oleh negara dan masyarakat itu sendiri, tetapi yang terjadi justru akses kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin/tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan masih sangat rendah. Permasalahan ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari pihak pemerintah, terlebih lagi semakin meningkatnya biaya kesehatan akan menjauhkan pelayanan kesehatan utamanya bagi masyarakat miskin. Hal ini terkait dengan belum berjalannya sistem jaminan sosial terutama bidang kesehatan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, sangat penting memberikan porsi yang cukup besar bagi jaminan kesehatan masyarakat. Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu upaya dalam bidang kesehatan untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat kurang mampu agar tercapai derajat kesehatan

yang optimal secara efektif dan efisien. Melalui jaminan kesehatan masyarakat diharapkan dapat menurunkun angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita serta menurunkan angka kelahiran disamping dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat kurang mampu pada umumnya.

Tabel 2.8
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jaminan Kesehatan Nasional	202.173	193.211	194.206	201.262	172850	
	▪ Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	114.101	120.727	117.752	129.714	109172	
	▪ PBI APBD Provinsi	7.346	7.073	9.703	3.048	4666	
	▪ Pekerja Penerima Upah (PPU)	31.864	25.959	66.751	68.500	59012	
	▪ Pekerja Bukan Penerima Upah/ Mandiri	37.270	31.473	31.473			
	▪ Bukan Pekerja	11.375	5.979	5.979			
2	Jamkesda	19.999	29.588	29.962	34.357	34416	
	Jumlah	222.172	222.799	224.168	235.619	207266	
	Cakupan persentase (%)	74,61	74,3	74,3	73,63	78,31	

Tabel T-C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1			Angka Kematian Bayi (AKB)	11.08	9.79	8.5	7.21	5.92	11.08	9.79	3.64	3.64	3.64	
2			Angka Kematian Ibu (AKI)	8	5	5	4	4	8	5	4	4	4	
3			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	34.45	26.7	22.85	18.85	14	34.45	26.7	27.4	18.85	14	
4			Angka Kesakitan	32.96	32.26	22.72	20.7	18.97	32.96	30.48	28.9	20.7	18.97	
5			Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	16.62	20.93	21.57	22.24	22.59	16.62	20.94	21.46	22.24	22.59	
6			Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes Per Satuan Penduduk	55.95	69.79	70.11	70.17	70.54	70.02	69.79	68.73	70.17	70.54	
7			Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten	63	68	73	78	80.5	63	71.64	*71,64	78	80.5	
8		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		100%	100%	100%	100%	100%	68.66	60.56	68.18	100%	100%	
9		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		100%	100%	100%	100%	100%	63.4	57.5	63.07	100%	100%	
10		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		100%	100%	100%	100%	100%	66.7	60.43	66.25	100%	100%	
11		Pelayanan Kesehatan Balita		100%	100%	100%	100%	100%	93.92	95	85.09	100%	100%	
12		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		100%	100%	100%	100%	100%	79.6	70.11	91.06	100%	100%	
13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		100%	100%	100%	100%	100%	23.84	73.3	90.16	100%	100%	

14		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		100%	100%	100%	100%	100%	80.22	91.78	99.76	100%	100%	
15		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		100%	100%	100%	100%	100%	52, 83	80	85.16	100%	100%	
16		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		100%	100%	100%	100%	100%	80.21	98.06	47.74	100%	100%	
17		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	80.3	80.31	92.92	100%	100%	
18		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis		100%	100%	100%	100%	100%	47.56	64.58	96.27	100%	100%	
19		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		100%	100%	100%	100%	100%	35.7	24.6	80.47	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan kesehatan, isu stategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu **masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat**, dengan permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain :

a) Status Kesehatan Ibu dan Bayi
b) Masalah Gizi (Gizi Kurang, Gizi Buruk, Stunting dan Obesitas)
c) Pandemi Covid-19
d) Disparitas tenaga kesehatan antar Puskesmas/ Kecamatan
e) Sarana Prasarana yang belum memadai di beberapa pelayanan kesehatan
f) Sanitasi Lingkungan
g) Triple Burden Disease (Penyakit Infeksi Belum Teratasi, Penyakit Tidak Menular Meningkat dan Munculnya Penyakit Baru)
h) Kepesertaan JKN

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reformasi dan akselerasi pembangunan kesehatan Nasional 2019–2024 yang telah ditetapkan dan sejalan dengan RPJMN 2019–2024, Renstra Kemenkes 2019-2024, menetapkan 6 sasaran pokok yaitu : 1). Meningkatnya status kesehatan gizi ibu dan anak, 2). Meningkatnya pengendalian penyakit, 3). Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, 4). Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan yang universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, 5). Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, 6). Meningkatnya responsivitas sistem kesehatan.

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Cakupan Layanan Penunjang Pemerintahan Daerah Terlaksana	100	persen	59,751,726,680	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Cakupan Layanan Penunjang Pemerintahan Daerah Terlaksana	100	persen	100,098,243,736	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan	5 dok, 2 lap	Dokumen, Laporan	323,640,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan	5 dok, 2 lap	Dokumen, Laporan	323,640,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1	Dokumen	64,800,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1	Dokumen	64,800,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Laporan	5,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2	Laporan	233,840,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2	Laporan	233,840,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	746 Org, 3 dok, 1 lap	org, lap, dok	52,303,259,298	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	746 Org, 3	org, lap, dok	92,649,776,354	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Orang yang meneriman Gaji dan Tunjangan ASN	745	orang	51,973,742,898	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Orang yang meneriman Gaji dan Tunjangan ASN	745	orang	92,320,259,954	Adanya kenaikan gaji karena penerimaan P3K Tahun Anggaran 2022 sebanyak 630 orang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	12	Laporan	324,516,400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	12	Laporan	324,516,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	Dokumen	5,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah	2	Laporan	80,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah	2	Laporan	80,000,000	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	2	Laporan	80,000,000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	2	Laporan	80,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	34 paket, 45 dokumen, 42 laporan	paket, dok, lap	396,986,200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	34 paket, 45 dokumen, 42 laporan	paket, dok, lap	396,986,200	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	paket	35,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	9	paket	35,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	60,980,100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	12	paket	60,980,100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	7	paket	30,003,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	7	paket	30,003,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	6	paket	51,006,100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	6	paket	51,006,100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	10,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makanan dan Minuman)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	29,997,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makanan dan Minuman)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	29,997,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Laporan	180,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	30	Laporan	180,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	60	0	150,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	60	0	150,000,000	
	Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	56	unit	100,000,000	Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	56	unit	100,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	4	unit	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	unit	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah laporan penunjang umum yang diselenggarakan	583	0	5,773,352,450	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah laporan penunjang umum yang diselenggarakan	583	0	5,773,352,450	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	297,342,850	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	297,342,850	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	5,476,009,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	5,476,009,600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	53	0	624,488,732	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	53	0	624,488,732	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42	Unit	474,997,832	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42	Unit	474,997,832	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	75,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	75,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	unit	74,490,900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	unit	74,490,900	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah FKTP yang BLUD	2	unit	100,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah FKTP yang BLUD	2	unit	100,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	FKTP yang BLUD	2	unit	100,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	FKTP yang BLUD	2	unit	100,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	100	persen	74,957,409,600	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	100	persen	87,627,409,600	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia	161 unit, 254 paket	unit, paket	20,245,361,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia	161 unit, 254 paket	unit, paket	32,915,361,000	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0	Unit	0	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	13	Unit	5,460,000,000	Usulan Pokir dan Aspirasi Masyarakat pembangunan Poskesdes

	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0	Unit	0	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	Unit	200,000,000	Pembanguann Pagar Puskesmas Butar Kec. Pagaran
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0	Unit	0	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7	Unit	1,450,000,000	Usulan Pokir
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0	Unit	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	Unit	2,500,000,000	Rehabilitasi Puskesmas Aek Raja Kec. Parmonangan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	Unit	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Unit	2,760,000,000	Usulan Pokir dan Aspirasi Masyarakat
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0	Unit	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	Unit	300,000,000	Rehabilitasi Rumah Dinas Medis Puskesmas Butar Kec. Pagaran
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	157	paket	14,102,085,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	157	paket	14,102,085,000	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Tersedianya Obat dan Vaksin	1	paket	1,940,783,000	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Tersedianya Obat dan Vaksin	1	paket	1,940,783,000	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Tersedianya Bahan Habis Pakai	1	paket	4,062,070,000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Tersedianya Bahan Habis Pakai	1	paket	4,062,070,000	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serat Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	21	paket	140,423,000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serat Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	21	paket	140,423,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia	24	layanan	54,035,837,900	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia	24	layanan	54,035,837,900	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	6788	orang	289,123,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	6788	orang	289,123,500	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	6480	orang	246,650,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	6480	orang	246,650,000	
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	6171	orang	161,461,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	6171	orang	161,461,500	
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20,462	orang	100,520,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20462	orang	100,520,000	
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	orang	50,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	orang	50,000,000	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	17,290	orang	271,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	17290	orang	271,000,000	
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36,912	orang	271,753,600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36912	orang	271,753,600	
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46,697	orang	179,814,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46697	orang	179,814,000	
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	1860	orang	117,865,300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	1860	orang	117,865,300	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	452	orang	402,306,800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	452	orang	402,306,800	

11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3285	orang	52,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3285	orang	52,000,000	
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	8538	orang	50,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	8538	orang	50,000,000	
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7	dokumen	467,040,200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7	dokumen	467,040,200	
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	orang	88,990,600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	orang	88,990,600	
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	4	Dokumen	801,116,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	4	Dokumen	801,116,500	
16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	5	dokumen	439,632,700	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	5	dokumen	439,632,700	
17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	5	Dokumen	143,431,100	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	5	Dokumen	143,431,100	
18	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus"	3	Dokumen	165,000,000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus"	3	Dokumen	165,000,000	
19	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9	dokumen	581,151,900	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9	dokumen	581,151,900	
20	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat"	37,000	Dokumen	31,534,135,200	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat"	37000	Dokumen	31,534,135,200	
21	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	Dokumen	45,608,000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	Dokumen	45,608,000	
22	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	21	Dokumen	17,435,652,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas"	21	Dokumen	17,435,652,000	
23	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	Dokumen	50,000,000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya"	12	Dokumen	50,000,000	
24	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	21	Puskesmas	91,585,000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota"	21	Puskesmas	91,585,000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen informasi kesehatan yang tersedia	13	dokumen	138,260,700	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen informasi kesehatan yang tersedia	13	dokumen	138,260,700	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	Dokumen	74,785,300	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	Dokumen	74,785,300	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	Dokumen	63,475,400	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	Dokumen	63,475,400	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	221	dokumen	537,950,000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	221	dokumen	537,950,000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	21	Dokumen	309,950,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	21	Dokumen	309,950,000	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	200	Dokumen	228,000,000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	200	Dokumen	228,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESSEHATAN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan minimal Puskesmas	65	persen	1,233,079,700	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESSEHATAN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan minimal Puskesmas	65	persen	1,233,079,700	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	801	0	103,000,000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	801	0	103,000,000	
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	400	Dokumen	50,000,000	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	400	Dokumen	50,000,000	

	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	401	Dokumen	53,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	401	Dokumen	53,000,000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan		dok, org	135,000,000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan		dok, org	135,000,000	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	368	dokumen	60,000,000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	368	dokumen	60,000,000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standart di Fasilitas Kesehatan	2,195	orang	35,000,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standart di Fasilitas Kesehatan	2195	orang	35,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	21	Dokumen	40,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	21	Dokumen	40,000,000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan mutunya	380	orang	995,079,700	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan mutunya	380	orang	995,079,700	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	380	orang	995,079,700	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	380	orang	995,079,700	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standart Good Distribution Practice dan Good Manufacture Practice	100	100	382,800,000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standart Good Distribution Practice dan Good Manufacture Practice	100	persen	564,994,000	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan	40	Dokumen	40,000,000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan	40	Dokumen	40,000,000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40	Dokumen	40,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40	Dokumen	40,000,000	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan	2	dokumen	85,000,000	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan	2	dokumen	85,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan kelas I tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"	1	Dokumen	40,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan kelas I tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	"Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"	1	Dokumen	40,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	Dokumen	45,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	Dokumen	45,000,000	

	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri yang diberikan	70	Dokumen	187,800,000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri yang diberikan	70	Dokumen	187,800,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70	Dokumen	187,800,000	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70	Dokumen	187,800,000	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	5	Dokumen	40,000,000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	5	Dokumen	40,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	5	Dokumen	40,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	5	Dokumen	40,000,000	
	Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	Dokumen	30,000,000	Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	Dokumen	30,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	Dokumen	30,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	Dokumen	30,000,000	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	2	unit	30,000,000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	2	unit	182,194,000	
	"Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	2	unit	30,000,000	"Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	2	unit	182,194,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Posyandu Aktif	88	Persen	90,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase Posyandu Aktif	88	Persen	90,000,000	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2	Dokumen	90,000,000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2	Dokumen	90,000,000	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	Dokumen	90,000,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	Dokumen	90,000,000	
						136,415,015,980						**189,613,727,036**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah :

a. Terlaksananya keterpaduan upaya kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan terutama dalam upaya promotif dan preventif, maupun kuratif dan rehabilitatif.
b. Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular utamanya melalui optimalisasi pencegahan dan pemberantasan penyakit dengan imunisasi (P3DI). Demikian juga untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit menular lainnya (Covid-19, TB Paru, DBD, Malaria, HIV/AIDS, dsb).
c. Terlaksananya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) diantaranya peningkatan cakupan desa siaga, rumah tangga ber-PHBS dan kemandirian Posyandu.
d. Terpenuhinya SDM yang merata sesuai ratio kebutuhan tenaga dengan jumlah penduduk di UPT Puskesmas dan jaringannya.
e. Tersedianya SDM yang berkualitas (mampu menggunakan sarana teknologi (utamanya alat kesehatan) yang telah tersedia).
f. Tersedianya Jaminan Pembiayaan Kesehatan khususnya kelompok rentan (maskin, ibu hamil, dsb).
g. Tersedianya Sarana/Prasana untuk mendukung program dan kegiatan melalui pembangunan, Pengadaan sarana/prasarana kesehatan terutama untuk mendukung program Desa Siaga melalui pembangunan Poskesdes, Pengadaan Alkes, Pengadaan Kenderaan R-4/Pusling dan R-2.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang sosial dan budaya yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kebijakan pembangunan kesehatan nasional diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian SDG's; dengan sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya umur harapan hidup (UHH), menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan (AKB dan AKI).

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Demikian juga dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2019-2023.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut maka penyelenggaraan pembangunan kesehatan diutamakan bagi penduduk rentan, yakni ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin, daerah tertinggal, daerah bencana, daerah perbatasan, daerah terpencil termasuk pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kesetaraan gender melalui peningkatan upaya pokok pembangunan

kesehatan yang terdiri dari: Upaya Kesehatan; Pembiayaan Kesehatan; Sumber Daya Manusia Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Manajemen dan informasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Upaya pokok tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK, globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor.

Di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 terdapat beberapa permasalahan yang meliputi:

1. Perkembangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia meliputi Pandemi COVID-19 berdampak multidimensi dan menciptakan berbagai beban tambahan terhadap situasi sistem kesehatan dan krisis berbagai aspek pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga masih diwarnai permasalahan disparitas pada sistem pelayanan kesehatan yang substansial, krisis kesehatan masyarakat, menurunnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Tantangan Kesehatan Ibu dan Anak.
   Angka Kematian Ibu Indonesia juga merupakan salah satu yang tertinggi dari negara-negara ASEAN dengan angka 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015). Angka Kematian Bayi di Indonesia relatif masih tinggi (24 kematian per1.000 KH, SDKI 2017 .Indonesia menempati urutan kedelapan jumlah kematian neonataltertinggi dunia dengan 72.400 kematian neonatal (2018).
3. *Triple Burden* Malnutrisi
   Penurunan prevalensi *wasting* dan *stunting* pada balita merupakan sasaran pokok RPJMN 2020-2024. Prevalensi *wasting* pada balita telah menurun dari 12,1% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 7,4% pada tahun 2019 (SSGI, 2019) dan pada tahun 2021 turun menjadi 7,1% (SSGBI, 2021). Selain itu telah terjadi penurunan balita *stunting* dari 37,2% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 30,8% tahun 2018 (Riskesdas, 2018), dan pada tahun 2021 telah turun lagi menjadi 24,4% (SSGBI, 2021). Di lain pihak, 3,8% anak balita mengalami kegemukan/*overweight* pada tahun 2021.
4. Transisi Epidemiologi terhadap Beban Penyakit.
   Tantangan penyakit menular yang masih persisten. Dengan jumlah estimasi kasus TB sebesar 824.000 pada tahun 2021, Indonesia menempati rangking ketiga dunia (*WHO Global TB Report* 2021), Infeksi HIV di Indonesia juga masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, Di tahun 2017, 52% dari 514 kabupaten/kota di Indonesia telah diklasifikasikan sebagai daerah bebas malaria, Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data Riskesdas, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada tahun 2013 baru mencapai 59,2% dan turun pada tahun 2018 menjadi 58,4%. Di tahun 2021 terdapat peningkatan capaian menjadi 65,8% berdasarkan SSGI 2021. Tren kejadian *dengue* mengalami peningkatan dari kurun waktu kurang lebih 20 tahun terakhir.

5. Pembudayaan GERMAS.

   GERMAS adalah berbagai upaya intervensi yang komprehensif dan holistik yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan *continuum of care.* Melalui pembudayaan GERMAS, *continuum of care* ini dilakukan secara terpadu dengan pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan aksi multisektor.

6. Potensi, Tantangan Sistem, dan Pelayanan Kesehatan.

   Rasio dokter per 1.000 penduduk di Indonesia mencapai 0,4, masih jauh dari rasio di negara-negara Asia yang rerata mencapai 1,2 per 1.000 penduduk dan negara-negara OECD dengan 3,2 dokter tersedia untuk tiap 1.000 penduduk. Secara nasional Indonesia memiliki rerata 1,18 tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk, sementara rerata di negara-negara Asia memiliki rasio 3,3 tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk, rerata negara-negara OECD mencapai 4,8. Dari sekitar 27.700 fasilitas kesehatan primer yang ada di Indonesia, sebanyak 22.764 fasilitas kesehatan primer telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada Juli 2021, dan direncanakan hingga 23.430 fasilitas pada akhir tahun.

7. Perlunya Peningkatan Akses dan Penguatan Kualitas Layanan Rujukan Sampai dengan tahun 2021, tercatat 3.120 rumah sakit di Indonesia, terdiri dari 2.522 rumah sakit umum (RSU), 521 rumah sakit khusus (RSK), dan 77 rumah sakit darurat. Sebanyak 1.531 rumah sakit umum dan 433 rumah sakit khusus adalah milik swasta, selebihnya milik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan TNI/POLRI. Pada kurun waktu tahun 2015-2019 terjadi peningkatan jumlah RSU dari 1.951 RSU di tahun 2015 menjadi 2.522 RSU pada tahun 2021 (naik 29%). Kenaikan terbesar terjadi pada RSU milik swasta. Untuk RSK, dalam periode yang sama justru terjadi sedikit penurunan, yakni dari 537 pada tahun 2015 menjadi 521 pada tahun 2021. Sebanyak 2.482 RS (79,6%) telah terakreditasi.

8. Perlunya Peningkatan Akses dan Penguatan Kualitas Layanan Rujukan Sampai dengan tahun 2021, tercatat 3.120 rumah sakit di Indonesia, terdiri dari 2.522 rumah sakit umum (RSU), 521 rumah sakit khusus (RSK), dan 77 rumah sakit darurat. Sebanyak 1.531 rumah sakit umum dan 433 rumah sakit khusus adalah milik swasta, selebihnya milik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan TNI/POLRI. Pada kurun waktu tahun 2015-2019 terjadi peningkatan jumlah RSU dari 1.951 RSU di tahun 2015 menjadi 2.522 RSU pada tahun 2021 (naik 29%). Kenaikan terbesar terjadi pada RSU milik swasta. Untuk RSK, dalam periode yang sama justru terjadi sedikit penurunan, yakni dari 537 pada tahun 2015 menjadi 521 pada tahun 2021. Sebanyak 2.482 RS (79,6%) telah terakreditasi.

9. Ketahanan Sektor Farmasi dan Alat Kesehatan

   Penyediaan dan pengelolaan anggaran untuk obat dan alkes di sektor publik dilaksanakan secara konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengambil peran memastikan bahwa pasokan obat program kesehatan dan stok penyangga (*buffer stock*) memadai, serta memastikan keamanan, efikasi dan kualitasnya. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan obat

dan vaksin di puskesmas telah mengalami peningkatan secara signifikan, dari 79,4% di tahun 2015 menjadi 92,12% di tahun 2020.

10. Memperkuat Ketahanan Kesehatan dan Tanggap Darurat Krisis Kesehatan

    Kemampuan dan kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat global menempati peringkat 45 dari 195 negara yang dinilai Global Health Security Index/Indeks Ketahanan Kesehatan Global 2021. Indonesia mempunyai skor untuk Indeks Ketahanan Kesehatan Global 50,4.

11. Sistem Pembiayaan Kesehatan

    Belanja kesehatan Indonesia per kapita telah menunjukkan peningkatan berarti menjadi rata-rata Rp 1,8 juta/kapita/tahun di tahun 2019 (dari Rp 1,1 juta/kapita/tahun di tahun 2012). Total belanja kesehatan ini mewakili hanya 3,1% dari PDB (CHE 2,9% dan *capital formation* 0,2%), di mana proporsi Total Belanja Kesehatan (TBK) terhadap PDB relatif statis dan tidak mengalami perubahan bermakna dibanding tahun-tahun sebelumnya.

12. Ketersediaan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan

    Jumlah dan jenis tenaga kesehatan puskesmas dapat dihitung berdasarkan standar ketenagaan minimal di puskesmas mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas dan dengan perhitungan kebutuhan tenaga di puskesmas berdasarkan beban kerja.

    Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2019, ada 363.714 tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dengan proporsi terbesar adalah bidan yaitu sebesar 41,66% dan yang paling sedikit adalah dokter gigi (2,16%). Dari total 10.134 puskesmas seluruh Indonesia, hanya 44,25% puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga promotif dan preventif kesehatan, meningkat dari 2018 yang mencapai 40%. Keterisian puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan lengkap di provinsi lain rata-rata masih di bawah 50%. Secara nasional terdapat 20% puskesmas yang kekurangan dokter, 31,6% puskesmas dengan status jumlah dokter cukup, dan 48,4% puskesmas yang memiliki jumlah dokter melebihi standar kebutuhan minimal.

13. Penguatan Teknologi Kesehatan, Tatakelola, dan Pengembangan Kebijakan Kesehatan

    Pengembangan dan penguatan pemanfaatan teknologi kesehatan. Pada situasi disrupsi dan perkembangan teknologi yang terus berkembang, pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan merupakan sebuah keniscayaan. Lebih khusus lagi pada aspek terkait kesehatan. Pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga terkait peranan teknologi kesehatan dalam penanganan dan pemberian pelayanan kesehatan. Dengan demikian, menjadi penting penguatan pemanfaatan teknologi kesehatan yang lebih integratif.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di

bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh;
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan;
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan;
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Tujuan		**Sasaran Strategis**	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan

4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasilguna dan berdayaguna untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024 yaitu :

- Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikator :
  a) Penurunan Angka Kematian Ibu
  b) Penurunan Angka Kematian Bayi
  c) Penurunan Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita
  d) Penurunan Angka Kesakitan
  e) Tercapainya Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
  f) Tercapainya Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes Per Satuan Penduduk
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator :
  a) Meningkatnya Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan diatas, maka disusunlah program-program Dinas Kesehatan untuk kurun waktu 2019-2024. Program-program Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dibagi dalam dua jenis, yaitu program Teknis dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Teknis

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Tabel T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KABUPATEN TAPANULI UTARA

OPD : Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Pemerintahan Daerah Terlaksana	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	100	persen	100,098,243,736	DAU, DAK		100	persen	100,098,243,736
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	5 dok, 3 lap	Dokumen, Laporan	323,640,000	DAU, DAK		5 dok, 3 lap	Dokumen, Laporan	323,640,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	64,800,000	DAU		1	Dokumen	64,800,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	5,000,000	DAU		1	Dokumen	5,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	5,000,000	DAU		1	Dokumen	5,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	5,000,000	DAU		1	Dokumen	5,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	5,000,000	DAU		1	Dokumen	5,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Laporan	5,000,000	DAU		1	Laporan	5,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2	Laporan	233,840,000	DAU, DAK		2	Laporan	233,840,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	746 Org, 3 dok, 1 lap	org, lap, dok	92,649,776,354	DAU		746 Org, 3 dok, 1 lap	org, lap, dok	92,649,776,354

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang meneriman Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	745	orang	92,320,259,954	DAU		745	orang	92,320,259,954
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	324,516,400	DAU		12	Laporan	324,516,400
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	5,000,000	DAU		1	Dokumen	5,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2	Laporan	80,000,000	DAU		2	Laporan	80,000,000
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2	Laporan	80,000,000	DAU		2	Laporan	80,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	34 paket, 45 dokumen, 42 laporan	paket, dok, lap	396,986,200	DAU		34 paket, 45 dokumen, 42 laporan	paket, dok, lap	396,986,200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	9	paket	35,000,000	DAU		9	paket	35,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	12	paket	60,980,100	DAU		12	paket	60,980,100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	7	paket	30,003,000	DAU		7	paket	30,003,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	6	paket	51,006,100	DAU		6	paket	51,006,100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2	dokumen	10,000,000	DAU		2	dokumen	10,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makanan dan Minuman)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	29,997,000	DAU		12	Laporan	29,997,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	30	Laporan	180,000,000	DAU		30	Laporan	180,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	60	0	150,000,000	DAU		60	0	150,000,000

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	56	unit	100,000,000	DAU		56	unit	100,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	4	unit	50,000,000	DAU		4	unit	50,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penunjang umum yang diselenggarakan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	583	0	5,773,352,450	DAU		583	0	5,773,352,450
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	12	Laporan	297,342,850	DAU		12	Laporan	297,342,850
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	4	Laporan	5,476,009,600	DAU		4	Laporan	5,476,009,600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	53	0	624,488,732	DAU		53	0	624,488,732
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	42	Unit	474,997,832	DAU		42	Unit	474,997,832
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	3	Unit	75,000,000	DAU		3	Unit	75,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	8	unit	74,490,900	DAU		8	unit	74,490,900
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah FKTP yang BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2	unit	100,000,000	DAU		2	unit	100,000,000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	FKTP yang BLUD	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2	unit	100,000,000	DAU		2	unit	100,000,000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	100	persen	87,627,409,600	DAU, DAK		100	persen	87,627,409,600
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	161 unit, 254 paket	unit, paket	32,915,361,000	DAU, DAK		161 unit, 254 paket	unit, paket	32,915,361,000
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	13	Unit	5,460,000,000	DAU, DAK		13	Unit	5,460,000,000
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Unit	200,000,000	DAU, DAK		1	Unit	200,000,000

	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	7	Unit	1,450,000,000	DAU, DAK		7	Unit	1,450,000,000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Unit	2,500,000,000	DAU, DAK		1	Unit	2,500,000,000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	5	Unit	2,760,000,000	DAU, DAK		5	Unit	2,760,000,000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Unit	300,000,000	DAU, DAK		1	Unit	300,000,000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	157	paket	14,102,085,000	DAU, DAK		157	paket	14,102,085,000
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Tersedianya Obat dan Vaksin	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	paket	1,940,783,000	DAU, DAK		1	paket	1,940,783,000
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Tersedianya Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	paket	4,062,070,000	DAU, DAK		1	paket	4,062,070,000
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serat Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	21	paket	140,423,000	DAU, DAK		21	paket	140,423,000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	24	layanan	54,035,837,900	DAU, DAK		24	layanan	54,035,837,900
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	6788	orang	289,123,500	DAU, DAK		6788	orang	289,123,500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	6480	orang	246,650,000	DAU, DAK		6480	orang	246,650,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	6171	orang	161,461,500	DAU, DAK		6171	orang	161,461,500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	20462	orang	100,520,000	DAU, DAK		20462	orang	100,520,000

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	0	orang	50,000,000	DAU, DAK		0	orang	50,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	17290	orang	271,000,000	DAU, DAK		17290	orang	271,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	36912	orang	271,753,600	DAU, DAK		36912	orang	271,753,600
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	46697	orang	179,814,000	DAU, DAK		46697	orang	179,814,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	"Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1860	orang	117,865,300	DAU, DAK		1860	orang	117,865,300
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	452	orang	402,306,800	DAU, DAK		452	orang	402,306,800
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	3285	orang	52,000,000	DAU, DAK		3285	orang	52,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	8538	orang	50,000,000	DAU, DAK		8538	orang	50,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	7	dokumen	467,040,200	DAU, DAK		7	dokumen	467,040,200
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	4	orang	88,990,600	DAU, DAK		4	orang	88,990,600
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	4	Dokumen	801,116,500	DAU, DAK		4	Dokumen	801,116,500
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	5	dokumen	439,632,700	DAU, DAK		5	dokumen	439,632,700
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	5	Dokumen	143,431,100	DAU, DAK		5	Dokumen	143,431,100
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	3	Dokumen	165,000,000	DAU, DAK		3	Dokumen	165,000,000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	9	dokumen	581,151,900	DAU, DAK		9	dokumen	581,151,900

	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	37000	Dokumen	31,534,135,200	DAU, DAK		37000	Dokumen	31,534,135,200
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	45,608,000	DAU, DAK		1	Dokumen	45,608,000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	21	Dokumen	17,435,652,000	DAU, DAK		21	Dokumen	17,435,652,000
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	12	Dokumen	50,000,000	DAU, DAK		12	Dokumen	50,000,000
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	21	Puskesmas	91,585,000	DAU, DAK		21	Puskesmas	91,585,000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen informasi kesehatan yang tersedia	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	13	dokumen	138,260,700	DAU, DAK		13	dokumen	138,260,700
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	74,785,300	DAU, DAK		1	Dokumen	74,785,300
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	12	Dokumen	63,475,400	DAU, DAK		12	Dokumen	63,475,400
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	221	dokumen	537,950,000	DAU, DAK		221	dokumen	537,950,000
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	21	Dokumen	309,950,000	DAU, DAK		21	Dokumen	309,950,000
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	200	Dokumen	228,000,000	DAU, DAK		200	Dokumen	228,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESSEHATAN	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan minimal Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	65	persen	1,233,079,700	DAU, DAK		65	persen	1,233,079,700
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	801	0	103,000,000	DAU, DAK		801	0	103,000,000
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	400	Dokumen	50,000,000	DAU, DAK		400	Dokumen	50,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	401	Dokumen	53,000,000	DAU, DAK		401	Dokumen	53,000,000

	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara		dok, org	135,000,000	DAU, DAK			dok, org	135,000,000
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	368	dokumen	60,000,000	DAU, DAK		368	dokumen	60,000,000
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standart di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2195	orang	35,000,000	DAU, DAK		2195	orang	35,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	21	Dokumen	40,000,000	DAU, DAK		21	Dokumen	40,000,000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan mutunya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	380	orang	995,079,700	DAU, DAK		380	orang	995,079,700
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	380	orang	995,079,700	DAU, DAK		380	orang	995,079,700
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standart Good Distribution Practice dan Good Manufacture Practice	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	100	persen	564,994,000	DAU, DAK		100	persen	564,994,000
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	40	Dokumen	40,000,000	DAU, DAK		40	Dokumen	40,000,000
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	40	Dokumen	40,000,000	DAU, DAK		40	Dokumen	40,000,000

	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2	dokumen	85,000,000	DAU, DAK		2	dokumen	85,000,000
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan kelas I tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	"Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	40,000,000	DAU, DAK		1	Dokumen	40,000,000
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	45,000,000	DAU, DAK		1	Dokumen	45,000,000
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri yang diberikan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	70	Dokumen	187,800,000	DAU, DAK		70	Dokumen	187,800,000
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	70	Dokumen	187,800,000	DAU, DAK		70	Dokumen	187,800,000
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	5	Dokumen	40,000,000	DAU, DAK		5	Dokumen	40,000,000

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	5	Dokumen	40,000,000	DAU, DAK		5	Dokumen	40,000,000
	Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	30,000,000	DAU, DAK		1	Dokumen	30,000,000
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1	Dokumen	30,000,000	DAU, DAK		1	Dokumen	30,000,000
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2	unit	182,194,000	DAU, DAK		2	unit	182,194,000
	"Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan"	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2	unit	182,194,000	DAU, DAK		2	unit	182,194,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	88	Persen	90,000,000	DAU		88	Persen	90,000,000
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2	Dokumen	90,000,000	DAU		2	Dokumen	90,000,000
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	2	Dokumen	90,000,000	DAU		2	Dokumen	90,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Akan tetapi Dana Alokasi Umum yang diberikan Pemerintah Pusat seiring dengan kondisi perekonomian tahun 2020 yang terganggu akibat adanya pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah Daerah untuk bijak dalam membagi alokasi dananya untuk mendukung prioritas penanganan pemulihan perekonomian masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024. Rumusan rencana program-kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara.

Namun demikian Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara masih mengusulkan tambahan anggaran untuk beberapa sub kegiatan yang sangat penting baik dari Sumber Dana DID, DBH-CHT maupun DAK

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KAB. TAPANULI UTARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi** **Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100** **100 persen persen**	**100** **100 persen persen**	**46.899.532.680,00**	**94.052.395.169,00**	**103.768.157.348,00**	**56.164.243.156,00**							**103.063.775.836,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan*				5 dokumen, 3 laporan dokumen dan laporan	5 dokumen, 3 laporan dokumen dan laporan	323.640.000,00	104.000.000,00	74.000.000,00	-249.640.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		303.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	64.800.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-4.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				64.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	7.500.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	14 Laporan	233.840.000,00	36.500.000,00	10.000.000,00	-223.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				233.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran*				1 laporan	1 laporan	39.451.065.298,00	87.869.017.111,00	99.086.986.790,00	59.635.921.492,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		92.649.776.354,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				746/12 Orang/bulan	746/12 Orang/bulan	39.121.548.898,00	87.548.455.911,00	98.819.405.590,00	59.697.856.692,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				92.320.259.954,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	324.516.400,00	314.561.200,00	263.581.200,00	-60.935.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			324.516.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah*				1 laporan	1 laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				58 paket, 2 dokumen, 435 laporan dokumen	58 paket, 2 dokumen, 435 laporan dokumen	396.986.200,00	190.000.000,00	190.000.000,00	-206.986.200,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		321.989.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.980.100,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-980.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			60.980.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	30.003.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.003.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			30.003.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	51.006.100,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-31.006.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			51.006.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	29.997.000,00	0,00	0,00	-29.997.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	180.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah*				60 unit	60 unit	150.000.000,00	3.334.720.000,00	3.316.312.500,00	3.166.312.500,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		3.540.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				56 Unit	56 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	21 Unit	0,00	3.334.720.000,00	3.316.312.500,00	3.316.312.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.490.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penunjang umum yang diselenggarakan*				17 laporan	17 laporan	5.773.352.450,00	2.216.103.058,00	786.303.058,00	-4.987.049.392,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		5.773.352.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	297.342.850,00	310.400.000,00	140.000.000,00	-157.342.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			297.342.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	5.476.009.600,00	1.905.703.058,00	646.303.058,00	-4.829.706.542,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.476.009.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara*				53 unit	53 unit	624.488.732,00	338.555.000,00	314.555.000,00	-309.933.732,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		474.997.832,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				42 Unit	42 Unit	474.997.832,00	338.555.000,00	314.555.000,00	-160.442.832,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			474.997.832,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	74.490.900,00	0,00	0,00	-74.490.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah FKTP yang BLUD*				2 unit kerja	2 unit kerja	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				13 Unit	3 Unit	5.460.000.000,00	0,00	0,00	-5.460.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				7 Unit	1 Unit	1.450.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-1.450.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			1.450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Unit	1 Unit	2.760.000.000,00	0,00	0,00	-2.760.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				157 Unit	157 Unit	14.102.085.000,00	0,00	0,00	-14.102.085.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	100 Unit	0,00	895.285.000,00	881.280.000,00	881.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.323.185.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				-	100 Unit	0,00	99.867.000,00	99.867.000,00	99.867.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			99.867.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	6.002.853.000,00	6.234.900.000,00	6.211.700.000,00	208.847.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			1.940.783.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				252 Paket	252 Paket	140.423.000,00	165.300.000,00	165.300.000,00	24.877.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			140.423.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6788 Orang	6788 Orang	289.123.500,00	120.000.000,00	0,00	-289.123.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			289.123.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6480 Orang	6480 Orang	246.650.000,00	120.000.000,00	0,00	-246.650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			246.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6171 Orang	6171 Orang	161.461.500,00	409.735.916,00	289.735.916,00	128.274.416,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			161.461.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20462 Orang	20462 Orang	100.520.000,00	120.000.000,00	0,00	-100.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			100.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				64272 Orang	64272 Orang	50.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17290 Orang	17290 Orang	271.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-271.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			271.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				36912 Orang	36912 Orang	271.753.600,00	120.000.000,00	0,00	-271.753.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			271.753.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				46697 Orang	46697 Orang	179.814.000,00	90.000.000,00	0,00	-179.814.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			179.814.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	117.865.300,00	604.006.534,00	514.006.534,00	396.141.234,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			117.865.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				452 Orang	452 Orang	402.306.800,00	255.000.000,00	150.000.000,00	-252.306.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			402.306.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3285 Orang	3285 Orang	52.000.000,00	738.119.600,00	663.119.600,00	611.119.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			52.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8538 Orang	8538 Orang	50.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				7 Dokumen	7 Dokumen	467.040.200,00	304.100.500,00	43.142.800,00	-423.897.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			467.040.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	88.990.600,00	0,00	0,00	-88.990.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			88.990.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	801.116.500,00	885.303.900,00	576.297.750,00	-224.818.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			801.116.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	439.632.700,00	485.310.700,00	485.310.700,00	45.678.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			439.632.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	143.431.100,00	122.220.000,00	92.220.000,00	-51.211.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN 2. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN			143.431.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	452 Orang	0,00	40.258.000,00	40.258.000,00	40.258.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			41.258.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				9 Dokumen	9 Dokumen	581.151.900,00	1.137.590.000,00	987.590.000,00	406.438.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			581.151.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				37000 Dokumen	37000 Dokumen	31.534.135.200,00	0,00	0,00	-31.534.135.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				-	41000 Dokumen	0,00	27.691.205.100,00	27.556.205.100,00	27.556.205.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN INSENTIF FISKAL	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			27.706.205.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	12 Paket	0,00	144.988.000,00	144.988.000,00	144.988.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			144.988.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	45.608.000,00	0,00	0,00	-45.608.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				21 Dokumen	21 Dokumen	50.000.000,00	23.904.000,00	23.904.000,00	-26.096.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	91.585.000,00	566.814.000,00	358.814.000,00	267.229.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			91.585.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	20 Orang	0,00	24.282.900,00	24.282.900,00	24.282.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			24.282.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	12 Dokumen	58.475.400,00	0,00	0,00	-58.475.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	372.555.100,00	372.555.100,00	372.555.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			372.615.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah dokumen informasi kesehatan yang tersedia*				13 dokumen	13 dokumen	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	89.785.300,00	115.186.000,00	115.186.000,00	25.400.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			63.475.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan*				21 unit dan 200 dokumen unit dan dokumen	21 unit dan 200 dokumen unit dan dokumen	702.950.000,00	280.000.000,00	0,00	-702.950.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		547.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				21 Unit	21 Unit	474.950.000,00	50.000.000,00	0,00	-474.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			309.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				200 Dokumen	200 Dokumen	228.000.000,00	0,00	0,00	-228.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				-	250 Dokumen	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				238.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas Yang Memiliki Minimal Sembilan Jenis Tenaga Kesehatan Persentase puskesmas yang memiliki minimal sembilan Jenis Tenaga Kesehatan**				**76 76 persen persen**	**76 76 persen persen**	**1.233.079.700,00**	**2.135.900.950,00**	**1.898.900.950,00**	**1.079.684.366,00**							**2.312.764.066,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan*				40 dokumen	40 dokumen	103.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-103.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Izin Praktik Tenaga Kesehatan		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				400 Dokumen	400 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				401 Dokumen	401 Dokumen	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan*				2195 orang	2195 orang	135.000.000,00	308.342.000,00	173.342.000,00	38.342.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara		263.342.066,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				368 Dokumen	368 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2195 Orang	2195 Orang	35.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				21 Dokumen	21 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	42 Dokumen	0,00	228.342.000,00	173.342.000,00	173.342.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				228.342.066,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan mutunya*				380 Orang	380 Orang	995.079.700,00	1.777.558.950,00	1.725.558.950,00	730.479.250,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1.999.422.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				380 Orang	380 Orang	995.079.700,00	0,00	0,00	-995.079.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				-	400 Orang	0,00	1.777.558.950,00	1.725.558.950,00	1.725.558.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			1.999.422.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian Serta Makanan Minuman Yang Dibina Agar Memenuhi Standard Good Distribution Practice (GDP) Dan Good Manufacture Practice (GMP)**				**100 persen**	**100 persen**	**554.994.000,00**	**424.329.000,00**	**316.329.000,00**	**-48.270.000,00**							**506.724.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*				40 sarana	40 sarana	40.000.000,00	96.730.000,00	63.730.000,00	23.730.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		96.730.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				40 Dokumen	40 Dokumen	40.000.000,00	96.730.000,00	63.730.000,00	23.730.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			96.730.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan*				2 dokumen	2 dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri yang diberikan*				70 sarana	70 sarana	187.800.000,00	85.387.000,00	85.387.000,00	-102.413.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Produsen Pangan Industri Rumah Tangga dan Masyarakat		187.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				70 Dokumen	70 Dokumen	187.800.000,00	85.387.000,00	85.387.000,00	-102.413.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			187.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan*				5 dokumen	5 dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*				2 dokumen	2 dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa*				28 unit	28 unit	182.194.000,00	167.212.000,00	167.212.000,00	-14.982.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		182.194.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				28 Unit	28 Unit	182.194.000,00	167.212.000,00	167.212.000,00	-14.982.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			182.194.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan*				12 dokumen	12 dokumen	90.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-90.000.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	39.514.000,00	39.514.000,00	39.514.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			39.514.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS AEK RAJA							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	7.272.000,00	0,00	0,00	-7.272.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				171 Orang	171 Orang	80.750.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-46.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			95.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	35 Orang	0,00	59.650.000,00	59.650.000,00	59.650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				410 Orang	410 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1536 Orang	1536 Orang	6.000.000,00	11.560.000,00	11.560.000,00	5.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				615 Orang	615 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	88 Orang	6.525.000,00	0,00	0,00	-6.525.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	12.900.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			12.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	8.300.000,00	6.700.000,00	5.100.000,00	-3.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			8.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	245.080.000,00	268.808.000,00	226.308.000,00	-18.772.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			245.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	5.300.000,00	19.870.000,00	19.870.000,00	14.570.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	84.010.000,00	0,00	0,00	-84.010.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	30.610.000,00	30.610.000,00	24.610.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				60 Orang	60 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	69.500.000,00	104.610.000,00	106.650.000,00	37.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				69.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	148.656.500,00	206.980.000,00	194.980.000,00	46.323.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				148.656.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	15 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	2.040.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	15 Dokumen	0,00	7.710.000,00	7.710.000,00	7.710.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	30.460.000,00	72.960.000,00	72.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				72.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	25 Dokumen	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	19.960.000,00	55.650.000,00	55.650.000,00	35.690.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BUTAR							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				0 Unit	10 Unit	7.368.000,00	0,00	0,00	-7.368.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				205 Orang	205 Orang	57.080.000,00	24.920.000,00	24.920.000,00	-32.160.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			57.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	35 Orang	0,00	42.800.000,00	42.800.000,00	42.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	4.100.000,00	0,00	0,00	-4.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2307 Orang	2307 Orang	8.400.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	5.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			8.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				646 Orang	646 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1242 Orang	1242 Orang	48.000.000,00	0,00	0,00	-48.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	8.400.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	1.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			8.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	1.850.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			1.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				25 Dokumen	25 Dokumen	288.817.500,00	233.102.000,00	233.102.000,00	-55.715.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			288.817.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				30 Dokumen	30 Dokumen	5.000.000,00	10.870.000,00	10.870.000,00	5.870.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1100 Dokumen	1100 Dokumen	94.819.500,00	0,00	0,00	-94.819.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				50 Dokumen	50 Dokumen	3.100.000,00	26.290.000,00	26.290.000,00	23.190.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	1 Orang	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				50 Dokumen	50 Dokumen	29.920.000,00	89.485.000,00	89.485.000,00	59.565.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			29.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				80 Dokumen	80 Dokumen	150.330.000,00	196.900.000,00	196.900.000,00	46.570.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			150.330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Pagaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				30 Laporan	30 Laporan	2.000.000,00	210.000,00	210.000,00	-1.790.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	13 Orang	0,00	19.530.000,00	19.530.000,00	19.530.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	20 Dokumen	0,00	7.140.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	15 Dokumen	0,00	89.936.000,00	89.936.000,00	89.936.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-			303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	25 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				55 Dokumen	55 Dokumen	23.100.000,00	92.250.000,00	92.250.000,00	69.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS GAROGA							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				13 Unit	13 Unit	9.312.000,00	0,00	0,00	-9.312.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				382 Orang	382 Orang	196.850.000,00	148.850.000,00	148.850.000,00	-48.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				196.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	500 Orang	0,00	37.260.000,00	37.260.000,00	37.260.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1221 Orang	1221 Orang	93.695.000,00	0,00	0,00	-93.695.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3823 Orang	3823 Orang	10.000.000,00	19.140.000,00	19.140.000,00	9.140.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				930 Orang	930 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2100 Orang	2100 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				51 Orang	51 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				197 Orang	197 Orang	15.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-5.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	302.226.000,00	302.226.000,00	292.226.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	28.840.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-23.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				28.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	19.760.000,00	19.760.000,00	-240.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	96.500.000,00	124.440.000,00	124.440.000,00	27.940.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			96.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	294.394.000,00	251.220.000,00	251.220.000,00	-43.174.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			294.394.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	-3.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	350 Orang	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	200 Orang	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00	23.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	110.238.000,00	119.010.000,00	119.010.000,00	8.772.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			110.238.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS HUTABAGINDA							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	10.312.000,00	0,00	0,00	-10.312.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1200 Orang	146.000.000,00	0,00	0,00	-146.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	850 Orang	0,00	54.990.000,00	44.100.000,00	44.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				77.916.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	200 Orang	0,00	98.170.000,00	98.170.000,00	98.170.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				98.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2771 Orang	100 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7859 Orang	7859 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	7200 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1466 Orang	1466 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				2.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4947 Orang	4947 Orang	12.450.000,00	0,00	0,00	-12.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				8.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				70 Orang	70 Orang	14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	21.600.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-15.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				22.600.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	7.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-4.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				2.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	356.961.000,00	371.900.000,00	296.480.000,00	-60.481.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				396.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.100.000,00	10.090.000,00	10.090.000,00	2.990.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				11.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	65.436.000,00	0,00	0,00	-65.436.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	17.200.000,00	32.320.000,00	22.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				3.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	86.100.000,00	150.190.000,00	122.180.000,00	36.080.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				166.570.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	201.778.500,00	280.500.000,00	268.500.000,00	66.721.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				280.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	15.690.000,00	15.690.000,00	15.690.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				33.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	-2.920.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -				15.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	100 Orang	0,00	22.140.000,00	22.140.000,00	22.140.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				22.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	15 Orang	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	50 Dokumen	0,00	7.140.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				7.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	14.400.000,00	113.600.000,00	113.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-			303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	19.960.000,00	126.930.000,00	126.930.000,00	106.970.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				122.980.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS JANJI ANGKOLA							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	7.888.000,00	0,00	0,00	-7.888.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				178 Orang	178 Orang	98.900.000,00	36.740.000,00	36.740.000,00	-62.160.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				98.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	50 Orang	0,00	71.220.000,00	71.220.000,00	71.220.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				521 Orang	521 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1786 Orang	1786 Orang	10.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-2.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				715 Orang	715 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				947 Orang	947 Orang	9.130.000,00	0,00	0,00	-9.130.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				32 Orang	32 Orang	9.900.000,00	0,00	0,00	-9.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				700 Orang	700 Orang	19.800.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	-13.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	6.600.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-2.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				700 Dokumen	700 Dokumen	265.601.000,00	242.874.000,00	242.874.000,00	-22.727.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			265.601.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				20 Dokumen	20 Dokumen	5.000.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00	5.230.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				30 Dokumen	30 Dokumen	46.819.000,00	0,00	0,00	-46.819.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	24.204.000,00	24.204.000,00	13.204.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				30 Orang	30 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				50 Dokumen	50 Dokumen	97.300.000,00	93.630.000,00	93.630.000,00	-3.670.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			97.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				50 Dokumen	50 Dokumen	160.716.000,00	211.527.000,00	211.527.000,00	50.811.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			160.716.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				20 Laporan	20 Laporan	4.000.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-2.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	20 Orang	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	60 Dokumen	0,00	4.008.000,00	4.008.000,00	4.008.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	50 Dokumen	0,00	84.280.000,00	84.280.000,00	84.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				20 Dokumen	20 Dokumen	19.960.000,00	104.880.000,00	104.880.000,00	84.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LUMBAN SINAGA							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	10 Unit	9.215.000,00	0,00	0,00	-9.215.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				314 Orang	314 Orang	102.100.000,00	67.900.000,00	67.900.000,00	-34.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	300 Orang	0,00	40.920.000,00	40.920.000,00	40.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			40.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1090 Orang	1090 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2995 Orang	2995 Orang	10.000.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	-2.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				636 Orang	636 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1642 Orang	1642 Orang	22.947.000,00	0,00	0,00	-22.947.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	8.923.500,00	0,00	0,00	-8.923.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	296 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				327 Orang	327 Orang	5.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-1.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	277.824.000,00	272.270.000,00	272.270.000,00	-5.554.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			287.824.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	16.304.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-11.304.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			17.304.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	102.455.000,00	0,00	0,00	-102.455.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.150.000,00	15.850.000,00	15.850.000,00	5.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			11.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				800 Orang	800 Orang	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	36.327.000,00	119.920.000,00	119.920.000,00	83.593.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			37.327.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	195.985.500,00	231.180.000,00	231.180.000,00	35.194.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			205.985.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	-560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				160 Orang	160 Orang	21.954.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-6.954.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			22.954.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	103.530.000,00	103.530.000,00	103.530.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	22.500.000,00	103.420.000,00	103.420.000,00	80.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			23.500.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARA							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				14 Unit	14 Unit	8.820.000,00	0,00	0,00	-8.820.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				321 Orang	321 Orang	204.465.000,00	0,00	0,00	-204.465.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	58 Orang	0,00	40.125.000,00	40.125.000,00	40.125.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	30 Orang	0,00	81.450.000,00	81.450.000,00	81.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				909 Orang	909 Orang	204.290.000,00	0,00	0,00	-204.290.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	4.940.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				892 Orang	892 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1964 Orang	1964 Orang	12.450.000,00	0,00	0,00	-12.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	22.050.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-15.050.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	7.100.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-5.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				7.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	20 Dokumen	30.300.000,00	279.658.000,00	279.658.000,00	249.358.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				35.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	5 Dokumen	11.000.000,00	13.330.000,00	13.330.000,00	2.330.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	38.958.000,00	0,00	0,00	-38.958.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	20 Dokumen	0,00	34.095.000,00	34.095.000,00	34.095.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				3 Orang	3 Orang	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20 Dokumen	20 Dokumen	70.000.000,00	87.855.000,00	124.495.000,00	54.495.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				30 Dokumen	30 Dokumen	190.401.000,00	238.600.000,00	238.600.000,00	48.199.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				190.401.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				20 Laporan	20 Laporan	27.000.000,00	38.440.000,00	1.800.000,00	-25.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	13.020.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	10 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	6.420.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	20 Dokumen	0,00	83.375.000,00	83.375.000,00	83.375.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				8 Dokumen	8 Dokumen	19.960.000,00	95.055.000,00	95.055.000,00	75.095.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS ONAN HASANG							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				13 Unit	13 Unit	8.586.000,00	0,00	0,00	-8.586.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				287 Orang	287 Orang	55.000.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	-24.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			127.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	96.900.000,00	96.900.000,00	96.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				912 Orang	912 Orang	60.250.500,00	0,00	0,00	-60.250.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			60.250.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2538 Orang	2538 Orang	55.400.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	-41.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			55.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				896 Orang	896 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1772 Orang	1772 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				27 Orang	27 Orang	16.500.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	-10.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				77 Orang	77 Orang	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	222.838.000,00	260.710.000,00	260.710.000,00	37.872.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			222.838.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.100.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-1.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	60.500.000,00	0,00	0,00	-60.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				60.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	21.360.000,00	23.420.000,00	13.420.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000,00	142.160.000,00	140.100.000,00	20.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	12 Dokumen	174.861.500,00	231.210.000,00	231.210.000,00	56.348.500,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				174.861.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	16 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	8.560.000,00	8.560.000,00	8.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	83.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-			303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara			709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	87.580.000,00	87.580.000,00	72.580.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANGARIBUAN							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				100 Unit	100 Unit	8.568.000,00	0,00	0,00	-8.568.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				335 Orang	335 Orang	103.300.000,00	0,00	0,00	-103.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	340 Orang	0,00	42.480.000,00	42.480.000,00	42.480.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			156.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	80.040.000,00	80.040.000,00	80.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				904 Orang	904 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3686 Orang	3686 Orang	10.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-2.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				634 Orang	634 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1943 Orang	1943 Orang	9.960.000,00	0,00	0,00	-9.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				26 Orang	26 Orang	30.800.000,00	0,00	0,00	-30.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	24 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				56 Orang	56 Orang	6.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				71 Dokumen	71 Dokumen	294.438.000,00	258.340.000,00	258.340.000,00	-36.098.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			294.438.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				14 Dokumen	14 Dokumen	7.100.000,00	11.050.000,00	11.050.000,00	3.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				35 Dokumen	35 Dokumen	40.779.000,00	0,00	0,00	-40.779.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				120 Dokumen	120 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	35 Dokumen	0,00	21.298.000,00	21.348.000,00	21.348.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				36 Orang	36 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				120 Dokumen	120 Dokumen	108.900.000,00	126.500.000,00	126.500.000,00	17.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			108.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				16 Dokumen	16 Dokumen	174.555.000,00	0,00	0,00	-174.555.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	230.700.000,00	230.700.000,00	230.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			180.704.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	0 Laporan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	20 Orang	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	10 Orang	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	25 Dokumen	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	25 Dokumen	0,00	100.340.000,00	100.340.000,00	100.340.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	10 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	19.960.000,00	74.592.000,00	74.542.000,00	54.582.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANIARAN							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	10 Unit	7.244.000,00	0,00	0,00	-7.244.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				307 Orang	307 Orang	70.900.000,00	61.100.000,00	61.100.000,00	-9.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			70.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	51.260.000,00	51.260.000,00	51.260.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			27.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				847 Orang	847 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2101 Orang	2101 Orang	14.000.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				981 Orang	981 Orang	12.150.000,00	0,00	0,00	-12.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1288 Orang	1288 Orang	22.076.000,00	0,00	0,00	-22.076.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	26.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	-16.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			26.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	6.600.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	-2.010.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				200 Dokumen	200 Dokumen	216.151.000,00	225.686.000,00	225.686.000,00	9.535.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100 Dokumen	100 Dokumen	7.100.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				7.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				200 Dokumen	200 Dokumen	53.555.000,00	0,00	0,00	-53.555.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				250 Dokumen	250 Dokumen	11.000.000,00	26.920.000,00	26.920.000,00	15.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	20 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				300 Dokumen	300 Dokumen	94.900.000,00	102.585.000,00	102.585.000,00	7.685.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				94.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				300 Dokumen	300 Dokumen	149.045.500,00	195.025.000,00	195.025.000,00	45.979.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				149.045.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				50 Laporan	50 Laporan	6.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	150 Orang	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				17.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	50 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	250 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIKAN DAN KESEHATAN				20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	300 Dokumen	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				30.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-			303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				80 Dokumen	80 Dokumen	19.960.000,00	63.623.000,00	63.623.000,00	43.663.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Paniaran	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PARMONANGAN							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				20 Unit	20 Unit	8.496.000,00	0,00	0,00	-8.496.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				8.496.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	91.100.000,00	33.660.000,00	33.660.000,00	-57.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				9.110.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	73.788.000,00	73.788.000,00	73.788.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				579 Orang	579 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1713 Orang	1713 Orang	12.000.000,00	18.360.000,00	18.360.000,00	6.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				682 Orang	682 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				899 Orang	899 Orang	7.470.000,00	0,00	0,00	-7.470.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.470.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	30.300.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-18.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			30.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.600.000,00	3.300.000,00	1.700.000,00	-4.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	276.489.000,00	263.194.000,00	263.194.000,00	-13.295.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			276.489.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	17.150.000,00	17.150.000,00	12.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	83.295.000,00	0,00	0,00	-83.295.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			83.295.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	25.912.000,00	25.912.000,00	14.912.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				60 Orang	60 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	94.400.000,00	123.990.000,00	124.390.000,00	29.990.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			94.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	172.801.000,00	228.910.000,00	229.360.000,00	56.559.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			172.801.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	113.770.000,00	113.770.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			113.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	-1.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	20 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	10 Orang	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			1.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	20 Dokumen	0,00	5.430.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	90.440.000,00	90.440.000,00	90.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	25 Dokumen	0,00	125.770.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	19.960.000,00	88.180.000,00	87.330.000,00	67.370.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PARSINGKAMAN							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				12 Unit	12 Unit	8.838.000,00	0,00	0,00	-8.838.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				341 Orang	341 Orang	129.000.000,00	40.080.000,00	40.080.000,00	-88.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	200 Orang	0,00	64.600.000,00	64.600.000,00	64.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				894 Orang	894 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2922 Orang	2922 Orang	10.000.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	-3.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1339 Orang	1339 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1955 Orang	1955 Orang	11.620.000,00	0,00	0,00	-11.620.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				22 Orang	22 Orang	12.600.000,00	0,00	0,00	-12.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				156 Orang	156 Orang	25.800.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	-17.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			26.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				320 Orang	320 Orang	6.600.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-2.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	312.155.000,00	264.870.000,00	264.870.000,00	-47.285.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00	1.310.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	36.347.000,00	0,00	0,00	-36.347.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	19.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				28 Orang	28 Orang	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	100.500.000,00	139.830.000,00	139.830.000,00	39.330.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			100.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	180.066.500,00	238.660.000,00	238.660.000,00	58.593.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	-1.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	160 Orang	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	40 Orang	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	100 Dokumen	0,00	5.430.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	125.800.000,00	125.800.000,00	125.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	24 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	19.960.000,00	71.760.000,00	71.760.000,00	51.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SARULLA							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				7 Unit	7 Unit	8.502.000,00	0,00	0,00	-8.502.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				260 Orang	260 Orang	118.200.000,00	43.420.000,00	43.420.000,00	-74.780.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			118.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	59 Orang	0,00	70.484.000,00	70.484.000,00	70.484.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			70.484.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				721 Orang	721 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2289 Orang	2289 Orang	10.000.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	-800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				950 Orang	950 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1115 Orang	1115 Orang	10.790.000,00	0,00	0,00	-10.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	11.700.000,00	0,00	0,00	-11.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				143 Orang	143 Orang	17.300.000,00	24.180.000,00	8.800.000,00	-8.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				330 Orang	330 Orang	6.600.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	-3.480.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	302.517.000,00	258.735.000,00	258.735.000,00	-43.782.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			302.517.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.100.000,00	9.970.000,00	9.970.000,00	2.870.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	46.577.000,00	0,00	0,00	-46.577.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.900.000,00	21.826.000,00	21.826.000,00	11.926.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				750 Orang	750 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	90.500.000,00	134.160.000,00	134.160.000,00	43.660.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			90.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	173.058.500,00	228.836.000,00	228.836.000,00	55.777.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	21 Orang	0,00	8.800.000,00	24.180.000,00	24.180.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	4 Orang	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	100 Dokumen	0,00	5.430.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	106.900.000,00	106.900.000,00	106.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	19.960.000,00	72.784.000,00	72.784.000,00	52.824.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIATAS BARITA							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				30 Unit	30 Unit	8.278.000,00	0,00	0,00	-8.278.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				321 Orang	321 Orang	93.800.000,00	0,00	0,00	-93.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	12 Orang	0,00	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			129.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	77.640.000,00	77.640.000,00	77.640.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1743 Orang	1743 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2824 Orang	2824 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	12 Orang	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				832 Orang	832 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1743 Orang	1743 Orang	10.560.000,00	0,00	0,00	-10.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				24 Orang	24 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				320 Orang	320 Orang	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	12 Orang	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			31.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			12.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	279.037.000,00	0,00	0,00	-279.037.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	248.638.000,00	248.638.000,00	248.638.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			251.771.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.100.000,00	0,00	0,00	-7.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	9.730.000,00	9.730.000,00	9.730.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			9.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	58.296.000,00	0,00	0,00	-58.296.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	20.630.000,00	20.630.000,00	20.630.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.090.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				30 Orang	30 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	101.700.000,00	0,00	0,00	-101.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	85.960.000,00	85.960.000,00	85.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			83.090.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	168.577.500,00	222.140.000,00	222.140.000,00	53.562.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			168.577.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				1.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	50 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	50 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	93.780.000,00	93.780.000,00	93.780.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-			303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara			709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	19.960.000,00	0,00	0,00	-19.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	111.090.000,00	111.090.000,00	111.090.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				110.990.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIBORONGBORONG							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				18 Unit	18 Unit	8.916.000,00	0,00	0,00	-8.916.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				430 Orang	430 Orang	110.500.000,00	73.200.000,00	73.200.000,00	-37.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			110.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	270 Orang	0,00	53.700.000,00	53.700.000,00	53.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			53.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1320 Orang	1320 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5844 Orang	5844 Orang	16.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7283 Orang	7283 Orang	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2473 Orang	2473 Orang	8.130.000,00	0,00	0,00	-8.130.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	25.800.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	-13.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			25.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				550 Orang	550 Orang	6.600.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	-2.010.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	300.340.000,00	264.400.000,00	264.400.000,00	-35.940.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			300.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	7.100.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	1.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	73.593.000,00	0,00	0,00	-73.593.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	9.000.000,00	22.880.000,00	22.880.000,00	13.880.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				6500 Orang	6500 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	99.200.000,00	167.875.000,00	167.875.000,00	68.675.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			99.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				15 Dokumen	15 Dokumen	183.445.000,00	242.960.000,00	242.960.000,00	59.515.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			183.445.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	240 Orang	0,00	28.350.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			28.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	365 Orang	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	104.900.000,00	104.900.000,00	104.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			177.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	19.960.000,00	39.810.000,00	39.810.000,00	19.850.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siborong Borong II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitampurung Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar I Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Lobu Siregar II Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Siaro Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Silait-Lait Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sitabotabo Toruan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SILANGIT							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				12 Unit	12 Unit	7.270.000,00	0,00	0,00	-7.270.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				341 Orang	341 Orang	71.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	75.500.000,00	75.500.000,00	75.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1119 Orang	1119 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3011 Orang	3011 Orang	5.000.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	3.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1622 Orang	1622 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1622 Orang	1622 Orang	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	20.250.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	-6.050.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	6.300.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				50 Dokumen	50 Dokumen	232.892.000,00	263.684.000,00	228.434.000,00	-4.458.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			235.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				30 Dokumen	30 Dokumen	21.400.000,00	0,00	0,00	-21.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				30 Dokumen	30 Dokumen	5.000.000,00	14.530.000,00	14.530.000,00	9.530.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				50 Dokumen	50 Dokumen	47.792.000,00	0,00	0,00	-47.792.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				15 Dokumen	15 Dokumen	11.000.000,00	32.630.000,00	32.630.000,00	21.630.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				120 Dokumen	120 Dokumen	90.900.000,00	112.400.000,00	112.400.000,00	21.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			91.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				150 Dokumen	150 Dokumen	149.117.500,00	206.900.000,00	194.900.000,00	45.782.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			149.118.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				25 Laporan	25 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIKAN DAN KESEHATAN			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	40 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	20 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	8.880.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	26.900.000,00	62.150.000,00	62.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				15 Dokumen	15 Dokumen	19.960.000,00	55.650.000,00	55.650.000,00	35.690.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMANGUMBAN							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				30 Unit	30 Unit	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				178 Orang	178 Orang	82.700.000,00	0,00	0,00	-82.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	200 Orang	0,00	47.360.000,00	47.360.000,00	47.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	106 Orang	0,00	60.520.000,00	60.520.000,00	60.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			60.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				570 Orang	570 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1655 Orang	1655 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1655 Orang	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				642 Orang	642 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				880 Orang	880 Orang	7.040.000,00	0,00	0,00	-7.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	22.800.000,00	0,00	0,00	-22.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	55 Orang	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	10 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	253.968.000,00	0,00	0,00	-253.968.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	240.336.000,00	240.336.000,00	240.336.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				238.938.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	10 Dokumen	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				15.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	56.603.000,00	0,00	0,00	-56.603.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	23.520.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				22.974.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	100.900.000,00	0,00	0,00	-100.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	101.350.000,00	101.350.000,00	101.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				101.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	158.835.000,00	0,00	0,00	-158.835.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	208.880.000,00	208.880.000,00	208.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				220.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			1.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	200 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	100 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	5.430.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			7.490.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	77.400.000,00	77.400.000,00	77.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	100 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	19.960.000,00	0,00	0,00	-19.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	79.410.000,00	79.410.000,00	79.410.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIPAHUTAR							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				8 Unit	8 Unit	9.276.000,00	0,00	0,00	-9.276.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				601 Orang	601 Orang	136.000.000,00	52.680.000,00	52.680.000,00	-83.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	64.800.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1909 Orang	1909 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6180 Orang	6180 Orang	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				934 Orang	934 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3172 Orang	3172 Orang	12.450.000,00	0,00	0,00	-12.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	10.800.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	2.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				270 Orang	270 Orang	6.600.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	10.650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	344.945.000,00	280.402.000,00	280.402.000,00	-64.543.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			344.945.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.100.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	550.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	55.932.000,00	0,00	0,00	-55.932.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	28.272.000,00	28.272.000,00	22.272.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	55.500.000,00	154.320.000,00	154.320.000,00	98.820.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	188.963.000,00	252.720.000,00	252.720.000,00	63.757.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	126.500.000,00	126.500.000,00	126.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	19.960.000,00	60.895.000,00	60.895.000,00	40.935.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIPULTAK							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	10 Unit	7.344.000,00	0,00	0,00	-7.344.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	180 Orang	70.900.000,00	0,00	0,00	-70.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	180 Orang	0,00	47.460.000,00	47.460.000,00	47.460.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	162 Orang	0,00	51.960.000,00	51.960.000,00	51.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1849 Orang	1849 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1125 Orang	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				734 Orang	734 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1102 Orang	1102 Orang	6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				125 Orang	125 Orang	22.800.000,00	0,00	0,00	-22.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	43 Orang	0,00	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	6.900.000,00	0,00	0,00	-6.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	15 Orang	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	236.866.000,00	0,00	0,00	-236.866.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	278.338.000,00	218.338.000,00	218.338.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.100.000,00	0,00	0,00	-8.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	5.725.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	60.270.000,00	0,00	0,00	-60.270.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	22.795.000,00	22.795.000,00	22.795.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	50 Orang	8.200.000,00	0,00	0,00	-8.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				24 Dokumen	24 Dokumen	98.100.000,00	0,00	0,00	-98.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	89.690.000,00	91.950.000,00	91.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				15 Dokumen	15 Dokumen	150.326.500,00	0,00	0,00	-150.326.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	209.720.000,00	197.720.000,00	197.720.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	2.860.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	43 Orang	0,00	41.280.000,00	41.280.000,00	41.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	12.240.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	20.340.000,00	80.340.000,00	80.340.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				12.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	19.960.000,00	0,00	0,00	-19.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	66.780.000,00	66.780.000,00	66.780.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SITADATADA							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				8 Unit	8 Unit	7.416.000,00	0,00	0,00	-7.416.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				225 Orang	225 Orang	70.900.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00	-19.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			72.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	30 Orang	0,00	66.084.000,00	66.084.000,00	66.084.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			66.084.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				866 Orang	866 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1984 Orang	1984 Orang	14.000.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	-8.240.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				728 Orang	728 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				694 Orang	694 Orang	6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	22.800.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-17.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			22.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	6.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-3.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				900 Dokumen	900 Dokumen	239.301.000,00	224.476.000,00	224.476.000,00	-14.825.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	8.100.000,00	7.390.000,00	7.390.000,00	-710.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			8.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	60.262.000,00	0,00	0,00	-60.262.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.500.000,00	23.822.000,00	23.822.000,00	13.322.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	20 Orang	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	97.800.000,00	133.370.000,00	133.370.000,00	35.570.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			97.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	152.349.000,00	199.800.000,00	199.800.000,00	47.451.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			153.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	-4.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	18 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				15.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.272.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	65.190.000,00	65.190.000,00	65.190.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				10.830.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-			303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	- Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	19.960.000,00	63.570.000,00	63.570.000,00	43.610.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar**				**100 persen**	**100 persen**	**87.127.251.600,00**	**61.793.870.250,00**	**58.904.601.400,00**	**-26.151.416.400,00**							**60.975.835.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia*				150 dan 254 unit dan paket	150 dan 254 unit dan paket	33.090.362.000,00	7.595.352.000,00	7.358.147.000,00	-25.732.215.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		10.962.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	10 Unit	8.280.000,00	0,00	0,00	-8.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				27 layanan	27 layanan	53.244.154.300,00	53.485.562.250,00	51.179.268.400,00	-2.064.885.900,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		49.161.255.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				321 Orang	321 Orang	82.200.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	-58.680.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			92.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	120 Orang	0,00	103.320.000,00	103.320.000,00	103.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			96.572.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				710 Orang	710 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2786 Orang	2786 Orang	12.000.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	-3.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1055 Orang	1055 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2180 Orang	2180 Orang	6.640.000,00	0,00	0,00	-6.640.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	25.800.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-12.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			25.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	6.600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-4.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	265.708.000,00	251.471.000,00	251.471.000,00	-14.237.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			265.708.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	5.100.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	3.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			15.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	79.767.000,00	0,00	0,00	-79.767.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	28.680.000,00	28.680.000,00	22.680.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	115.700.000,00	121.970.000,00	121.970.000,00	6.270.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			115.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	170.249.000,00	223.353.000,00	223.353.000,00	53.104.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			180.249.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	800.000,00	800.000,00	-4.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	50 Orang	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			22.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	3 Orang	0,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			11.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	71.840.000,00	71.840.000,00	71.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			72.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	89.785.300,00	432.956.000,00	367.186.000,00	277.400.700,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	-		303.875.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**600.158.000,00**	**1.799.953.000,00**	**1.749.053.000,00**	**199.804.000,00**							**799.962.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				21 dokumen	21 dokumen	510.158.000,00	1.749.953.000,00	1.749.053.000,00	1.238.895.000,00			-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		709.962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	19.960.000,00	77.520.000,00	77.520.000,00	57.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			19.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**136.415.015.980,00**	**160.206.448.369,00**	**166.637.041.698,00**	**30.222.025.718,00**							**167.659.061.102,00**	

BAB V

PENUTUP

Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dalam penyusunan Renja Perubahan 2024 tetap berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat bergantung dari sistem informasi yang ada dan konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama, karena pengukuran kinerja bersifat *on going proces* sehingga wajib secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator kinerja yang benar-benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai. Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performa organisasi, merupakan *entry point* terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan baik tergantung dari bagaimana merumuskan dan menjabarkan jenis atau bentuk intervensi sesuai dengan masalah-masalah spesifik yang ada. Dengan demikian metode dan tehnik melaksanakan program kegiatan merupakan hal yang sangat penting, sehingga program-program dimaksud dapat terlaksana dengan baik, efektif dan tepat sasaran.

Tarutung, 24 Juni 2024

KEPALA DINAS,

ALEXANDER G.P. GULTOM, SKM, MKM
PEMBINA TK. I
NIP. 19730318 199803 1 004

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA PERUBAHAN

RENJA PERUBAHAN

KECAMATAN PAHAE JULU
TAHUN 2024

TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja`-SKPD adalah Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Tahun 2020 – 2024 dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Kecamatan Pahae Julu sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) perlu menetapkan target Kinerja sehingga pada akhir tahun anggaran dapat diketahui pencapaian kinerjanya, hal ini dimaksudkan agar dapat lebih mudah mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Rancangan Renja Perubahan SKPD Kecamatan Pahae Julu Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Pahae Julu untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Pahae Julu ini dilandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5233);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif prakiraan maju. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan :

1. Mengacu pada RKPD
2. Mengacu pada Renstra SKPD
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi
5. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

a. Maksud

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kantor Camat Pahae Julu Tahun 2024 disusun dengan maksud:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Pahae Julu Tahun 2024
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara khususnya Kecamatan Pahae Julu;
3. Untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Pahae Julu, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada

norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) ini adalah :

1. Untuk menjadi acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
2. Untuk menjadi bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
3. Untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan kedalam Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kantor Camat Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kantor Camat Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN KANTOR CAMAT PAHAE JULU KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Kantor Camat Pahae Julu Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Camat Pahae Julu

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD yang memuat indikator sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kantor Camat Pahae Julu.

Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Camat Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Kantor Camat Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat kajian tentang rancangaan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN KANTOR CAMAT PAHE JULU KABUPATENTAPANULI UTARA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIANRENSTRA

Kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Pahae Julu s/d Tahun 2024 (tahun lalu) dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Pahae Julu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pahae Julu dapat dilihat pada Tabel T-C.29 pada lampiran.

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)*
PROVINSI SUMATERA UTARA KABUPATEN TAPANULI UTARA KECAMATAN PAHAE JULU

SKPD : Kantor Camat Pahae Julu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2022			Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2022	Tkt. Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
4.01.20.01	**KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU**									
4.01.4.01.20.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani**	12 Bulan	12 Bulan	**69.435900**	**67.953.400**	**95,79**	**96.351.340**		
4.01.4.01.20.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan benda pos lainnya	12 Bulan	12 Bulan	603.000,00	603.000,00	51,09	603.000,00		
4.01.4.01.20.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terpenuhinya Sarana Komunikasi, Air dan Listrik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	4.948.700,00	2.439.000,00	73,78	4.940.000,00		
4.01.4.01.20.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor Pejabat Pengelola Keuangan dan Asset daerah	12 Bulan	12 Bulan	29.905.400,00	29.201.900,00	99,57	28.988.400,00		
4.01.4.01.20.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	7.847.500,00	7.847.500,00	98,62	3.393.400,00		
4.01.4.01.20.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	13.360.600,00	13.359.835,00	87,65	13.379.400,00		
4.01.4.01.20.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	5.940.900,00	5.931.066,00	99,68	-		
4.01.4.01.20.01.01.12	Peneyediaan Komponen Instalasi Lsitrik/Penerangan bangunan	Terpenuhinya Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	-	-	-	-	-	-		
4.01.4.01.20.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	2.415.000,00	600.000,00	98,41	1.125.000,00		
4.01.4.01.20.01.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman Untuk Kegiatan Rutin Kantor	12 Bulan	12 Bulan	26.400.000,00	26.391.000,00	89,96	25.450.000,00		
4.01.4.01.20.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terjalinnya Koordinasi Lintas Sektor Terkait Yang Saling Mendukung	12 Bulan	12 Bulan	4.680.000,00	3.910.000,00	96,07	6.880.000,00		
4.01.4.01.20.01.01.24	Penyediaan Jasa Non PNS	Terbayarnya jasa non PNS (Petugas Kebersihan, Sopir, Petugas Jaga Malam)	12 Bulan	12 Bulan	50.548.000,00	50.400.000,00	99,71	54.000.000,00		

4.01.4.01.20.01.01.32	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah	Terjalinnya Koordinasi Lintas Sektor Terkait Yang Saling mendukung	12 Bulan	12 Bulan	44.010.000	43.950.000	99,24	38.250.000,00		
4.01.4.01.20.01.02	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**			**57.808.100**	**55.767.096**	85,61	**28.623.100**		
.094.01.4.01.20.01.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	-	-	-	-	-	-		
4.01.4.01.20.01.02.65	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kantor	12 Bulan	12 Bulan	41.435.700	39.397.900	86,01	33.024.800,00		
4.01.4.01.20.01.02.66	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	12 Bulan	12 Bulan	5.996.400	5.996.400	96,46	5.708.900,00		
4.01.4.01.20.01.02.67	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10.376.000	10.372.796	98,58	5.569.000,00		
4.01.4.01.20.01.02.68	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/mesin-mesin kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	-	-	-	-	-	-		
4.01.4.01.20.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase tingkat kepatuhan pegawai**			**-**	**-**	-	-		
4.01.4.01.20.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian olahraga/training	-	-	-	-	-	-		
4.01.4.01.20.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**			**4.540.000**	**2.920.000**	89,83	-		
4.01.4.01.20.01.05.01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Tersedianya Sumber Daya Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	4.540.000	2.920.000	89,83	-		
4.01.4.01.20.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan**			**5.014.600**	**2.634.600**	77,31	**6.504.100**		
4.01.4.01.20.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP SKPD	7 Set	7 Set	2.499.900	1.389.900	47,24	2.482.400,00		
4.01.4.01.20.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	7 Set	7 Set	2.514.700	1.244.700	93,32	2.523.600,00		
4.01.4.01.20.01.37	**Program Koordinasi Dan Pembinaan Pelaku Pembangunan di Kecamatan**	**Cakupan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kecamatan**			**110.900.200**	**107.112.100**	90,43			
4.01.4.01.20.01.37.01	Pendukung pelaksanaan kegiatan hari jadi Kabupaten Tapanuli Utara di Kecamatan	Tersedianya biaya pendukung pelaksanaan hari jadi Kabupaten di Kecamatan	1 Kegaiatan	1 Kegaiatan	11.119.300	11.119.300	88,53	13.298.200,00		
4.01.4.01.20.01.37.22	Forum dan konsultasi pemerintah di Kecamatan	Pelaku Pembangunan di Kecamatan Semakin Koordinatif	12 Pertemuan	12 Pertemuan	18.913.500	18.010.500	99,48	18.725.900,00		

4.01.4.01.20.01.37.24	Pembinaan PKK di Kecamatan	Tersedianya biaya untuk pembinaan PKK di Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	20.303.900	20.260.900	96,25	10.613.500,00		
4.01.4.01.20.01.37.27	Penyediaan jasa pelaksanaan pendataan e-KTP di Kecamatan	Tersedianya petugas e-KTP dan Pendataan Catatan Sipil	12 Bulan	12 Bulan	16.854.700	16.443.600	75,96	8.563.800,00		
4.01.4.01.20.01.37.28	Pendukung dan Koordinasi Pelaksanaan ADD/K dan Pembangunan Lainnya	Terlaksananya kegiatan ADD/K di Kecamatan	9 Bulan	9 Bulan	26.402.600	22.619.700	99,99	21.369.600,00		
4.01.4.01.20.01.37.29	Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Hari-hari besar di Kecamatan	Tersedianya biaya pendukung untuk Peringatan HUT dan Natal Oikumene Kecamatan Pahae Julu	2 Kegiatan	2 Kegiatan	18.975.500	17.156.500	78,14	30.799.000,00		
4.01.4.01.20.01.37.41	Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Terlaksananya perencanaan pembangunan di Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.034.900	25.014.900	100,00	23.839.700,00		
4.01.4.01.20.01.37.42	Pendukung kegiatan seni dan olahraga	Tersedianya biaya pendukung kegiatan seni dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	20.002.300	-	0,00	8.000.000,00		

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisa kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerka pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanna SKPD digunakan beberapa indicator antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Kantor Camat Pahae Julu merupakan salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang ikut serta dalam menunjang Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan pembangunan. Pencapaian kinerja Kecamatan Pahae Julu selama Tahun 2017 dalam berbagai bidang baik pemerintahan, kesejahteraan social, pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Sosial Budaya yang telah terealisasi pada Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan
    a) Telah dilaksanakan pembinaan kepada aparat Pemerintah Desa tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masalah-masalah yang terkait didalamnya.
    b) Telah dilaksanakan Pameran Pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara
    c) Dalam bidang kependudukan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembuatan KTP elektronik, telah dilaksanakan pelayanan perekaman e-KTP
    d) Mengenai pelayanan di bidang pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah, dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya ada blanko dimana setiap formulir yang dari Kepala Desa harus diketahui oleh Camat Pahae Julu yaitu (F1.35, F1.07, F1.21, dan F1.06) telah terlayani dengan baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku.
    e) Dalam bidang pajak bumi dan bangunan telah didistribusikan SPPT bagi wajib pajak PBB sebanyak 20 Desa + 1 Kelurahan.

2. Seksi Kesejahteraan Sosial
    a) Penyaluran Beras Miskin (Raskin) sudah terlaksana sampai dengan bulan Desember 2018, bulan ke-13, dan bulan ke-14
    b) Pendataan BPJS

c) Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan : Paskah Raya Kecamatan, HUT RI Ke-72, dan Perayaan Natal Oikumene
d) Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab)

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
   a) Pelaksanaan Musrenbang Desa tentang APBDes
   b) Pelaksanaan Musrenbang Desa tentang ADD/K dan Dana Desa
   c) Pembinaan PKK Desa Percontohan yaitu Desa Sitampurung dan Desa Sigumbang
   d) Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten
   e) Pencairan Honor/Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan BPD Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
   f) Pelaksanaan Gotong Royong Desa

Dengan persentasi realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2022 yaitu :

EVALUASI KINERJA PROGRAM (EKP)

Kode	Program	Bobot Program	Capian Kinerja
P1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	95,80 %
P2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100 %	85,61 %
P3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %
P4	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	89,83 %
P5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100 %	77,30 %
P6	Program Koordinasi Dan Pembinaan Pelaku Pembangunan	100 %	90,42 %

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Pahe Julu
Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan	Indeks	-	80				n/a				
2	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan admninistratif yang ditindaklanjuti	Persen		80				80				
4	Persentase pelayanan admnistrasi kependudukan (KTP dan KK) tepat waktu	Persen		80				90				
5	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	Persen	-	75				72				
6	Persentase pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	Persen		100				68				
7	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	-	60				58,25*				
8	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	-	100				100				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemeirntah (AKIP) Kecamatan	Nilai	-		C	B	B					
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen			100	100	100					
3	Persentase Realisasi Target PAD	Persen			70	75	80					
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Dokumen	-		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan					
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-		-	75	80					

6	Persentase kelembagaan Desa Yang Aktif	Persen			80	85	90					
7	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	-		100	100	100					
8	Persentase penduduk yang melakukan perekaman e-KTP	%	-		70	75	80					
9	Persentase penetapan APBDes sesuai dengan siklus pembangunan desa	%	-		100	100	100					

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan kondisi umum berbagai bidang yang ada di Kecamatan Pahae Julu, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentu saja menghadapi tantangan yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tuntutan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk taat pajak sehingga Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan PAD tidak bisa mencapai realisasi sampai dengan 100%
3. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan , dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
4. Terbatasnya jumlah personil dan anggaran
5. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
6. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos.
7. Dengan adanya Bandar Udara Silangit maka akses dari luar lebih gampang dan dikhawatirkan perdagangan Narkoba atau obat-obat terlarang mudah masuk.
8. Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pahae Julu.
9. Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidsk seimbangnya pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.

Sedangkan Peluang untuk pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Pahae Juluadalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati ke Camat.
2. Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur tugas,pokok, dan fungsi setiap seksi di Kantor Kecamatan Pahae Julu
3. Adanya hubungan atau koordinasi yang baik dengan stakeholder, Instansi, Pemerintah Desa atau organisasi kemasyarakatan lainnya sehingga ada dukungan dari lembaga atau partisipasi masyarakat yang cukup tinggimisalnya : Dinas Sosial, Dinas Pasar dan Kebersihan, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah sehingga memudahkan untuk pelayanan lanjutan.

4. Adanya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui Musrenbang Desa dan Kecamatan, Kegiatan gotong royong, dan sebagainya.
5. Adanya pemberdayaan peningkatan Aparat Kecamatan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya melalui program ijin belajar, bimtek dari Pemerintah Kabupaten maupun Lembaga penyelenggara diklat yang berhubungan dengan pelayanan publik dan ilmu lainnya.
6. Adanya pengalokasian anggaran dari Pemerintah untuk operasional kantor ataupun peningkatan sarana dan prasarana
7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
8. Adanya system administrasi kependudukan melalui program system aplikasi pendataan penduduk

Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan kondisi umum berbagai bidang yang ada di Kecamatan Pahae Julu, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentu saja menghadapi kendala dan permasalahan. Secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
2. Belum optimalnya tata kelola keuangan
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pahae Julu bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. **Peningkatan pelayanan kepada masyarakat**

   Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya. Perbaikan
   dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan

menjadi hal yang harus dilakukan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Peran strategis pelayanan Kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus dipehatikan, antara lain :

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu;
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Perwujudan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Tatakelola pemerintahan daerah yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Berbagai fenomena terakhir di Indonesia menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas tatakelola pemerintahan yang baik dan inovatif cenderung memiliki kinerja yang baik dibandingkan daerah lainnya. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih menemui kendala di Kabupaten Tapanuli Utara. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik.

Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik belum mampu menciptakan pelayanan publik yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Berbagai inovasi yang telah dilakukan dalam penerapan e-government, inovasi dalam pemanfaatan potensi daerah serta inovasi lainnya belum mampu secara optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga mengakibatkan

tingkat daya saing daerah masih rendah.

Adapun strategi yang dilakukan Kantor Kecamatan Pahae Julu dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan etos kerja dan disiplin aparat yang ada di Kantor Kecamatan Pahae Julu.
2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan untuk meningkatkan kualitas aparat yang ada di Kantor Kecamatan Pahae Julu.
3) Membangun budaya pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
4) Pemanfaatan anggaran operasional yang tersedia dengan optimal, efektif dan efisien.
5) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya perbaikan infrastruktur pendukung yang dapat mengoptimalkan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan peran serta pemuda.
6) Bekerja sama dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7) Meningkatkan peran PKK dalam pembangunan kemasyarakatan.
8) Bekerja sama dengan unsur pimpinan kecamatan dalam mewujudkan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
9) Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk membayar pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara.
10) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang ada di Kecamatan Pahae Julu
11) Berperan aktif dalam upaya perwujudan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA. Rencana Kerja Kecamatan Pahae Julu berdasarkan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pahae Julu.Untuk Tahun 2024, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Untuk lebih

jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat Tabel T-C.31.

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Nama SKPD : KANTOR CAMAT PAHE JULU

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6,00						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan layanan penunjang yang tertangani	12 Bulan	**1.456.895.376**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.428.328.800**	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Pahe Julu	Telaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Pahe Julu	Telaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat Daerah	12 Bulan	**10.380.004**	
	Administrasi Keuangan					**Administrasi Keuangan**				**4.999.400**	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Camat Pahe Julu	Tersusunnya Buku Lakip dan Evaluasi Renja			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Camat Pahe Julu	Tersusunnya Buku Lakip dan Evaluasi Renja	7 Set	2.499.700	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya Buku Laporan Keuangan Tahunan			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya Buku Laporan Keuangan Tahunan	7 Set	2.499.700	
	Administrasi Umum					**Administrasi Umum**				**302.554.631**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya Jasa Surat Menyurat			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.503.958	
	Penyediaan jasa pendukung teknis/administratif perkantoran	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya Jasa pendukung teknis/administrasi			Penyediaan jasa pendukung teknis/administratif perkantoran	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya Jasa pendukung teknis/administrasi	-	-	

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Pahe Julu	Tercukupinya Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Pahe Julu	Tercukupinya Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	20.554.875	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Pahe Julu	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas dan Honor Sopir			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Pahe Julu	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas dan Honor Sopir	12 Bulan	-	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kantor Camat Pahe Julu	Meningkatnya Kinerja Penatausahaan Keuangan di Kantor Camat			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kantor Camat Pahe Julu	Meningkatnya Kinerja Penatausahaan Keuangan di Kantor Camat	12 Bulan	115.939.461	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Camat Pahe Julu	Terbayarnya honor petugas kebersihan dan pembelian alat/bahan kebersihan			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Camat Pahe Julu	Terbayarnya honor petugas kebersihan dan pembelian alat/bahan kebersihan	12 Bulan	-	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya Alat Tulis Kantor			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	55.543.840	
			Tersedianya Alat Tulis Kantor					Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10.461.809	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya komponen instalasi listrik			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	-	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	-	
	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya penyediaan makanan minuman			Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya penyediaan makanan minuman	12 Bulan	25.450.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya kendaraan dinas/operasional			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	-	-	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor	-	-	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya pengadaan peralatan kantor			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya pengadaan peralatan kantor	Komputer dan printer	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas	12 Bulan	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan Terbayarnya honor petugas jaga malam			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan Terbayarnya honor petugas jaga malam	12 Bulan	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Pahe Julu	service, bbm			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Pahe Julu	service, bbm	12 Bulan	72.100.688	
	Pemeliharaan rutin/berkala	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya pemeliharaan peralatan			Pemeliharaan rutin/berkala	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung	12 Bulan	-	

	peralatan gedung kantor		gedung			peralatan gedung kantor					
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**					
	Pendidikan dan pelatihan formal	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya pendidikan dan formal			Pendidikan dan pelatihan formal	Kantor Camat Pahe Julu	Tersedianya pendidikan dan formal		-	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70%	**112.677.100**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				112.677.100	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**112.677.100**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Camat Pahe Julu	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		112.677.100	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Camat Pahe Julu	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Kegiatan	112.677.100	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			70	**1.065.000.000,00**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.065.000.000,00	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**1.116.036.929,84**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kantor Kelurahan Onan Hasang	Terbangunnya jalan lingkungan, pembangunan drainase, pembangunan irigasi di Kelurahan Onan Hasang		1.000.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kantor Kelurahan Onan Hasang	Terbangunnya jalan lingkungan, pembangunan drainase, pembangunan irigasi di Kelurahan Onan Hasang	6 Kegiatan	1.058.012.829,84	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Kelurahan Onan Hasang	Terlaksananya pembinaan PKK dan Pemberdayaan Lansia Kelurahan Onan Hasang		65.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Kelurahan Onan Hasang	Terlaksananya pembinaan PKK dan Pemberdayaan Lansia Kelurahan Onan Hasang	2 Kegiatan	58.024.100	
	Jumlah				**2.634.572.476**					**2.974.976.864**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pahae Julu yang tertuang dalam Rencana Kerja ini merupakan kumpulan kegiatan yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024. Secara terperinci rencana program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Pahae Julu Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini yang juga memuat :

1. Program dan Kegiatan Kantor Camat Pahe Julu Tahun Anggaran 2024.
2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan).
3. Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara
4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiran Maju Tahun 2024

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Mempedomani Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional Tahun 2020-2024, disampaikan bahwa 7 agenda pembangunan RPJMNIVTahun 2020-2024 meliputi :

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan
   b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara

   rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

   a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;

b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah belum berkembang;
c. Peningkatandaya saing wilayah yang inklusif;
d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah;serta
e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkaraktermelalui :
   a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
   b. Penguatanpelaksanaan perlindungan sosial;RPJMD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2019-2024
   c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
   d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
   e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
   f. Pengentasan kemiskinan; dan
   g. Peningkatan produktivitas daya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara–bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa–bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukumdan aturan, tekun dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai–nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilakukan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
   a. Memperkuat ketahanan budaya bangsa
   b. Memajukan kebudayaan;
   c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan penghayatan nilai agama;
   d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga;
   e. Meningkatkan budaya literasi.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastrukturwilayah;
b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
d. Rehabilitasi sarana prasarana yang sudah tidak efisien;
e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alamdan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan iklim. Pembangunan lingkungan hidup serta peningkatan ketahan bencana dan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :
   RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024
   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
   b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
   c. Pembangunan rendah karbon

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
   a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
   c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanansiber;
   d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
   e. MempermudahaksesterhadappelayanandanperlindunganWNIdiluarnegeri.

Agenda pembangunan nasional selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan di wilayah masing-masing guna pencapaian target pembangunan secara nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN SKPD

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Kantor Camat Pahe Julu Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada misinya bertujuan :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan

Dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan

3.3 PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan :
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah

2. Administrasi Keuangan, sub kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Pembuatan Laporan Evaluasi Renja
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Umum , sub kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan listrik
3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8) Penyediaan makanan dan minuman rapat
9)Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan
10) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
11) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kenderaan dinas/operasional
13) Pemeliharaan rutin Peralatan Kantor
14) Pengadaan Peralatan Kantor

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, sub kegiatan :
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

Pemberdayaan Kelurahan, sub kegiatan :

1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
2) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

Secara terperinci dapat dilihat pada Tabel TC.33

TABEL TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KECAMATAN PAHAE JULU KABUPATEN TAPANULI UTARA

SKPD : KANTOR CAMAT PAHE JULU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	7	8	9	10	11
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**129.317.970**				**133.083.869**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Telaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	-			12 Bulan	52.500.000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**								
7	01	01	2.02	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Buku Lakip dan Evaluasi Renja	Kantor Camat Pahe Julu	3 Bulan	3.150.000			3 Bulan	2.624.685
7	01	01	2.02	09	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Buku Laporan Keuangan Tahunan	Kantor Camat Pahe Julu	3 Bulan	3.150.000			3 Bulan	2.624.685
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Umum**								
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	1.000.000			12 Bulan	633.150
					Penyediaan jasa pendukung teknis/administratif perkantoran	Tersedianya Jasa pendukung teknis/administrasi	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	-			12 Bulan	-
7	01	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	23.700.00			12 Bulan	5.197.500
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas dan Honor Sopir	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	37.150.000			12 Bulan	-

7	01	01	2.03	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Kinerja Penatausahaan Keuangan di Kantor Camat	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	27.955.200			12 Bulan	29.316.420
7	01	01	2.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya honor petugas kebersihan dan pembelian alat/bahan kebersihan	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	54.604.764			12 Bulan	54.000.000
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	15.286.750			12 Bulan	14.044.800
						Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor Kelurahan Siborongborong	12 Bulan	-			12 Bulan	-
7	01	01	2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	-			12 Bulan	2.645.370
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	1.991.400			12 Bulan	-
7	01	01	2.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	-			12 Bulan	-
7	01	01	2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya penyediaan makanan minuman	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	15.076.000			12 Bulan	-
7	01	01	2.03	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	49.950.000			12 Bulan	-
7	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	-			12 Bulan	-
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	-			12 Bulan	-
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan peralatan kantor	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	-			12 Bulan	-
7	01	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	-			12 Bulan	3.150.000
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan Terbayarnya honor petugas jaga malam	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	-			12 Bulan	23.100.000
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	service, bbm	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	-			12 Bulan	18.231.360
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	-			12 Bulan	-
7	**01**	**01**	**2.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya pendidikan dan formal	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	-			12 Bulan	-
													-
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				112.677.100				118.310.955
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								-

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Camat Pahe Julu	12 Bulan	47.348.000			12 Bulan	118.310.955
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				1.065.000.000				1.118.250.000
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								-
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya jalan lingkungan, pembangunan drainase, pembangunan irigasi di Kelurahan Onan Hasang	Kantor Kelurahan Onan Hasang	100%	132.934.800			100 %	1.050.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pembinaan PKK dan Pemberdayaan Lansia Kelurahan Onan Hasang	Kantor Kelurahan Onan Hasang	12 Bulan	67.064.900			12 Bulan	68.250.000

BAB V

PENUTUP

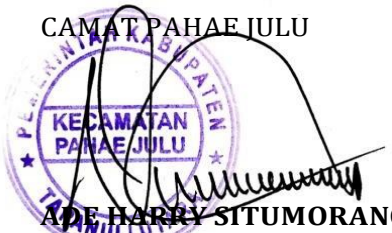
Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkanRancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kantor Kecamatan Pahae Julu Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Pahae Julu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kantor Kecamatan Pahae Julu Tahun 2024 ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Pahae Julu pada Tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan.

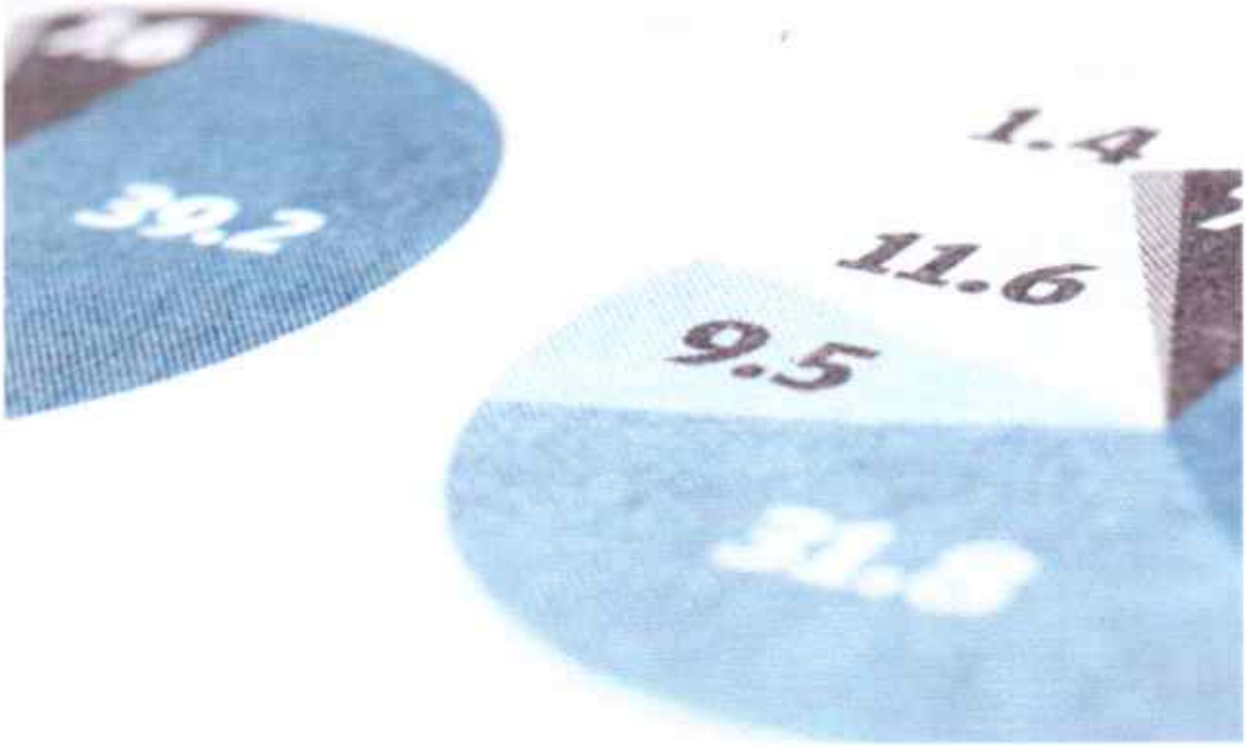
Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kantor Kecamatan Pahae Julu Tahun 2024 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pahae Julu. Melalui Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kantor Kecamatan Pahae Julu Tahun 2024 ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkancapaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kantor Kecamatan Pahae Julu Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pahae Julu, 2024

CAMAT PAHAE JULU



ADE HARRY SITUMORANG, SSTP,MSP
PENATA TK I
NIP. 19871026 2006021001



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2024
KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Siatas Barita menyusun Renja Perubahan Kecamatan Siatas Barita Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Siatas Barita. Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Siatas Barita Tahun 2020-2024 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Tapanuli Utara .

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

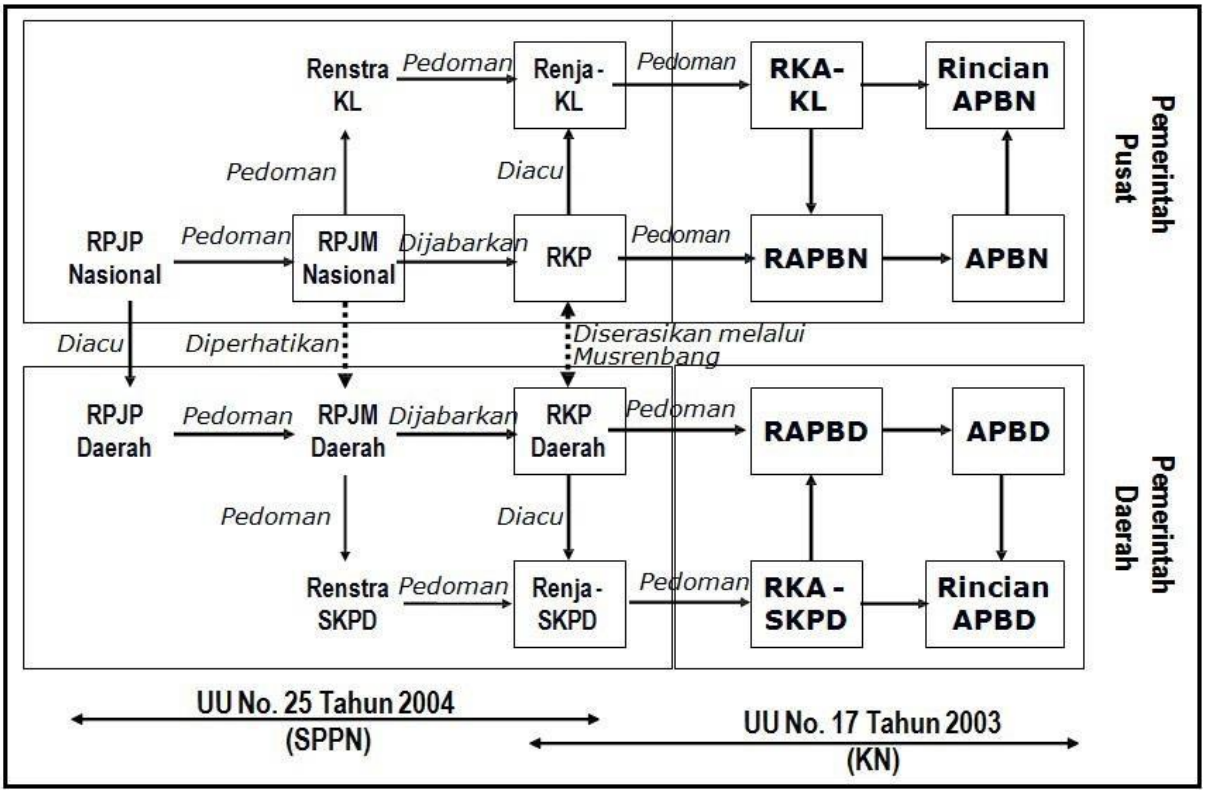
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD.

Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

d Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi , kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daera;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

h. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

j. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Tahun 2024 Kecamatan Siatas Barita disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Siatas Barita dalam penyusunan RKA Kecamatan Siatas Barita

Tahun 2025. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 Kecamatan Siatas Barita adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Siatas Barita Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Siatas Barita Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA S/D TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. PENUTUP

BAB II.

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SAMPAI TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Siatas Barita Tahun 2020-2024 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Siatas Barita

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan Startegis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran		Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
							Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi		
1	Unsur Kewilayahan	Kantor Kecamatan Siatas Barita		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Persen	100	100	1.805.260.027	1.752.249.247		
				Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah					30.045.800	28.061.560		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA SKPD	Dokumen	2 Dok	2 Dok	2.647.500	1.794.540	Penyusunan RKA memalui aplikasi SIPD sudah dapat dilihat dan dipelajari dari youtube sehingga konsultasi ke Bappedalitbang dan Badan Pengelola Keuangan	

							dan Asset Daerah dapat dioptimalisasi
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dokumen	2 Dok	2 Dok	2.738.300	1.794.740	Penyusunan DPA memalui aplikasi SIPD sudah dapat dilihat dan dipelajari dari youtube sehingga konsultasi ke Bappedalitbang dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dapat dioptimalisasi
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LKIP	Laporan	1 Lap	1 Lap	2.160.000	1.072.280	
Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22.500.000	22.500.000	-

Daerah	kinerja perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang	23 orang	23 orang	1.525.001.627	1.506.865.901	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	38.858.800	36.177.600	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan	1 laporan	2.400.000	2.368.210	
Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4 paket	4 paket	1.200.000	1.200.000	
Penyediaan	Jumlah	Paket	1 paket	1 paket	30.423.700	26.115.000	Selisih harga

Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan						yang terdapat pada Satuan Satndar Harga (SSH) dengan harga E-Catalog
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	380 Laporan	380 Laporan	41.990.000	22.648.262	Adanya perjalanan dinas ke Luar Daerah yang tidak dapat dilakukan pembayarannya atas dasar surat Bupati Tapanuli Utara
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin yang tersedia	Unit	65 unit	65 unit	28.030.000	28.030.000	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	1.000.000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.093.600	14.106.837	-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Dinas Perorangan	Jumlah unit Kenderaan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1 unit	1 unit	40.695.000	39.158.450	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Persen	100	100	8.970.700	8.315.300	
Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan							
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.880.700	4.225.300	
Peningkatan	Jumlah				4.090.000	4.090.000	

Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang aktif	Persen	100	100	24.166.700	22.568.160
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					24.166.700	22.568.160
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyarawah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan Desa	Lembaga	45 Lembaga	45 lembaga	24.166.700	22.568.160
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	5.464.700	5.390.160
Koordinasi upaya Penyelenggaraan					5.464.700	5.390.160

Ketentraman dan Ketertiban Umum						
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.464.700	5.390.160
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan forum koordinasi tingkat kecamatan	Persen	100	100	25.000.000	24.775.080
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					25.000.000	24.775.080
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	24.775.080

	Pimpinan di Kecamatan					
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah					24.950.900	24.069.460
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3.091.800	3.091.800
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	Dokumen			6.210.000	6.210.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenraman dan Keteriban Umum	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.650.0000	2.173.800
Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Doumen	12.999.100	12.629.860

			Program dan Pemberdayaan Masyarakat	fasilitasi dalam rangka pelaksanaan program dan pemberdayaan masyarakat desa.							

Perkiraan Capaian Renja Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran		Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi		
1	Unsur Kewilayahan	Kantor Kecamatan Siatas Barita	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Persen	100	100	2.277.835.042	1.747.206.501		
			Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persen	100	100	32.553.050	31.864.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA SKPD	Dokumen	2 Dok	2 Dok	1.703.050	1.619.500		

SKPD							
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dokumen	2 Dok	2 Dok	1.410.000	1.299.500	
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LKIP	Laporan	1 Lap	1 Lap	840.000	720.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	28.600.000	28.255.000,-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Terlaksananya Administrasi keuangan dengan baik***	***Persen***	***100 Persen***	***100 Persen***	***2.051.260.828***	***1.548.723.691***	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang	23 orang	23 orang	2.013.969.228	1.518.492.791	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35.439.600	33.339.600	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan	1 laporan	1.204.000	362.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan baik***	***Persen***	***100 Persen***	***100 Persen***	***51.249.600***	***43.498.700***	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1 paket	1 paket	24.697.400	19.012.400	Selisih antara SSH dengan Harga e kataloq
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	4 Paket	4 Paket	3.272.200	3.260.600	
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Paket	4 Paket	4 Paket	6.870.000	4.905.700	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	380 Laporan	380 Laporan	16.410.000	16.320.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Tersedianya Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah***	***Unit***	***1 unit***	***1 unit***	***19.736.700***	***19.400.000***	**-**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang tersedia	Unit	1 unit	1 unit	19.736.700	19.400.000	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah***	***Persen***	***100 Persen***	***100 Persen***	***85.604.764***	***66.328.225***	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	980.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	15.944.178	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan umum Kantor	Laporan	12 Lap	12 Lap	54.000.000	49.074.500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Dinas Perorangan	Jumlah unit Kenderaan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1 unit	1 unit	35.127.600	31.118.385	-
Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	unit	4 unit	4 unit	2.302.500	2.302.500	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Persen	100	100	11.609.000	5.283.000	
Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Persen	100	100	11.609.000	5.283,000	
Koordinasi /Sinergi Perencanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.397.000	1.363.000	

dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait					
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	10.212.000	3.920.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang aktif	Persen	100	100	20.110.000	15.663.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Terlaksananya Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Persen***	***100***	***100***	***20.110.000***	***15.663.000***
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyarawah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan Desa	Lembaga	72 Lembaga	72 lembaga	17.660.000	13.248.000
Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.450.000	2.415.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Tingkat keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	1.400.000	0

UMUM						
Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	***Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***Persen***	***100***	***100***	***1.400.000***	***0***
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	-Laporan	- Laporan	1.400.000	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan forum koordinasi tingkat kecamatan	Persen	100	100	21.600.000	21.600.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan kepala Daerah	Persen	100	100	21.600.000	21.600.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000	21.600.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	3.607.500	3.336.000

HAN DESA						
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Terlaksananya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Persen	100	100	3.607.500	3.336.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.360.000	1.320.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenraman dan Keteriban Umum	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1 Dokumen	1Dokumen	2.247.500	2.016.000

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Siatas Barita dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Siatas Barita disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi 2024 sd TW II	Catatan Analisis
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan	77,05	90	80	
2	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	97,75	90	85	
3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	
4	Persentase masyarakat yang melakukan perekaman e KTP	97,82	100	35	
5	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100	
6	Nilai AKIP Kecamatan	BB	BB	-	

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

b. Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBD.
c. Ada review RPJM sesuai dengan RKP

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Siatas Barita Tahun 2021 sd keadaan Triwulan II, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen dan kerjasama seluruh ASN untuk meningkatkan pelayanan
2. Perlu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ada di Kecamatan Siatas Barita

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Siatas Barita merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024 kondisi sampai keadaan triwulan II, Kecamatan Siatas Barita menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.7

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024
kondisi sampai triwulan II

Peluang	Tantangan
Potensi Siatas Barita sebagai situs budaya dan keagamaan	
Obyek wisata	Belum semua potensi wisata di tiap desa terpublikasikan contoh Permandian air panas di Desa Pansurnapitu, Agrawisata salak di Desa Pansurnapitu dan Kebun Buah naga di Desa simanampang serta Peternakan lebaha madu di Desa Lobuhole

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Siatas Barita pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja yang maksimal
2. Ada monitoring yang terjadwal secara rutin

Sedangkan isu-isu penting lainnya yang ada Kecamatan Siatas Barita adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia;
2. Kurangnya sarana dan prasarana di Kecamatan mengakibatkan pelayan kurang optimal
3. Minimnya Anggaran di Kecamatan berakibat kepada kurang eefektif dan efisiennya pelayanan.
4. Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati kepada camat tidak disertai anggaran.
5. Pentingnya pemahaman dan pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi aparatur pelayanan pubik

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Siatas Barita Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Siatas Barita Tahun 2024 disajikan pada :

Tabel 2.8
Evaluasi Renja Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TW IV

PERANGKAT DAERAH : KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi																

		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja SKPD**		**76.768.042**		**33.902.000**		**32.553.050**		**-**	**-**	**-**		**-**		**33.902.000**		
		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	10	4.350.550	-	2.647.500	2	1.703.050	1	-	-	-	1	-	1	2.647.500	10,00%	0,61
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	10	4.148.300	-	2.738.300	2	1.410.000	1	-	-	-	1	-	1	2.738.300	10,00%	0,66
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LKIP yang tesusun	5	17.169.192	4	6.016.200	1	840.000	1	-	-	-	1	-	5	6.016.200	100,00%	0,35
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LaporanEvaluasi Kinerja	60	51.100.000	24	22.500.000	12	28.600.000	3	-	3	-	6	-	30	22.500.000	50,00%	0,44

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**6.007.105.352**		**6.545.085.274**		**2.051.260.828**		**284.294.196**		**530.786.872**	**-**	**815.081.068**	**-**	**7.360.166.342**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	5.800.000.000	23	6.234.275.474	23	2.013.969.228	23	284.294.196	-	529.924.572	23	814.218.768	46	7.048.494.242	100,00%	1,22
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi SKPD	5	192.181.000	3	141.245.200	12	36.087.600	3	-	3	500.300	6	500.300	9	141.745.500	100,00%	0,74
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	14.924.352	3	169.564.600	1	1.204.000	1	-	-	362.000	1	362.000	4	169.926.600	80,00%	11,39

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**495.631.180**		**247.552.200**		**51.238.600**		**-**		**19.012.000**	**-**	**19.012.000**	**-**	**266.564.200**		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	105.201.379	3	88.159.400	1	24.697.400	-	-	1	19.012.000	1	19.012.000	4	107.171.400	80,00%	1,02
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	20	25.113.049	12	9.396.900	4	3.261.200			-	-	-	-	12	9.396.900	60,00%	0,37
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20	31.951.602	12	17.074.000	4	6.870.000			-	-	-	-	12	17.074.000	60,00%	0,53

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlaj Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	333.365.150	36	132.921.900	380	16.410.000	70		90	-	160	-	196	132.921.900	326,67%	0,40
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya peralatan dan mesin lainnya**		**91.964.356**		**31.030.000**		**19.736.700**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.030.000**		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	75	91.964.356	75	31.030.000	1	19.736.700	-	-	-	-	-	-	75	31.030.000	100,00%	0,34
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**				**273.090.700**		**85.604.764**		**9.000.000**		**30.009.061**	**-**	**39.009.061**	**-**	**312.099.761**		

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	60	5.332.000	36	3.062.000	12	1.000.000	3		3	-	6	-	42	3.062.000	70,00%	0,57
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	77.546.080	36	53.035.100	12	30.000.000	3		3	4.509.061	6	4.509.061	42	57.544.161	70,00%	0,74
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang disediakan	60	297.150.288	36	216.993.600	12	54.604.764	2	9.000.000	4	25.500.000	6	34.500.000	42	251.493.600	70,00%	0,85
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya barang Milik Daerah**		**219.580.748**		**152.058.412**		**37.430.100**		**-**		**2.222.200**	**-**	**2.222.200**	**-**	**154.280.612**		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	182.139.568	3	137.929.812	1	35.127.600	-	-	1	2.222.200	1	2.222.200	4	140.152.012	80,00%	0,77
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi dipelihara	20	37.441.180	20	14.128.600	6	2.302.500	-	-	-	-	-	-	20	14.128.600	100,00%	0,38
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang dilaksanakan											-	-	-			

		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Tingkat Kecamatan**				**113.520.300**		**5.247.000**		**-**		**138.000**	**-**	**138.000**	**-**	**113.658.300**		#DIV/0!
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/sinergi perencanaan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait	60	175.459.618	36	47.980.700	12	1.397.000	3		3	138.000	6	138.000	42	48.118.700	70,00%	0,27
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	60	75.751.600	36	65.539.600	1	10.212.000					-	-	36	65.539.600	60,00%	0,87

3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa Yang Aktif										-	-	-			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa**		**46.726.700**		**26.616.700**		**20.110.000**		**-**			**-**	**-**	**-**	**26.616.700**		
		Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	60	41.826.700	36	24.166.700	45	17.660.000	-	-	45	6.613.000	45	6.613.000	81	30.779.700	135,00%	0,74

		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	4.900.000	1	2.450.000	1	2.450.000	-	-	-	-	-	-	1	2.450.000	100,00%	0,50
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti																
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**		**6.864.700**		**5.464.700**		**1.400.000**		**-**			**-**	**-**	**-**	**5.464.700**		0,80

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Rebuplik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	60	6.864.700	36	5.464.700	12	1.400.000					-	-	36	5.464.700	60,00%	0,80
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan											-	-	-			
		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**				**25.000.000**		**21.600.000**		**-**		**7.200.000**	**-**	**7.200.000**	**-**	**32.200.000**		#DIV/0!

		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	60	46.600.000	36	25.000.000	1	21.600.000	9		9	7.200.000	18	7.200.000	54	32.200.000	90,00%	0,69
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti											-	-	-			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	**Terlaksananya Fasilitasi rekomendasi dan pengawasan Pemerintahan Desa**		**11.596.800**		**5.741.800**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.741.800**		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	60	6.699.300	36	3.091.800	1	3.607.500	-	-	-	-	-	-	36	3.091.800	60,00%	0,46

		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	60	4.897.500	36	2.650.000	1	2.247.500			-	-	-	-	36	2.650.000	60,00%	0,54

BAB III.
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitias Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

	PP4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, Visi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah " ***Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata***"

Dalam mencapai Visi tersebut dituangkan ke dalam misi yaitu :

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Perlindungan Petani dan lahan pertanian berkelanjutan;
2. Pengembangan Komoditi dan Produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumberdaya lokal;

3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan pengembangan jiwa;
5. Meningkatkan Destinasi wisata melalui kawasan wisata alam dan budatya rohani dan agrowisata;
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan mengacu pada penataan ruang/ wilayah perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan system E Govermen.

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2024

Visi	:	Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata
Misi	:	Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan system e government
Tujuan RPJMD	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Sasaran RPJMD	:	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Siatas Barita serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Siatas Barita Tahun 2020-2024, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan	90
			Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	90
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
			Persentase masyarakat yang melakukan perekaman e KTP	100
			Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100
			Nilai AKIP Kecamatan	BB

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Siatas Barita Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Siatas Barita Tahun 2024 disajkan pada tabel berikut:

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Siatas Barita
Tahun Anggaran : 2024 (PAPBD)

PERANGKAT DAERAH : KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi						

		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja SKPD**		**76.768.042**		**33.902.000**		**32.553.050**
		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	10	4.350.550	-	2.647.500	2	1.703.050
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	10	4.148.300	-	2.738.300	2	1.410.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LKIP yang tesusun	5	17.169.192	4	6.016.200	1	840.000

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LaporanEvaluasi Kinerja	60	51.100.000	24	22.500.000	12	28.600.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**6.007.105.352**		**6.545.085.274**		**2.051.260.828**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	5.800.000.000	23	6.234.275.474	23	2.013.969.228
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi SKPD	5	192.181.000	3	141.245.200	12	36.087.600

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	14.924.352	3	169.564.600	1	1.204.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**495.631.180**		**247.552.200**		**51.238.600**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	105.201.379	3	88.159.400	1	24.697.400

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	20	25.113.049	12	9.396.900	4	3.261.200
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20	31.951.602	12	17.074.000	4	6.870.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlaj Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	333.365.150	36	132.921.900	380	16.410.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya peralatan dan mesin lainnya**		**91.964.356**		**31.030.000**		**19.736.700**

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	75	91.964.356	75	31.030.000	1	19.736.700
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**				**273.090.700**		**85.604.764**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	60	5.332.000	36	3.062.000	12	1.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	77.546.080	36	53.035.100	12	30.000.000

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang disediakan	60	297.150.288	36	216.993.600	12	54.604.764
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya barang Milik Daerah**		**219.580.748**		**152.058.412**		**37.430.100**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	182.139.568	3	137.929.812	1	35.127.600

		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi dipelihara	20	37.441.180	20	14.128.600	6	2.302.500
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Publik yang dilaksanakan						
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Tingkat Kecamatan**				**113.520.300**		**5.247.000**

		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/sinergi perencanaan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait	60	175.459.618	36	47.980.700	12	1.397.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	60	75.751.600	36	65.539.600	1	10.212.000
3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa Yang Aktif						

		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa**		**46.726.700**		**26.616.700**		**20.110.000**
		Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	60	41.826.700	36	24.166.700	45	17.660.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	4.900.000	1	2.450.000	1	2.450.000

		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti						
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**		**6.864.700**		**5.464.700**		**1.400.000**

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Rebuplik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	60	6.864.700	36	5.464.700	12	1.400.000
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan						
		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**				**25.000.000**		**21.600.000**

		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	60	46.600.000	36	25.000.000	1	21.600.000
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti						
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	**Terlaksananya Fasilitasi rekomendasi dan pengawasan Pemerintahan Desa**		**11.596.800**		**5.741.800**		

		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	60	6.699.300	36	3.091.800	1	3.607.500
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	60	4.897.500	36	2.650.000	1	2.247.500

BAB V.

PENUTUP

Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara dan berpedoman pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupate Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024 Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

Siatas Barita, 2024

CAMAT SIATAS BARITA

ELYANTO SITOMPUL,ST,MM

NIP.196801281992031002

RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan, karena berkat karuniaNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kantor Kecamatan Sipoholon dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku yang berjudul: "RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON ".

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Sipoholon ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik.

Dengan segala keterbatasan perumusan Dokumen Rencana Kerja ini, tak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Rencana Kerja (RENJA) ini semua kebijakan Program dan Kegiatan yang kami kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik Aparatur Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara maupun masyarakat serta DPRD, agar dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Sipoholon maupun pihak lain yang memerlukannya.

Sipoholon,

CAMAT SIPOHOLON,

RONALD TOGU SITUMORANG,SSTP
PEMBINA
NIP. 198504052003121001

DAFTAR ISI

PENGANTAR…….. i

DAFTAR ISI…… ii

DAFTAR TABEL…… iii

BAB I PENDAHULUAN…… 1

1.1 LATAR BELAKANG…… 1

1.2 LANDASAN HUKUM…….. 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN…… 5

1.4 SITEMATIKA PENULISAN…… 6

BAB II HASIL EVLUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 … 8

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH…….. 8

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.. 15

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH……. 19

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD……. 23

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT…… 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH……. 34

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL…… 34

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH… 36

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN…… 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…. 44

BAB V PENUTUP…….. 47

DAFTAR TABEL

TABEL T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara …….	9
TABEL T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara ……..	18
TABEL T-C. 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara ……..	24
TABEL T-C. 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara ……	32
TABEL T-C. 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara ……..	39
TABEL 4.1	Program Utama dan Kegiatan Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ……	44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja P e r u b a h a n Tahun 2024 Kecamatan Sipoholon yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Sipoholon, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Sipoholon dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah

Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sipoholon memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sipoholon serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Sipoholon secara subtansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKOPD, RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program–program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan .
4. Pendekatan Top–Down (Atas–Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program–program jenjang pemerintah diatasnya .
5. Pendekatan Botom–Up (Bawah–Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom–Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sipoholon Tahun 2024

disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, mengacu kepada Rancana Kerja OPD Kabupaten Tapanuli Utara, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Kecamatan Sipoholon sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menetapkan target kinerja sehingga pada akhir tahun anggaran dapat diketahui pencapaian kinerjanya, hal ini dimaksudkan agar dapat lebih mudah mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Renja OPD Kecamatan Sipoholon Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sipoholon untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA OPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sipoholon ini dilandaskan pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 63 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanui Utara Nomor 63 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
15. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun 2019 – 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja OPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif prakiraan maju. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan :

1. Mengacu pada RKPD
2. Mengacu pada Renstra OPD
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi
5. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

a. Maksud

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sipoholon Tahun 2024 disusun dengan maksud:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Sipoholon Tahun 2024
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara khususnya Kecamatan Sipoholon;
3. Untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Sipoholon, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini adalah :

1. Untuk menjadi acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;

2. Untuk menjadi bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
3. Untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan kedalam Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA Kantor Kecamatan SIPOHOLON KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kantor Kecamatan Sipoholon

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD yang memuat indikator sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kantor Kecamatan Sipoholon.

Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat kajian tentang rancangaan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sipoholon s/d Tahun 2023 (tahun lalu) dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sipoholon ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sipoholon dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Tapanuli Utara

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Sipoholon

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5.02	Keuangan									
5.02.03	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**									
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah									
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD	2 buku	0	0	0	0	0	2 buku	100
7	Unsur kewilayahan									
7.01	Kecamatan									
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	25 buku	5 buku	5 buku	5 buku	100	5 buku	15 buku	60
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Perubahan	1 buku	0	0	0	0	1 buku	1 buku	100

	Perubahan DPA-SKPD	DPA-SKPD								
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10 set	2 set	2 set	2 set	100	2 set	6 set	60
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	60
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyerapan Gaji dan Tunjangan ASN	70 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100	14 bulan	42 bulan	60
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	20 orang dan 5 laporan	4 orang dan 1 laporan	4 orang dan 1 laporan	4 orang dan 1 laporan	100	4 orang dan 1 laporan	12 orang dan 3 laporan	60
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 set	1	1 set	1 set	100	1 set	3 set	60
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran	5 set	1 set	1 set	1 set	100	1 set	3 set	60

	triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD								
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik daerah									
7.01.01.2.03.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	30 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	18 laporan	60
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasilistrik/ penerangan bangunan kantor	80 jenis	16 jenis	16 jenis	16 jenis	100	16 jenis	48 jenis	60
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	80 jenis	16 jenis	16 jenis	16 jenis	100	16 jenis	48 jenis	60
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	75 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100	15 jenis	45 jenis	60
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	5000 kotak nasi dan snack	1000 kotak nasi dan snack	1000 kotak nasi dan snack	1000 kotak nasi dan snack	100	1000 kotak nasi dan snack	3000 kotak nasi dan snack	60
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	32000 lembar	6451 lembar	6650 lembar	6650 lembar	100	5779 lembar	18880 lembar	60
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	1000 eksemplar	200 eks	200 eks	200 eks	100	200 eks	600 eks	60

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	1000 oh	200 oh	200 oh	200 oh	100	200 oh	600 oh	60
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah									
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	5 jenis	0	0	0	0	3 jenis	3 jenis	60
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyerapan jasa surat menyurat	370 buah	74 buah	70 buah	70 buah	100	80 buah	224 buah	60
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyerapan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah penyerapan jasa pelayanan umum kantor	15 orang dan 60 bulan	3 orang dan 12 bulan	3 orang dan 12 bulan	3 orang dan 11 bulan	97	3 orang dan 12 bulan	9 orang dan 35 bulan	60
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyerapan jasa pemeliharaan barang milik daerah	1 mobil dan 60 bulan	1 mobil dan 12 bulan	1 mobil dan 12 bulan	1 mobil dan 12 bulan	100	1 mobil dan 12 bulan	1 mobil dan 36 bulan	60
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Jumlah penyerapan	2 unit dan 12 bulan	2 unit dan 12	2 unit dan 12	2 unit 12 bulan	100	2 unit dan 12	2 unit dan 36	60

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jasa pemeliharaan barang milik daerah		bulan	bulan			bulan	bulan	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik**									
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15 orang dan 60 bulan	3 orang dan 12 bulan	3 orang dan 12 bulan	3 orang dan 12 bulan	100	3 orang dan 12 bulan	12 orang dan 12 bulan	60
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**									
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang di Desa	1 kegiatan	0	0	0	0	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	20 kegiatan	5 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	4 kegiatan	12 kegiatan	60
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60

		kelurahan								
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**									
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan di desa	130 oh	0	0	0	0	130 oh	130 oh	100

Sipoholon,

CAMAT SIPOHOLON,

RONALD TOGU SITUMORANG, SSTP
PEMBINA
NIP. 198504052003121001

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerka pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanna OPD digunakan beberapa indicator antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Kantor Kecamatan Sipoholon merupakan salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang ikut serta dalam menunjang Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan pembangunan. Pencapaian kinerja Kecamatan Sipoholon selama Tahun 2023 dalam berbagai bidang baik pemerintahan, kesejahteraan sosial, pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Sosial Budaya yang telah terealisasi pada Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan
    a) Telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023
    b) Telah dilaksanakan pembinaan kepada aparat Pemerintah Desa tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masalah-masalah yang terkait didalamnya.
    c) Telah dilaksanakan Pameran Pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara
    d) Dalam bidang kependudukan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembuatan KTP elektronik, telah dilaksanakan pelayanan perekaman e-KTP
    e) Mengenai pelayanan di bidang pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah, dan Surat Keterangan Kependudukan

lainnya ada perubahan blanko dimana setiap formulir yang dari Kepala Desa harus diketahui oleh Camat Sipoholon yaitu (F1.35, F1.07, F1.21, dan F1.06) telah terlayani dengan baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

f) Dalam bidang pajak bumi dan bangunan telah dilaksanakan sosialisasi PBB dan didistribusikan SPPT bagi wajib pajak PBB sebanyak 13 Desa + 1 Kelurahan.

2. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a) Monitoring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial
   b) Pendataan BPJS
   c) Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan : Paskah Raya Kecamatan, HUT RI Ke-77, dan Perayaan Natal Oikumene
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
   a) Pelaksanaan Musrenbang Desa tentang APBDes
   b) Pelaksanaan Musrenbang Desa tentang ADD/K dan Dana Desa
   c) Pembinaan PKK Desa Percontohan yaitu Desa Simanungkalit dan Desa Hutauruk Hasundutan
   d) Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten
   e) Pencairan Honor/Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan BPD Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
   f) Pelaksanaan Gotong Royong Desa

   Dengan persentasi realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 yaitu :

EVALUASI KINERJA PROGRAM (EKP)

Kode	Program	Bobot Program	Capaian Kinerja
P2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	97,32
P3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	72,08
P4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	92,62

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sipoholon
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai		B	BB	B	B	CC	CC	B	B	
	Ketepatan Waktu Penyerahan Laporan Keuangan	Persen		80	80	80	80	80	80	80	80	
	Persentase Kelembagaan Desa	Persen		75	80	85	90	90	90	85	100	
	Indek Kepuasan Masyarakat	Persen		80	85	88	100	90	90	88	100	
	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	Persen		88	90	95	100	90	90	95	100	
	Persentase Penduduk Yang Melakukan Perekaman KTP-El	Persen		75	80	85	90	85	85	85	100	
	Persentase Penetapan APBDes Tepat Waktu	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Temuan BPK/ Inspektorat	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Realisasi Target PAD/ PBB	Persen		70	75	80	90	80	80	80	90	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan kondisi umum berbagai bidang yang ada di Kecamatan Sipoholon, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentu saja menghadapi tantangan yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk taat pajak sehingga Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan PAD tidak bisa mencapai realisasi sampai dengan 100%
2. Pelayanan kepada masyarakat ataupun penyelesaian tugas sering terhambat dikarenakan Terbatasnya SDM yang dapat mengoperasikan Komputer dan Internet dan Perangkat Komputer untuk perekaman e- KTP sering bermasalah karena jaringan.
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos.
4. Masih terbatasnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pengurusan administrasi kependudukan dan pengurusan surat kepemilikan tanah sehingga tidak mengikuti prosedur yang berlaku (segala berkas dimulai dari Kepala Desa/Lurah)
5. Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.

Sedangkan Peluang untuk pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Sipoholon adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati ke Camat.
2. Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur tugas,pokok, dan fungsi setiap seksi di Kantor Kecamatan Sipoholon.
3. Adanya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mengatur tentang jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan,

retribusi, dan alur prosedur pengurusannya.

4. Terjalinnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Unsur Pimpinan Kecamatan,Kepala Desa/Lurah, UPTD di Kecamatan, dan tokoh masyarakat/pemuda/agama sehingga ketentraman dan ketertiban dapat tercapai dan penyelesaian masalah-masalah sosial dapat diselesaikan/ditangani dengan baik.
5. Posisi wilayah yang strategis yang dapat di akses dengan transportasi yang cukup memadai khususnya bagi masyarakat yang tinggal di desa.
6. Ketersediaan Dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Sipoholon.
7. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai (Tempat Parkir, Balai Data, Gudang, Peralatan Perekaman e-KTP, Infokus, Kamera, Komputer dan Printer, Alat Kebersihan, dan lainnya).

Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan kondisi umum berbagai bidang yang ada di Kecamatan Sipoholon, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentu saja menghadapi kendala dan permasalahan. Secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Infrastruktur pendukung sektor pertanian yang tidak memadai, seperti jalan dan jembatan yang menuju sentra produksi serta saluran irigasi.
b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung Kantor Kecamatan Sipoholon dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
c. Minimnya modal yang dimiliki masyarakat dalam upaya peningkatan hasil produksi pertanian/perikanan/peternakan.
d. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dalam hal pengelolaan lahan pertanian/perikanan/peternakan.
e. Pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal, dikarenakan minimnya tenaga kesehatan seperti bidan desa, dokter, perawat serta sarana pendukung kesehatan.

f. Peran serta masyarakat dalam pembangunan masih rendah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sipoholon bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tapanuli Utara kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung
2. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum, dan tentunya dengann tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan tang berlaku.
4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya Rencana Pembangunan Hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.
5. Koordinasi dan konsultasi antar pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai dengan seharusnya sehingga masih sering terjadi ketidakpastian kewenangan.
6. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis maupun diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Adapun strategi yang dilakukan Kantor Kecamatan Sipoholon dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan etos kerja dan disiplin aparat yang ada di Kantor Kecamatan Sipoholon.
b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan untuk meningkatkan kualitas aparat yang ada di Kantor Kecamatan Sipoholon.
c. Membangun budaya pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
d. Pemanfaatan anggaran operasional yang tersedia dengan optimal, efektif dan efisien.
e. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya perbaikan infrastruktur pendukung yang dapat mengoptimalkan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan peran serta pemuda.
f. Bekerja sama dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
g. Meningkatkan peran PKK dalam pembangunan kemasyarakatan.
h. Bekerja sama dengan unsur pimpinan kecamatan dalam mewujudkan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
i. Penanaman kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan.
j. Menggalakkan gotong royong dalam masyarakat.
k. Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk membayar pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara.
l. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang ada di Kecamatan Sipoholon
m. Berperan aktif dalam upaya perwujudan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA. Rencana Kerja Kecamatan Sipoholon berdasarkan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Sipoholon. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat dilihat Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C. 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Tapanuli Utara

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Sipoholon

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	**Cakupan Layanan Pemenuhan Administrasi**	**12 bulan**	**2.218.294.779**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	**Cakupan Layanan Pemenuhan Administrasi**	**12 bulan**	**2.218.294.779**	
1	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	*Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah*	*12 bulan*	*4.300.750*	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah*	*12 bulan*	*4.300.750*	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersusunnya RKA, DPA	5 buku	1.941.550	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya RKA, DPA	5 buku	1.941.550	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA- SKPD	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersusunnya RKA	2 set	480.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA- SKPD		Tersusunnya Lakip	2 set	480.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersusunnya Lakip	2 set	775.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunnya Lakip	2 set	775.900	
	Evaluasi Kinerja	**Kantor**	Terlaksananya	1 laporan	1.103.300	Evaluasi		Terlaksanany	1 laporan	1.103.300	

	Perangkat Daerah	**Kecamatan Sipoholon**	evaluasi kinerja Perangkat daerah			Kinerja Perangkat Daerah		a evaluasi kinerja Perangkat daerah			
2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	*Terlaksananya administrasi keuanganperangkat daerah*	*12 bulan*	*2.018.541.354*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Terlaksananya administrasi keuanganperangkat daerah*	*12 bulan*	*2.018.541.354*	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Terssedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	1.982.751.054	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Terssedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	1.982.751.054	
	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Terlaksananya penatausahaan keuangan	4 orang dan 12 bulan	34.327.200	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya penatausahaan keuangan	4 orang dan 12 bulan	34.327.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 set	1.463.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 set	1.463.100	
3	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	*12 bulan*	*67.811.275*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	*12 bulan*	*67.811.275*	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	16 jenis	2.195.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	16 jenis	2.195.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	16 jenis	11.140.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	16 jenis	11.140.000	
	Penyediaan Peralatan	**Kantor Kecamatan**	Tersedianya peralatan	15 jenis	10.410.375	Penyediaan Peralatan		Tersedianya peralatan	15 jenis	10.410.375	

	Rumah Tangga	**Sipoholon**	rumah tangga			Rumah Tangga		rumah tangga			
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya makanan / minuman rapat	1000 kotak nasi dan snack	11.360.000	Penyediaan bahan Logistik Kantor		Tersedianya makanan / minuman rapat	1000 kotak nasi dan snack	11.360.000	
	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6650 lembar	3.216.800	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6650 lembar	3.216.800	
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya bahan bacaan	200 eksemplar	3.658.500	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan	200 eksemplar	3.658.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 oh	25.830.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 oh	25.830.000	
5	*Pengadaan Barang Milik Daerah*	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	*Tersedianya barang milik daerah*	*12 bulan*	*5.900.200*	*Pengadaan Barang Milik Daerah*		*Tersedianya barang milik daerah*	*12 bulan*	*5.900.200*	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya peralatan dan mesin laiinya	2 jenis	5.900200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya peralatan dan mesin laiinya	2 jenis	5.900200	
6	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*12 bulan*	*82.958.600*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*12 bulan*	*82.958.600*	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersedianya jasa surat menyurat	100 buah	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat	100 buah	1.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Tersdianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	26.961.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersdianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	26.961.800	
	Penyediaan	**Kantor**	Tersedianya	3 orang	54.496.800	Penyediaan		Tersedianya	3 orang	54.496.800	

	Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kecamatan Sipoholon**	jasa pelayanan umum kantor	dan 12 bulan		Jasa Pelayanan Umum Kantor		jasa pelayanan umum kantor	dan 12 bulan		
7	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*	*12 bulan*	*38.782.600*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*	*12 bulan*	*38.782.600*	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 mobil dan 12 bulan	26.703.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 mobil dan 12 bulan	26.703.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	2 unit dan 12 bulan	12.079.600	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	2 unit dan 12 bulan	12.079.600	
II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	**Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**12 bulan**	**53.936.925**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**12 bulan**	**53.936.925**	
1	*Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	*Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamtan*	*12 bulan*	*53.936.925*	*Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*		*Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamtan*	*12 bulan*	*53.936.925*	
	Koordinasi/ Sinergi	**Kantor Kecamatan**	Pertemuan koordinasi	3 orang dan 12	53.936.925.	Koordinasi/ Sinergi		Pertemuan koordinasi	3 orang dan 12	53.936.925.	

	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**Sipoholon**	antara uspika dan masyarakat	bulan		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		antara uspika dan masyarakat	bulan		
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon**	**Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**12 bulan**	**200.003.300**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon**	**Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**12 bulan**	**200.003.300**	
1	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	**Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon**	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*	*12 bulan*	*200.003.300*	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*	*12 bulan*	*200.003.300*	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	**Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon**	Terlaksananya pembangunan	12 bulan	125.939.500	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Terlaksananya pembangunan	12 bulan	125.939.500	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon**	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	12 bulan	74.063.800	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	12 bulan	74.063.800	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Usulan Program dan Kegiatan Kemasyarakatan dilaksanakan terlebih dulu dengan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa masing-masing, dengan perangkat Desa sehingga tersusunlah usulan Prioritas dari Desa. Selanjutnya dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan tanggal 26 Februari 2024 di Kantor Kecamatan Sipoholon yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara beserta Dinas terkait seperti anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang berdomisili di Kecamatan Sipoholon, Bappedalitbang Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas PUTR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, Disdukcapil, Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, UPT Puskesmas Siatadatada, UPT Puskesmas Situmeang Habinsaran, UPT Perikanan, UPT Peternakan dan Korwil Pendidikan, Kepala Sekolah, Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa, BPD, dan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam agenda musrenbang ini membahas Usulan Prioritas untuk APBD TA. 2025 yang sebagian besar berupa Program/Kegiatan berupa pembangunan fisik seperti :

1. Rehabilitasi total Kantor Kecmaatan Sipoholon
2. Pembangunan Kantor Kepala Desa, Ruang Kepala Sekolah/Guru, Perpustakaan, Gedung PAUD, Polindes, dan Poskesdes
3. Pemagaran Sekolah
4. Pembangunan Gorong-gorong plat
5. Permintaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kesehatan
6. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Sipoholon.
7. Pembangunan Drainase
8. Pembangunan Irigasi
9. Pembangunan MCK
10. Pengaspalan Jalan, Pengaspalan Hotmix
11. Pengadaan Alat-alat Pertanian ; Handtraktor, Mesin Babat, Mesin

Pembuat Kompos, Bibit Unggul Padi, Pupuk Pertanian, Pemipil Jagung, dan sebagainya

Program/Kegiatan yang diusulkan dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Peningkatan terhadap program dan kegiatan untuk pembinaan PKK di Desa/Kelurahan dan di Kecamatan ;
4. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
5. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan USPIKA, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Tapanuli Utara

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Sipoholon

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/KOta**	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	**Cakupan pemenuhan layanan administrasi**	**12 bulan**	
1	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	12 bulan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	Tersedianya barang milik daerah	12 bulan	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	
II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	**Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**12 bulan**	

1	KoordinasiPenyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Sipoholon	Terlaksananya pertemuan koordinasi antara uspika dan masyarakat	12 bulan	
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kantor Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon**	**CakupanPeningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**12 bulan**	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kantor Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan	12 bulan	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

Rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Sipoholon yang tertuang dalam Rencana Kerja ini merupakan kumpulan kegiatan yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024. Secara terperinci rencana program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini yang juga memuat :

1. Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun Anggaran 2024.
2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan).
3. Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara
4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiran Maju Tahun 2025

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 mengangkat tema **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang memuat 5 (lima) arahan dan komitmen Pemerintah yakni kebijakan pada 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dan untuk Rancangan Renja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 mengangkat tema : "**Akselerasi Pencapaian Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Sumatera Utara Bermartabat.”**.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan

Kabupaten Tapanuli Utara yaitu pada Misi 6 dan Misi 7 yaitu sebagai berikut :

1. Misi 6 : Menjadikan Desa sebagai Pusat Percepatan Pembangunan

   Tujuan : Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan

   Sasaran :

   - Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan
   - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan desa sebagai pusat percepatan pembangunan

2. Misi 7 : Membangun Pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan public dengan system e-government

   Tujuan : Mewujudkan peningkatan system pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan meningkatkan profesionalisme dan produktivuitas aparatur pelayanan publik

   Sasaran :

   - Terwujudnya kelembagaan dan tata laksanan pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi.
   - Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan
   - Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan , pendapatan, dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif, dan tertib
   - Terwujudnya perencanaan dan pengendalian

pembangunan yang berkualitas, responsive, dan memperhatikan kearifan lokal.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Kantor Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada misinya bertujuan :

1. Meningkatkan Kualitas SDM
2. Meningkatkan Koordinasi dan konsutasi pemerintah di Kecamatan Sipoholon
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Pembangunan.

Sasaran yang direncanakan Kantor Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara yaitu sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen administrasi kependudukan yang tepat waktu untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan administrasi kependudukan
2. Terciptanya koordinasi dan akses pelayanan yang prima mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai ke Kabupaten
3. Terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia aparat pemerintah desa dan kecamatan
4. Timbulnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Sipoholon
5. Terwujudnya pembangunan sarana transportasi antar desa dan dari desa ke ibukota Kecamatan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Sipoholon adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Tabel T-C. 33

Rumusan rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Tapanuli Utara

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Sipoholon

Kode					Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					Unsur Kewilayahan								
7	**01**				**Kecamatan**				**2.087.942.161**				**2.725.826.800**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Cakupan Layanan Pemenuhan Administrasi**	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	**12 bulan**	**2.034.005.236**	DAU		**12 bulan**	**2.365.826.800**
7	*01*	*01*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah*	*Kantor Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*4.300.750*	DAU		*12 bulan*	*7.419.000*
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya RKA, DPA	Kantor Kecamatan Sipoholon	5 buku	1.941.550	DAU		5 buku	3.407.000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA-SKPD	Kantor Kecamatan Sipoholon	2 set	480.000	DAU		2 set	1.842.000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Lakip	Kantor Kecamatan Sipoholon	2 set	775.900	DAU		2 set	1.842.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja	Terlaksananya	Kantor	1 laporan	1.103.300	DAU		1 laporan	2.170.000

					Perangkat Daerah	evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kecamatan Sipoholon						
7	*01*	*01*	*2.02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Terlaksananya administrasi keuanganperangkat daerah*	*Kantor Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*1.834.251.811*	DAU		*12 bulan*	*2.096.015.000*
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Terssedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Kecamatan Sipoholon	14 bulan	1.798.461.511	DAU		14 bulan	2.051.367.000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan	Kantor Kecamatan Sipoholon	4 orang dan 12 bulan	34.327.200	DAU		4 orang dan 12 bulan	41.613.000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kantor Kecamatan Sipoholon	1 set	1.463.100	DAU		1 set	1.293.000
7	*01*	*01*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	*Kantor Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*67.811.275*	DAU		*12 bulan*	*122.586.000*
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kantor Kecamatan Sipoholon	16 jenis	2.195.800	DAU		16 jenis	5.299.000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Kecamatan Sipoholon	16 jenis	11.140.000	DAU		16 jenis	17.809.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kantor Kecamatan Sipoholon	15 jenis	10.410.175	DAU		15 jenis	9.158.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan / minuman rapat	Kantor Kecamatan Sipoholon	1000 kotak nasi dan snack	11.360.000	DAU		1000 kotak nasi dan snack	30.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kecamatan Sipoholon	6650 lembar	3.216.800	DAU		6650 lembar	6.788.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan	Tersedianya bahan bacaan	Kantor Kecamatan Sipoholon	200 eksemplar	3.658.500	DAU		200 eksemplar	3.532.000

					Perundang-undangan								
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kantor Kecamatan Sipoholon	200 oh	25.830.000	DAU		200 oh	50.000.000
7	*01*	*01*	*2.07*		*Pengadaan Barang Milik Daerah*	*Tersedianya barang milik daerah*	*Kantor Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*5.900.200*	DAU		*12 bulan*	*15.000.000*
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin laiinya	Kantor Kecamatan Sipoholon	2 jenis	5.900.200	DAU		2 jenis	15.000.000
7	*01*	*01*	*2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*Kantor Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*82.958.600*	DAU		*12 bulan*	*82.959.800*
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kantor Kecamatan Sipoholon	100 buah	1.500.000	DAU		100 buah	1.500.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersdianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kecamatan Sipoholon	12 bulan	26.961.800	DAU		12 bulan	26.963.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kantor Kecamatan Sipoholon	3 orang dan 12 bulan	54.496.800	DAU		3 orang dan 12 bulan	54.496.800
7	*01*	*01*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*	*Kantor Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*38.782.600*	DAU		*12 bulan*	*54.350.000*
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Kantor Kecamatan Sipoholon	1 mobil dan 12 bulan	26.703.000	DAU		1 mobil dan 12 bulan	32.350.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan	Kantor Kecamatan	2 unit dan 12 bulan	12.079.600	DAU		2 unit dan 12 bulan	22.000.000

					Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	barang milik daerah	Sipoholon						
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kantor Kecamatan Sipoholon**	**12 bulan**	**53.936.925**	DAU		**12 bulan**	**60.000.000**
7	*01*	*02*	*2.01*		*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamtan*	*Kantor Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*53.936.925*	DAU		*12 bulan*	*60.000.000*
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pertemuan koordinasi antara uspika dan masyarakat	Kantor Kecamatan Sipoholon	3 orang dan 12 bulan	53.936.925	DAU		3 orang dan 12 bulan	60.000.000
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kantor Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon**	**12 bulan**	**200.003.300**	DAU		**12 bulan**	**300.000.000**
7	*01*	*03*	*2.02*		*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*	*Kantor Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon*	*12 bulan*	*200.003.300*	DAU		*12 bulan*	*300.000.000*
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan	Kantor Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon	12 bulan	125.939.500	DAU		12 bulan	200.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan	Terlaksananya	Kantor	12 bulan	74.063.800	DAU		12 bulan	100.000.000

					Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon						

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kerja Kecamatan Sipoholon Tahun 2024 terdiri dari 3 Program dan Beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Sistim Informasi Perangkat daerah yang diuraikan pada Tabel berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASn
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Alokasi anggaran Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.2.472.235.004,00 dengan perincian untuk belanja Operasi sebesar Rp. 2.355.136.629,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.117.098.375,00. Adapun untuk perincian sebagaimana pada lampiran rencana program SKPD Tahun 2024.

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Sipoholon sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun 2024 ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Sipoholon pada Tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun 2024 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Sipoholon. Melalui Rencana KerjaPerubahan (Renja) Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun 2024 ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kantor Kecamatan Sipoholon Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

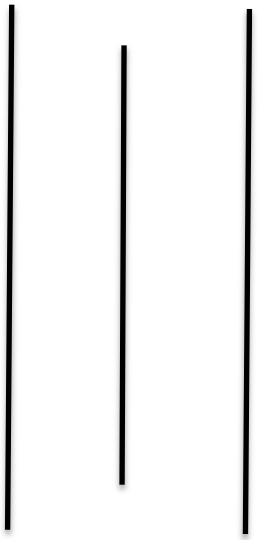
Sipoholon,

CAMAT SIPOHOLON,

RONALD TOGU SITUMORANG, SSTP
PEMBINA
NIP. 198504052003121001

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

KANTOR CAMAT TARUTUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memberi rahmat karuniaNya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 secara garis besar mengupas tentang visi, misi, nilai, tujuan strategis, sasaran dan target stategis Kecamatan Tarutung. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang berhubungan langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan perumusan dokumen Rencanaa Kerja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini.

Kami menyadari Rencana Kerja ini banyak kekurangannya, namun demikian berharap semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah maupun masyarakat dapat mengarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Tarutung mau pun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Tarutung, 2023.
CAMAT TARUTUNG

RENHARD D. LUMBANTOBING,S.Sos
PEMBINA
NIP. 197505272005021002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar I

Daftar Isi II

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2.LANDASAN HUKUM 3

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN 7

BAB II EVALUASI RENJA S/D TW II TAHUN BERKENAAN 9

2.1 EVALUASI RENJA S/D TW II TAHUN BERKENAAN 9

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 16

2.3 ISU-ISU PENTINGNYA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 21

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 29

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 29

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 32

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 35

BAB V PENUTUP 36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Kecamatan Tarutung s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)	10
Tabel 2.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023	18
Tabel 2.3.1	Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternative penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara adalah salah satu langkah di dalam mencapai tujuan yang dicapai disesuaikan dengan visi dan misi yang pembangunan Kabupaten yaitu **"Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung SDM yang berkualitas serta daerah wisata"**. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannnya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Kerja SKPD.

Kecamatan Tarutung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menetapkan target Kinerja sehingga pada akhir tahun anggaran dapat diketahui pencapaian kinerjanya, hal ini dimaksudkan agar dapat lebih mudah mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki jangka waktu perencanaan
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut diatas, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD.

Sesuai dengan amanat itu maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Tarutung Tahun 2024. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan Renja Kantor Kecamatan Tarutung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perncanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif prakiraan maju. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan:

1. Mengacu pada RKPD
2. Mengacu pada Renstra SKPD
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan
5. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

A. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tarutung Tahun 2024 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan Daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kantor Camat Kecamatan Tarutung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2024. Selain daripada itu Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disusun dengan maksud :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara khususnya Kecamatan Tarutung.
3. Untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme dan displin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara agar senantiasa bertanggungjawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram mengacu pada norma, standard dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.

B. TUJUAN

Sedangkan tujuan disusunnya rencana kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan bagi Kantor Kecamatan Tarutung dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Merumuskan Program dan Kegiatan pembangunan Kantor Kecamatan Tarutung.
3. Mengoptimalkan peran dan fungsinya perencanaan dalam pembangunan Daerah.
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif bermanfaat tepat sasaran dan berkesinambungan.

5. Untuk menjadi acuan perencanaan yang membuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan.
6. Untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan dalam Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

1.4 Sistematika Penyusunan

Renja Kantor Camat Kecamatan Tarutung Tahun 2024 disusun dalam sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara

1.2 Landasan Hukum
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TARUTUNG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Tarutung Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis pelayanan SKPD,
Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD yang memuat indikator sesuai dengan tugas dan fungsi masing-maing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan urian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3 Program Dan Kegiatan.

berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjuti.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TARUTUNG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengindentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengindentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Kecamatan Tarutung. Berdasarkan Renstra Kecamatan Tarutung Tahun 2020 -2024 yang terdiri 5 Program 7 Kegiatan dan 18 sub kegiatan. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, Laporan Evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan DPA Perangkat Daerah (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023).

Pada Tahun 2023 Kecamatan Tarutung melaksanakan Program dan Kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 7.380.353.759,- (Tujuh Milyard Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.239.766.804,- (Tujuh Milyard Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah),- atau persentase realisasi sebesar 98,10%.

Adapun Target dan Realisasi anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN DAN KEUANGAN
KECAMATAN TARUTUNG TAHUN 2023

No	Uraian Program dan Kegiatan	TARGET SEBELUM PERUBAHAN		TARGET SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)
		KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.844.600		26.414.400		79,94	5.298.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	1.844.600	100	2.374.400	100	89,06	299.700
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	100	24.040.800	100	79,04	5.039.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.464.002.267		5.520.429.423	100	99,71	16.218.474
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	5.420.062.767	100	5.476.469.223	100	99,71	16.053.674
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	41.427.600	100	41.775.600	100	100	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	1.711.900	100	2.184.600	100	92,46	164.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		98.263.900		126.059.100	100	83,72	20.525.700
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	5.971.200	100	8.605.000	100	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	8.490.600	100	39.389.500	100	99,26	293.300
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	0	100	6.724.600	100	83,84	1.087.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	19.899.400	100	27.125.000	100	99,90	27.700
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	26.800.000	100	44.215.000	100	56,76	19.117.700
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		23.914.000	100	88.850.000	100	79,23	18.450.000

	Pengadaan Mebel	100	15.464.000	100	63.350.000	100	72,77	17.290.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	8.450.000	100	25.500.000	100	95,29	1.200.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusuan Pemerintahan Daerah		82.838.300		109.434.700	100	86,23	15.089.033
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	1.300.000	100	860.000	100	100	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	11.912.100	100	35.912.300	100	67,49	11.675.425
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	72.000.000	100	72.662.400	100	95,33	3.392.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		55.489.350		56.984.020	100	98,27	984,970
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	100	40.766.450	100	36.987.720	100	98,01	736,070
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	14.722.900	100	19.996.300	100	98,76	248,900
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		71.377.400	100	10.000.000	100		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		71.377.400	100	10.000.000	100	89,92	1.007.600
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	71.693.200	100	10.000.000	100	89,92	1.007.600
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100	15.401.900	100		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			100	15.401.900	100	96,16	591.600
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	100		100	15.401.900	100	96,16	591.600
IV	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100		100	26.599.800	100	95,77	1.124.200
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100		100	26.599.800	100	95,77	1.124.200
	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Ketahanan Nasional	100		100	4.999.800	100	77,52	1.124.200

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100		100	21.600.000	100	100	0
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100		100	4.999.800	100	73,89	1.305.600
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100		100	4.999.800	100	73,89	1.305.600
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100		100	4.999.600	100	73,89	1.305.600
	Kel. Hutatoruan V							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100		100	199.999.700	100	96,32	7.360.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	4.999.900	100	4.999.700	100	100	0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100	598.054.606	100	100.000.000	100	98,79	1.205.500
	Pemberdayaan Masyarakat	100	180.525.200	100	95.000.000	100	93,51	6.164.400
	Kel. Hutatoruan VI							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100		100	199.339.735	100		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	5.000.000	100	3.940.000	100	100	0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100	548.316.302	100	92.786.135	100	99,88	
	Pemberdayaan Masyarakat	100	223.214.000	100	102.613.600	100	97,77	
	Kel. Hutatoruan VII							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100			200.000.100	100	98,25	3.505.900
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	71.134.400	100	0			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	100	5.999.900	100	5.000.000	100	100	

	di Kelurahan							
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100	542.971.152	100	98.845.800	100	98,85	1.134.200
	Pemberdayaan Masyarakat	100	222.055.200	100	92.648.400	100	97,52	2.351.700
	Kel. Hutatoruan IX							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				199.870.700	100	89,34	21.305.400
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	4.999.200	100	4.998.700	100	100	0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100	567.521.527	100	67.277.400	100	95,53	3.004.400
	Pemberdayaan Masyarakat	100	201.440.150	100	127.594.600	100	85,66	18.301.000
	Kel. Hutatoruan X							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				195.970.581	100	97,34	5.214.700
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	5.000.000	100	5.000.000	100	100	0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100	548.911.077	100	92.917.881	100	97,46	2.364.700
	Pemberdayaan Masyarakat	100	220.000.000	100	98.052.700	100	97,09	2.850.000
	Kel. Hutatoruan XI							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				190.755.881	100	97,73	4.544.290
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	5.000.000	100	5.000.000	100	100	0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100	450.000.003	100	100.000.000	100	100	245.990
	Pemberdayaan Masyarakat	100	323.961.450	100	95.000.000	100	95,48	4.299.300
	Kel. Partali Toruan							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100			200.000.000	100	92,16	15.675.400

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	5.000.000	100	4.999.900	100	100	0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100	566.873.536	100	96.205.300	100	92,93	6.805.300
	Pemberdayaan Masyarakat	100	216.850.175	100	98.794.800	100	91,02	8.870.100

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2023)

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yakni terdiri dari 5 Program.

Berdasarkan Evaluasi Laporan Realisasi Keuangan samapi Triwulan IV 31 Desember 2023 realisasi anggaran Rp. 7.239.766.804,- atau sebesar 98,10%.

Adapun rincian anggaran dan target realisasi kinerja sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. ***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***
   Masukan input berupa dana Rp. 26.414.400,00 dengan indikator Keluaran Kegiatan adalah terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 1 tahun dengan Pagu Rp. 2.374.400 dengan target realisasi sebesar 86,06% dan terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu sebesar Rp. 24.040.000,00 dengan realisasi sebesar 79,04%.
2. ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
   Masukan input dana Rp. 5.520.429.423,00 dengan indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN pagu sebesar Rp. 5.476.469.223 dengan target realisasi sebesar 99,71 ,terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan pagu sebesar Rp 41.775.600,00 dengan realisasi sebesar 100% dan terlaksananya Koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pagu 2.184.600,00 dengan target realisasi sebesar 92,46%.
3. ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***
   Masukan input dana Rp. 126.059.100,00 dengan indikator Keluaran Kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pagu 8.605.000,00 dengan target realisasi sebesar 100%, tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu sebesar Rp. 39.389.500,00 target realisasi sebesar 99,26%, tersedianya Peralatan Rumah Tangga pagu sebesar Rp. 6.724.600,00 dengan target realisasi sebesar 83,84%, tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan pagu sebesar Rp. 27.125.000,00 dengan target realisasi sebesar 99,90% dan terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu 44.215.000,00 dengan target realisasi sebesar 56,76%.
4. ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
   Masukan input dana Rp. 88.850.00,00 dengan indikator Keluaran Kegiatan adalah terpenuhinya pengadaan mebel pagu sebesar Rp. 63.350.000,00 dengan target realisasi sebesar Rp. 72,77% dan terpenuhinya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pagu sebesar Rp. 25.500.000,00 target realisasi sebesar 95,29%.
5. ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
   Masukan input dana Rp. 109.434.700,00 dengan indikator Keluaran Kegiatan adalah tersedianya Jasa Surat Menyurat pagu sebesar Rp. 860.000,00 dengan target realisasi 100%, tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pagu sebesar Rp. 35.912.300,00 dengan target realisasi sebesar Rp. 67,49% dan tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor pagu sebesar Rp. 72.662.400,00 dengan target realisasi sebesar 95,33%.

6. ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Masukan input dana Rp. 56.984.020,00 dengan indikator Keluaran
Kegiatan adalah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan keadaan dinas operasional atau lapangan pagu sebesar Rp. 36.987.720,00 dengan target realisai 98,01% dan terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pagu sebesar Rp. 19.996.300,00 dengan target realisasi sebesar 98,76%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   Masukan input dana Rp.10.000.000,00 dengan indikator Keluaran
   Kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pagu sebesar Rp. 10.015.000,00 selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 89,92%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   Masukan input dana Rp. 1.410.582.616,00 dengan indikator Keluaran
   Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebesar Rp. 15.401.900,00 dengan target realisasi sebesar 96,16% dan masing-masing Kelurahan ada 7 di Kecamatan Tarutung yaitu :

1. Kelurahan Hutatoruan V

Masukan input dana Rp. 199.999.700,00 dengan indikator Keluaran
Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan target realisasi sebesar 100%, terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana pagu 100.000.000,00 dengan target realisasi 98,79% dan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat pagu sebesar Rp. 95.000.000,00 dengan realisasi sebesar 93,51%.

2. Kelurahan Hutatoruan VI

Masukan input dana Rp. 199.339.735,00 dengan indikator Keluaran
Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. 3.940,000,00 dengan target realisasi sebesar 100%, terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana pagu 92.786.135,00 dengan target realisasi 99,88% dan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat pagu sebesar Rp. 102.613.600,00 dengan realisasi sebesar 97,77%.

3. Kelurahan Hutatoruan VII

Masukan input dana Rp. 200.000.000,00 dengan indikator Keluaran
Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan target realisasi sebesar 100%, terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana pagu 100.000.000,00 dengan target realisasi 98,85% dan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat pagu sebesar Rp. 95.000.000,00 dengan realisasi sebesar 97,52%.

4. Kelurahan Hutatoruan IX

Masukan input dana Rp. 199.870.700,00 dengan indikator Keluaran
Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. 4.998.700,00 dengan target realisasi sebesar 100%, terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana pagu 67.277.400,00 dengan target realisasi 95,53% dan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat pagu sebesar Rp. 127.594.600,00 dengan realisasi sebesar 85,66%.

5. Kelurahan Hutatoruan X

Masukan input dana Rp. 195.970.581,00 dengan indikator Keluaran
Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan target realisasi sebesar 100%, terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana pagu 92.917.881,00 dengan target realisasi 97,46% dan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat pagu sebesar Rp. 98.052.700,00 dengan realisasi sebesar 97,09%.

6. Kelurahan Hutatoruan XI

Masukan input dana Rp. 200.000.000,00 dengan indikator Keluaran
Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan target realisasi sebesar 100%, terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana pagu 100.000.000,00 dengan target realisasi 100% dan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat pagu sebesar Rp. 95.000.000,00 dengan realisasi sebesar 95,48%.

7. Kelurahan Partali Toruan

Masukan input dana Rp. 200.000.000,00 dengan indikator Keluaran
Kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. 4.999.900,00 dengan target realisasi sebesar 100%, terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana pagu 96.205.300,00 dengan target realisasi 92,93% dan terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat pagu sebesar Rp. 98.794.800,00 dengan realisasi sebesar 91,02%.

D. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah

Masukan input dana Rp. 26.999.800,00 dengan indikator Keluaran
Kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Simulasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional pagu sebesar 26.999.800,00 selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 94,17% dan terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pagu sebesar Rp. 21.000.000,00 dengan target realisasi sebesar 100%.

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Masukan input dana Rp. 4.999.600,00 dengan indikator Keluaran
Kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa pagu sebesar Rp. 4.999.600,00 dengan target realisasi sebesar 73,89%.

Tabel 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TARUTUNG S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Retribusi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan kegiatan renja SKPD Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan keuangan PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusuan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		dan Listrik									
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitas gedung kantor dan bangunan Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik										
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksanannya Koordinasi/Sinergi Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pemberdayaan/Kelurahan										
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pembangunan di Desa										
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananyan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
	Kel. Hutatoruan V										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kel. Hutatoruan VI										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kel. Hutatoruan VII										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kel. Hutatoruan IX										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Kel. Hutatoruan X										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kel. Hutatoruan XI										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kel. Partali Toruan										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program-program yang telah tersusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah SKPD (LAKIP SKPD). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik atau tahunan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarutung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tarutung selama Tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

Kinerja pemerintah Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan. Untuk evaluasi kinerja ini dikelompokan dalam indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang tertuang dalam tabel pengukuran kinerja kegiatan Kecamatan Tarutung.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada Tahun 2023 anggaran Kecamatan Tarutung sebesar Rp. 7.380.353.759,- dengan 5 Program dan 18 Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasi anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 7.239.766.804,- atau 98,10% dari pagu anggaran, dengan capaian kinerja fisik 98,10%.

Kinerja Pemerintah Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 tertuang dalam tabel pengukuran kinerja kegiatan dimana hasil prosentase yang dicapai oleh masing-masing kegiatan tingkat realisasinya baik. Prosentase pencapaiannya kinerja masing-masing kegiatan berkisar antara 0% sampai 100% dan setiap tahunnya sesuai data yang ada mengalami peningkatan. Ini menunjukan bahwa capaian kinerja Kecamatan Tarutung dapat memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Tapanuli Utara untuk mewujudkan "Good Governance".

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini seringkali ditemui hambatan dimana ada juga beberapa kegiatan yang hasilnya tidak mencapai 100%.

Sesuai penetapan kinerja tahun 2023 Kecamatan Tarutung telah memprogramkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

EVALUASI KINERJA PROGRAM (EKP)

No	Program	Bobot Program	Capaian Kinerja
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	98,71%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	89,92%
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	95,77%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	95,70%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	73,89%
Rata –rata capaian program		**100%**	**90,79%**

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian perencanaan strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tarutung s/d 2023 adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	0	n/a	n/a	n/a	82,02	90	100%
2.	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	85%	88%	89%	92%	95,37%	100%	100%
3.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Penduduk yang melakukan perekaman e-KTP	100%	100%	100%	100%	95,61%	100%	100%
5.	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	60	65	70	71	75	75

2.3 ISU-ISU PENTINGNYA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Adapun isu penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tarutung didasarkan kepada permasalahan dan hambatan yang dihadapi terutama penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan diuraikan sebagai berikut :

- Inovasi-inovasi dibidang penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
- Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan lebih terstruktur;
- Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan tupoksinya;
- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kinerja;
- Kritertia kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
- Penambahan sarana dan prasarana kantor serta pemanfaatannya sesuai dengan tuntutan tugas.

Kondisi umum berbagai bidang yang ada di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentu saja menghadapi tantangan yang secara umum dijabarkan sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk taat pajak sehingga pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PAD tidak bisa mencapai realiasasi sampai dengan 100%.
2. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai berikut maraknya kasus korupsi yang terekspos.
3. Masih terbatasnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pengurusan administrasi kependudukan dan kepengurusan surat kepemilikan tanah sehingga tidak mengikuti prosedur yang berlaku.

4. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan meningkatnya pengangguran pada usia produkrtif sebagai akibat tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.

Selain itu dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan sumber daya manusia aparatur di Desa/Kelurahan serta Kecamatan Tarutung perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara bahwa ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tapanuli Utara kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi wilayah dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan dan aturan yang berlaku.
3. Mengendornya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana pembangunan hasil musyawarah rencana pembangunan desa dan musyawarah rencana pembangunankecamatan.

4. Koordinasi dan konsultasi antar pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan dengan seharusnya sehingga masih sering terjadi ketidakpastian kewenangan.
5. Pegawai belum semuanya memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Adapun strategi yang dilakukan Kantor Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan etos kerja dan displin aparat yang ada di Kantor Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan untuk meningkatkan kualitas aparat yang ada di Kantor Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
- Membangun budaya pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- Pemanfaatan anggaran operasional yang tersedia dengan optimal.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya perbaikan infrastruktur pendukung yang dapat mengoptimalkan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan peran serta pemuda.
- Bekerjasama dengan lembaga/Organisasi kemasyarakatan atau pihak ketiga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan peran PKK dalam pembangunan kemasyarakatan.
- Melakukan pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan dalam upaya peningkatan kepemudaan serta pemuda dalam pembangunan.
- Bekerjasama dengan unsur pimpinan kecamatan dalam mewujudkan dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
- Menggalakkan gotong royong dalam masyarakat.
- Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk membayar pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara.

Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat.

2. Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap seksi di Kantor Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Terjalinnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan unsur Pimpinan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, UPTD Kecamatan dan tokoh masyarakat/pemuda/agama sehingga ketentraman dan ketertiban dapat tercapai dan penyelesaian masalah-masalah sosial dapat diselesaikan dengan baik.
4. Posisi wilayah yang strategis yang dapat diakses dengan transportasi yang cukup memadai khususnya bagi masyarakat yang tinggal di desa.
5. Ketersediaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Sarana dan prasarana yang cukup memadai (kamar mandi, tempat parkir, Balai Data, Peralatan dan Perlengkapan lainnya).

Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan pelayanan Kantor Camat Tarutung :

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai
2. Terbatasnya sarana dan prasarana kantor mengakibatkan pelayanan kurang optimal.
3. Belum optimalnya koordinasi Perangkat Daerah lain dengan Kecamatan
4. Terbatasnya fasilitas umum di Kecamatan
5. Kondisi Geografis yang rawan bencana
6. Masih adanya wilayah blank spot

Tabel 2.3.1
Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai
			Terbatasnya sarana dan prasarana kantor mengakibatkan pelayanan kurang optimal.
			Belum optimalnya koordinasi Perangkat Daerah lain dengan Kecamatan
			Terbatasnya fasilitas umum di Kecamatan
			Kondisi Geografis yang rawan bencana
			Masih adanya wilayah blank spot
			Adanya Perubahan Peraturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 sehingga ada penambahan untuk Nomenklatur Kegiatan

Dari analisis kondisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, terdapat sejumlah permasalahan yang dideskripsikan sebagai berikut :

No	Sasaran Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tarutung	Permasalahan Pelayanan Kantor Kecamatan Tarutung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 8 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik deng sistem e-government			
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Belum optimalnya tugas dan tanggung jawab pegawai, Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kantor, sulitnya kondisi geografis, masih terbatasnya fasilitas umum, masih adanya wilayah blank spot	Tugas dan Fungsi sudah jelas, setiap jenis pelayanan memiliki SOP dan SP (standart pelayanan) yang jelas, Tersedianya kotak pengaduan/sara

Dari hasil identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Tarutung dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kantor Kecamatan Tarutung maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya.

   Dalam pelaksanaan tugas dilakukan dengan arah kebijakan :

   a. Pengembangan sumberdaya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kopensasi dan kesejahteraan pegawai.
   b. Peningkatan kemampuan aparatur dengan mengikuti sosialisasi maupun bimtek.
   c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efiensi.

2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan serta menjaga pembangunan yang dilaksanakan dengan arah kebijakan :

   a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis.
   b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
   c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Strategi pembangunan koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan:

   a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan serta dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

2.4 Review terhadap rancangan awal

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap Tahun Anggaran sebagaimana tabel review terhadap rencana kerja PD tahun 2023
2. Alasan proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat (Prosedur Buttom Up).
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.
4. Untuk review terhadap RKPD tahun 2024 Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara lebih jelasnya dilihat pada Tabel T.C 31 Review terhadap rancangan awal tahun 2024 di bawah ini :

Tabel TC.3.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KECAMATAN TARUTUNG

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**						**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**						
	Perencanaan, Penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		*terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat*			*Perencanaan, Penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*		*terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*			
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Tarutung	Terlaksananya Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	4.222.416	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Tarutung	Terlaksananya Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2.374.400	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Tarutung	Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	16.740.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Tarutung	Terlaksananya	Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	16.740.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*			*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Terlaksananya Administrasi Keuangan*	*Persentase Administrasi Keuangan*	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Tarutung	Terlaksananya administrasi Keuangan PD	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	7.738.708.791	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Tarutung	Terlaksananya administrasi Keuangan PD	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.340.483.342	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Tarutung	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	50.127.396	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Tarutung	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	41.775.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Tarutung	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	4.227.740	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Tarutung	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	2.184.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*			*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Tarutung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Tarutung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	8.605.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Tarutung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	31.013.994	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Tarutung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	39.389.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Tarutung	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	7.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Tarutung	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan	100%	6.724.600	

	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Kec.Tarutung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	20.215.470	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Kec.Tarutung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	16.450.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Tarutung	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	18.912.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Tarutung	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	49.890.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	*Kec.Tarutung*	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah*	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahah Daerah*			*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah*	*Kec.Tarutung*	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah*	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahah Daerah*			
	Pengadaan Mebel	Kec.Tarutung	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	63.350.000	Pengadaan Mebel	Kec.Tarutung	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	63.350.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Tarutung	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Tarutung	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Tarutung	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kec.Tarutung	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Tarutung	Tersediaanya Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Surat Menyurat	100%	2.417.580	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Tarutung	Tersediaanya Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Surat	100%	860.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kec.Tarutung	Tersediaanya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100%	19.686.337	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kec.Tarutung	Tersediaanya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100%	35.912.300	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Tarutung	Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	87.120.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Tarutung	Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	72.662.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Kec.Tarutung	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah*	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang*			*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah*	Kec.Tarutung	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*Persentase Pemeliharaan Barang*	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kenderaan dinas operasional atau lapangan	Kec.Tarutung	Tersediaanya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kenderaan dinas operasional atau lapangan	Persentase Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	100%	45.703.031	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kenderaan dinas	Kec.Tarutung	Tersediaanya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	Persentase Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan,	100%	36.987.720	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Tarutung	Terperliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terperliharanya Gedung Kantor dan	100%	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Tarutung	Terperliharanya Gedung Kantor dan Bangunan	Persentase Terperliharanya Gedung Kantor	100%	19.996.300	
II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kec.Tarutung					**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan**						
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Tarutung	*Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat*	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan*			*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat*	Kec.Tarutung	*Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan*	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan*	100%		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Kec.Tarutung	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat	Persentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	100%	74.812.400	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Kec.Tarutung	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Persentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	100%	10.000.000	
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kec.Tarutung	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan**		**Program Pemberdayaan**				
	Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Kec.Tarutung	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat di*			*Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan*	Kec.Tarutung	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di*	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat di*	100%		
	Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Tarutung	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Persentase Peningkatan Partisipasi dalam	100%	40.000.000	Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kec.Tarutung	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi dalam	Persentase Peningkatan Partisipasi dalam	100%	22.701.900	
	Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Kec.Tarutung	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat di*	100%		*Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan*	Kec.Tarutung	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di*	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat di*	100%		
	Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec.Tarutung	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Persentase Peningkatan Partisipasi dalam	100%	5.499.890	Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kec.Tarutung	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi dalam	Persentase Peningkatan Partisipasi dalam	100%	35.000.000	

	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec.Tarutung	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana	Persentase Pembangunan	100%	600.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec.Tarutung	Terlaksananya Pembangunan	Persentase Pembangunan	100%	700.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec.Tarutung	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di	100%	400.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec.Tarutung	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di	100%	455.000.000	
IV	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Kec.Tarutung					**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**						
	Koordinasi Penerarapan dan Penegakan Peraturan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Kec.Tarutung	*Terlaksananya Koordinasi Penerarapan dan Penegakan Peraturan Peraturan Peraturan Kepala Daerah*	*Persentase Koordinasi Penerarapan dan Penegakan Peraturan Peraturan Peraturan*			*Koordinasi Penerarapan dan Penegakan Peraturan Peraturan Peraturan Kepala Daerah*	Kec.Tarutung	*Terlaksananya Koordinasi Penerarapan dan Penegakan*	*Persentase Koordinasi Penerarapan dan Penegakan*			
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/Atau Kepolisiaan Negara Republik Indonesia	Kec.Tarutung	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/Atau Kepolisiaan Negara Republik Indonesia	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	100%	5.500.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/Atau	Kec.Tarutung	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	100%	4.999.800	
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**						
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urusan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Tarutung	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Urusan sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Persentase Urusan Pemerintahan Urusan sesuai*			*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urusan sesuai Penugasan Kepala Daerah*	Kec.Tarutung	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan*	*Persentase Urusan Pemerintahan*			
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Kec.Tarutung	Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	100%	5.500.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Kec.Tarutung	Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi dan	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan	100%	4.999.850	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Tarutung	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	100%	21.600.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Tarutung	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	Persentase Tugas Forum Koordinasi	100%	21.600.000	
VI	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec.Tarutung					**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Tarutung	*Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*			*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	Kec.Tarutung	*Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*			
	Fasilitasi, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec.Tarutung	Terselenggaranya Fasilitasi, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Fasilitasi, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan	100%	5.500.000	Fasilitasi, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec.Tarutung	Terselenggaranya Fasilitasi, Pelaksanaan Tugas	Persentase Fasilitasi, Pelaksanaan	100%	4.999.050	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan Unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes, pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa/kelurahanselanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut ke Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Desa yang ada pada unit pelaksana teknis di tingkat Kecamatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Mempedomani Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, disampaikan bahwa 7 agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024, meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan.
   b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industri, kemaritiman, energy industri, Parawisata serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :
   a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah belum berkembang;
   c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
   d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah serta;
   e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah

Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adatif, inovatif, terampil dan berkarakter melalui :

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, RPJMD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2020-2024;
c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
f. Pengentasan kemiskinan; dan
g. Peningkatan produktivitas daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas displin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilakukan secara holistik dan integrative dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui :
   a. Memperkuat ketahanan budaya bangsa;
   b. Memajukan kebudayaan;
   c. Meningkatkan pemahaman, pengalaman dan penghayatan nilai agama;
   d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga;
   e. Meningkatkan budaya literasi.
5. Memperkuat infrakstruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan dirahkan melalui kebijakan : RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024

   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
   b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
   c. Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhumkam dan transformasi pelayanan publik.

   Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

   a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk Pelayanan Publik berkualitas;
   b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
   c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
   e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

   Agenda pembangunan nasional selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan pembangunan di wilayah masing-masing guna pencapaian target pembangunan secara nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SKPD

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Kantor Camat Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada misinya bertujuan : **"Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja"** dan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatkan Nilai AKIP dari Inspektorat."

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	0	n/a	n/a	n/a	80	90	100%
2.	Persentase Kelembagaan Desa yang aktif	85%	88%	89%	92%	95%	100%	100%
3.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Penduduk yang melakukan perekaman e-KTP	90%	93%	95%	98%	99%	100%	100%
5.	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	60	65	70	71	75	75

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Agenda Musrenbang ini Usulan Prioritas untuk APBD Tahun Anggaran 2024 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Mebel
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikai, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
c. Pembangunan Sarana dan Prasarana
d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional
b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

BAB 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dirangkum rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang telah dientri pada system Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 (terlampir).

BAB 5
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Tarutung Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Tarutung sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tarutung Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kantor Kecamatan Tarutung yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan serta berfungsi sebagai sarana peningkatan Kinerja Kantor Kecamatan Tarutung.

Akhirnya Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tarutung ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang strategis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik.

Tarutung, 2023.

CAMAT TARUTUNG,

RENHARD D. LUMBANTOBING,S.Sos
PEMBINA
NIP. 197505272005021002

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

KANTOR CAMAT SIBORONGBORONG

TAHUN 2024



KECAMATAN SIBORONGBORONG

T.A 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja SKPD adalah Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Tahun 2020 – 2024 dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat**.**

Kecamatan Siborongborong sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) perlu menetapkan target Kinerja sehingga pada akhir tahun anggaran dapat diketahui pencapaian kinerjanya, hal ini dimaksudkan agar dapat lebih mudah mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Renja Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Siborongborong untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Siborongborong ini dilandaskan pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
15. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2020 – 2024 .

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif prakiraan maju. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan :

1. Mengacu pada RKPD
2. Mengacu pada Renstra SKPD
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi
5. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Camat Siborongborong Tahun 2024 disusun dengan maksud:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Siborongborong Tahun 2024
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara khususnya Kecamatan Siborongborong;
3. Untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Siborongborong, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah :

1. Untuk menjadi acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
2. Untuk menjadi bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
3. Untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan kedalam Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Camat Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Camat Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kantor Camat Siborongborong Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Camat Siborongborong

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD yang memuat indikator sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kantor Camat Siborongborong

Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Camat Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Kantor Camat Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat kajian tentang rancangaan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Siborongborong s/d Tahun 2024 (tahun lalu) dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Siborongborong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Siborongborong dapat dilihat pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025
PROVINSI SUMATERA UTARA KABUPATEN TAPANULI UTARA KECAMATAN SIBORONGBORONG

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
								I		II			
1	2	3	4	5		7		8		9		12 = 8+9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**Cakupan pemenuhan layana penunjang**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**17,974,810,640**	**100**	**3,406,932,946**	**25**	**578,929,036**	**#**	**1,030,790,837**	**50**	**1,609,719,873**
2		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**77,046,400**	**100**	**30,424,000**	**-**	**-**	**#**	**5,394,000**	**25**	**5,394,000**
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5	7,046,400	1	624,000	-	-	-	-	-	-

4		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat DAerah	24	70,000,000	12	29,800,000	-	-	6	5,394,000	6	5,394,000
5		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan tepat waktu**	**100**	**16,562,192,800**	**100**	**3,142,572,181**	**25**	**569,929,036**	**#**	**989,684,512**	**50**	**1,559,613,548**
6		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	140	16,319,654,400	12	3,102,472,981	3	563,479,836	3	978,681,712	1	1,542,161,548
7		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	231,390,700	12	38,695,200	2	6,449,200	3	9,673,800	5	16,123,000
8		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	11,147,700	1	1,404,000	-	-	1	1,329,000	**1**	1,329,000
9		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah dengan baik**	**100**	**600,571,440**	**100**	**104,934,250**	**-**	**-**	**#**	**8,556,000**	**2**	**8,556,000**
10		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	60	18,118,500	12	1,356,800	-	-	-	-	-	-
11		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	94,682,900	12	20,085,450	-	-		-	**-**	**-**
12		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	60	40,000,000	12	6,005,000	-	-	3	1,946,000	3	1,946,000
13		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	60	20,473,440	12	5,762,000	-	-	3	1,020,000	3	**1,020,000**
14		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	36,733,000	12	4,320,000	-	-	-	-	**-**	-
15		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	60	390,563,600	12	67,405,000	-	-	3	5,590,000	3	**5,590,000**
16		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**12**	**150,000,000**	**2**	**16,560,000**	**-**	**-**	**1**	**7,800,000**	**1**	**7,800,000**

17		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	150,000,000	2	16,560,000	-	-	1	7,800,000	**1**	**7,800,000**
18		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**375,000,000**	**100**	**83,758,515**	**25**	**9,000,000**	**#**	**13,861,325**	**5**	**22,861,325**
19		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	120,000,000	12	28,761,715	-	-	6	4,654,325	6	**4,654,325**
20		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	5,000,000	12	500,000	-	-	-	-	-	-
21		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	250,000,000	12	54,496,800	2	9,000,000	2	9,207,000	6	**18,207,000**
22		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik**	**100**	**210,000,000**	**100**	**28,684,000**	**-**	**-**	**#**	**5,495,000**	50	5,495,000
23		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	15,000,000	2	666,000	-	-	-	-	-	-
24		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	180,000,000	1	24,923,600	-	-	6	4,995,000	7	4,995,000
25		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	15,000,000	3	3,094,400	-	-	1	500,000	1	**500,000**
26	**Cakupan Layanan Publik Yang di Laksanakan**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**85**	**208,784,800**	**80**	**20,250,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
27		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase terlaksananya penyeleggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik**	**85**	**208,784,800**	**80**	**20,250,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**

28		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48	208,784,800	12	20,250,000	-	-	-	-	-	-
29	**Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**80**	**2,345,490,000**	**85**	**19,967,200**	-	-	**#**	**16,457,200**	**50**	**16,457,200**
30		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kegiatan pemebrdayaan desa yang dilaksanakan**	**80**	**55,000,000**	**85**	**19,967,200**	-	-	**#**	**16,457,200**	9	16,457,200
31		Peningkatan Partispasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartispasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15	65,000,000	5	19,967,200	-	-	5	16,457,200	5	**16,457,200**
32		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**80**	**2,290,490,000**	**85**	**200,000,000**	-	-	-	-	-	-
33		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25	2,000,000,000	1	88,255,700	-	-	-	-	10	-
34		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan"	10	290,490,000	2	111,744,300	-	-	-	-	-	-
35	**Terlaksannanya ketentraman dan ketertiban umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Tingkat keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti**	**75**	**55,000,000**	**80**	**3,250,000**	-	-	-	-	-	-
36		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan**	**24**	**55,000,000**	**12**	**3,250,000**	-	-	-	-	**11**	-

37		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24	55,000,000	12	3,250,000	-	-	-	-	-	-
38	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan lancar**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	**80**	**105,000,000**	**85**	**28,800,000**	**14**	**4,800,000**	**#**	**4,800,000**	**28**	**9,600,000**
39		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan baik**	**80**	**105,000,000**	**85**	**28,800,000**	**14**	**4,800,000**	**#**	**4,800,000**	**12**	**9,600,000**
40		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Foruim Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24	105,000,000	12	28,800,000	2	4,800,000	2	4,800,000	4	9,600,000
41	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti**	**75**	**55,000,000**	**80**	**1,070,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42		**Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**75**	**55,000,000**	**80**	**1,070,000**	-	-	-	-	13	-
43		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pela sanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	36	55,000,000	12	1,070,000	-	-	-	-	-	-
JUMLAH					**20,744,085,440**		**3,480,270,146**		**583,729,036**		**1,052,048,037**		**1,635,777,073**

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

Analisa kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanna SKPD digunakan beberapa indicator antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Kantor Camat Siborongborong merupakan salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang ikut serta dalam menunjang Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan pembangunan. Pencapaian kinerja Kecamatan Siborongborong selama Tahun 2019 dalam berbagai bidang baik pemerintahan, kesejahteraan social, pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Sosial Budaya yang telah terealisasi pada Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan
   a) Telah dilaksanakan pembinaan kepada aparat Pemerintah Desa tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masalah-masalah yang terkait didalamnya.
   b) Telah dilaksanakan Pameran Pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara
   c) Dalam bidang kependudukan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembuatan KTP elektronik, telah dilaksanakan pelayanan perekaman e-KTP
   d) Mengenai pelayanan di bidang pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah, dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya ada perubahan blanko dimana setiap formulir yang dari Kepala Desa harus diketahui oleh Camat Siborongborong yaitu (F1.35, F1.07, F1.21, dan F1.06) telah terlayani dengan baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku.
   e) Dalam bidang pajak bumi dan bangunan telah didistribusikan SPPT bagi wajib pajak PBB sebanyak 20 Desa + 1 Kelurahan.

2. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a) Pelaksanaan monitoring pelaksanaan protokol kesehatan di pesta dan tempat-tempat umum lainnya
   b) Pendataan dan Pemberian bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid-19 (mahasiswa, UMKM, dan sebagainya)
   c) Pemberian bantuan sosial untuk korban bencana alam, kebakaran, dan lainnya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
   a) Pelaksanaan Musrenbang Desa tentang APBDes
   b) Pelaksanaan Musrenbang Desa tentang ADD/K dan Dana Desa
   c) Pembinaan PKK Desa Percontohan yaitu Desa Lumban Tongatonga dan Desa Sitabotabo Toruan
   d) Pencairan Honor/Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan BPD Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
   e) Pelaksanaan Gotong Royong Desa

Dengan persentasi realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

TABEL 2.3

EVALUASI KINERJA PROGRAM (EKP)

Kode	Program	Bobot Program	Capian Kinerja
P1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100
P2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80	80
P3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	85	85
P4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	80	80
P5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85	85
P6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80	80

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

Berdasarkan kondisi umum berbagai bidang yang ada di Kecamatan Siborongborong, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentu saja menghadapi tantangan yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tuntutan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk taat pajak sehingga Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan PAD tidak bisa mencapai realisasi sampai dengan 100%
3. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan , dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
4. Terbatasnya jumlah SDM dan anggaran

5. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
6. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos.
7. Dengan adanya Bandar Udara Silangit maka akses dari luar lebih gampang dan dikhawatirkan perdagangan Narkoba atau obat-obat terlarang mudah masuk.
8. Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Siborongborong.
9. Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidsk seimbangnya pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.

Sedangkan Peluang untuk pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Siborongborong adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati ke Camat.
2. Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur tugas,pokok, dan fungsi setiap seksi di Kantor Kecamatan Siborongborong
3. Adanya hubungan atau koordinasi yang baik dengan stakeholder, Instansi, Pemerintah Desa atau organisasi kemasyarakatan lainnya sehingga ada dukungan dari lembaga atau partisipasi masyarakat yang cukup tinggi misalnya : Dinas Sosial, Dinas Pasar dan Kebersihan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga memudahkan untuk pelayanan lanjutan.
4. Adanya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui Musrenbang Desa dan Kecamatan, Kegiatan gotong royong, dan sebagainya.
5. Adanya pemberdayaan peningkatan Aparat Kecamatan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya melalui program ijin belajar, bimtek dari Pemerintah Kabupaten maupun Lembaga penyelenggara diklat yang berhubungan dengan pelayanan publik dan ilmu lainnya.
6. Adanya pengalokasian anggaran dari Pemerintah untuk operasional kantor ataupun peningkatan sarana dan prasarana
7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
8. Adanya system administrasi kependudukan melalui program system aplikasi pendataan penduduk

Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan kondisi umum berbagai bidang yang ada di Kecamatan Siborongborong, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentu saja menghadapi kendala dan permasalahan. Secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kecamatan
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan
3. Belum optimalnya tata kelola keuangan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Siborongborong bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Peran strategis pelayanan Kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus dipehatikan, antara lain :

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu;
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Perwujudan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan daerah yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Berbagai fenomena terakhir di Indonesia menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas tatakelola pemerintahan yang baik dan inovatif cenderung memiliki kinerja yang baik dibandingkan daerah lainnya. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih menemui kendala di Kabupaten Tapanuli Utara. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik.

Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik belum mampu menciptakan pelayanan publik yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Berbagai inovasi yang telah dilakukan dalam penerapan e-government, inovasi dalam pemanfaatan potensi daerah serta inovasi lainnya belum mampu secara optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga mengakibatkan tingkat daya saing daerah masih rendah.

Adapun strategi yang dilakukan Kantor Kecamatan Siborongborong dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan etos kerja dan disiplin aparat yang ada di Kantor Kecamatan Siborongborong.
2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan untuk meningkatkan kualitas aparat yang ada di Kantor Kecamatan Siborongborong.
3) Membangun budaya pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
4) Pemanfaatan anggaran operasional yang tersedia dengan optimal, efektif dan efisien.
5) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya perbaikan infrastruktur pendukung yang dapat mengoptimalkan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan peran serta pemuda.
6) Bekerja sama dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7) Meningkatkan peran PKK dalam pembangunan kemasyarakatan.
8) Bekerja sama dengan unsur pimpinan kecamatan dalam mewujudkan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
9) Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk membayar pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara.

10) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang ada di Kecamatan Siborongborong
11) Berperan aktif dalam upaya perwujudan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA. Rencana Kerja Kecamatan Siborongborong berdasarkan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Siborongborong. Untuk Tahun 2024, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2.3.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN TAHUN 2024
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Nama SKPD : KANTOR CAMAT SIBORONGBORONG

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan layanan penunjang yang tertangani		**3.289.286.766**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		Cakupan layanan penunjang yang tertangani		**3.289.286.766**	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	**18.274.000**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	**18.274.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP6	Kantor Camat Siborongborong	Telaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	1 Laporan	624.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP6	Kantor Camat Siborongborong	Telaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	1 Laporan	624.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	17.650.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	17.650.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	12 Bulan	**3.043.842.501**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	12 Bulan	**3.043.842.501**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	3.003.743.301	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	3.003.743.301	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya penatausahaan keuangan perangkat daerah	12 Bulan	38.695.200	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya penatausahaan keuangan perangkat daerah	12 Bulan	38.695.200	
	Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1.404.000	Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1.404.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	**89.564.450**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	**89.564.450**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	1.532.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	1.532.000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	20.085.450	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	20.085.450	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	6.005.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	6.005.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	5.762.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	5.762.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	0	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	56.180.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	56.180.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	83.758.515	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	83.758.515	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	500.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tercukupinya Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	28.761.715	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tercukupinya Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	28.761.715	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Siborongboron	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (petugas kebersihan, sopir, petugas jaga malam)	12 Bulan	54.496.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Siborongboron	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (petugas kebersihan, sopir, petugas jaga malam)	12 Bulan	54.496.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	**37.287.300**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah**	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	**37.287.300**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	33.180.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	33.180.900	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	3.094.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	3.094.400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	1.012.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	1.012.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Siborongborong	**Cakupan peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	12 Laporan	**44.386.500**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kantor Camat Siborongborong	**Cakupan peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	12 Laporan	**44.386.500**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Siborongborong	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	12 Laporan	44.386.500	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kantor Camat Siborongborong	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	12 Laporan	44.386.500	

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	44.386.500	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	44.386.500	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Siborongborong	Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	**17.497.200**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kantor Camat Siborongborong	Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	**17.497.200**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Lembaga Kemasyarakatan	17.497.200	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Lembaga Kemasyarakatan	17.497.200	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	17.497.200	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	17.497.200	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kantor Kelurahan Pasar Siborongborong	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kantor Kelurahan Pasar Siborongborong	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	**200.000.000**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kantor Kelurahan Pasar Siborongborong	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Pasar Siborongborong	12 Bulan	88.255.700	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kantor Kelurahan Pasar Siborongborong	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Pasar Siborongborong	12 Bulan	88.255.700	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Kelurahan Pasar Siborongborong	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	111.744.300	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Kelurahan Pasar Siborongborong	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	111.744.300	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Siborongborong	**Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	12 Kegiatan	**500.000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	12 Kegiatan	**500.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksannaya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Kegiatan	500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terlaksannaya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Kegiatan	500.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	12 Kegiatan	500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	12 Kegiatan	500.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya penyelenggraaan urusan Pemerintahan Umum	12 Dokumen	**28.800.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Terlaksananya penyelenggraaan urusan Pemerintahan Umum	12 Dokumen	**28.800.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Dokumen	28.800.000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Dokumen	28.800.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	28.800.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	28.800.000	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Kegiatan	**1.070.000**	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Kegiatan	**1.070.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Kegiatan	1.070.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Kegiatan	1.070.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	12 Kegiatan	1.070.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	12 Kegiatan	1.070.000	

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Siborongborong seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka usulan program dan kegiatan masyarakat yang dapat dikelompokkan pada Renja Tahun 2024 seperti pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara

Nama SKPD : KANTOR CAMAT SIBORONGBORONG

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Siborongborong	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	100	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Siborongborong	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	80	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Siborongborong Kelurahan Pasar Siborongborong	Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Siborongborong	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	80	
5	Program Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Siborongborong	Cakupan Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum	85	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Siborongborong	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Siborongborong yang tertuang dalam Rencana Kerja ini merupakan kumpulan kegiatan yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022. Secara terperinci rencana program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini yang juga memuat :

1. Program dan Kegiatan Kantor Camat Siborongborong Tahun Anggaran 2022.
2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan).
3. Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara
4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiran Maju Tahun 2024

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Mempedomani Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, disampaikan bahwa 7 agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
   a..Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan
   b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
   a.Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   b.Distribusi pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah belum berkembang;

c.Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
d.Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
e.Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter melalui :
   a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024
   c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
   d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
   e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
   f. Pengentasan kemiskinan; dan
   g. Peningkatan produktivitas daya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilakukan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
   a.Memperkuat ketahanan budaya bangsa
   b.Memajukan kebudayaan;
   c.Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan penghayatan nilai agama;
   d.Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga;
   e.Meningkatkan budaya literasi.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:.
   a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
   c.Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;

d.Rehabilitasi sarana prasarana yang sudah tidak efisien;
e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup serta peningkatan ketahan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melelui kebijakan : RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024
   a.Peningkatan kualitas lingkungan hidup
   b.Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
   c.Pembangunan rendah karbon

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
   a.Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b.Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
   c.Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d.Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
   e.Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan nasional selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan di wilayah masing-masing guna pencapaian target pembangunan secara nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Kantor Camat Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada misinya bertujuan:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatkan Nilai AKIP dari Inspektorat

3.3 PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan :
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.Administrasi Keuangan, sub kegiatan :
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3.Administrasi Umum , sub kegiatan :
1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan,

sub kegiatan :

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

Pemberdayaan Kelurahan,

sub kegiatan :

1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
2) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

IV. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Kegiatan :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan :

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Kegiatan :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dirangkum rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang telah dientri pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2024 ***(Terlampir).***

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG																			
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp. 3.463.710.146	Rp. 16.560.000			Rp. 3.480.270.146	Rp. 3.364.980.466	Rp. 16.560.000			Rp. 3.381.540.466	Rp. 4.254.500.000,00
7	01				KECAMATAN				Rp. 3.463.710.146	Rp. 16.560.000			Rp. 3.480.270.146	Rp. 3.364.980.466	Rp. 16.560.000			Rp. 3.381.540.466	Rp. 4.254.500.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 3.390.372.946	Rp. 16.560.000			Rp. 3.406.932.946	Rp. 3.272.726.766	Rp. 16.560.000			Rp. 3.289.286.766	Rp. 4.029.500.000,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 30.424.000				Rp. 30.424.000	Rp. 18.274.000				Rp. 18.274.000	Rp. 42.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa		Rp. 624.000				Rp. 624.000	Rp. 624.000				Rp. 624.000	Rp. 2.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 29.800.000				Rp. 29.800.000	Rp. 17.650.000				Rp. 17.650.000	Rp. 40.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 3.142.572.181				Rp. 3.142.572.181	Rp. 3.043.842.501				Rp. 3.043.842.501	Rp. 3.547.500.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 3.102.472.981				Rp. 3.102.472.981	Rp. 3.003.743.301				Rp. 3.003.743.301	Rp. 3.500.000.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 38.695.200				Rp. 38.695.200	Rp. 38.695.200				Rp. 38.695.200	Rp. 45.000.000,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 1.404.000				Rp. 1.404.000	Rp. 1.404.000				Rp. 1.404.000	Rp. 2.500.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 104.934.250				Rp. 104.934.250	Rp. 89.564.450				Rp. 89.564.450	Rp. 164.000.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 1.356.800				Rp. 1.356.800	Rp. 1.532.000				Rp. 1.532.000	Rp. 4.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 20.085.450				Rp. 20.085.450	Rp. 20.085.450				Rp. 20.085.450	Rp. 30.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 6.005.000				Rp. 6.005.000	Rp. 6.005.000				Rp. 6.005.000	Rp. 12.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 5.762.000				Rp. 5.762.000	Rp. 5.762.000				Rp. 5.762.000	Rp. 10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 4.320.000				Rp. 4.320.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 8.000.000,00

7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa		Rp. 67.405.000				Rp. 67.405.000	Rp. 56.180.000				Rp. 56.180.000	Rp. 100.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp. 16.560.000			Rp. 16.560.000		Rp. 16.560.000			Rp. 16.560.000	Rp. 90.000.000,00
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong												Rp. 40.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong			Rp. 16.560.000			Rp. 16.560.000		Rp. 16.560.000			Rp. 16.560.000	Rp. 50.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 83.758.515				Rp. 83.758.515	Rp. 83.758.515				Rp. 83.758.515	Rp. 106.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 500.000				Rp. 500.000	Rp. 500.000				Rp. 500.000	Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 28.761.715				Rp. 28.761.715	Rp. 28.761.715				Rp. 28.761.715	Rp. 42.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 54.496.800				Rp. 54.496.800	Rp. 54.496.800				Rp. 54.496.800	Rp. 62.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 28.684.000				Rp. 28.684.000	Rp. 37.287.300				Rp. 37.287.300	Rp. 80.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 24.923.600				Rp. 24.923.600	Rp. 33.180.900				Rp. 33.180.900	Rp. 55.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 3.094.400				Rp. 3.094.400	Rp. 3.094.400				Rp. 3.094.400	Rp. 10.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 666.000				Rp. 666.000	Rp. 1.012.000				Rp. 1.012.000	Rp. 15.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 20.250.000				Rp. 20.250.000	Rp. 44.386.500				Rp. 44.386.500	Rp. 85.000.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 20.250.000				Rp. 20.250.000	Rp. 44.386.500				Rp. 44.386.500	Rp. 85.000.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 20.250.000				Rp. 20.250.000	Rp. 44.386.500				Rp. 44.386.500	Rp. 85.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 19.967.200				Rp. 19.967.200	Rp. 17.497.200				Rp. 17.497.200	Rp. 40.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 19.967.200				Rp. 19.967.200	Rp. 17.497.200				Rp. 17.497.200	Rp. 40.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa		Rp. 19.967.200				Rp. 19.967.200	Rp. 17.497.200				Rp. 17.497.200	Rp. 40.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp. 3.250.000				Rp. 3.250.000	Rp. 500.000				Rp. 500.000	Rp. 30.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp. 3.250.000				Rp. 3.250.000	Rp. 500.000				Rp. 500.000	Rp. 30.000.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa		Rp. 3.250.000				Rp. 3.250.000	Rp. 500.000				Rp. 500.000	Rp. 30.000.000,00
					PROGRAM PENYELENGGARAAN														

7	01	05			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 45.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 45.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 45.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 1.070.000				Rp. 1.070.000	Rp. 1.070.000				Rp. 1.070.000	Rp. 25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 1.070.000				Rp. 1.070.000	Rp. 1.070.000				Rp. 1.070.000	Rp. 25.000.000,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa		Rp. 1.070.000				Rp. 1.070.000	Rp. 1.070.000				Rp. 1.070.000	Rp. 25.000.000,00
KELURAHAN PASAR SIBORONGBORONG																			
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 780.000.000,00
7	01				KECAMATAN				Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 780.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 780.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000		Rp. 780.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Rp. 88.255.700				Rp. 88.255.700	Rp. 88.255.700				Rp. 88.255.700		Rp. 650.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Rp. 111.744.300				Rp. 111.744.300	Rp. 111.744.300				Rp. 111.744.300		Rp. 130.000.000,00
Jumlah								**Rp. 3.663.710.146**	**Rp. 16.560.000**			**Rp. 3.680.270.146**	**Rp. 3.564.980.466**	**Rp. 16.560.000**			**Rp. 3.581.540.466**		**Rp. 5.034.500.000,00**

Kab. Tapanuli Utara, ...
Camat KANTOR SIBORONGBORONG

A. LAOMOR SWANDI S, ST, MM
NIP. 197602242003121004

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Siborongborong sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2024 ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Siborongborong pada Tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2024 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Siborongborong. Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2024 ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Siborongborong, November 2024

CAMAT SIBORONGBORONG

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA KECAMATAN SIBORONGBORONG

A. LAOMOR SWANDI S, ST, MM

PEMBINA

NIP. 19760224 200312 1 004

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

KANTOR CAMAT SIBORONGBORONG

TAHUN 2024



KECAMATAN SIBORONGBORONG

T.A 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja SKPD adalah Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Tahun 2020 – 2024 dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat**.**

Kecamatan Siborongborong sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) perlu menetapkan target Kinerja sehingga pada akhir tahun anggaran dapat diketahui pencapaian kinerjanya, hal ini dimaksudkan agar dapat lebih mudah mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Renja Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Siborongborong untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Siborongborong ini dilandaskan pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
15. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2020 – 2024 .

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif prakiraan maju. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan :

1. Mengacu pada RKPD
2. Mengacu pada Renstra SKPD
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi
5. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Camat Siborongborong Tahun 2024 disusun dengan maksud:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Siborongborong Tahun 2024
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara khususnya Kecamatan Siborongborong;
3. Untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Siborongborong, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah :

1. Untuk menjadi acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
2. Untuk menjadi bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
3. Untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan kedalam Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Camat Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Camat Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kantor Camat Siborongborong Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Camat Siborongborong

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD yang memuat indikator sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kantor Camat Siborongborong

Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Camat Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Kantor Camat Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat kajian tentang rancangaan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Siborongborong s/d Tahun 2024 (tahun lalu) dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Siborongborong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Siborongborong dapat dilihat pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2025
PROVINSI SUMATERA UTARA KABUPATEN TAPANULI UTARA KECAMATAN SIBORONGBORONG

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024 per Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
								I		II			
1	2	3	4	5		7		8		9		12 = 8+9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**Cakupan pemenuhan layana penunjang**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**17,974,810,640**	**100**	**3,406,932,946**	**25**	**578,929,036**	**#**	**1,030,790,837**	**50**	**1,609,719,873**
2		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**77,046,400**	**100**	**30,424,000**	**-**	**-**	**#**	**5,394,000**	**25**	**5,394,000**
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5	7,046,400	1	624,000	-	-	-	-	-	-

4		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat DAerah	24	70,000,000	12	29,800,000	-	-	6	5,394,000	6	5,394,000
5		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan tepat waktu**	**100**	**16,562,192,800**	**100**	**3,142,572,181**	**25**	**569,929,036**	**#**	**989,684,512**	**50**	**1,559,613,548**
6		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	140	16,319,654,400	12	3,102,472,981	3	563,479,836	3	978,681,712	1	1,542,161,548
7		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	231,390,700	12	38,695,200	2	6,449,200	3	9,673,800	5	16,123,000
8		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	11,147,700	1	1,404,000	-	-	1	1,329,000	**1**	1,329,000
9		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah dengan baik**	**100**	**600,571,440**	**100**	**104,934,250**	**-**	**-**	**#**	**8,556,000**	**2**	**8,556,000**
10		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	60	18,118,500	12	1,356,800	-	-	-	-	-	-
11		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	94,682,900	12	20,085,450	-	-		-	**-**	**-**
12		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	60	40,000,000	12	6,005,000	-	-	3	1,946,000	3	1,946,000
13		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	60	20,473,440	12	5,762,000	-	-	3	1,020,000	3	**1,020,000**
14		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	36,733,000	12	4,320,000	-	-	-	-	**-**	-
15		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	60	390,563,600	12	67,405,000	-	-	3	5,590,000	3	**5,590,000**
16		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**12**	**150,000,000**	**2**	**16,560,000**	**-**	**-**	**1**	**7,800,000**	**1**	**7,800,000**

17		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	150,000,000	2	16,560,000	-	-	1	7,800,000	**1**	**7,800,000**
18		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**375,000,000**	**100**	**83,758,515**	**25**	**9,000,000**	**#**	**13,861,325**	**5**	**22,861,325**
19		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	120,000,000	12	28,761,715	-	-	6	4,654,325	6	**4,654,325**
20		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	5,000,000	12	500,000	-	-	-	-	-	-
21		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	250,000,000	12	54,496,800	2	9,000,000	2	9,207,000	6	**18,207,000**
22		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik**	**100**	**210,000,000**	**100**	**28,684,000**	**-**	**-**	**#**	**5,495,000**	50	5,495,000
23		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	15,000,000	2	666,000	-	-	-	-	-	-
24		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	180,000,000	1	24,923,600	-	-	6	4,995,000	7	4,995,000
25		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	15,000,000	3	3,094,400	-	-	1	500,000	1	**500,000**
26	**Cakupan Layanan Publik Yang di Laksanakan**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**85**	**208,784,800**	**80**	**20,250,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
27		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase terlaksananya penyeleggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik**	**85**	**208,784,800**	**80**	**20,250,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**

28		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48	208,784,800	12	20,250,000	-	-	-	-	-	-
29	**Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**80**	**2,345,490,000**	**85**	**19,967,200**	-	-	**#**	**16,457,200**	**50**	**16,457,200**
30		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kegiatan pemebrdayaan desa yang dilaksanakan**	**80**	**55,000,000**	**85**	**19,967,200**	-	-	**#**	**16,457,200**	9	16,457,200
31		Peningkatan Partispasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartispasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15	65,000,000	5	19,967,200	-	-	5	16,457,200	5	**16,457,200**
32		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**80**	**2,290,490,000**	**85**	**200,000,000**	-	-	-	-	-	-
33		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25	2,000,000,000	1	88,255,700	-	-	-	-	10	-
34		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan"	10	290,490,000	2	111,744,300	-	-	-	-	-	-
35	**Terlaksannanya ketentraman dan ketertiban umum**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Tingkat keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti**	**75**	**55,000,000**	**80**	**3,250,000**	-	-	-	-	-	-
36		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan**	**24**	**55,000,000**	**12**	**3,250,000**	-	-	-	-	**11**	-

37		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24	55,000,000	12	3,250,000	-	-	-	-	-	-
38	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan lancar**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	**80**	**105,000,000**	**85**	**28,800,000**	**14**	**4,800,000**	**#**	**4,800,000**	**28**	**9,600,000**
39		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan baik**	**80**	**105,000,000**	**85**	**28,800,000**	**14**	**4,800,000**	**#**	**4,800,000**	**12**	**9,600,000**
40		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Foruim Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24	105,000,000	12	28,800,000	2	4,800,000	2	4,800,000	4	9,600,000
41	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti**	**75**	**55,000,000**	**80**	**1,070,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42		**Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**75**	**55,000,000**	**80**	**1,070,000**	-	-	-	-	13	-
43		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pela sanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	36	55,000,000	12	1,070,000	-	-	-	-	-	-
JUMLAH					**20,744,085,440**		**3,480,270,146**		**583,729,036**		**1,052,048,037**		**1,635,777,073**

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

Analisa kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanna SKPD digunakan beberapa indicator antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Kantor Camat Siborongborong merupakan salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang ikut serta dalam menunjang Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan pembangunan. Pencapaian kinerja Kecamatan Siborongborong selama Tahun 2019 dalam berbagai bidang baik pemerintahan, kesejahteraan social, pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Sosial Budaya yang telah terealisasi pada Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan
   a) Telah dilaksanakan pembinaan kepada aparat Pemerintah Desa tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masalah-masalah yang terkait didalamnya.
   b) Telah dilaksanakan Pameran Pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara
   c) Dalam bidang kependudukan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembuatan KTP elektronik, telah dilaksanakan pelayanan perekaman e-KTP
   d) Mengenai pelayanan di bidang pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah, dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya ada perubahan blanko dimana setiap formulir yang dari Kepala Desa harus diketahui oleh Camat Siborongborong yaitu (F1.35, F1.07, F1.21, dan F1.06) telah terlayani dengan baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku.
   e) Dalam bidang pajak bumi dan bangunan telah didistribusikan SPPT bagi wajib pajak PBB sebanyak 20 Desa + 1 Kelurahan.

2. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a) Pelaksanaan monitoring pelaksanaan protokol kesehatan di pesta dan tempat-tempat umum lainnya
   b) Pendataan dan Pemberian bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid-19 (mahasiswa, UMKM, dan sebagainya)
   c) Pemberian bantuan sosial untuk korban bencana alam, kebakaran, dan lainnya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
   a) Pelaksanaan Musrenbang Desa tentang APBDes
   b) Pelaksanaan Musrenbang Desa tentang ADD/K dan Dana Desa
   c) Pembinaan PKK Desa Percontohan yaitu Desa Lumban Tongatonga dan Desa Sitabotabo Toruan
   d) Pencairan Honor/Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan BPD Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
   e) Pelaksanaan Gotong Royong Desa

Dengan persentasi realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

TABEL 2.3

EVALUASI KINERJA PROGRAM (EKP)

Kode	Program	Bobot Program	Capian Kinerja
P1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100
P2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80	80
P3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	85	85
P4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	80	80
P5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85	85
P6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80	80

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

Berdasarkan kondisi umum berbagai bidang yang ada di Kecamatan Siborongborong, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentu saja menghadapi tantangan yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tuntutan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk taat pajak sehingga Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan PAD tidak bisa mencapai realisasi sampai dengan 100%
3. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan , dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
4. Terbatasnya jumlah SDM dan anggaran

5. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
6. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos.
7. Dengan adanya Bandar Udara Silangit maka akses dari luar lebih gampang dan dikhawatirkan perdagangan Narkoba atau obat-obat terlarang mudah masuk.
8. Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Siborongborong.
9. Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidsk seimbangnya pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.

Sedangkan Peluang untuk pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Siborongborong adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati ke Camat.
2. Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur tugas,pokok, dan fungsi setiap seksi di Kantor Kecamatan Siborongborong
3. Adanya hubungan atau koordinasi yang baik dengan stakeholder, Instansi, Pemerintah Desa atau organisasi kemasyarakatan lainnya sehingga ada dukungan dari lembaga atau partisipasi masyarakat yang cukup tinggi misalnya : Dinas Sosial, Dinas Pasar dan Kebersihan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga memudahkan untuk pelayanan lanjutan.
4. Adanya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui Musrenbang Desa dan Kecamatan, Kegiatan gotong royong, dan sebagainya.
5. Adanya pemberdayaan peningkatan Aparat Kecamatan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya melalui program ijin belajar, bimtek dari Pemerintah Kabupaten maupun Lembaga penyelenggara diklat yang berhubungan dengan pelayanan publik dan ilmu lainnya.
6. Adanya pengalokasian anggaran dari Pemerintah untuk operasional kantor ataupun peningkatan sarana dan prasarana
7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
8. Adanya system administrasi kependudukan melalui program system aplikasi pendataan penduduk

Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan kondisi umum berbagai bidang yang ada di Kecamatan Siborongborong, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentu saja menghadapi kendala dan permasalahan. Secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kecamatan
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan
3. Belum optimalnya tata kelola keuangan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Siborongborong bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Peran strategis pelayanan Kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus dipehatikan, antara lain :

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu;
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Perwujudan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan daerah yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Berbagai fenomena terakhir di Indonesia menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas tatakelola pemerintahan yang baik dan inovatif cenderung memiliki kinerja yang baik dibandingkan daerah lainnya. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih menemui kendala di Kabupaten Tapanuli Utara. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik.

Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik belum mampu menciptakan pelayanan publik yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Berbagai inovasi yang telah dilakukan dalam penerapan e-government, inovasi dalam pemanfaatan potensi daerah serta inovasi lainnya belum mampu secara optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga mengakibatkan tingkat daya saing daerah masih rendah.

Adapun strategi yang dilakukan Kantor Kecamatan Siborongborong dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan etos kerja dan disiplin aparat yang ada di Kantor Kecamatan Siborongborong.
2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan untuk meningkatkan kualitas aparat yang ada di Kantor Kecamatan Siborongborong.
3) Membangun budaya pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
4) Pemanfaatan anggaran operasional yang tersedia dengan optimal, efektif dan efisien.
5) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya perbaikan infrastruktur pendukung yang dapat mengoptimalkan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan peran serta pemuda.
6) Bekerja sama dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7) Meningkatkan peran PKK dalam pembangunan kemasyarakatan.
8) Bekerja sama dengan unsur pimpinan kecamatan dalam mewujudkan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
9) Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk membayar pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara.

10) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang ada di Kecamatan Siborongborong
11) Berperan aktif dalam upaya perwujudan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA. Rencana Kerja Kecamatan Siborongborong berdasarkan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Siborongborong. Untuk Tahun 2024, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2.3.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN TAHUN 2024
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Nama SKPD : KANTOR CAMAT SIBORONGBORONG

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan layanan penunjang yang tertangani		**3.289.286.766**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		Cakupan layanan penunjang yang tertangani		**3.289.286.766**	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	**18.274.000**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	**18.274.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP6	Kantor Camat Siborongborong	Telaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	1 Laporan	624.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP6	Kantor Camat Siborongborong	Telaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	1 Laporan	624.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	17.650.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	17.650.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	12 Bulan	**3.043.842.501**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	12 Bulan	**3.043.842.501**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	3.003.743.301	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	3.003.743.301	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya penatausahaan keuangan perangkat daerah	12 Bulan	38.695.200	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya penatausahaan keuangan perangkat daerah	12 Bulan	38.695.200	
	Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1.404.000	Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1.404.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	**89.564.450**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	**89.564.450**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	1.532.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	1.532.000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	20.085.450	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	20.085.450	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	6.005.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	6.005.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	5.762.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	5.762.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	0	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	56.180.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	56.180.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	83.758.515	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	83.758.515	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	500.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tercukupinya Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	28.761.715	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tercukupinya Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	28.761.715	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Siborongboron	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (petugas kebersihan, sopir, petugas jaga malam)	12 Bulan	54.496.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Siborongboron	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (petugas kebersihan, sopir, petugas jaga malam)	12 Bulan	54.496.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	**37.287.300**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah**	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	**37.287.300**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	33.180.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	33.180.900	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	3.094.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	3.094.400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	1.012.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Siborongborong	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	1.012.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Siborongborong	**Cakupan peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	12 Laporan	**44.386.500**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kantor Camat Siborongborong	**Cakupan peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	12 Laporan	**44.386.500**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Siborongborong	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	12 Laporan	44.386.500	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kantor Camat Siborongborong	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	12 Laporan	44.386.500	

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	44.386.500	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	44.386.500	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Siborongborong	Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	**17.497.200**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kantor Camat Siborongborong	Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	**17.497.200**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Lembaga Kemasyarakatan	17.497.200	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Lembaga Kemasyarakatan	17.497.200	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	17.497.200	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	17.497.200	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kantor Kelurahan Pasar Siborongborong	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kantor Kelurahan Pasar Siborongborong	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	**200.000.000**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kantor Kelurahan Pasar Siborongborong	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Pasar Siborongborong	12 Bulan	88.255.700	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kantor Kelurahan Pasar Siborongborong	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Pasar Siborongborong	12 Bulan	88.255.700	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Kelurahan Pasar Siborongborong	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	111.744.300	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Kelurahan Pasar Siborongborong	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	111.744.300	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Siborongborong	**Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	12 Kegiatan	**500.000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	12 Kegiatan	**500.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksannaya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Kegiatan	500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terlaksannaya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Kegiatan	500.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	12 Kegiatan	500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	12 Kegiatan	500.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya penyelenggraaan urusan Pemerintahan Umum	12 Dokumen	**28.800.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Terlaksananya penyelenggraaan urusan Pemerintahan Umum	12 Dokumen	**28.800.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Dokumen	28.800.000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Dokumen	28.800.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	28.800.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	28.800.000	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Kegiatan	**1.070.000**	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Kegiatan	**1.070.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Siborongborong	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Kegiatan	1.070.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Kegiatan	1.070.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Camat Siborongborong	Jumlah kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	12 Kegiatan	1.070.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	12 Kegiatan	1.070.000	

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Siborongborong seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka usulan program dan kegiatan masyarakat yang dapat dikelompokkan pada Renja Tahun 2024 seperti pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara

Nama SKPD : KANTOR CAMAT SIBORONGBORONG

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Siborongborong	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	100	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Siborongborong	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	80	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Siborongborong Kelurahan Pasar Siborongborong	Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Siborongborong	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	80	
5	Program Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Siborongborong	Cakupan Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum	85	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Siborongborong	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Siborongborong yang tertuang dalam Rencana Kerja ini merupakan kumpulan kegiatan yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022. Secara terperinci rencana program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini yang juga memuat :

1. Program dan Kegiatan Kantor Camat Siborongborong Tahun Anggaran 2022.
2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan).
3. Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara
4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiran Maju Tahun 2024

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Mempedomani Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, disampaikan bahwa 7 agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
   a..Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan
   b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
   a.Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   b.Distribusi pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah belum berkembang;

c.Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
d.Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
e.Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter melalui :
   a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024
   c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
   d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
   e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
   f. Pengentasan kemiskinan; dan
   g. Peningkatan produktivitas daya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilakukan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
   a.Memperkuat ketahanan budaya bangsa
   b.Memajukan kebudayaan;
   c.Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan penghayatan nilai agama;
   d.Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga;
   e.Meningkatkan budaya literasi.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:.
   a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
   c.Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;

d.Rehabilitasi sarana prasarana yang sudah tidak efisien;
e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup serta peningkatan ketahan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melelui kebijakan : RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024
   a.Peningkatan kualitas lingkungan hidup
   b.Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
   c.Pembangunan rendah karbon

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
   a.Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b.Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
   c.Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d.Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
   e.Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan nasional selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan di wilayah masing-masing guna pencapaian target pembangunan secara nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Kantor Camat Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada misinya bertujuan:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatkan Nilai AKIP dari Inspektorat

3.3 PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan :
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.Administrasi Keuangan, sub kegiatan :
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3.Administrasi Umum , sub kegiatan :
1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan,

sub kegiatan :

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

Pemberdayaan Kelurahan,

sub kegiatan :

1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
2) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

IV. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Kegiatan :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan :

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Kegiatan :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dirangkum rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang telah dientri pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2024 ***(Terlampir).***

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG																			
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp. 3.463.710.146	Rp. 16.560.000			Rp. 3.480.270.146	Rp. 3.364.980.466	Rp. 16.560.000			Rp. 3.381.540.466	Rp. 4.254.500.000,00
7	01				KECAMATAN				Rp. 3.463.710.146	Rp. 16.560.000			Rp. 3.480.270.146	Rp. 3.364.980.466	Rp. 16.560.000			Rp. 3.381.540.466	Rp. 4.254.500.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 3.390.372.946	Rp. 16.560.000			Rp. 3.406.932.946	Rp. 3.272.726.766	Rp. 16.560.000			Rp. 3.289.286.766	Rp. 4.029.500.000,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 30.424.000				Rp. 30.424.000	Rp. 18.274.000				Rp. 18.274.000	Rp. 42.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa		Rp. 624.000				Rp. 624.000	Rp. 624.000				Rp. 624.000	Rp. 2.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 29.800.000				Rp. 29.800.000	Rp. 17.650.000				Rp. 17.650.000	Rp. 40.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 3.142.572.181				Rp. 3.142.572.181	Rp. 3.043.842.501				Rp. 3.043.842.501	Rp. 3.547.500.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 3.102.472.981				Rp. 3.102.472.981	Rp. 3.003.743.301				Rp. 3.003.743.301	Rp. 3.500.000.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 38.695.200				Rp. 38.695.200	Rp. 38.695.200				Rp. 38.695.200	Rp. 45.000.000,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 1.404.000				Rp. 1.404.000	Rp. 1.404.000				Rp. 1.404.000	Rp. 2.500.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 104.934.250				Rp. 104.934.250	Rp. 89.564.450				Rp. 89.564.450	Rp. 164.000.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 1.356.800				Rp. 1.356.800	Rp. 1.532.000				Rp. 1.532.000	Rp. 4.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 20.085.450				Rp. 20.085.450	Rp. 20.085.450				Rp. 20.085.450	Rp. 30.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 6.005.000				Rp. 6.005.000	Rp. 6.005.000				Rp. 6.005.000	Rp. 12.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 5.762.000				Rp. 5.762.000	Rp. 5.762.000				Rp. 5.762.000	Rp. 10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 4.320.000				Rp. 4.320.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 8.000.000,00

7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa		Rp. 67.405.000				Rp. 67.405.000	Rp. 56.180.000				Rp. 56.180.000	Rp. 100.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp. 16.560.000			Rp. 16.560.000		Rp. 16.560.000			Rp. 16.560.000	Rp. 90.000.000,00
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong												Rp. 40.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong			Rp. 16.560.000			Rp. 16.560.000		Rp. 16.560.000			Rp. 16.560.000	Rp. 50.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 83.758.515				Rp. 83.758.515	Rp. 83.758.515				Rp. 83.758.515	Rp. 106.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 500.000				Rp. 500.000	Rp. 500.000				Rp. 500.000	Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 28.761.715				Rp. 28.761.715	Rp. 28.761.715				Rp. 28.761.715	Rp. 42.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 54.496.800				Rp. 54.496.800	Rp. 54.496.800				Rp. 54.496.800	Rp. 62.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 28.684.000				Rp. 28.684.000	Rp. 37.287.300				Rp. 37.287.300	Rp. 80.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 24.923.600				Rp. 24.923.600	Rp. 33.180.900				Rp. 33.180.900	Rp. 55.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 3.094.400				Rp. 3.094.400	Rp. 3.094.400				Rp. 3.094.400	Rp. 10.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 666.000				Rp. 666.000	Rp. 1.012.000				Rp. 1.012.000	Rp. 15.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 20.250.000				Rp. 20.250.000	Rp. 44.386.500				Rp. 44.386.500	Rp. 85.000.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 20.250.000				Rp. 20.250.000	Rp. 44.386.500				Rp. 44.386.500	Rp. 85.000.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 20.250.000				Rp. 20.250.000	Rp. 44.386.500				Rp. 44.386.500	Rp. 85.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 19.967.200				Rp. 19.967.200	Rp. 17.497.200				Rp. 17.497.200	Rp. 40.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 19.967.200				Rp. 19.967.200	Rp. 17.497.200				Rp. 17.497.200	Rp. 40.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa		Rp. 19.967.200				Rp. 19.967.200	Rp. 17.497.200				Rp. 17.497.200	Rp. 40.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp. 3.250.000				Rp. 3.250.000	Rp. 500.000				Rp. 500.000	Rp. 30.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp. 3.250.000				Rp. 3.250.000	Rp. 500.000				Rp. 500.000	Rp. 30.000.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa		Rp. 3.250.000				Rp. 3.250.000	Rp. 500.000				Rp. 500.000	Rp. 30.000.000,00
					PROGRAM PENYELENGGARAAN														

7	01	05			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 45.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 45.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong		Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 45.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 1.070.000				Rp. 1.070.000	Rp. 1.070.000				Rp. 1.070.000	Rp. 25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 1.070.000				Rp. 1.070.000	Rp. 1.070.000				Rp. 1.070.000	Rp. 25.000.000,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa		Rp. 1.070.000				Rp. 1.070.000	Rp. 1.070.000				Rp. 1.070.000	Rp. 25.000.000,00
KELURAHAN PASAR SIBORONGBORONG																			
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 780.000.000,00
7	01				KECAMATAN				Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 780.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 780.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000		Rp. 780.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Rp. 88.255.700				Rp. 88.255.700	Rp. 88.255.700				Rp. 88.255.700		Rp. 650.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	Rp. 111.744.300				Rp. 111.744.300	Rp. 111.744.300				Rp. 111.744.300		Rp. 130.000.000,00
Jumlah								**Rp. 3.663.710.146**	**Rp. 16.560.000**			**Rp. 3.680.270.146**	**Rp. 3.564.980.466**	**Rp. 16.560.000**			**Rp. 3.581.540.466**		**Rp. 5.034.500.000,00**

Kab. Tapanuli Utara, ...
Camat KANTOR SIBORONGBORONG

A. LAOMOR SWANDI S, ST, MM
NIP. 197602242003121004

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Siborongborong sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2024 ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Siborongborong pada Tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2024 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Siborongborong. Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2024 ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Siborongborong Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Siborongborong, November 2024

CAMAT SIBORONGBORONG

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA KECAMATAN SIBORONGBORONG

A. LAOMOR SWANDI S, ST, MM

PEMBINA

NIP. 19760224 200312 1 004

Dipindai dengan CamScanner